PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029



H. ABDUL HADI
BUPATI BALANGAN

H. AKHMAD FAUZI
WAKIL BUPATI BALANGAN

VISI :

BALANGAN BAHARAT

(MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAGIAN HUKUM
SETDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

BAGIAN HUKUM
SETDA

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

BAGIAN HUKUM
SETDA

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025-2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Balangan tahun 2025-2029.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Balangan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAGIAN HUKUM
SETDA

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAGIAN HUKUM
SETDA

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih dengan arah pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

a. pedoman dalam menetapkan Strategi dan Kebijakan umum Pembangunan Daerah;
b. pedoman perumusan Program prioritas Pembangunan Daerah;
c. pedoman agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karekteristik Daerah;
d. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;
e. pedoman penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD; dan
f. tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Visi;
b. Misi;
c. tujuan;
d. sasaran;
e. arah kebijakan;
f. prioritas; dan
g. program strategis

Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAGIAN HUKUM
SETDA

BAB III
PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan:
   a. penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan berpedoman RPJPD Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029; dan
   b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum Daerah;
   c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. penutup

(3) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala.

BAGIAN HUKUM
SETDA

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar;
   d. merugikan kepentingan Nasional.

(2) Perubahan yang mendasar pada perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
   a. bencana alam;
   b. bencana nonalam;
   c. goncangan politik;
   d. krisis ekonomi;
   e. konflik sosial budaya;
   f. gangguan keamanan;
   g. pemekaran Daerah; atau
   h. perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah apabila RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Setelah RPJMD Tahun 2025-2029 berakhir dan belum ditetapkan RPJMD baru periode berikutnya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Renja Pemerintah dan/atau RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUFRIANNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG (5-68/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BALANGANTAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Balangan, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Balangan pada Tahun 2025–2029 yang harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel.

Penyusunannya RPJMD ini berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan Daerah, isu – isu strategis, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program pembangunan Daerah, indikator kinerja Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Balangan untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Balangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

BAGIAN HUKUM
SETDA

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

BAGIAN HUKUM SETDA

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 164

BAGIAN HUKUM
SETDA

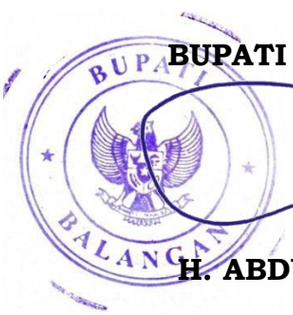
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun kedepan untuk mewujudkan visi daerah **"BALANGAN BAHARAT (Membangun Desa dan Menata Kota, Menuju Masyarakat yang Harmonis, Religius, Maju, dan Sejahtera).**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029 telah melalui proses panjang mulai dari penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, pembahasan bersama DPRD, hingga memperoleh kesepakatan bersama. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I.1**
1.1	Latar Belakang Penyusunan	I.1
1.2	Dasar Hukum	I.3
1.3	Hubungan Antardokumen	I.6
1.4	Maksud dan Tujuan	I.8
1.5	Sistematika Penulisan	I.9
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II.1**
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	II.142
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	II.193
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III.1**
3.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III.1
3.2	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III.18
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**IV.1**
4.1	Program Perangkat Daerah	IV.1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV.76
BAB V	**PENUTUP**	**V.1**
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V.1
5.2	Pedoman Transisi	V.3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan	II.2
Tabel 2.2	Luas Jenis Vegetasi Kabupaten Balangan	II.9
Tabel 2.3	Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan	II.9
Tabel 2.4	Daya Dukung Pangan Kabupaten Balangan	II.12
Tabel 2.5	Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.14
Tabel 2.6	Wisata Agro dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.15
Tabel 2.7	Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.15
Tabel 2.8	Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.15
Tabel 2.9	Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis	II.16
Tabel 2.10	Daya Dukung dan Ambang Batas Kebutuhan Air Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.18
Tabel 2.11	Daya Dukung dan Ambang Batas Kebutuhan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.22
Tabel 2.12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.25
Tabel 2.13	Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2020-2024	II.26
Tabel 2.14	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2020–2024	II.27
Tabel 2.15	Persentase penduduk berakses air minum	II.29
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023	II.30
Tabel 2.17	Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.31
Tabel 2.18	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.32
Tabel 2.19	Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.33
Tabel 2.20	Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.34
Tabel 2.21	Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024	II.38
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II.39
Tabel 2.23	Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024	II.41

Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024	II.41
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang Dianut Tahun 2020-2024	II.42
Tabel 2.26	Proyeksi Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030 (ribu)	II.44
Tabel 2.27	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2020-2030	II.44
Tabel 2.28	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2020-2024	II.45
Tabel 2.29	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2020-2024	II.46
Tabel 2.30	Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)	II.49
Tabel 2.31	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran	II.50
Tabel 2.32	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II.53
Tabel 2.33	Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.54
Tabel 2.34	Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Balangan 2020-2024 (ribu rupiah/kapita/thn)	II.56
Tabel 2.35	Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II.57
Tabel 2.36	Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.60
Tabel 2.37	Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II.63
Tabel 2.38	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2022	II.64
Tabel 2.39	Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	II.66
Tabel 2.40	Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II.68
Tabel 2.41	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.75
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.77
Tabel 2.43	PPKS Yang Tertangani Tahun 2024	II.78

Tabel 2.44	Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.79
Tabel 2.45	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023	II.80
Tabel 2.46	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.82
Tabel 2.47	Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024	II.86
Tabel 2.48	Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024	II.86
Tabel 2.49	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Balangan Tahun 2023-2024	II.87
Tabel 2.50	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.89
Tabel 2.51	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.90
Tabel 2.52	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.90
Tabel 2.53	Capaian Indikator Koperasi dan UKM Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.92
Tabel 2.54	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.95
Tabel 2.55	Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.95
Tabel 2.56	Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.96
Tabel 2.57	Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.97
Tabel 2.58	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.97
Tabel 2.59	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.97
Tabel 2.60	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.99
Tabel 2.61	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.102
Tabel 2.62	Peringkat Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2024	II.102
Tabel 2.63	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.104

Tabel 2.64	Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.105
Tabel 2.65	Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.106
Tabel 2.66	Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.108
Tabel 2.67	Perkembangan Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II.110
Tabel 2.68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024	II.111
Tabel 2.69	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.112
Tabel 2.70	Hasil Antara Area Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024	II.112
Tabel 2.71	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024	II.113
Tabel 2.72	SAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.115
Tabel 2.73	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.115
Tabel 2.74	Opini BPK Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.116
Tabel 2.75	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2020–2023	II.117
Tabel 2.76	Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.118
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.119
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.124
Tabel 2.79	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.137
Tabel 2.80	Realisasi Kinerja BPR Sanggam Cipta Sejahtera	II.141
Tabel 2.81	Data Kinerja PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda)	II.142
Tabel 2.82	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.145
Tabel 2.83	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.150
Tabel 2.84	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.155
Tabel 2.85	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.157
Tabel 2.86	Neraca Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.160

Tabel 2.87	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.164
Tabel 2.88	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.172
Tabel 2.89	Realisasi Belanja Wajib Pegawai Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.176
Tabel 2.90	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023	II.178
Tabel 2.91	Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.180
Tabel 2.92	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030	II.182
Tabel 2.93	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030	II.185
Tabel 2.94	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030	II.187
Tabel 2.95	Proyeksi SILPA Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030	II.188
Tabel 2.96	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib di Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030	II.190
Tabel 2.97	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030	II.192
Tabel 2.98	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	II.203
Tabel 2.99	Kawasan Transmigrasi Kabupaten Balangan	II.231
Tabel 2.100	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Balangan (WIUP)	II.232
Tabel 2.101	Indikator Penghentian Pemberian Izin Baru Kabupaten Balangan	II.233
Tabel 2.102	Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045	II.234
Tabel 2.103	Rekomendasi Berdasarkan Isu Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	II.236
Tabel 2.104	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan	II.237
Tabel 2.105	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	II.244
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Balangan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	III.2
Tabel 3.2	Indikator Makro Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030	III.11
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	III.14

Tabel 3.4	Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030	III.21
Tabel 3.5	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan	III.23
Tabel 3.6	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030	III.32
Tabel 3.7	Implementasi dari Janji dan Sub Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	III.98
Tabel 3.8	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	III.109
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030	IV.3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Balangan	IV.78
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Balangan	IV.81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I.8
Gambar 2.1	Batas Administrasi Kabupaten Balangan	II.2
Gambar 2.2	Luas Kecamatan di Kabupaten Balangan (Km)	II.3
Gambar 2.3	Peta Sebaran Aliran Sungai	II.6
Gambar 2.4	Peta Ekoregion Kabupaten Balangan	II.7
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan	II.10
Gambar 2.6	Distribusi Daya Dukung Air di Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.19
Gambar 2.7	Distribusi Daya Dukung Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2024	II.23
Gambar 2.8	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.24
Gambar 2.9	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Kabupaten Balangan 2020–2024	II.28
Gambar 2.10	Pengeluaran Per kapita disesuaikan di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 (Ribu Rupiah/kapita/thn)	II.29
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.36
Gambar 2.12	Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024 (jiwa)	II.38
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2024 (jiwa)	II.39
Gambar 2.14	Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023-2024	II.40
Gambar 2.15	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2030	II.42
Gambar 2.16	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2030	II.43
Gambar 2.17	Proyeksi Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Tahun 2020-2030	II.43
Gambar 2.18	Distribusi PDRB Balangan Tahun 2024	II.47
Gambar 2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024	II.52

Gambar 2.20	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II.55
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2020–2024	II.57
Gambar 2.22	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II.58
Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024	II.59
Gambar 2.24	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II.59
Gambar 2.25	Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan 2020-2024	II.61
Gambar 2.26	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Balangan 2020-2024	II.62
Gambar 2.27	Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan 2020-2024	II.65
Gambar 2.28	Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2024	II.66
Gambar 2.29	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan 2020-2024	II.68
Gambar 2.30	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024	II.71
Gambar 2.31	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II.72
Gambar 2.32	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024	II.75
Gambar 2.33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II.81
Gambar 2.34	TFR di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023	II.83
Gambar 2.35	Age Specific Fertility Rate (ASFR) di Kabupaten Balangan 2020-2023	II.84
Gambar 2.36	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan 2020–2024	II.85
Gambar 2.37	Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024	II.88
Gambar 2.38	Indeks Infrastruktur Publik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024	II.99
Gambar 2.39	Indeks Infrastruktur Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024	II.100

Gambar 2.40	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II.120
Gambar 2.41	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 (%)	II.170
Gambar 2.42	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	II.211
Gambar 2.43	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan	II.212
Gambar 3.1	Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	III.12
Gambar 3.2	Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	III.18
Gambar 3.3	Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029	III.19
Gambar 3.4	Peta Rencana Pola Ruang Klaster Banua Anam	III.27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045, pemerintah daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045. Dengan dilantiknya **H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom sebagai Bupati** dan **H. Akhmad Fauzi, S.Pd sebagai Wakil Bupati Kabupaten Balangan** periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025, menjadi awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.

Mengawali pemerintahan kepala daerah yang baru, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memedomani RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Balangan, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 memuat 5 (lima) bab meliputi Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Daerah; Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Bab IV Progam Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Bab V Penutup. Tatacara penyusunan RPJMD dilakukan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Pendekatan Teknokratik; dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
b. Pendekatan Partisipatif; dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan Politis; dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas; merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.
e. Pendekatan Holistik-Tematik; dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
f. Pendekatan Integratif; dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
g. Pendekatan Spasial; dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Substansi RPJMD diperkaya dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Melalui hasil KLHS RPJMD, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dapat diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Rencana pembangunan disusun dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rekomendasi bagi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun secara simultan dan berpedoman pada RPJMD. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025 2029 merupakan bagian dari RPJMD. Renstra Perangkat

Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah akan menjadi pedoman bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 berdasarkan beberapa peraturan peundang-undangan dan peraturan pelaksananya. Adapun dasar hukum dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 149); dan
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6).

1.3. Hubungan Antardokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan memedomani RPJPD dan RTRW serta memerhatikan RPJMD provinsi dan RPJMN. Keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Balangan dengan RPJPD Kabupaten Balangan
   Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045. Mempdomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
b. RPJMD Kabupaten Balangan dengan RTRW Kabupaten Balangan
   Penyusunan RPJMD juga memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Mengingat saat dokumen RPJMD ini disusun Rancangan Perubahan RTRW belum selesai

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka dilakukan penyelarasan dengan hasil analisis dalam materi teknis Rancangan Perubahan RTRW.

c. RPJMD Kabupaten Balangan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan juga memerhatikan sinergi dengan rencana pembangunan provinsi. Untuk itu RPJMD Kabupaten Balangan disusun mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. RPJMD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

d. RPJMD Kabupaten Balangan dengan RPJMN

   RPJMD kabupaten Balangan disusun memerhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Memedomani RPJMN dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan Asta Cita dan program prioritas nasional dengan memerhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

e. RPJMD Kabupaten Balangan dengan Renstra Perangkat Daerah

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan dilakukan secara simultan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah akan disusun bersamaan setelah pelantikan kepala daerah. Pada saat RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

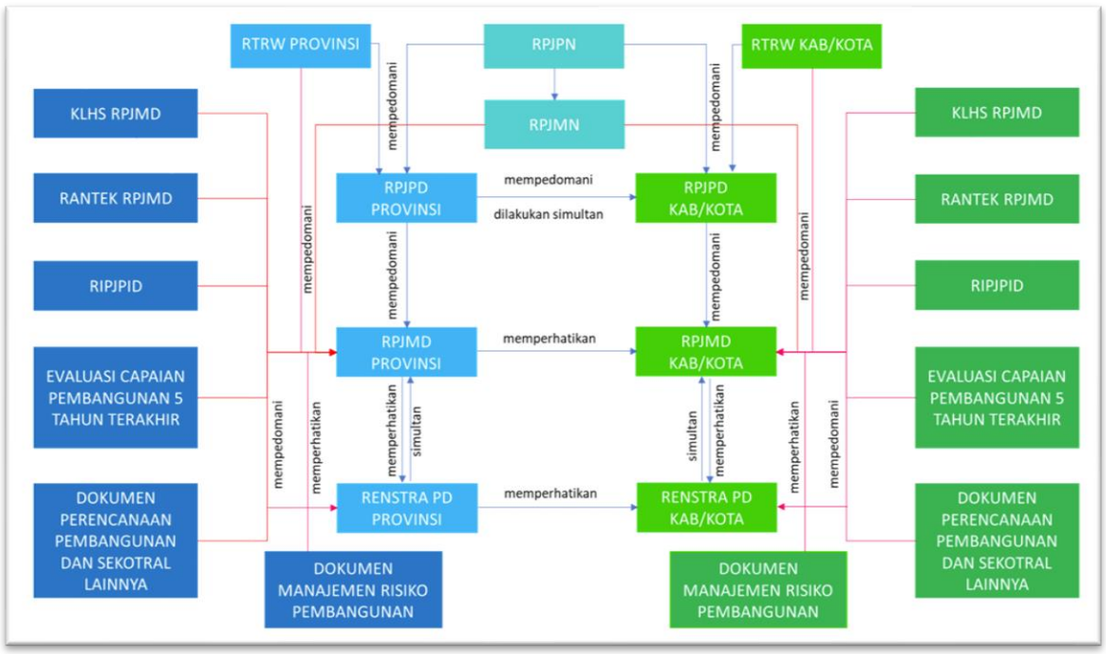
f. RPJMD Kabupaten Balangan dengan RKPD

   RPJMD merupakan pedoman pembangunan jangka menengah yang akan dijabarkan ke perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun akan memedomani RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

g. Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan juga memerhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterhubungan antar dokumen perencanaan digambarkan pada Gambar 1.1. di bawah.

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 adalah memberikan pedoman pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Balangan untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan yang akan dicapai dari penyusunan RPJMD ini, yaitu:

a. Teridentifikasinya gambaran kondisi daerah berdasarkan kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir.
b. Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis daerah.
c. Tersedianya proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan jangka menengah.
d. Ditetapkannya tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi RPJMD.
e. Ditetapkannya strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah, serta program perangkat daerah.

f. Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
g. Terciptanya sinergi perencanaan kabupaten dengan provinsi dan nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Umum Daerah; memuat kondisi daerah yang didukung dengan data dan informasi yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing; dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu memuat kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kerjasama daerah. Pada bab ini juga memuat gambaran keuangan daera yakni kondisi keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir, dan proyeksi kemampuan keuangan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya, di bab ini juga menyajikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan rumusan isu strategis.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; bab ini memuat visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran disertai indikator kinerja dan targetnya per tahun. Dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, guna mewujudkan sinergi pembangunan, maka pada bab ini dimuat dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas nasional.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; memuat program pembangunan daerah, indikator kinerja, target dan pagu anggaran per tahun. Lebih lanjut, pada bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab V Penutup; memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan RPJMD, serta pedoman transisi pada saat RPJMD akan berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto "SANGGAM" yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

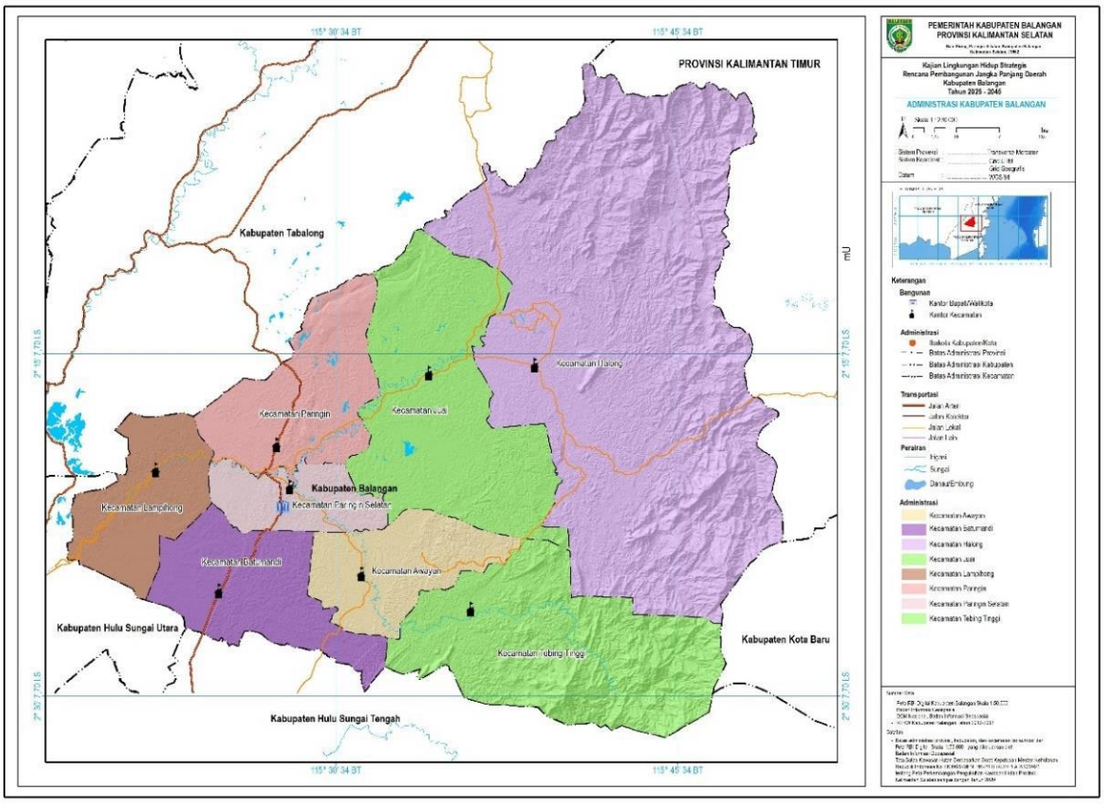
Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1828,10 km^2 dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sebelah Barat	:	Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah Timur	:	Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006, Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (100,09 km^2),

Batumandi (112,25 km^2), Awayan (122,73 km^2), Tebing Tinggi (285,15 km^2), Paringin (138,65 km^2), Paringin Selatan (85,48 km^2), Juai (230,82 km^2), seta Halong (752,91 km^2).

Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan).

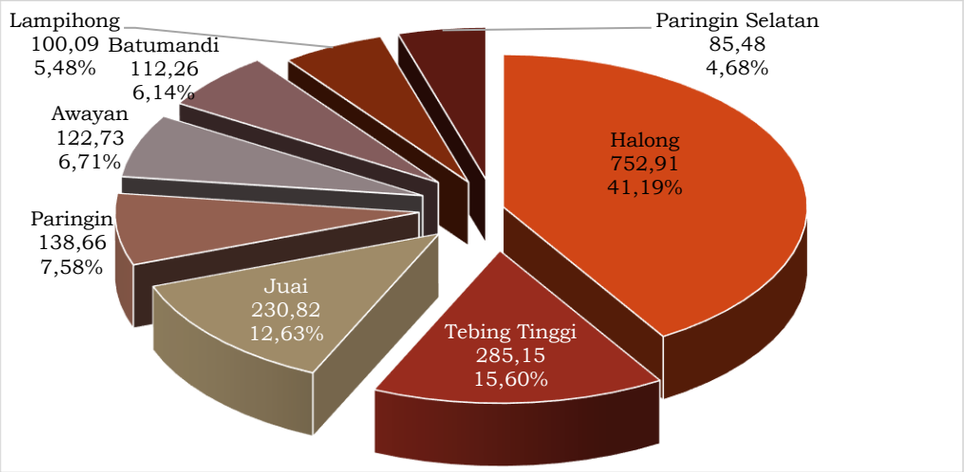


Gambar 2.1.
Batas Administrasi Kabupaten Balangan
Sumber: KLHS Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Lampihong	-	27
2	Paringin	2	14
3	Juai	-	20
4	Halong	-	24
5	Batu Mandi	-	18
6	Paringin Selatan	1	15
7	Awayan	-	23
8	Tebing Tinggi	-	12
	Jumlah	3	153

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025



Gambar 2.2.
Luas Kecamatan di Kabupaten Balangan (Km)
Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2022

b. Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38%). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19%. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40%. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2% yaitu mencapai 69% dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2%, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 % dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

c. Geologi

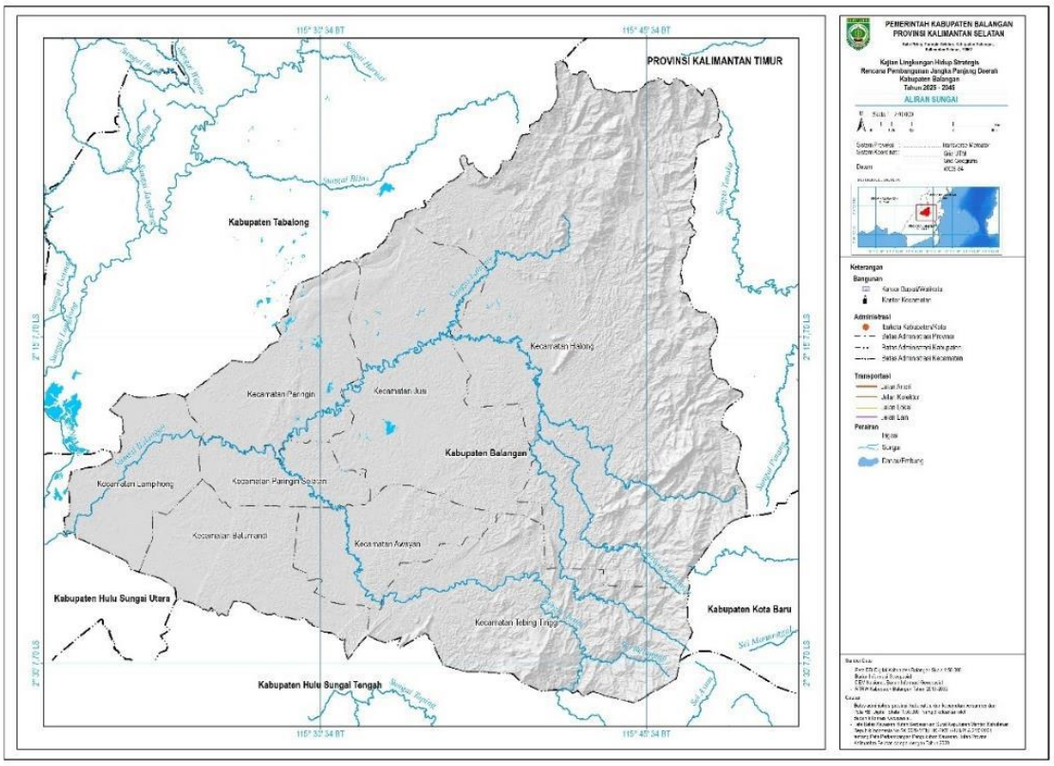
Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 %). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64%). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76% dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98% dan 1,26% dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

d. Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir didaerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu: pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada ternasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering.



Gambar 2.3.
Peta Sebaran Aliran Sungai
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Aliran sungai di Kabupaten Balangan mencapai 1.301.015,72 meter dengan pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik memberikan keuntungan karena mendistribusikan air ke semua arah. Sungai terpanjang di Kabupaten Balangan adalah Sungai Balangan dengan panjang mencapai 111.947,98 meter. Aliran sungai-sungai besar dan kecil membentang ke seluruh wilayah dan menjadikan distribusi air permukaan tersebar merata.

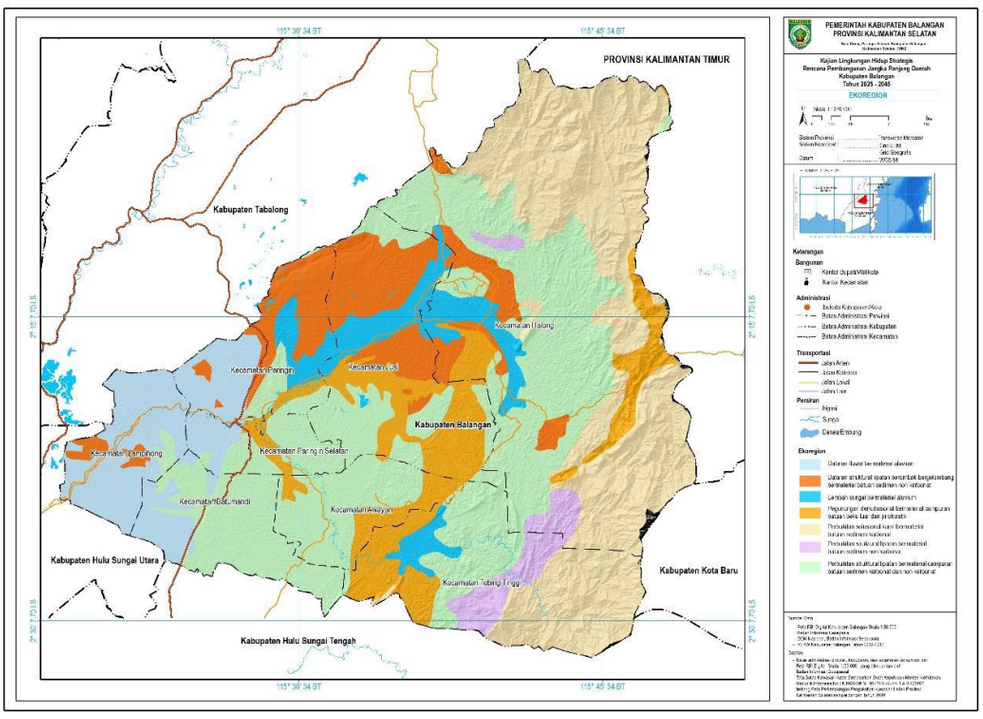
e. Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata-rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan,

tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan.

f. Ekoregion

Ekoregion dikategorikan berdasarkan kesamaan ciri fisik suatu wilayah baik dari aspek iklim, tanah, air, flora, dan fauna. Ekoregion secara geomorfologis dipengaruhi oleh proses asal bentuklahan yang berlangsung oleh faktor tenaga endogen dan tenaga eksogen. Wilayah Kabupaten Balangan dibentuk oleh tiga proses asal yaitu proses fluvial oleh tenaga aliran air sungai, proses denudasional oleh tenaga angin, dan proses struktural oleh tenaga tektonik.



Gambar 2.4.
Peta Ekoregion Kabupaten Balangan
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Ekoregion dataran fluvial bermaterial aluvium meliputi 9,77 persen wilayah Kabupaten Balangan. Dataran fluvial terbentuk oleh tenaga aliran air sungai yang mengikis dan mengendapkan material sepanjang alirannya. Deposisi material aluvium tersusun atas tekstur liat dan berpasir serta cenderung memiliki kesuburan tanah yang baik untuk pertanian. Sebagai hasil deposisi, bentuklahan ini berkarakteristik topografi datar dan landai. Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat menyusun 23,37 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuklahan ini terbentuk dari proses erosi batuan karbonat yang berlangsung sangat lama hingga terbentuk topografi dataran.

Selanjutnya adalah bentuk lahan dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat meliputi 10,17 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuklahan ini awalnya berasal dari proses lipatan dari tenaga tektonik, kemudian mengalami erosi sehingga terbentuklah dataran berombak-bergelombang. Sisi timur Kabupaten Balangan merupakan rangkaian pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik dengan persentase luas mencapai 10,99 persen. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat merupakan bentuklahan yang meliputi area terluas dengan persentase 40,80 persen wilayah.

g. Komunitas Vegetasi

Komunitas vegetasi tersusun oleh beberapa tipe vegetasi dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan responnya terhadap unsur lanskap. Struktur, komposisi jenis, dan biogegografi vegetasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama karakteristik iklim, tanah, dan topografi. Tipe vegetasi merupakan komponen biotik dalam siklus ekologis dan memiliki peranan khusus bagi lingkungan hidup seperti pengaturan sistem hidrologis, pertukaran unsur hara tanah, dan pengaturan iklim sebagai penyerap karbon (*carbon sink*). Tipe vegetasi Kabupaten Balangan secara khusus berperan penting dalam penilaian jasa ekosistem, memahami interaksi dan peran vegetasi terhadap ekosistem akan membantu menarik kesimpulan terhadap pemanfaatan sumberdaya dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.2.
Luas Jenis Vegetasi Kabupaten Balangan

No	Ekoregion	Luas (Ha)	%
1	Vegetasi hutan batuan ultra basa	19.776,31	10,82
2	Vegetasi hutan batu gamping pamah pada bentang alam karst	47.313,80	25,88
3	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	74.614,72	40,81
4	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7.899,09	4,32
5	Vegetasi hutan pegunungan bawah	5.306,95	2,90
6	Vegetasi terna rawa air payau	10.517,52	5,75
7	Vegetasi terna rawa air tawar	15.643,78	8,56
8	Vegetasi terna rawa gambut	1.777,83	0,97
Kabupaten Balangan		**182.850,00**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

h. Penggunaan Lahan

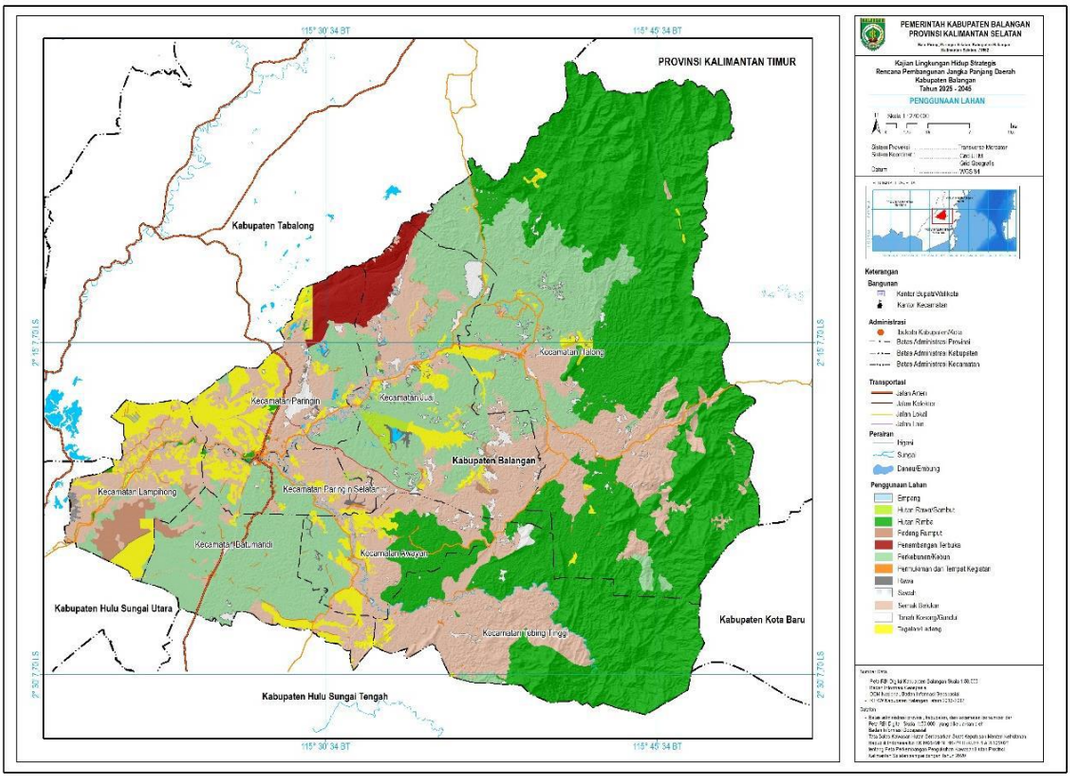
Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya Kabupaten Balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan dan di sepanjang jalan berupa perumahan penduduk. Sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah melainkan berupa hutan karet yang cukup padat.

Tabel 2.3.
Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan

Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
1	Tanah Sawah/*Wetland*	14.100,19
2	Tanah Bukan Sawah	94.750,81
	a. Kebun Campuran	163,03
	b. Ladang	196,38
	c. Kelapa Sawit	2.755,55
	d. Perkebunan Karet	90.701,69
	e. Kolam	934,16
3	Bukan Lahan Pertanian	73.998,92
	a. Permukiman	2.897,40
	b. Hutan Lahan Kering Sekunder	13.801,52
	c. Hutan Lahan Kering Primer	46.844,17
	d. Rawa	348,35
	e. Semak Belukar	1,71
	f. Lahan Terbuka	305,17

	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
	g. Bendung/Waduk	45,07
	h. Sungai	415,24
	i. Gosong sungai	13,60
	j. Pertambangan	9.315,67
	k. Timbunan Sampah	11,02

Sumber: DPUPRKP, Peta RBI Kab. Balangan Skala 1:50.000, Tahun 2021



Gambar 2.5.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tanah sawah, tanah bukan sawah, dan bukan lahan pertanian. Jenis penggunaan lahan tanah bukan sawah melingkupi wilayah yang lebih luas dengan cakupan 51,8 persen luas wilayah, artinya struktur perekenomian masyarakat lebih didominasi pada komoditas perkebunan dan tanaman semusim di ladang. Jenis tutupan lahan terbangun, hutan, dan pertambangan dikategorikan sebagai bukan lahan pertanian yang mencakup 40,46 persen luas wilayah. Hutan lahan kering primer merupakan jenis tutupan yang meliputi 25,6 persen wilayah. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman hanya meliputi 1,58 persen, hal ini menandakan pemanfaatan lahan di Kabupaten Balangan lebih luas diperuntukkan sebagai lahan budidaya non terbangun.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

A. Sektor Pertanian

Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan gambar 2.5 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2022 adalah 7,71%, penggunaan lahan berupa kegiatan untuk tanah perkebunan karet 49,60% dan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,51%. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjangganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi:

1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung, kedelai serta tanaman holtikultura lainnya.
2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan Kelapa (Gula Aren) dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan.

Tabel 2.4.
Daya Dukung Pangan Kabupaten Balangan

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Padi (Kg) (Tpij)	Kebutuhan Penduduk (Piji)	Daya Dukung Pangan	Keterangan
1	Lampihong	396524,8738	18861	377663,8738	Belum Terlampaui
2	Batumandi	173828,4066	19448	154380,4066	Belum Terlampaui
3	Awayan	114434,0303	14169	100265,0303	Belum Terlampaui
4	Tebingtinggi	66012,97765	7338	58674,97765	Belum Terlampaui
5	Paringin	59279,01947	20354	38925,01947	Belum Terlampaui
6	Paringin Selatan	41975,48666	16429	25546,48666	Belum Terlampaui
7	Juai	136423,9366	17063	119360,9366	Belum Terlampaui
8	Halong	176178,8032	20850	155328,8032	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan pada peta daya dukung dan daya dukung pangan lingkungan hidup berbasis jasa penyedia pangan. Berdasarkan peta tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan swasembada pangan. Pendekatan swasembada pangan berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan penduduk dan berbanding lurus dengan luasa lahan pertanian dan panen. Secara operasional, proses penyusunan status daya dukung pangan dilakukan dengan proses pengolahan spasial yang berdasarkan peta daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup dan dilengkapi juga dengan data tabular yang berupa jumlah penduduk, produksi padi, pola konsumsi dalam rumah tangga. Dalam kajian, bahan pangan yang digunakan adalah bahan pangan beras.

B. Sektor Pertambangan

Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan

dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (60,69%).

Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan.

C. Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah sektor industri atau kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dan kunjungan seseorang ke suatu tempat atau daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, pendidikan, atau alasan lainnya. Tujuan utama dari pariwisata adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi wisatawan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, mempromosikan warisan budaya dan alam, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya. Pengelolaan pariwisata yang baik melibatkan upaya untuk menjaga lingkungan alam, melestarikan warisan budaya, serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan kebijakan yang tepat, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata juga telah berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Internet dan media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan tujuan wisata, memfasilitasi reservasi dan pembayaran, serta memberikan informasi yang berguna bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religius. Tabel dibawah ini adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.5.
Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Air Terjun Tayak	Desa Uren Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tumate	Desa Aniungan Kecamatan Halong
3.	Air Terjun Pemandian Anggang	Desa Uren Kecamtan Halong
4.	Air Terjun Buntar Sawang	Desa Mamigang Kecamatan Halong
5.	Gunung Batu Kiras	Desa Kapul Kecamatan Halong
6.	Wisata Goa Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
7.	Telaga Pemujaan	Desa Kapul Kecamatan Halong
8.	Gunung Braii	Desa Kapul Kecamatan Halong
9.	Puncak Baringin Wanai	Desa Hauwai Kecamatan Halong
10.	Gua Berangin Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
11.	Banyu Babau	Desa Liyu Kecamatan Halong
12.	Air Panas	Desa Liyu Kecamatan Halong
13.	Air Terjun Sidandu	Desa Liyu Kecamatan Halong
14.	Puncak Gunung Hauk	Desa Marajai Kecamatan Halong
15.	Arus Deras Nanai	Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
16.	Air Terjun Batu Bainggi	Desa Liyu Kecamatan Halong
17.	Danau Baruh Bahinu	Desa Binjai Kecamatan Parsel
18.	Gunung Batu Sungsum	Desa Gunung Batu Sungsum Kec.Tebing Tinggi
19.	Air Terjun Batarius	Desa Mamigang, Halong
20.	Puncak Belawanai	Desa Ajung, Tebing Tinggi
21.	Gunung Hantanung	Tebing Tinggi
22.	Sungai Maranting	Desa Sungsum, Tebing Tinggi
23.	Air Terjun Desa Liyu	Desa Liyu, Halong
24.	Air Terjun Riam Mandian	Binuang Santang, libaru Sungkai
25.	Watu Badinding	Desa Liyu, Kec. Halong
26.	Riam Jalatik	Desa Kambiyain, Kec. Halong
27.	Air Terjun Mengway	Mamigang, Kec. Halong
28.	Goa Nomio	Marajai. Kec. Halong
29.	Sungai Bataliyan	Mamigang, Kec. Halong

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.6.
Wisata Agro dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Tugu Perjuangan Rakyat Paringin	Kecamatan Paringin
2.	Hutan Kota Balangan	Kecamatan Paringin
3.	Taman Hijau Balangan	Kecamatan Paringin Selatan
4.	Waterpark Ar-Raudah	Kelurahan Paringin Kota, Paringin
5.	Al Fatah Stabel	Batu Mandi

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.7.
Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Benteng Tundakan	Desa Tundakan, Kec. Awayan
2.	Aruh Adat Dayak Meratus Halong	Desa Kapul, Kec. Halong
3.	Aruh Adat Dayak Deah	Desa Liyu, Kec. Halong
4.	Rumah Bubungan Tinggi Tarangan	Desa Tarangan Kec. Paringin Selatan
5.	Pahajatan	Desa Tungkap, Kec. Paringin Selatan
6.	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai	Desa Kapul Kecamatan Halong

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.8.
Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Makam Datu Kandang Haji	Desa Teluk Bayur Kec. Juai
2.	Makam Datu Martika	Desa Tampang Kec. Lampihong
3.	Mesjid Syuhada Kyai Martasura	Desa Hujan Mas Kec. Paringin
4.	Mesjid Al-Akbar (Islamic Centre)	Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan
5.	Makam Datu Amir Husin	Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong
6.	Mesjid Jannatul Ma'wa	Desa Buntu Karau, Kec. Juai
7.	Mesjid Bangkal	Desa Bangkal, Kec. Halong
8.	Kubah Makam K.H.Tarmiji	Desa Nungka Kecamatan Awayan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.9.
Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Desa Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tayak	Desa Uren, Kecamatan Halong
3.	Karang Bintang	Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.	Gua gunung batu	Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.	Desa Wisata Rano Liyu	Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.	Baruh Bahinu Binjai	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.	Taman Bunga	Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.	Racah Mampulang	Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.	Gunung Belawan	Desa Kapul, Kecamatan Halong
11.	Bontar Batarius	Desa Mamigang, Kec. Halong

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2023

D. Pengembangan Kawasan yang mendukung IKN

Kabupaten Balangan merupakan daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, Pembangunan Kampus PSDKU, Pengembangan Rumah Sakit, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya.

Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Balangan dihitung berdasarkan debit tahunan DAS Balangan dan jasa lingkungan penyedia air. Berdasarkan hasil perhitungan, ketersediaan air diperkirakan

mencapai 1.024.897.625,13 m3/tahun. Sementara itu, kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan domestik untuk dikonsumsi dan sanitasi, serta kebutuhan untuk pengelolaan lahan. Kebutuhan air total mencapai 198.626.377 m3/tahun dengan rincian 5,7 persen proporsi kebutuhan domestik dan 94,31 persen proporsi kebutuhan pengelolaan lahan. Dengan hasil tersebut, maka daya dukung air Kabupaten Balangan pada tahun 2024 mencapai 826.271.248,13 m3/tahun.

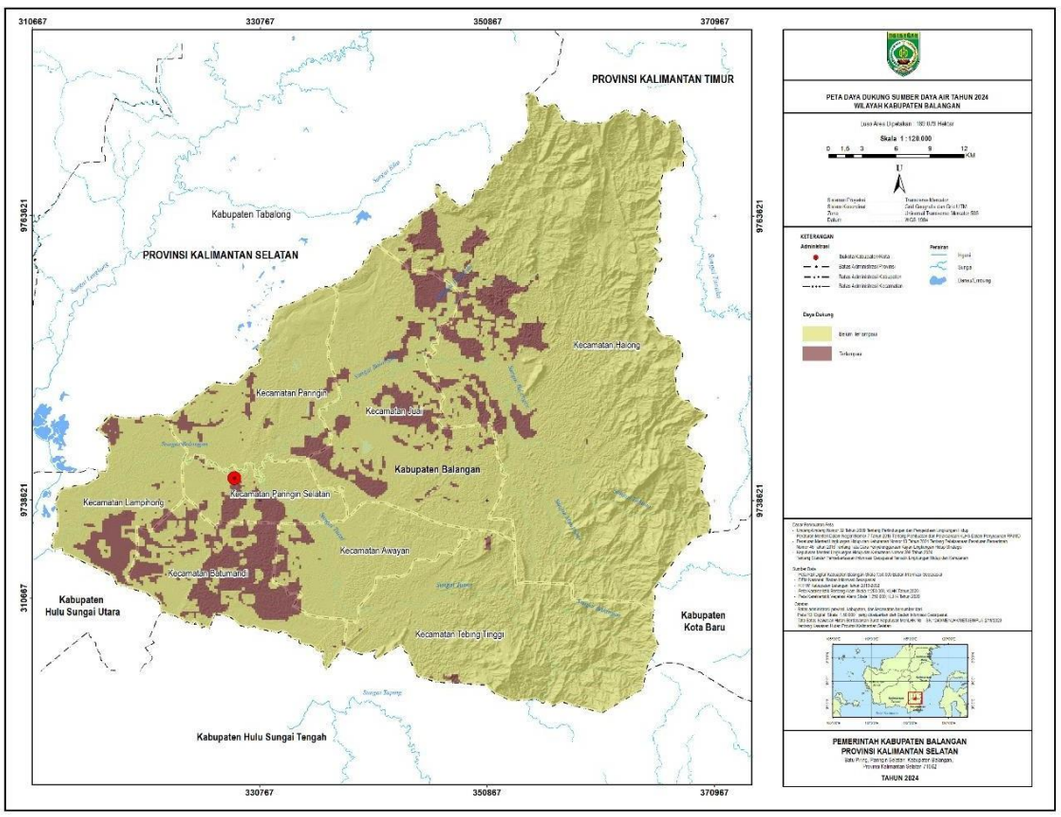
Secara akumulatif, status daya dukung air tahun 2024 belum terlampaui (surplus), demikian pula dengan akumulasi daya dukung air setiap kecamatan.

Tabel 2.10.
Daya Dukung dan Ambang Batas Kebutuhan Air Kabupaten Balangan Tahun 2024

Kecamatan	Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan Domestik (m^3/tahun)	Kebutuhan Berbasis Lahan (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m^3/tahun)	Daya Dukung (m^3/tahun)	Ambang Batas (jiwa)	Status
Awayan	50,155,963.56	1,189,731.00	7,124,384.00	8,314,115.00	41,841,848.56	52,302	Belum Terlampaui
Batumandi	69,551,743.93	1,511,980.00	51,359,857.00	52,871,837.00	16,679,906.93	20,850	Belum Terlampaui
Halong	494,408,678.21	1,915,485.00	47,672,030.00	49,587,515.00	444,821,163.21	556,026	Belum Terlampaui
Juai	120,979,797.30	1,448,098.00	39,277,858.00	40,725,956.00	80,253,841.30	100,317	Belum Terlampaui
Lampihong	51,487,650.34	1,702,887.00	17,938,273.00	19,641,160.00	31,846,490.34	39,808	Belum Terlampaui
Paringin	61,375,730.05	1,604,788.00	11,653,503.00	13,258,291.00	48,117,439.05	60,147	Belum Terlampaui
Paringin Selatan	30,808,893.84	1,464,738.00	10,896,632.00	12,361,370.00	18,447,523.84	23,059	Belum Terlampaui
Tebing Tinggi	146,129,167.90	454,792.00	1,411,341.00	1,866,133.00	144,263,034.90	180,329	Belum Terlampaui
Kabupaten Balangan	**1,024,897,625.13**	**11,292,499.00**	**187,333,878.00**	**198,626,377.00**	**826,271,248.13**	**1,032,839**	**Belum Terlampaui**

Sumber: Analisis Data, 2024

Kapasitas suplai air tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Halong dengan suplai 494 juta m^3/tahun, kemudian diikuti dengan suplai Kecamatan Tebing Tinggi sebesar 146 juta m^3/tahun. Peran sistem DAS yang masih terjaga dengan baik pada kedua kecamatan tersebut memberikan keuntungan pasokan air yang melimpah. Sementara kebutuhan air tertinggi ditunjukkan oleh Kecamatan Batumandi yaitu mencapai 52,8 juta m^3/tahun, kemudian diikuti dengan Kecamatan Halong 49,5 m^3/tahun dan Kecamatan Juai 40,7 m^3/tahun. Liputan lahan pertanian dan perkebunaan pada ketiga kecamatan tersebut merupakan faktor utama kebutuhan air begitu tinggi.



Gambar 2.6.
Distribusi Daya Dukung Air di Kabupaten Balangan Tahun 2024
Sumber: Analisis Data, 2024

Berbanding terbalik dengan kuantifikasi secara akumulatif, distribusi pada sistem grid menunjukkan adanya area dengan daya dukung air terlampaui (defisit). Area defisit merupakan wilayah yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan dengan kebutuhan air cukup tinggi. Namun disisi lain ketersediaan air pada luasan area grid cenderung rendah. Ketidakseimbangan ini menciptakan suatu kondisi over-demand sehingga terjadi kondisi defisit. Namun demikian, lahan pertanian di Kabupaten

Balangan berasosiasi dengan sungai yang juga mendukung pasokan air yang dibutuhkan. Kondisi kekurangan air dapat menyebabkan produktivitas lahan pertanian menurun, umumnya terjadi pada saat musim kemarau dengan intensitas curah hujan menurun cukup drastis di Kabupaten Balangan.

B. Daya Dukung Pangan

Ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan menunjang kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan fisik dan kecukupan nutrisi. Undang-undang Nomor 41 tahun tahun 2009 menyebutkan bahwa bahan pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati dan hewani, yang mana bahan tersebut diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

Daya dukung pangan yang disediakan oleh alam diasumsikan selalu tetap, kecuali terdapat pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi sumber pangan. Sementara tingkat kebutuhan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pemodelan kuantifikasi produksi dan konsumsi pangan dilakukan secara kuantitatif dan berbasis keruangan. Urgensi analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan sebagai basis dalam mengetahui kondisi lingkungan dalam menopang kebutuhan pokok daerah. Pemodelan daya dukung pangan dilengkapi dengan pemetaan berbasis sistem grid secara in situ yaitu tidak mempertimbangkan aliran energi ke sistem grid lain. Setiap grid dengan luasan 5’ x 5’ meter merupakan proporsi yang mewakili nilai ketersediaan dan kebutuhan, kemudian dilakukan tumpangsusun (overlay) untuk mendapatkan status daya dukung sekaligus luasannya.

Kapasitas penyediaan sumber pangan dihitung dari kinerja jasa lingkungan dan produksi lahan pertanian dalam menghasilkan pangan baik dari hasil pengelolaan lahan pertanian serta perkebunan. Sementara kebutuhan pangan dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi energi pangan yaitu 2.407,4 kilokalori/kapita/hari.

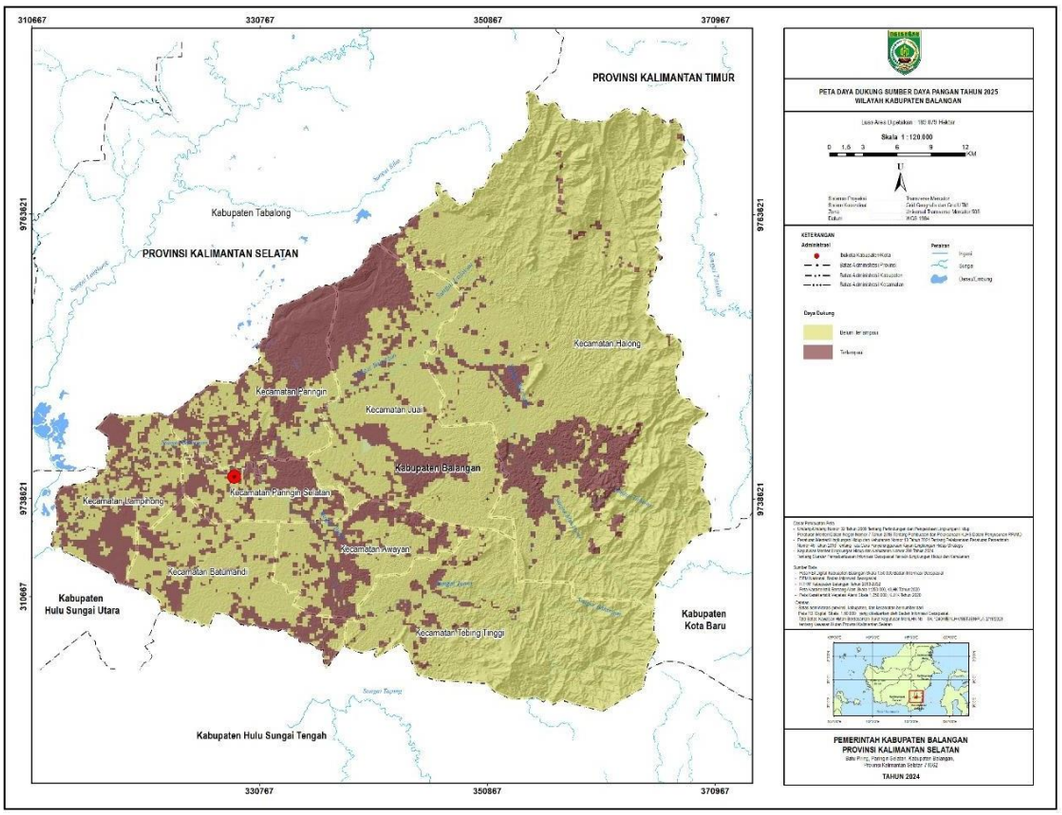
Kapasitas produksi pangan di Kabupaten Balangan mencapai 116.861.484.216 kkal/tahun dengan konsumsi pangan mencapai 100.233.672.000 kkal/tahun. Sehingga diperoleh daya dukung pangan di tahun 2024 16.631/812/216,9 kkal/tahun. Kebutuhan pangan yang tercatat pada tahun 2024 menggunakan 85,76 persen dari total ketersediannya, sehingga status daya dukung pangan berkondisi Belum

Terlampaui atau surplus. Namun jika dilakukan akumulasi pada level kecamatan, terdapat lima kecamatan mengalami defisit daya dukung pangan yaitu Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Paringin, dan Kecamatan Paringin Selatan. Kelima daerah tersebut memiliki kapasitas produksi cenderung rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Dari segi ketersediaan menurut kecamatan, Kecamatan Halong merupakan daerah dengan kapasitas produksi tertinggi mencapai 54 miliar kkal/tahun. Selain liputan wilayah yang lebih luas, kinerja jasa lingkungan penyedia pangan Kecamatan Halong mayoritas didominasi kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut didukung dengan tutupan tegakan hutan alami sepanjang Perbukitan Meratus yang meregulasi keseuburan tanah, produksi primer, hingga tata hidrologis yang maksimal.

Tabel 2.11.
Daya Dukung dan Ambang Batas Kebutuhan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2024

Kecamatan	Produksi (Kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (Kkal/tahun)	Daya Dukung Pangan (Kkal/tahun)	Ambang Batas (Jiwa)	Status
Awayan	5,521,719,343.6	10,560,070,500.0	-5,038,351,156.4	-6,573.2	Terlampaui
Batumandi	7,608,877,675.3	13,409,917,500.0	-5,801,039,824.6	-7,568.2	Terlampaui
Halong	54,200,598,612.2	17,015,533,500.0	37,185,065,112.2	48,512.8	Belum Terlampaui
Juai	13,690,709,377.1	12,858,037,500.0	832,671,877.1	1,086.3	Belum Terlampaui
Lampihong	6,933,673,142.1	15,112,314,000.0	-8,178,640,857.9	-10,670.1	Terlampaui
Paringin	7,829,902,312.5	14,235,438,000.0	-6,405,535,687.5	-8,356.9	Terlampaui
Paringin Selatan	3,574,105,664.0	12,999,840,000.0	-9,425,734,336.0	-12,297.1	Terlampaui
Tebing Tinggi	17,505,898,090.0	4,042,521,000.0	13,463,377,090.0	17,564.7	Belum Terlampaui
Kabupaten Balangan	116,865,484,216.9	100,233,672,000.0	16,631,812,216.9	21,698.4	**Belum Terlampaui**

Sumber: Analisis Data, 2024



Gambar 2.7.
Distribusi Daya Dukung Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2024
Sumber: Analisis Data, 2024

Didasarkan pada aspek keruangannya, area berstatus defisit tersebar hampir di sebagian besar sel-sel grid Kabupaten Balangan. Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan jumlah konsumsi energi yang dibutuhkan menjadikan over-demand pada sejumlah area. Konsumsi energi menggunakan faktor jumlah dan distribusi penduduk, sehingga model konsumsi akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan persebaran penduduk.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.

b. Kapasitas Air Baku

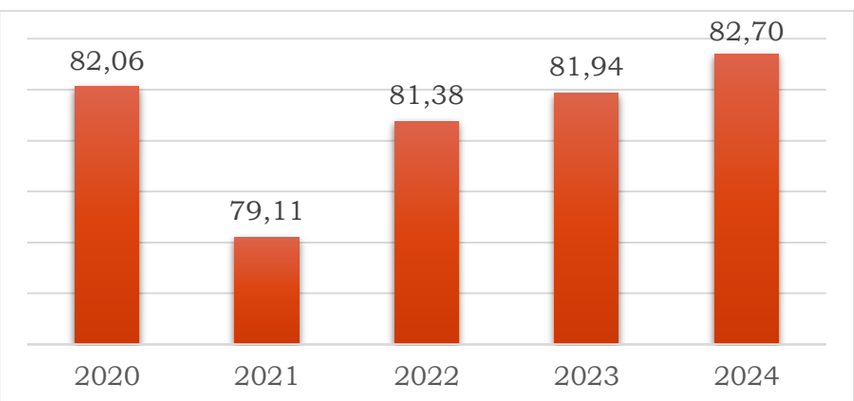
Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.

c. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

d. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. IKP disusun dari berbagai indikator yang dikombinasikan untuk menghasilkan skor komposit, memberikan gambaran tentang seberapa tahan pangan suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 yaitu sebesar 82,06 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 79,11, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 82,70 di tahun 2024.



Gambar 2.8.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025

e. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment/ PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,45 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 2,96, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun berikutnya menjadi 6,04 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan mengalami penurunan kembali menjadi hanya 3,41.

Tabel 2.12.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	3,45	2,96	4,65	6,04	3,41

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan dan BPS RI, 2025

f. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2019 hingga 2022 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 55,24% pada tahun 2019 dan sampai naik hingga 55,27% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 konsumsi pangan menurun menjadi 52,88%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan di angka 54,23 meskipun memang tidak setinggi pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 52,75% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 55,04 %

Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 17,43% di tahun 2023, cukup menurun dibanding

tahun 2022 di angka 19,18%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%. Ini menunjukan masyarakat Balangan cenderung memilih cara praktis dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi, serta gaya hidup masyarakat Kabupaten Balangan yang sudah mulai berubah.

Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi rokok yang juga cenderung naik secara konsisten dari 5,56% pada tahun 2019 hingga 6,42% pada tahun 2021 dan baru mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 di angka 5,69%. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan.

Tabel 2.13.
Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2020-2024

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	627,078	638,764	675,742	654,043	773,823
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)	55,27	52,88	54,23	52,75	55,04
1	Padi-padian	6,35	5,95	5,56	7,22	6,45
2	Umbi-umbian	0,18	0,27	0,32	0,31	0,15
3	Ikan / udang / cumi / kerang	5,66	5,78	6,28	5,46	5,30
4	Daging	1,74	1,73	2,05	1,8	2,21
5	Telur dan Susu	3,2	2,81	3,35	3,21	2,74
6	Sayur-sayuran	2,89	3,40	3,19	3,14	3,10
7	Kacang-kacangan	0,84	0,83	0,82	0,73	0,74
8	Buah-buahan	3,1	1,65	1,98	2,22	3,84
9	Minyak dan Kelapa	1,54	1,42	1,89	1,51	1,25
10	Bahan Minuman	1,95	1,89	1,79	1,62	1,54
11	Bumbu-bumbuan	0,96	1,10	1,16	1,03	0,86
12	Konsumsi Lainnya	1,5	1,55	1,64	1,39	1,23
13	Makanan dan Minuman Jadi	19,8	18,08	19,18	17,43	20,28
14	Rokok	5,56	6,42	5,02	5,69	5,44
Jumlah		**55,27**	**52,88**	**54,23**	**52,75**	**55,04**

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

g. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga

Di tahun 2024 pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga tertinggi adalah Perumahan dan fasilitas rumah tangga di angka 22,66 sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat mulai tahun 2020-2024 konsumsi Perumahan dan fasilitas rumah tangga ada di angka rata-rata 23,32%. Peringkat kedua konsumsi non pangan tertinggi adalah konsumsi aneka barang dan yaitu 9,41. Secara umum konsumsi masyarakat di Kabupaten Balangan masih di area kebutuhan mendasar manusia pada umumnya yakni sandang, pangan dan papan.

Tabel 2.14.
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2020–2024

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Rata-rata Pengeluaran (Ribu Rp)	559,112	569,272	570,370	585.873	632,057
B	Distribusi Pengeluaran (%)	44,73	47,12	45,77	47,25	44,97
1	Perumahan & Fasilitas Rumah tangga	22.08	24,66	23,36	23,84	22,66
2	Aneka Barang dan Jasa	8,89	9,84	9,84	8,99	9,41
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	3,03	3,03	3,00	2,77	2,68
4	Barang Tahan Lama	5,06	4,54	3,20	5,74	4,53
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	3,82	4,57	4,89	4,96	4,72
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	1,85	0,48	1,49	0,95	0,97
Jumlah		**44,73**	**47,12**	**45,77**	**47,25**	**44,97**

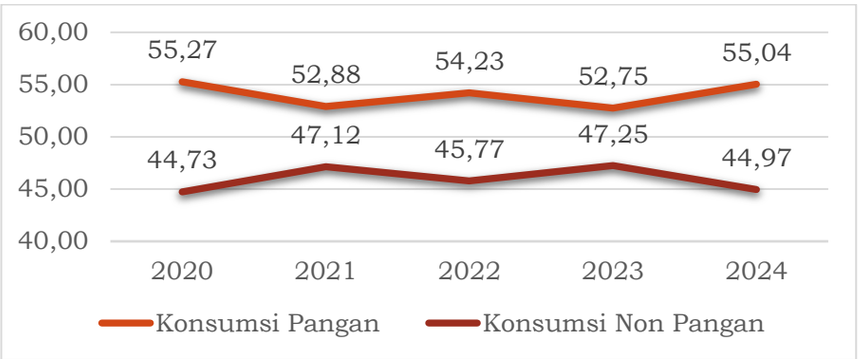
Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

Secara umum, pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 44,73%. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12%, menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77% . Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%. Kemudian pada tahun 2024 kembali menurun di angka 44,97% artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder.

h. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Jika dilihat, pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten

Balangan persentasenya secara umum pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2020 persentasenya 44,73%, Artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12% dan menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25% dan menurun kembali di tahun 2024 menjadi hanya 44,97%.

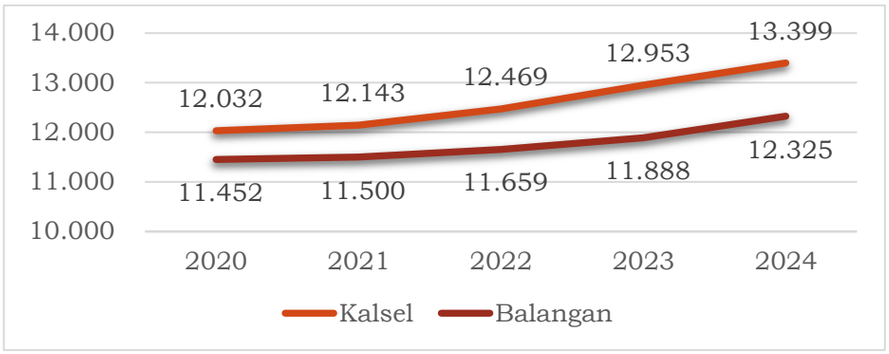


Gambar 2.9.
Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Di Kabupaten Balangan 2020–2024
Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

i. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Balangan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 mencapai 11.452.000/orang/tahun sementara tahun 2024 mencapai 12.325.000 /orang/tahun. Meskipun terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.10.
Pengeluaran Per kapita disesuaikan di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024
(Ribu Rupiah/kapita/thn)
Sumber: BPS RI, 2025

j. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2024, sebanyak 89,31% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, naik dari 87,76% di tahun 2023, kenaikan ini dikarenakan pemerintah daerah memperioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk standar hidup layak, namun yang menjadi kendala adalah masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di perdesaan yang belum dapat mengakses air bersih karena ketidakmampuan dalam membayar biaya per bulannya. Hal ini menjadi permasalahan disamping masih tingginya idle capacity PDAM Balangan (57,71%) Capain ini menunjukkan besarnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang disediakan oleh PDAM dan program Pamsimas.

Tabel 2.15.
Persentase penduduk berakses air minum

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk berakses air minum	80,59	81,72	84,05	87,76	89,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2024

k. Kinerja Indikator Pangan Lainnya

Beberapa indikator terkait ketahanan pangan yang menggambarkan kondisi pangan di Kabupaten Balangan disajikan pada tabel di bawah. Indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi

menunjukkan kecenderungan meningkat, yang juga diikuti dengan meningkatnya skor PPH ketersediaan.

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2023

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Skor PPH Konsumsi	87,2	86,5	89,1	89,60
2	Skor PPH Ketersediaan	83,48	83,22	85,06	85,78
3	Perkembangan Desa Rentan Pangan	29	23	18	17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan dan BPS RI, 2024

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan maka makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya. Data pada tabel di atas menunjukkan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Balangan meningkat signifikan dari tahun 2021 ke 2023. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi.

Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2020 - 2023 cukup baik, namun pada Tahun 2024 ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan sehingga ketersediaan bahan pangan tersebut kurang dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan atau defisit, yaitu gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan jagung. Komoditas gula pasir dan minyak goreng di Kabupaten Balangan memang tidak menghasilkan kedua produk tersebut sehingga ketersediaannya masih tergantung dari luar daerah. Selanjutnya komoditas Bawang merah dan jagung ketersediaan masih kurang akibatnya produksi dari Kabupaten Balangan masih rendah. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah Daging ayam, beras dan daging sapi. Ketiga komoditas tersebut produksi pada Tahun 2024 cukup besar sehingga ketersediaannya surplus.

Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan-bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu, disebabkan waktu tanam yang masih tergantung air hujan/musim. Hal tersebut dikarenakan sistem tata kelola air yang belum optimal. Akibatnya ada waktu waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam atau musim tanam, yang bersamaan. Sehingga menyebabkan menurunnya jumlah produksi pertanian.

Tabel 2.17.
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No.	Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)					Kebutuhan Tahun (Ton)					Surplus/ Defisit (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras	103.633	100.088	74,741	22.588,95	58.621,35	14.643	14.740	8.036	12.950	9.509.74	88.990	85.348	7.961	9.638,95	49.111,61
2	Gula Pasir*	1.248	1.256	1,401	0	0,00	1.232	1.240	831	1.311	804,73	16	16	830	-1.311,00	-884,73
3	Minyak Goreng*	1.315	1.273	1272	0	0,00	1.259	1.267	905	1.446	992,49	56	6	-367	-1.446	-992,49
4	Bawang Merah*	471	460	663	0	0,00	437	440	225.72	441	290,15	34	20	219	-441	-290,15
6	Cabai Merah/ rawit	15.432	14.752	798	408,50	776,30	14.643	14.740	125	149	179,25	789	12	-673	259,50	579,05
8	Daging Sapi	248	225	5,232	384,69	2.463,46	239	240	497,97	38	18,88	9	(15)	493	346,69	2.4444,57
9	Daging Ayam	1.410	1.785	76,983	2.399,54	10.493,13	946	952	773,19	1.190	921,89	464	833	696	1.209,54	9.571,24
10	Telur Ayam Ras	1.281	1.189	83,202	13.685,81	1.287,33	941	947	672,21	950	728,65	340	235	589	12.735,81	558,68
11	Jagung	16.374	38.660	16,815	6.834,69	26,70	896,33	159	64,02	98,2	85,77	15.477,67	38.501	47	6.736,49	-59,07
12	Kacang Kedelai	306,70	-	61	0	0,00	479	321	0	0	0	(172,3)	(321)	-61	0	0
13	Kacang Hijau	93	-	-	0	0,00	-	40	0	0	0	-	(40)	0	0	0
14	Kacang Tanah	199,07	41,02	-	0	17,78	-	212	0	0	0	-	(170,98)	0	0	0
15	Ubi Kayu	2.396	490	478	0	0,00	-	373	0	0	0	-	117	0	0	0
16	Ubi Jalar	275	-	-	0	0,00	-	185	0	0	0	-	(185)	0	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, 2024

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Balangan dapat diindikasikan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selama 5 (lima) tahun terakhir, IKLH Kabupaten Balangan menujukkan peningkatan. Status IKLH Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berada dalam Kriteria Baik dengan nilai IKLH 70,80. Komponen-komponen pembentuk IKLH seperti kondisi air, udaha, dan lahan selama kurun waktu yang sama terlihat kebih dinamis. Terdapat tahun-tahun tertentu dimana komponen-komponen tersebut mengalami penurunan. Pada tahun-tahun mendatang, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Balangan tetap lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 2.18.
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,93	63,25	67,83	68,24	70,80
2	Indeks Kualitas Air	53,33	50,95	51,33	50	53,33
3	Indeks Pencemaran Udara	91,17	91,09	91,93	93,97	97,23
3	Indeks Tutupan Lahan	56,45	51,60	51,60	51,94	51,9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2025

b. Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, berkelanjutan maupun adalah genetik. pemanfaatan Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.

c. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan

bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Akses sanitasi di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 98,75% naik menjadi 98,85% di tahun 2024.Namun capaian akses sanitasi yang tinggi ini masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akses aman, layak dan tidak layak. Untuk akses aman masih sangat rendah, yaitu 0,59%, akses layak sebesar 10,84% dan akses tidak layak sebesar 88,01%. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan guna meningkatkan akses tidak layak menjadi akses layak dan akses layak menjadi aman. Dan yang harus menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang melakukan praktek BABS yaitu sebesar 1,15% atau 508 KK.

Tabel 2.19.
Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase akses sanitasi	95,09	92,61	98,85	98,75	98,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2024

d. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja

dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Balangan secara umum menunjukkan kondisi yang baik dari tahun ke tahun. Namun persentase sampah yang tertangani dan persentase sampah yang terkurangi melalui 3R sedikit mengalami penurunan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 2.20.
Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbunan sampah yang tertangani	175,46	5.162,93	20.576,25	20.980,81	19.396,27
2	Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R	2,65%	12,07%	22,04%	20,37%	19,38 %
3	Persentase sampah yang tertangani	71,74%	75,18%	71,84%	72,05%	71,63%
4	Persentase cakupan area pelayanan	65%	75,18%	89,43%	92,56%	97%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2025

e. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

1) Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
2) Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Persentase Penurunan Emisi GRK

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.

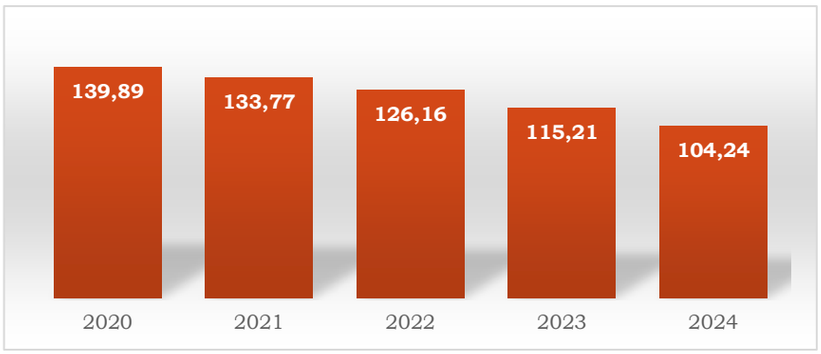
Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah

perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.

b. Indeks Risiko Bencana

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini mengidikasikan semakin baiknya pengelolaan risiko bencana di Balangan. Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2024 mencapai 104,24 dengan kriteria Sedang. Capaian ini lebih rendah dari nilai IRB Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 122,11 dengan kriteria Sedang.



Gambar 2.11.
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Balangan terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng

25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2019.

Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (*mass movement*) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indeks komposit yang mengukur tingkat resiliensi suatu wilayah terhadap bencana, berdasarkan kapasitasnya untuk memitigasi risiko, beradaptasi, meminimalkan dampak kerusakan, dan pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan setelah bencana.

Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Balangan sejak tahun 2021 sampai 2024 terus mengalami peningkatan, dari yang semula 0,39 pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,59 pada tahun 2024.

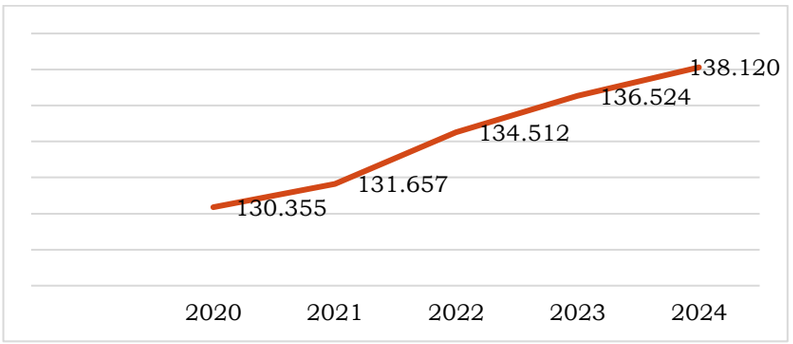
Tabel 2.21.
Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,39	0,43	0,52	0,59

Sumber: BPBD Kabupaten Balangan, 2025

2.1.1.7. Demografi

Data penduduk di Kabupaten Balangan menurut Badan Pusat Statistik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sebanyak 134.51 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 136.52 ribu jiwa dan tahun 2024 sebanyak 138.12 ribu jiwa. Penduduk di Kabupaten Balangan memiliki persentase 3,23% dari keseluruhan penduduk di Kalimantan Selatan. Hal ini terhitung dari jumlah penduduk yang sedikit, apabila dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Tapin sebesar 198.87 ribu jiwa dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 237.11 ribu jiwa. Perkembangan penduduk Balangan dari tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.12.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan
Tahun 2020–2024 (jiwa)

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk pertahun mengalami penambahan pada kisaran 1.000 hingga 2.000 penduduk. Hal ini juga didukung dengan persentase penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Halong yaitu sebanyak 15,30% atau sebanyak 21.26 ribu jiwa dengan luas wilayah 42,24% atau 772 km2. Kecamatan Halong merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan kecamatan lainnya, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.63%. Sedangkan Kecamatan Paringin Selatan yang memiliki kategori kepadatan

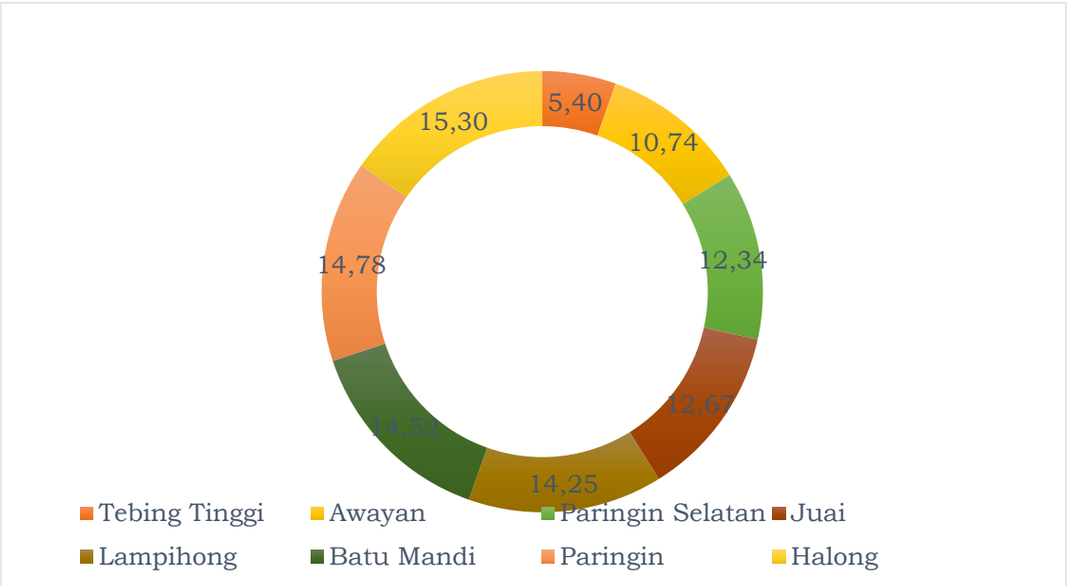
penduduk tinggi dengan angka kepadatan penduduk pada tahun 2023 254/ km2 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 260/km2.

Tabel 2.22.
Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	65.905	66.821	67.958	69.146	70.480
Perempuan	64.450	65.392	66.554	67.378	68.480
Jumlah	**130.355**	**132.213**	**134.512**	**136.524**	**138.950**

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

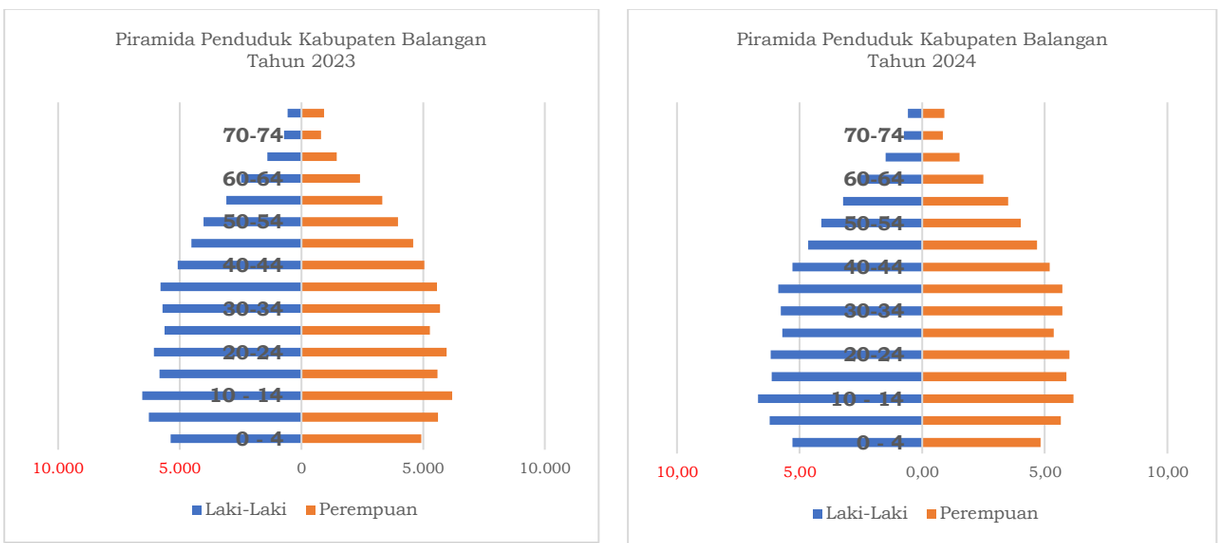
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 di Kabupaten Balangan terdapat 69.146 laki-laki dan 67.378 perempuan. Kurun waktu 2019 hingga 2023 jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berada di posisi lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 70,48 ribu jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 68,48 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103. Rasio jenis kelamin sebesar 103 tersebut menggambarkan dalam 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Rasio sebesar angka tersebut (103), masih menggambarkan keseimbangan gender antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan.



Gambar 2.13.
Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan
Tahun 2024 (jiwa)
Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

Persentase penduduk per kecamatan pada Kabupaten Balangan juga mengalami konsentrasi tertinggi pada Kecamatan Halong yaitu sebanyak 15,30% atau sebanyak 21.26 ribu jiwa dengan luas wilayah 42,24% atau 772 km2. Kecamatan Halong merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan kecamatan lainnya, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.63%. Sedangkan Kecamatan Paringin Selatan yang memiliki kategori kepadatan penduduk tinggi dengan angka kepadatan penduduk pada tahun 2023 254/ km2 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 260/km2.

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan jumlah komposisi usia dan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Pada Kabupaten Balangan sendiri memiliki piramida penduduk tipe ekspansif, tipe piramida ekspansif bisa ditemukan pada wilayah yang masuk dalam kategori berkembang. Piramida penduduk tipe ekspansif memiliki ciri-ciri usia tua yang mengerucut atau lebih sedikit, sementara pada usia muda dan usia produktif cenderung lebih lebar atau lebih banyak jumlahnya. Sehingga hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Balangan terkait dengan bonus demografi. Pemerintah Daerah juga harus memiliki perencanaan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sarana pendidikan, dan peningkatan sarana kesehatan untuk memenuhi kesiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing.



Gambar 2.14.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023-2024
Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk Kabuparen Balangan berdasarkan kelompok umur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan lebih besarnya jumlah penduduk produktif dibanding penduduk belum dan tidak produktif. Lebih rinci perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.23.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Usia	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	12.300	12.149	12.120	10.310	10,13
5-9	13.115	13.228	13.218	11.890	11,88
10-14	11.100	11.410	11.851	12.740	12,85
15-19	10.990	10.981	11.019	11.440	12,00
20-24	11.488	11.484	11.501	12.030	12,19
25-29	11.300	11.344	11.438	10.910	11,07
30-34	11.397	11.460	11.540	11.420	11,46
35-39	9.755	9.853	9.997	11.360	11,59
40-44	9.064	9.168	9.279	10.130	10,49
45-49	7.854	8.061	8.290	9.130	9,34
50-54	7.191	7.431	7.697	8.010	8,12
55-59	5.765	6.006	6.260	6.430	6,72
60-64	4.219	4.453	4.720	4.900	5,01
65-69	2.450	2.611	2.766	2.860	3,02
70-74	1.271	1.427	1.608	1.520	1,58
75+	1.096	1.147	1.208	1.480	1,50
Total	**130.355**	**132.213**	**134.512**	**136.520**	**138,95**

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024-2025

Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan klasifikasi bukan Angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji seperti di bawah.

Tabel 2.24.
Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
Bukan Angkatan Kerja	22.341	23.676	26.929	26.542	23.222
Bekerja	70.928	70.707	68.313	70.395	75.268
Pengangguran Terbuka	1.789	1.768	2.830	1.955	2.080

Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2025

Penduduk Kabupaten Balangan mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari data yang tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.25.
Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang Dianut
Tahun 2020-2024

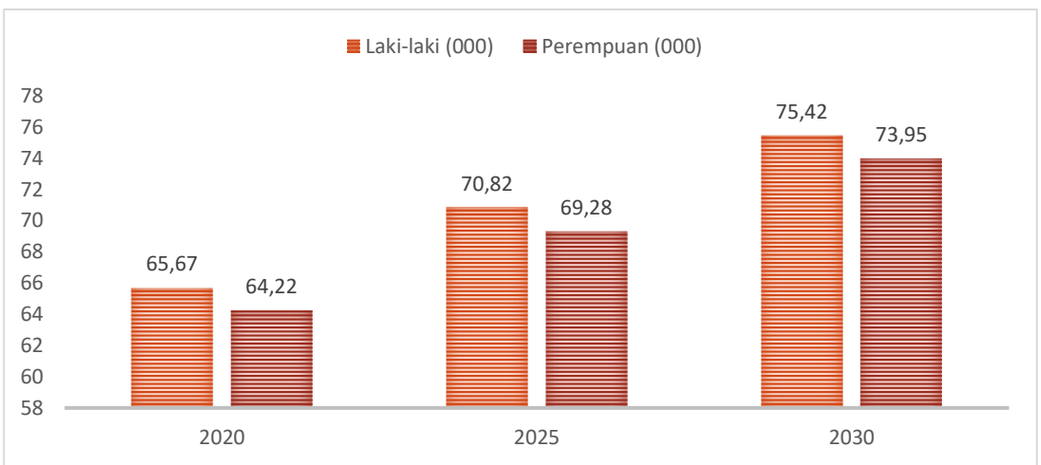
Agama	2020	2021	2022	2023	2024
Islam	124.776	125.054	126.628	129.185	131.395
Protestan	904	939	954	992	1.046
Katolik	275	267	270	269	267
Hindu	1.854	1.791	1.719	1.742	1.782
Budha	4.230	4.167	4.103	4.175	4.290
Lainnya	64	106	115	161	170
Jumlah	132.103	132.324	133.789	136.520	138.950

Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2025

Proyeksi Penduduk

Penduduk merupakan komponen penting dalam pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Proyeksi penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2020 sampai tahun 2030 berdasarkan jenis kelamin memberikan gambaran hampir sama proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Sex ratio tahun 2020 berdasarkan publikasi BPS mencapai 102,25 dan pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 101,99.

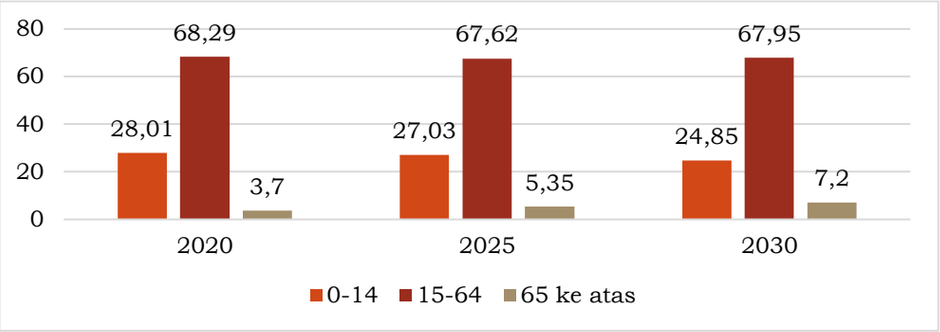


Gambar 2.15.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2030

Sumber: hasil proyeksi BPS dan tim penyusun RPJPD, 2023

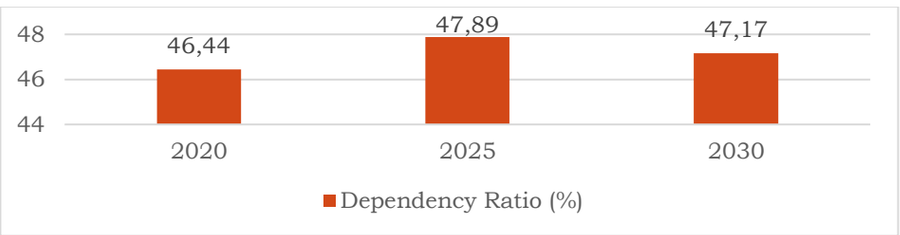
Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 149,37 ribu orang. Bila pada

tahun 2020 komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 68,29 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 67,95 persen pada tahun 2030. Hal yang sama terjadi pada penduduk belum produktif (0-14 tahun) diproyeksikan mengalami penurunan sampai tahun 2030 dari 28,01 menjadi 24,85. Sebaliknya, penduduk usia 65 tahun keatas yang dikategorikan penduduk tidak produktif diproyeksikan meningkat dan mencapai 7,2 persen pada tahun 2030.



Gambar 2.16.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2030
Sumber: hasil proyeksi BPS dan tim penyusun RPJPD, 2023

Dengan pertumbuhan penduduk demikian, ratio ketergantungan mengalami peningkatan dari 46,44 pada tahun 2020 menjadi 47,17 pada tahun 2030. Rasio ketergantungan 47,17 berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 47 sampai 48 orang tidak produktif. Lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.17.
Proyeksi Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Tahun 2020-2030
Sumber: hasil proyeksi BPS dan tim penyusun RPJPD, 2023

Tabel 2.26.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030 (ribu)

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	12,26	12,17	12,16	12,23	12,34	12,5	12,46	12,42	12,39	12,36	12,35
5-9	13,07	13,19	13,12	12,89	12,59	12,25	12,16	12,15	12,22	12,33	12,48
10-14	11,06	11,41	11,87	12,37	12,81	13,11	13,23	13,16	12,93	12,63	12,29
15-19	10,95	10,88	10,81	10,8	10,89	11,1	11,46	11,92	12,41	12,86	13,16
20-24	11,45	11,4	11,31	11,2	11,09	11	10,92	10,86	10,85	10,93	11,15
25-29	11,26	11,29	11,37	11,45	11,51	11,52	11,47	11,39	11,27	11,17	11,07
30-34	11,36	11,47	11,47	11,41	11,34	11,31	11,35	11,42	11,5	11,56	11,57
35-39	9,72	10,01	10,38	10,77	11,1	11,34	11,44	11,44	11,38	11,31	11,28
40-44	9,03	9,16	9,24	9,31	9,43	9,62	9,91	10,27	10,66	10,99	11,22
45-49	7,83	8	8,23	8,47	8,7	8,88	9,01	9,09	9,16	9,28	9,46
50-54	7,16	7,3	7,38	7,45	7,54	7,65	7,83	8,05	8,29	8,51	8,7
55-59	5,75	6	6,25	6,5	6,72	6,9	7,03	7,12	7,18	7,26	7,38
60-64	4,2	4,47	4,72	4,95	5,17	5,4	5,64	5,89	6,12	6,33	6,5
65-69	2,44	2,7	2,98	3,27	3,56	3,83	4,08	4,3	4,51	4,72	4,94
70-74	1,25	1,4	1,55	1,71	1,89	2,09	2,32	2,56	2,82	3,06	3,29
75+	1,11	1,17	1,25	1,34	1,45	1,59	1,73	1,9	2,08	2,29	2,53
TOTAL	**129,89**	**132,01**	**134,08**	**136,12**	**138,12**	**140,09**	**142,03**	**143,93**	**145,77**	**147,58**	**149,37**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Parameter hasil proyeksi penduduk Kabupaten Balangan untuk periode 10 tahun kedepan dirangkum pada tabel di bawah

Tabel 2.27.
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2020-2030

Parameter	2020	2025	2030
PENDUDUK			
Laki-Laki (000)	65,67	70,82	75,42
Perempuan (000)	64,22	69,28	73,95
Total (000)	129,89	140,09	149,37
Sex Ratio (%)	102,25	102,23	101,99
Komposisi Umur (000 orang):			
0-14	36,39	37,86	37,12
15-64	88,71	94,72	101,49
65+	4,8	7,51	10,76
Komposisi Umur (%):			
0-14	28,01	27,03	24,85
15-64	68,29	67,62	67,95
65+	3,7	5,35	7,2
Dependency Ratio (%)	46,44	47,89	47,17
FERTILITAS			
Total Fertility Rate (TFR)[1]	2,36	2,29	2,24
MORTALITAS			
Infont Mortality Rate (IMR)[1]	18,24	14,57	12,7

Sumber: hasil proyeksi BPS Kalimantan Selatan, 2023

Ket: * Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Balangan, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mencapai 21.764,18 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 887,99 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 20.876,19 miliar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya semua sektor PDRB terutama pada sektor pertambangan yang naik di tahun 2024. Namun jika dilihat PDRB tanpa Batubara pada tahun 2024 sebesar 5.961,91 miliar rupiah, naik sebesar 476,95 miliar rupiah dibandingkan tahun 2023. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Balangan sudah mulai mengalami pemulihan, setelah mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020.

Tabel 2.28.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Urusan , Kehutanan, dan Perikanan	1.311,57	1.406,44	1 474,32	1.603,24	1.712,60
B	Pertambangan dan Penggalian	6.317,73	7.581,21	14 562,33	15.391,23	15.802,27
C	Industri Pengolahan	212,25	231,37	252,75	262,89	276,37
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,42	4,68	5,09	5,53	5,91
E	Pengadaan Air	30,15	30,50	31,90	33,96	35,23
F	Konstruksi	501,84	525,05	582,78	643,20	702,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	640,39	671,41	751,05	867,76	935,08
H	Transportasi dan Pergudangan	216,77	221,15	249,09	300,28	339,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40,27	41,73	45,07	49,51	55,41
J	Informasi dan Komunikasi	157,48	165,84	178,87	191,97	207,65
K	Jasa Keuangan da Asuransi	40,66	40,79	44,93	48,59	53,72

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	115,76	121,72	127,58	137,87	150,39
M,N	Jasa Perusahaan	8,68	9,12	10,19	11,62	12,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	551,73	545,47	572,28	627,29	699,80
P	Jasa Pendidikan	396,31	416,00	445,99	474,10	522,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,86	122,26	132,09	144,46	158,83
R, S, T, U	Jasa Lainnya	65,42	66,85	74,07	82,69	92,80
PDRB		10.722,30	12.201,61	19.540,39	20.876,19	21.764,18
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		4.404,57	4.620,40	4.978,06	5.484,96	5.961,91

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

Nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yakni dari 10.390,60 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 10.821,60 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Balangan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,15 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah mengalami perbaikan perekonomian sebagai akibat pandemi COVID-19 dan diperkirakan tidak dipengaruhi perubahan harga yang terjadi di tahun 2024 atau tetap mengacu pada harga produk tahun 2010.

Tabel 2.29.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	991,90	1.027,02	1 030,66	1.071,80	1.110,72
B	Pertambangan dan Penggalian	6,143,65	6.379,57	6 774,16	7.019,43	7.257,05
C	Industri Pengolahan	140,77	146,76	153,47	158,90	164,97
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,55	2,65	2,85	3,09	3,28
E	Pengadaan Air	21,27	21,38	22,03	22,68	23,21
F	Konstruksi	339,68	342,18	356,72	382,85	410,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	407,92	412,95	435,79	464,84	487,89
H	Transportasi dan Pergudangan	145,31	147,55	156,52	166,70	179,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,28	27,64	29,15	31,80	34,25
J	Informasi dan Komunikasi	122,32	128,69	135,69	143,44	152,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26,94	25,86	26,27	27,95	30,50
L	Real Estate	83,42	86,25	89,43	94,38	99,42
M,N	Jasa Perusahaan	5,28	5,51	5,91	6,41	6,88

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	340,48	332,17	341,82	360,56	391,11
P	Jasa Pendidikan	265,57	271,28	286,14	299,85	324,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,28	78,70	83,75	88,88	94,89
R, S, T, U	Jasa Lainnya	41,26	41,69	44,30	47,04	50,82
PDRB		9.177,87	9.477,83	9.974,65	10.390,60	10.821,60
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		**3.027,47**	**3.034,22**	**3.200,49**	**3.371,17**	**3.564,55**

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2024 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,87 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Berikut postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan tahun 2024.



Gambar 2.18.
Distribusi PDRB Balangan Tahun 2024
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2020-2024 sebesar 68,56 %. Tahun ini masih ada kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2020 sebesar 58,92% naik menjadi 72,61% pada tahun 2024. Hingga tahun 2020 sampai 2024 komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas tertinggi yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan. Pada tahun 2024, dengan pangsa mencapai 72,61 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Tingginya share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Harga batubara acuan di Januari 2022 sudah mencapai 158,50 USD/ton, yang mana harga tersebut sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan saat Januari 2021 yang hanya 75,84 USD/ton. Sepanjang tahun 2022 harga batubara acuan cenderung selalu meningkat dan Desember 2022 masih berada di harga 281,48 USD/ton. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2022 menjadi sangat tinggi.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor

Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dimana sepanjang tahun 2024, harga batu bara mengalami fluktuasi dengan tren penurunan pada beberapa periode dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan yang juga menurun.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2024, pangsa PDRB kategori ini mencapai 4,30%. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Tabel 2.30.
Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,23	11,53	7.54	7,68	7,87
B	Pertambangan dan Penggalian	59,92	62,13	74.52	73,73	72,61
C	Industri Pengolahan	1,98	1,90	1.29	1,26	1,27
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,04	0,04	0.03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air	0,28	0,25	0.16	0,16	0,16
F	Konstruksi	4,68	4,30	2.98	3,08	3,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,97	5,50	3.84	4,16	4,30
H	Transportasi dan Pergudangan	2,02	1,81	1.27	1,44	1,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38	0,34	0.23	0,24	0,25
J	Informasi dan Komunikasi	1,47	1,36	0.92	0,92	0,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,33	0.23	0,23	0,25
L	Real Estate	1,08	1,00	0.65	0,66	0,69
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0.05	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,15	4,47	2.93	3,00	3,22
P	Jasa Pendidikan	3,70	3,54	2.28	2,27	2,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03	1,04	0.68	0,69	0,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,61	0,57	0.38	0,40	0,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang menurun pada tahun 2020, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut

digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) terjadi kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sampai tahun 2022 karena terjadinya pemulihan ekonomi dan berkurangnya pandemi COVID-19 meskipun terjadi kecenderungan mulai melambat kembali di tahun 2023 dan tahun 2024.

Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan. Kemudian, kedua komponen tersebut mengalami peningkatan yang cukup siginifikan di tahun 2021 di angka Rp. 6.034,18 Miliar bahkan pada tahun 2024 meningkat kembali secara drastis di angka Rp. 13.124,52 Miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat siginifikan di tahun 2022. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran di Balangan.

Tabel 2.31.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.503,01	2.586,19	2.949,43	3.236,01	3.529,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	109,74	113,21	121,53	139,32	165,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.118,07	1.109,31	1 179,70	1.315,44	1.535,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.451,22	2.516,05	2 809,28	3.088,17	3.425,04
Perubahan Inventori	1,97	2,66	-29,91	-27,3	-16,03
Net Ekspor Barang dan Jasa	4.538,29	6.034,18	12.817,81	13.124,55	13.124,52
Produk Domestik Regional Bruto	**10.722,30**	**12.361,61**	**19.847,84**	**20.876,19**	**21.764,18**

Sumber: BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2022, seluruh komponen mengalami peningkatan nilai tambah yang signifikan. Sehingga, kenaikan seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total. Sedangkan di tahun 2024 mengalami peningkatan nilai tambah dari 13 komponen.

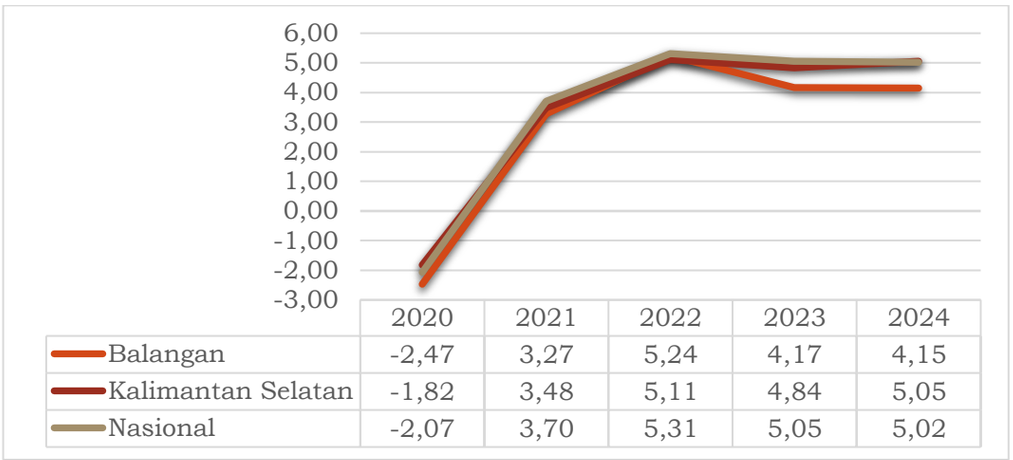
Sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia, perekonomian antar negara kini semakin terintregasi. Hal ini mengakibatkan perlambatan ritme ekonomi global yang kemudian turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarutlarut. Perekonomian Balangan sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Mengingat kategori lapangan usaha pertambangan dengan produk utamanya yaitu batubara merupakan kategori yang sangat dominan dalam perekonomian Balangan, tentunya jalur perdagangan (ekspor) dari kategori lapangan usaha ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi pergerakan perekonomian Balangan.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Balangan cenderung selalu mengalami percepatan, kecuali saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, tidak hanya sekedar mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Balangan bahkan mengalami penurunan hingga mencapai angka -2,47 persen. Setelah itu, perekonomian Balangan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 dan mampu tumbuh hingga 3,27 persen, hingga pada akhirnya di tahun 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi sekitar 5,24 persen. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan kembali menurun menjadi 4,17 persen di tahun 2023 hingga di akhir 2024 di angka 4,15 persen.

Kategori penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2024 yaitu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 9,12%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

8,47%, Jasa Pendidikan 8,17% dan Jasa Lainnya 8,03%. Sedangkan kategori penyumbang terkecil pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan yaitu sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 2,31%, Pertambangan dan Penggalian 3,39% dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,63%. Berbagai kebijakan dan juga perbaikan juga secara berkelanjutan diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, untuk terus memutar roda perekonomian yang sempat macet dan senantiasa berupaya meningkatkan produksi berbagai lapangan usaha yang memungkinkan semaksimal mungkin, termasuk halnya di Kabupaten Balangan. Upaya-upaya perbaikan perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan unit usaha yang ada di Kabupaten Balangan pada akhirnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif.



	2020	2021	2022	2023	2024
Balangan	-2,47	3,27	5,24	4,17	4,15
Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,02

Gambar 2.19.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, Namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Sedangkan di tahun 2023 dan 2024 kembali berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Dimana pada tahun 2024 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 4,15%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,05%, dan Nasional sebesar 5,02%.

Tabel 2.32.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
KALIMANTAN SELATAN	-1,81	3,48	5,11	4,84	5,05
TANAH LAUT	-1,99	3,47	5,12	4.78	5,01
KOTABARU	-1,87	3,36	4,58	4.29	5,34
BANJAR	-1,96	3,21	4,48	4.35	4,76
BARITO KUALA	-1,04	3,17	3,59	3.91	5,02
TAPIN	-1,50	3,41	4,91	4.88	4,89
HULU SUNGAI SELATAN	-1,19	4,18	4,02	5.27	5,15
HULU SUNGAI TENGAH	-1,01	3,01	3,93	4.11	4,95
HULU SUNGAI UTARA	-0,67	3,23	4,09	4.51	4,43
TABALONG	-2,62	3,28	5,30	4.90	4,87
TANAH BUMBU	-1,46	4,23	5,45	4.84	4,82
BALANGAN	**-2,47**	**3,26**	**5,24**	**4.17**	**4,15**
KOTA BANJARMASIN	-1,91	3,41	5,69	5.62	5,63
KOTA BANJAR BARU	-1,88	3,32	7,93	6.81	6,71

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Banjar Baru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,71%, di urutan kedua yaitu Kota Banjarmasin dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,63% dan di urutan ketiga yaitu Kabupaten Kotabaru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34%. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan berada pada urutan terendah ke 13 (sebelas) sebesar 4,15%.

c. Kemiskinan

Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif, kecuali pada tahun 2021. Persentase masyarakat miskin pada tahun 2021 meningkat sebagai dampak pandemik COVID-19 yang beriringan juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan cenderung melambat dari yang sebelumnya mengalami kontraksi.

Penurunan persentase penduduk miskin 3 (tiga) tahun terakhir diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin terendah berada di angka 6.680 pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada Maret 2024 sebesar 4,87%, Hal ini berarti dari 100 orang penduduk sebanyak 4 sampai 5 orang penduduk Kabupaten Balangan memiliki rata–rata pengeluaran per kapita

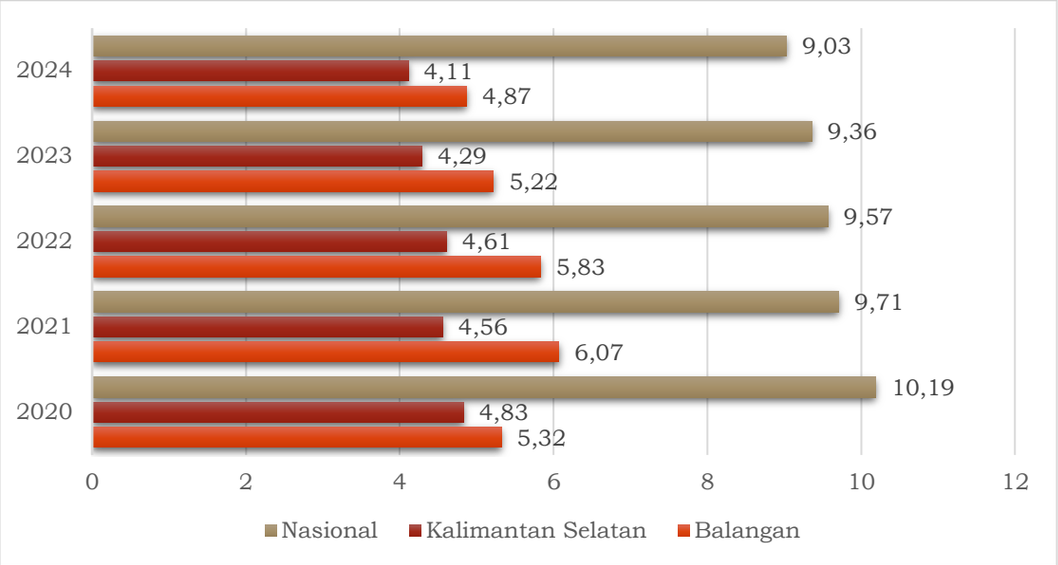
per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 sebesar Rp.528.104, lebih besar dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penduduk miskin di Balangan mengindikasikan semakin baiknya perekonomian masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.33.
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan
Tahun 2020–2024

Uraian				
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
441.488	453.928	476.190	508.157	528.104
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
7.064	8.062	7.825	7.074	6.680
Persentase Penduduk Miskin (%)				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
5,32	6,07	5,83	5,22	4,87
Tingkat Kedalaman (P1)				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
0,88	0,78	0,67	0,554	0,849
Tingkat Keparahan (P2)				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
0,24	0,19	0,12	0,128	0,200

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024

Walaupun menunjukkan tren penurunan, namun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Selatan, namun berada di bawah Nasional. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan sebesar 4,87 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,11 persen, dan Nasional sebesar 9,03 persen.



Gambar 2.20.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI, data diolah 2025

Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana keadaan individu atau kelompok miskin berada dibawah rata-rata garis kemiskinan. Kemiskinan ekstrem ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharuskan menjadi 0 persen diseluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten Balangan sendiri tercatat menurut data P3KE (Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) sejumlah 9.568 keluarga atau 37.998 individu. Jumlah penduduk miskin ekstrem pada data P3KE secara umum dan di Kabupaten Balangan juga ditentukan menurut Desil 1, 2, dan 3. Secara rinci Desil 1 atau kelompok terendah dalam kemiskinan ekstrem, 1.450 keluarga atau 6.859 individu. Data yang keluar dari Kemenko PMK tersebut, masih harus diverifikasi dan divalidasi kembali di tahap desa hingga kabupaten dengan tata aturan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 guna akurasi data dan penerima bantuan social kedepan.

Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi didapatkan sejumlah 4.934 keluarga dengan rincian 807 keluarga desil 1, 1.490 keluarga desil 2, dan 2.640 keluarga desil 3. Pada individu, terdapat 19.134 orang/jiwa yang terdaftar dengan rincian 3.840 desil 1, 6.031 desil 2, dan 9.263 desil 3. Intervensi kebijakan pemerintah daerah menyasar pada tiga pilar penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan ketiga yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

d. PDRB Per Kapita

Selama kurun tahun 2020–2024, PDRB ADHB per kapita Balangan meningkat dari 82,53 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 157,57 juta rupiah tahun 2024. Tingginya nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2024 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2024. Hal tersebut tentunya berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2024 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri, salah satunya sebagai bahan energi alternatif. Mengingat peranan sektor pertambangan sangat dominan bagi PDRB Balangan, adanya kenaikan harga dan peningkatan produksi tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2024 sangat tinggi. Sedangkan untuk Laju pertumbuhan PDRB ADHB per kapita Balangan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan posisi terakhir pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,74 persen atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 58,07 persen.

Dari sisi harga konstan, Nilai PDRB Perkapita ADHK per kapita Balangan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 70,65 juta rupiah dan pada tahun 2024 besarannya meningkat menjadi 78,35 juta rupiah. Secara lengkap untuk perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Balangan 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34.
Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Balangan 2020-2024 (ribu rupiah/kapita/thn)

Jenis Pengeluaran	2020	2021*	2022	2023*	2024**
PDRB perkapita ADHB (ribu rupiah)	82.539,54	93.645,02	148.028,75	153.371,69	157.578,97
PDRB perkapita ADHK (ribu rupiah)	70.650,63	71.799,05	74.392,70	76.336,93	78.351,53
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHB (persen)	(2,59)	13,45	58,07	3,61	2,74
PDRB perkapita ADHK (persen)	(2,29)	1,63	3,61	2,61	2,64

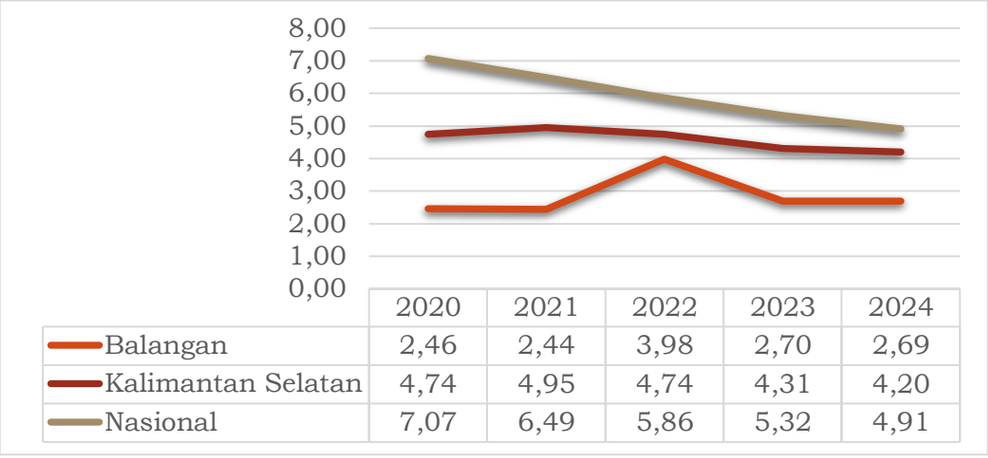
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar 2,70% dan terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,69%. Banyak faktor yang

mempengaruhi meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan, salah satunya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap produktivitas usaha yang berakibat berkurangnya kesempatan kerja dan peluang kerja.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 selalu berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2024 TPT di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 2,69%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,20%, dan Nasional sebesar 4,91%.



	2020	2021	2022	2023	2024
Balangan	2,46	2,44	3,98	2,70	2,69
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	4,31	4,20
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Gambar 2.21.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan BPS RI, 2025

f. Indeks Gini

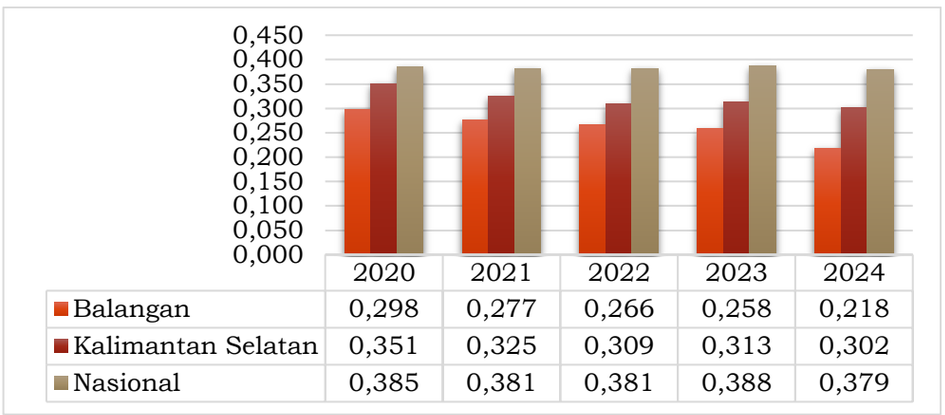
Data menunjukkan capaian indeks gini di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020, indeks gini mencapai 0,298 dan menurun sampai 0,218 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan pendapatan masyarakat cukup rendah.

Tabel 2.35.
Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks gini	0,298	0,277	0,266	0,258	0,218

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 dan Lakip Tahun 2024

Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 selalu berada dibawah Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2024 Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,218, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,302, dan Nasional sebesar 0,379. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di di Kabupaten Balangan semakin membaik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



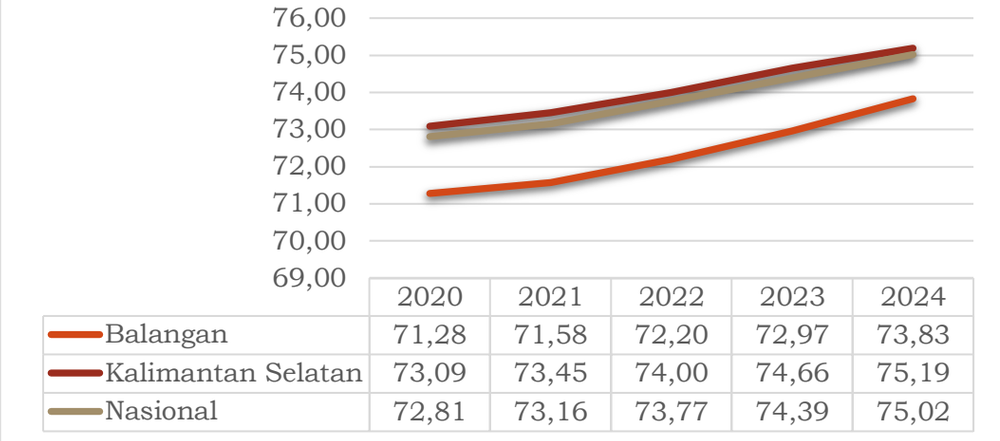
	2020	2021	2022	2023	2024
Balangan	0,298	0,277	0,266	0,258	0,218
Kalimantan Selatan	0,351	0,325	0,309	0,313	0,302
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379

Gambar 2.22.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI serta Lakip Tahun 2024, data diolah 2025

g. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 71,28% dan terus mengalami peningkatam menjadi 73,83% pada tahun 2024, meskipun memang angkanya masih di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,19%. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

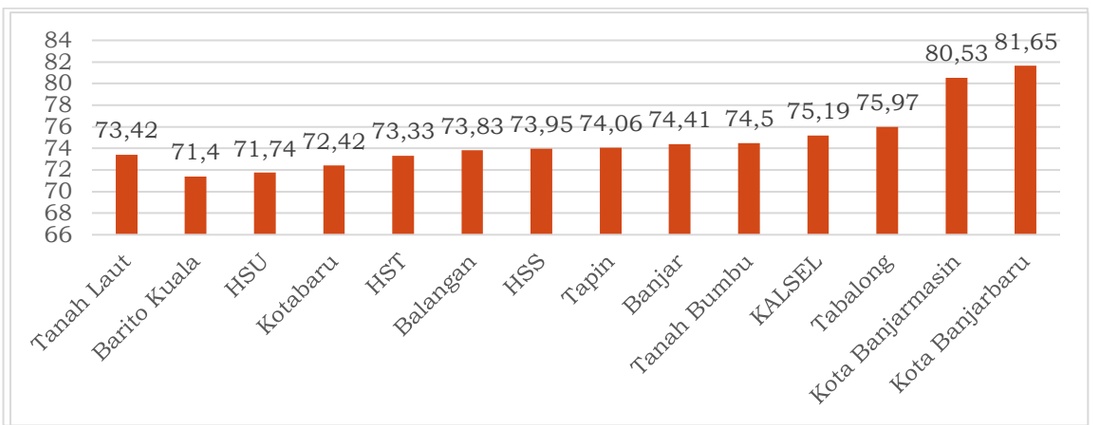
Nilai IPM di Kabupaten Balangan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Pada tahun 2024 IPM di Kabupaten Balangan mencapai 73,83%, sementara IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,19% dan IPM Nasional sebesar 75,02%.



	2020	2021	2022	2023	2024
Balangan	71,28	71,58	72,20	72,97	73,83
Kalimantan Selatan	73,09	73,45	74,00	74,66	75,19
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Gambar 2.23.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI, 2025

Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan di tahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional.



Gambar 2.24.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Terlihat pada gambar di atas, posisi IPM Kabupaten Balangan berada pada urutan ke 8 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peningkatan indikator penyusunnya, yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah serta pengeluaran perkapita disesuaikan.

Tabel 2.36.
Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran/ Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/kapita/thn)
2020	73,02	12,46	7,55	11.452
2021	73,15	12,47	7,69	11.500
2022	73,42	12,61	7,85	11.659
2023	73,69	12,82	8.03	11.888
2024	73,87	13,09	8,13	12.325

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 dan BPS Kabupaten Balangan 2025

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

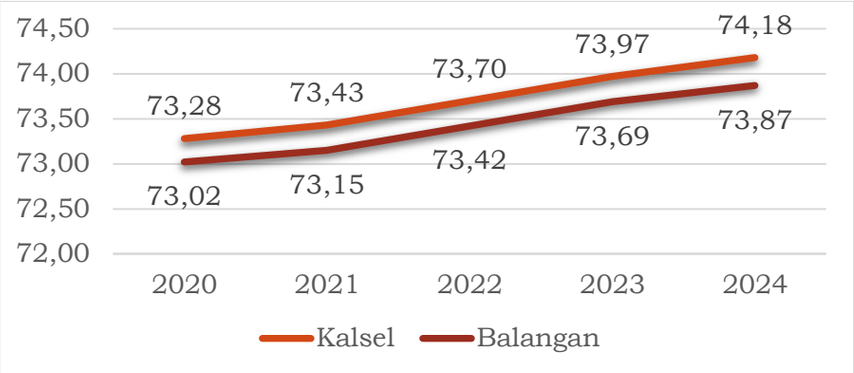
a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan adalah skala yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan fungsi dan struktur jasmani mental sosial penduduk. Informasi mengenai derajat kesehatan bermanfaat untuk menilai status kesehatan suatu wilayah, membandingkan status kesehatan antar wilayah, menilai kebutuhan pelayanan kesehatan, merencanakan dan implementasi pelayanan kesehatan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan. Derajat kesehatan suatu masyarakat dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Angka tersebut didefinisikan sebagai perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Pada tahun 2024, Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Balangan yaitu sebesar 73,87. Artinya, setiap bayi yang lahir secara rata rata diharapkan dapat hidup sampai usia 73 hingga 74 tahun. AHH ini meningkat dibandingkan AHH tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 73,69. Jika dilihat selama periode waktu 2020-2024, AHH Kabupaten Balangan menunjukkan tren yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Walau terjadi peningkatan kinerja UHH, namun capaian UHH selama lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kabupaten Balangan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu capaian UHH pada tahun 2024 menempatkan

Kabupaten Balangan berada di urutan ke 6 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

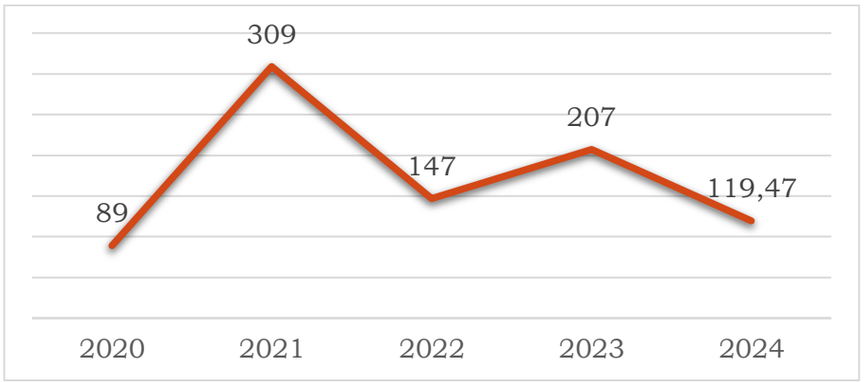


Gambar 2.25.
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan 2020-2024
Sumber: BPS RI 2025

Walapun UHH di Kabupaten Balangan sebagai penyumbang negatif di Provinsi Kalimantan Selatan namun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kabupaten Hulu Sungai Utara maka UHH Kabupaten Balangan lebih baik atau lebih tinggi dari pada kedua kabupaten tersebut.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI menurut batasan dari The Tenth Revision of International *Cassification of Diseases* (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015).



Gambar 2.26.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Balangan 2020-2024
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024, LKIP 2023 dan MODN tanggal 02.01.25 jam 15.19 dan komdatkesmas periode desember 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas AKI di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir bersifat fluktiatif. Pada tahun 2020 AKI di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 89/100.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 309/100.000 KH dan menurun kembali ditahun 2023 menjadi 207/100.000 KH atau sebanyak 3 orang dan pada pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 119,47/100.000 KH. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan AKI ditahun 2021 karena pandemi COVID 19. Adapun 3 kematian ibu ditahun 2022 tersebut bertempat di RS Amuntai dan Balangan dengan rincian sebagai berikut, 2 orang di Kecamatan Lampihong karena *preeklamsia* berat, *rupture uteri* dan *syock hypopolemic*, 1 orang di Kecamatan Awayan karena perdarahan.

Tabel 2.37.
Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	Proporsi Kematian Ibu Per 100.000 KH
1.	Tanah Laut	4685	6	128,07
2.	Kotabaru	3926	13	331,13
3.	Banjar	7419	21	283,06
4.	Barito Kuala	3632	5	137,67
5.	Tapin	2437	6	246,20
6.	Hulu Sungai Selatan	3188	2	62,74
7.	Hulu Sungai Tengah	2931	4	136,47
8.	Hulu Sungai Utara	2717	4	147,22
9.	Tabalong	2869	5	174,28
10.	Tanah Bumbu	5399	4	74,09
11.	**Balangan**	**1674**	**2**	**119,47**
12.	Banjarmasin	8770	10	114,03
13.	Banjarbaru	4263	4	93,83
	Kalimantan Selatan	**53752**	**86**	**159,53**

Sumber MODN tanggal 02.01.25 jam 15.19 dan komdatkesmas periode desember 2024

Berdasarkan tabel diatas AKI Kabupaten Balangan sebesar 119,47/100.000 KH, hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Balangan sebagai penyumbang positif untuk Propinsi Kalimantan Selatan karena berada dibawah AKI Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 159,99/100.000 KH. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga terdekat seperti Hulu Sungai Utara sebesar 147,22/100.000 KH dan Kabupaten Tabalong sebesar 174,28/1.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan berada dibawah dua kabupaten tersebut.

Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKI dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain peningkatan pelayanan ibu hamil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (AKI) yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 140 buah Poskesdes dan 149 bidan didesa, peningkatan kompetensi bidan yaitu dilaksanakan pelatihan

Asuhan Persalinan Normal (APN) secara bertahap yang pelaksanaannya berkerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin, pengadaan roda dua secara bertahap untuk bidan di desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penurunan AKI. Adanya kendaraan roda dua dapat digunakan oleh bidan di desa untuk melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu dan anak yang tidak koperatif memeriksakan kesehatannya ke Poskesdes maupun Puskesmas.

c. Indeks Keluarga Sehat

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga oleh Puskesmas akan berjalan dengan baik, bila dilaksanakan langkah-langkah persiapan yang meliputi sosialisasi, pengorganisasian, pembiayaan dan persiapan pendataan. Berdasarkan Permenkes Nomor 39 tahun 2016 Kriteria Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai berikut : Keluarga sehat dengan nilai > 0,800, keluarga pra sehat dengan nilai 0,500 - 0,800, keluarga tidak sehat dengan nilai < 0,500.

Tabel 2.38.
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,3	0,32	0,34

Sumber: Laporan Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan Tahun 2020-2022

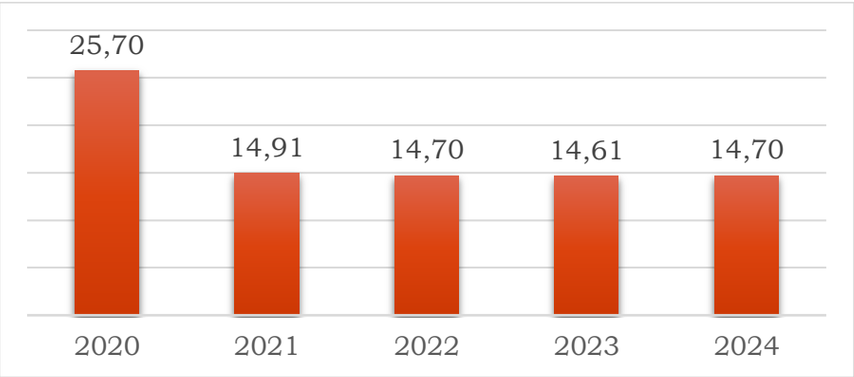
Dari 12 indikator IKS, terdapat 5 indikator keluarga sehat yang masih rendah di Kabupaten Balangan sehingga mempengaruhi IKS Kabupaten Balangan. 5 indikator yang masih rendah dan memerlukan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah indikator keluarga mengikuti program KB (49 %), penderita TB paru yang berobat sesuai standar 43,62%, penderita hypertensi yang berobat teratur 24,41%, penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan 13,93%, anggota keluarga tidak ada yang merokok 55,90%.

d. Prevalensi Stunting

Kejadian Balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan Datang. *Stunting* adalah masalah gizi kronis pada Balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek

dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif.

Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan, pola asuh pemberian makanan pendamping asi yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan.



Gambar 2.27.
Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan 2020-2024
*Su*mber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 dan LKIP 2023

Berdasarkan tabel diatas dari data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) prevalensi stunting di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi penurunan signifikan dari 25,70 pada tahun 2020, menurun menjadi hanya 14,70 pada tahun 2024.

Berdasarkan data, prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi penurunan namun jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada diatas prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 9,1% dan berada di urutan ke 3 tertinggi Se-Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Banjar.

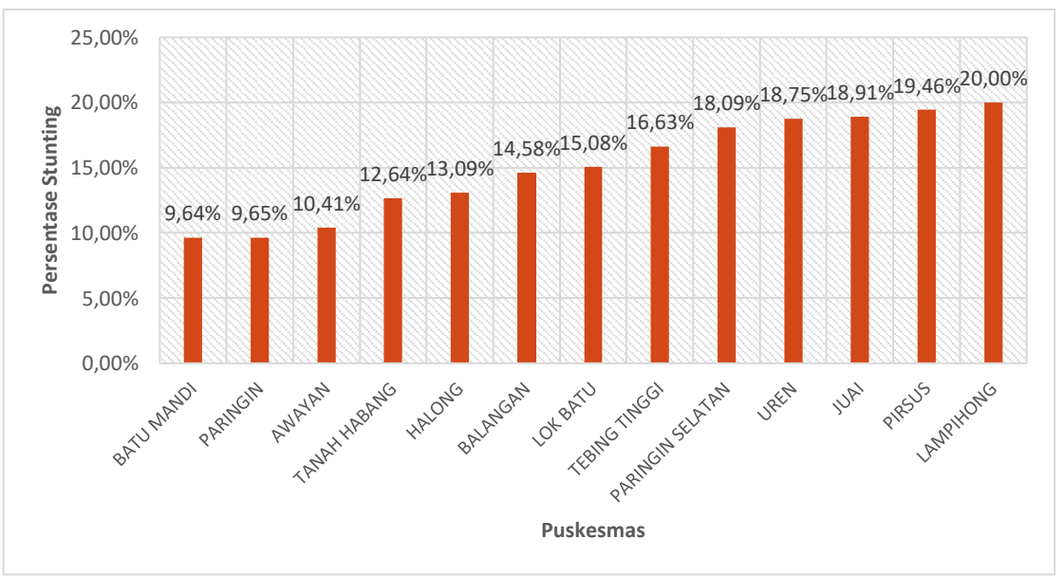
Tabel 2.39.
Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN	PREVALENSI STUNTING
1.	Tanah Laut	5,3%
2.	Kota Baru	7,5%
3.	Banjar	17,1%
4.	Barito Kuala	12,5%
5.	Tapin	11,3%
6.	Hulu Sungai Selatan	4,4%
7.	Hulu Sungai Tengah	10,2%
8.	Hulu Sungai Utara	19,4%
9.	Tabalong	8,9%
10.	Tanah Bumbu	5%
11.	**Balangan**	14,7%
12.	Banjarmasin	2,9%
13.	Banjar Baru	13,2%
Provinsi Kalimantan Selatan		9,1%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (data e-PPGBM) tahun 2023

Prevalensi stunting di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 19,4%, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 10,2% maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan gambar di bawah, prevalensi stunting tahun 2024 terendah di Puskesmas Batumandi sebesar 9,64% dan yang tertinggi adalah Puskesmas Lampihong sebesar 20%.



Gambar 2.28.
Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2024
Sumber: e-PPGBM Bulan Agustus Tahun 2024

Berdasarkan grapik diatas prevalensi stunting tahun 2024 terendah di Puskesmas Batumandi sebesar 9,64% dan yang tertinggi adalah Puskesmas Lampihong sebesar 20%.

e. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu.

f. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

g. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

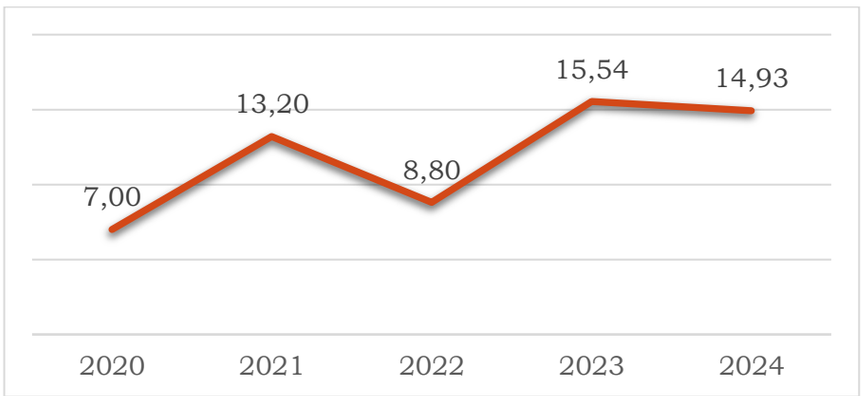
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan:
   Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
2. Kesadaran Masyarakat:
   Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Komitmen Pemerintah Daerah:
   Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC):
   Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

h. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 14,93 per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.29.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan 2020-2024
Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023

Capaian angka kematian bayi pada tahun 2024 sebesar 14,93 per 1.000 kelahiran hidup, dengan total 1.674 kelahiran hidup dan 25 kasus kematian bayi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 11,91 per 1.000 kelahiran hidup, serta menjadikan Balangan sebagai kabupaten dengan angka kematian bayi tertinggi ketiga di provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.40.
Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup	Jumlah Bayi Mati	Proporsi Bayi Mati Per 1.000 KH
1.	Tanah Laut	4685	59	12,59

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup	Jumlah Bayi Mati	Proporsi Bayi Mati Per 1.000 KH
2.	Kotabaru	3926	35	8,91
3.	Banjar	7419	126	16,98
4.	Barito Kuala	3632	27	7,43
5.	Tapin	2437	31	12,72
6.	Hulu Sungai Selatan	3188	42	13,17
7.	Hulu Sungai Tengah	2931	33	11,26
8.	Hulu Sungai Utara	2717	49	18,03
9.	Tabalong	2869	37	12,90
10.	Tanah Bumbu	5399	66	12,22
11.	**Balangan**	**1674**	**25**	**14,93**
12.	Banjarmasin	8770	70	7,98
13.	Banjarbaru	4263	42	9,85
Kalimantan Selatan		**53910**	**642**	**11,91**

Sumber: MODN tanggal 02.01.25 jam 15.19 dan komdatkesmas periode desember 2024

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam–28 hari). Selain upaya tersebut diatas juga melaksanakan kunjungan dokter spesialis anak ke puskesmas, pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas Balita, peningkatan kompetensi bidan untuk pelayanan persalinan dengan melaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN).

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.

Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi merupakan jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum

dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir

Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kecamatan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

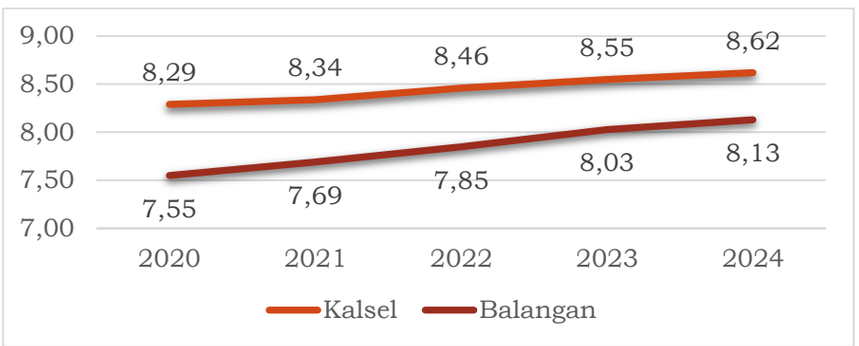
b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi merupakan jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Demensi RLS terdiri atas penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Capaian RLS Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir masih cukup rendah dalam peningkatannya. Dimana pada tahun 2020 sebesar 7,55 tahun dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 8,13 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,13 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (2 SMP). Selain itu, capaian RLS selama periode tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Kalimantan Selatan.



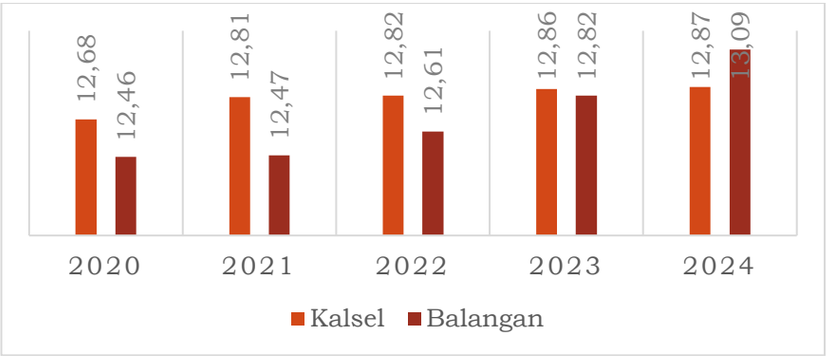
Gambar 2.30.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025

Masih rendah dan lambatnya peningkatan RLS Kabupaten Balangan di sebabkan oleh banyaknya penduduk diatas umur 25 tahun di Kabupaten Balangan yang hanya mengenyam pendidikan di SD dan juga banyak yang tidak melanjutkan kejenjang SMP serta masih ada penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pada saat berusia dibawah 25 tahun.

d. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.



Gambar 2.31.
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di Kabupaten Balangan selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,46 tahun, yang berarti anak-anak usia sekolah pada tahun tersebut diperkirakan akan mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun apabila mengikuti jenjang pendidikan yang berlaku secara terus-menerus tanpa hambatan. Tahun berikutnya, pada 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 12,61. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 12,82 , hingga akhirnya meningkat menjadi 13,09 pada tahun 2024. Kenaikan angka ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan akses pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, mulai memberikan hasil yang positif. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan membaiknya fasilitas pendidikan, bertambahnya jumlah anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta berkurangnya angka putus sekolah. Secara keseluruhan, perkembangan angka harapan lama sekolah tersebut menjadi indikator penting bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Balangan terus menunjukkan arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Perkembangan ini juga sejalan dengan komitmen daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan yang menjadi salah satu penopang utama pembangunan berkelanjutan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan HLS di Kabupaten Balangan. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, seperti rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
2. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana sebagai pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer yaitu pengadaan Chromebook bagi seluruh sekolah jenjang SD dan SMP sebanyak 202 buah
3. Peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai meberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke janjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2018 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahan ternama di luar Kalimantan)

Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 600 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

e. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3.

f. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau

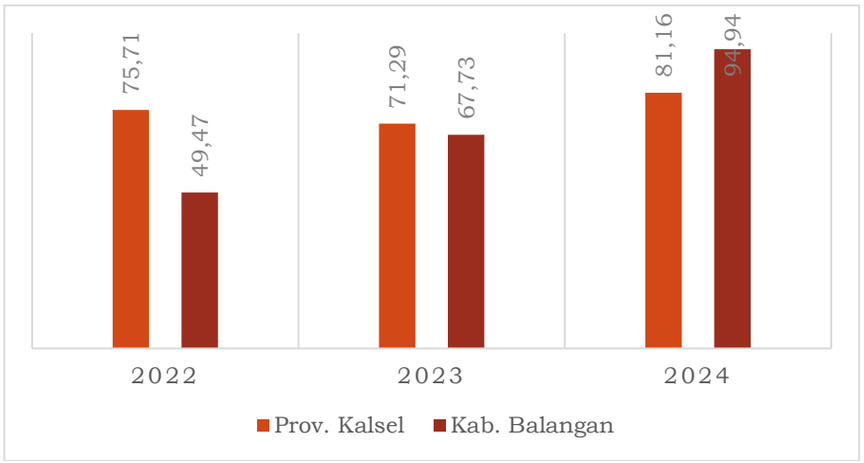
pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

g. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Range kategori IPLM yaitu sangat rendah 0-30%, rendah 31%-50%, sedang 51%-80%, tinggi 81%-90%, dan sangat tinggi 91%-100%.

Pengukuran IPLM di Kabupaten Balangan baru dilakukan tahun 2022 dengan nilai 49,47% dengan kategori Rendah dibanding IPLM provinsi, pencapaian nilai IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,71% dan masuk ke dalam kategori Sedang. Nilai IPLM Balangan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 67,73%. Sementara IPLM provinsi menurun menjadi 71,29%. Walau IPLM Balangan meningat secara signifikan, namun masih perlu ditingkatkan agar berada diatas IPLM provinsi. Selanjutnya IPLM Kabupaten Balangan pada tahun 2024 mencapai 94,94% dengan kategori sangat tinggi dan berada diatas capaian IPLM Provinsi Kalsel yang hanya 81,16%. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat pembangunan literasi masyarakatnya sudah sangat baik.



Gambar 2.32.
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2022-2024
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025 dan BPS Provinsi Kalsel, 2025

h. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Balangan pada semua jenjang angkanya masih fluktuatif. Untuk APK PAUD selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat kecuali pada tahun 2022. APK PAUD pada tahun 2022 sebesar 70,89, lebih rendah dibanding APK PAUD tahun sebelumnya yang mencapai 89,28. Namun kondisi kembali membaik dengan meningkatkan nilai APK PAUD pada tahun 2023 menjadi 72,23. Penurunan APK PAUD tahun 2022 disebabkan belum meratanya lembaga PAUD di desa khususnya pada daerah terpencil. Namun hal ini sudah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program satu desa satu PAUD. Selain itu, faktor geografi Kabupaten Balangan sebagai daerah yang diapit oleh kabupaten tetangga yang lebih maju pembangunannya dan ada beberapa desa yang secara letak lebih dekat ke kabupaten tetangga maka masyarakatnya cenderung menyekolahkan anaknya ke kabupaten tentangga. Kondisi ini menyebabkan anak tersebut tidak masuk dalam perhitungan APK di Balangan. Hal ini sudah disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas baik itu sarana dan prasarana sekolah ataupun mutu dari pendidikan sehingga menarik minat penduduk untuk bersekolah.

Tabel 2.41.
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	71,77	89,28	70,89	72,23	n/a
2	SD/MI/Paket A	108,35	108,08	102,18	105,29	106,20
3	SMP/MTs/Paket B	86,12	85,26	104,32	86,38	97,39

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	SMA/SMK/Paket C	95	98,02	105,51	99,25	96,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2022-2023, Neraca Pendidikan Daerah dan Kabupaten Balangan Dalam Angka 2025.

Sedangkan APK jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2024 mencapai 106,20 dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 105,29. APK SMP/MTs/Paket B di tahun 2024 sebesar 97,39 dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 86,38. Penyebab cenderung menurunnya APK SD dan SMP pada tahun 2024 sama halnya dengan APK PAUD. Selain itu, masyarakat Kabupaten Balangan agamis sehingga banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, baik itu di dalam ataupun diluar Kabupaten Balangan. Bagi yang bersekolah di pesantren dalam Kabupaten Balangan, pemerintah daerah sudah mensikapinya dengan menawarkan kepada ponpes tersebut untuk membuka kelas paket kesetaraan didalam agar para santri lulusan nanti bisa juga mendapatkan ijazah dari jalur pendidikan non formal. Selanjutnya untuk APK SMA/SMK/Paket C tahun 2024 sebesar 96,66 berarti lebih rendah dari APK tahun sebelumnya yang mencapai 105,51 pada tahun 2022.

i. Angka Partisipasi Murni (APM)

Berdasarkan data pada tabel di bawah. dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI selama 5 tahun bersifat fluktuatif yang mana tahun 2020 yaitu sebesar 99,27. Namun mulai tahun 2021 terjadi penurunan sampai tahun 2022 dan kembali meningkat hingga mencapai 98,52 pada tahun 2024

Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs di tahun 2024 sebesar 79,55, berarti meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 78,35. Sementara APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23, yang juga mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 65,83. Lalu kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi hanya 67,93.

Penurunan APM jenjang SMP/MTs dikarenakan banyaknya anak usia 13-15 tahun yang lulus dari Pendidikan Dasar melanjutkan pendidikan mereka ke kabupaten tetangga sehingga tidak tercatat di kabupaten Balangan. Pada saat ini terjadi fenomena atau tren sekolah sekolah pesantren modern dengan bilingual (dua bahasa) sementara di Kabupaten Balangan belum tersedia pesantren modern.

Tabel 2.42.
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A	99,27	99,17	91,16	98,90	98,52
2	SMP/MTs/Paket B	82,69	76,28	69,19	78,35	79,55
3	SMA/SMK/Paket C	70,84	65,83	56,23	72,25	67,93

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Kabupaten Balangan Dalam Angka 2025.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

b. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan untuk di Kabupaten Balangan hanya menangangi 9 jenis PPKS yang totalnya pada 2023 berjumlah 60.942 orang. Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan yang terdiri dari Anak Terlantar 59 orang, Anak Berlawanan dengan

Hukum 8 orang, Lanjut Usia 3.701 orang, Penyandang Disabilitas 1.129 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 orang, Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 62 orang, Fakir miskin 54.289 orang dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.636 Orang. Untuk dapat melihat secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
PPKS Yang Tertangani Tahun 2024

No	PPKS	Jumlah PPKS (Jiwa)	Jumlah PPKS yang Tertangani (Jiwa)
1	Anak Terlantar	50	50
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	4	4
3	Lanjut Usia	3.701	551
4	Penyandang Disabilitas	1.129	435
5	Korban Bencana Alam	95	95
6	Korban Bencana Sosial	150	150
7	Perempuan Rawan Sosial dan Ekonomi	132	132
8	Fakir Miskin	52.670	41756
9	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1636	516
Jumlah		**59.567**	**43.689**

Sumber : Dinas Sosial Data Diolah, 2024

PPKS yang tertangani pada tahun 2023 terealisasi sebesar 36. 202 orang, kemudian di tahun 2024 terealisasi sebanyak 43.689. Jumlah PPKS yang terlayani memang mengalami peningkatan namun secara jumlah PPKS keseluruhan, masih tinggi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024. Jumlah PPKS pada tahun 2023 sebesar 60.916 jiwa sementara pada tahun 2024 sebesar 59.567 jiwa. Jumlah yang terlayani didapatkan melalui penelusuran mandiri bekerjasama dengan TKSK Kecamatan dan PSKS di delapan kecamatan. Pada tahun 2024 penjaringan sasaran penerima manfaat diperluas dengan adanya media inovasi diantaranya, Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (SIAP PD Kabupaten Balangan) yang memfasilitasi verifikasi dua arah antara SKPD tekhnis bekerjasama dengan aparatur desa sehingga memudahkan penentuan sasaran. Inovasi Layar Si Balang yang menjadi media pelaporan mandiri Masyarakat langsung ke Dinas Sosial apabila terdapat PPKS yang perlu dilayani, aplikasi Layanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan (Layar si Balang) juga merupakan upaya Dinas Sosial untuk mendekatkan pelayanan kepada PPKS agar lebih mudah melaporkan layanan yang diperlukan berdasarkan data DTKS.

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	40.95%	72%	70,33%	59,40%	73,18%
6.2	Persentase PPKS yang tertangani	40.95%	72%	68,72%	59,40%	73,18%
6.3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	20.66%	54.91%	32,44%	59,40%	73,18%
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	149.80%	267.36%	100%	100%	100%
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	100%	100%	32,93%	32,48%	33,49%
	Jumlah PPKS (Jiwa)	47,523	96.059	68.334	60.942	56.699
	Rantra/BPNT	6.214	7.138	6.669	5.467	5.690
	PKH	3.604	3.652	3.687	2.996	3058
		9.818	10.790	10.356	8.463	8.748

Sumber: Dinas Sosial data diolah, 2024

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran

Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 yaitu sebesar 85 persen.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

Pembangunan kualitas keluarga diarahkan untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga yang dibahas dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan keluarga guna mewujudkan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga.

b. Indeks Perlindungan Anak

IPA (Indeks Perlindungan Anak) merupakan alat ukur yang penting untuk menilai seberapa baik suatu daerah dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan hak anak (Indeks Pemenuhan Hak Anak/IPHA), mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus bagi anak-anak (Indeks Pemenuhan Khusus Anak/IPHK) yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan memahami IPA, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem perlindungan anak dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki kondisi tersebut. Capaian IPA Kabupaten Balangan pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,73 dan menurun di tahun 2023 menjadi 60,92. Selama periode tersebut capaian IPA di Kabupaten Balangan lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPA Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.45.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023

Indeks Perlindungan Anak	2022	2023
Balangan	62,73	60,92
Kalimantan Selatan	63,12	62,46

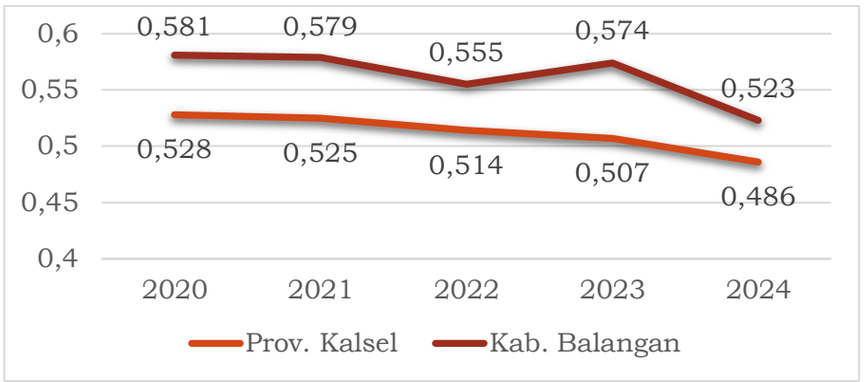
Sumber: Buku IPA Tahun 2022-2023

c. Indeks Ketimpangan Gender

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) idealnya berlawanan. IPM, IPG, dan IDG yang tinggi seharusnya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di wilayah dengan pembangunan manusia yang sudah baik, cenderung sudah merata kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir cenderung menurun kecuali pada tahun 2021 dan 2023. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,058 poin. Walau demikian, bila dibandingkan dengan IKG Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada gambar di bawah IKG Balangan

selalu lebih tinggi. Capaian IKG provinsi kalimantan selatan pada tahun 2024 sebesar 0,486 sementara Kabupaten Balangan 0,523. Ini berarti kesetaraan gender di tingkat provinsi lebih baik dibandingkan Kabupaten Balangan.



Gambar 2.33.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025

d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dengan capaian 93,21. Capaian tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan IPG di Kabupaten Balangan hingga menjadi 92,95. Lebih lanjut, capaian IPG Kabupaten Balangan selama periode 2020-2024 selalu berada di atas IPG Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.46.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

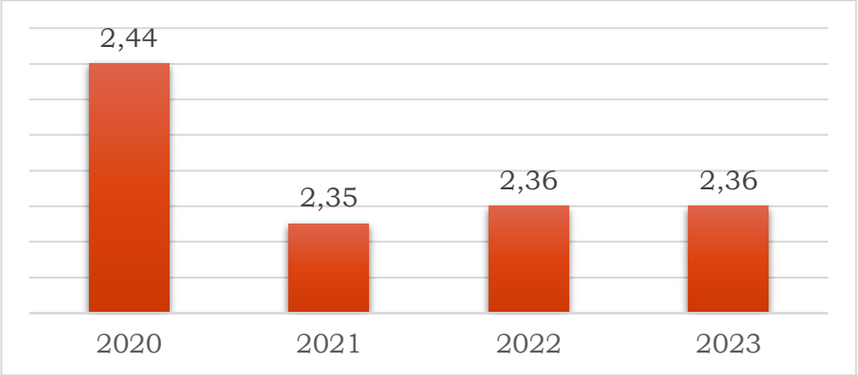
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Kabupaten Balangan					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,22	92,33	93,10	93,21	92,95
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,14	70,57	70,03	73,27	68,83
	Prov. Kalimantan Selatan					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,86	88,86	89,44	89,65	89,94
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,48	74,58	74,80	75,97	75,01

Sumber: BPS RI, 2025

Partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. BPS RI mencatat skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Balangan pada tahun 2020 yaitu sebesar 70,14 dan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun hingga menjadi 68,83 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, maka capaian IDG Kabupaten Balangan pada periode dimaksud selalu lebih rendah. Penurunan IDG Kabupaten Balangan dan posisi yang lebih rendah dari IDG provinsi perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga dapat terwujud keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.

e. *Total Fertility Rate* (TFR)

Berdasarkan grafik TFR di bawah, selama 4 (empat) tahun terakhir, TFR terjadi penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 namun terjadi peningkatan ditahun 2022 dan 2023. Fluktuatifnya TFR menggambarkan pertumbuhan penduduk yang belum stabil. Naiknya TFR ditahun 2022 dan 2023 salah satunya dipengaruhi karena menurunnya MCPR di Kabupaten Balangan pada tahun 2022. Cakupan Pelayanan KB (MCPR) atau Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu.



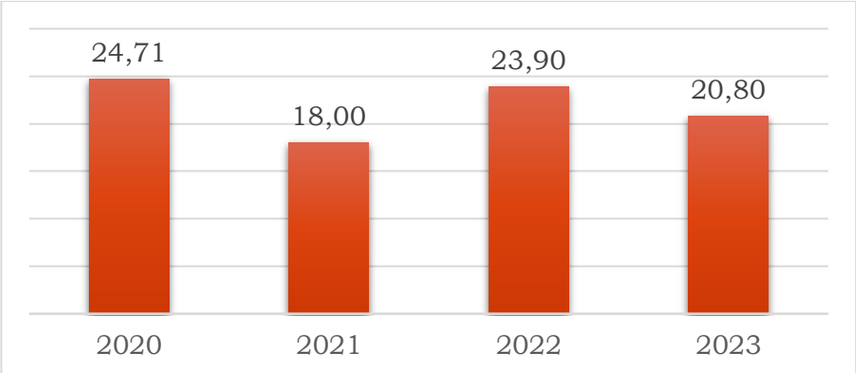
Gambar 2.34.
TFR di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023
Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

Seiring dengan menurunnya angka MCPR pada tahun 2022, angka TFR juga mengalami peningkatan. Walau terlihat tidak signifikan secara angka, hal ini dipangaruhi oleh tingkat pendidikan yang akan menentukan pengetahuan serta pemahaman terhadap yang memberikan KIE (di tingkat lini lapangan/Kader KB) dan yang diberikan KIE dalam hal ini adalah PUS (Pasangan Usia Subur) khususnya tentang pemakaian alat dan obat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan maupun mengakhiri proses reproduksi. Selain itu faktor ekonomi merupakan hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan jumlah anak yang didahului oleh perencanaan keluarga sehingga sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis juga mempengaruhi karena wilayah yang sulit seperti pegunungan sehingga akses ke pelayanan terbatas. Jumlah tenaga bidan yang belum memperoleh pelatihan tentang pelayanan KB modern lebih banyak jika dibandingkan dengan bidan yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pelayanan KB, sehingga tenaga pemberi pelayanan KB khususnya dengan metode kontrasepsi jangka panjang sangat terbatas.

f. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan data, ASFR usia 15-19 tahun di Kabupaten Balangan ASFR selama 4 tahun bersifat fluktuatif. ASFR dari tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi 18%. Terjadinya peningkatan ASFR tahun 2022 di Kabupaten Balangan menjadi 23,9% tentu karena dipengaruhi terjadinya peningkatan pernikahan usia anak. Selanjutnya di tahun 2023 menurun kembali menjadi 20,8%. Adapun perkembangan

ASFR di Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir disajikan pada gambar di bawah.



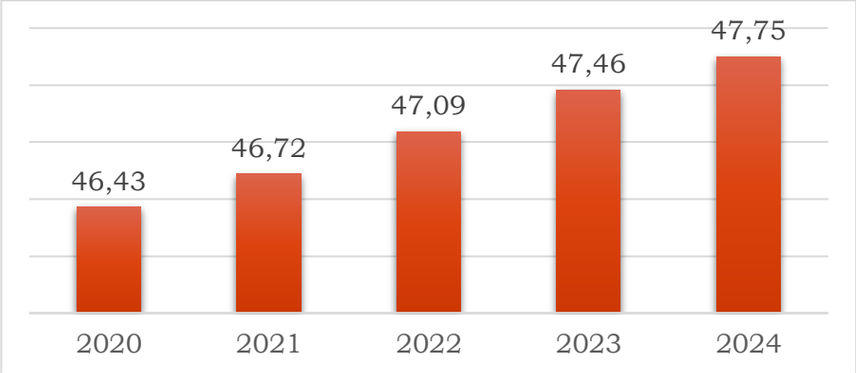
Gambar 2.35.
***Age Specific Fertility Rate* (ASFR) di Kabupaten Balangan 2020-2023**
*Su*mber: LAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio)*

Angka Beban ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka Beban Ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi (kelompok umur 0−14 dan 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (kelompok umur 15−64 tahun). Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah, maka semakin rendah beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi.



Gambar 2.36.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan 2020–2024
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan 2024

Angka beban ketergantungan di Kabupaten Balangan tahun 2020 yaitu sebesar 46,43 persen. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 sampai 47 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Nilai angka beban ketergantungan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, angka beban ketergantungan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, yaitu mencapai angka 47,75 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 47 sampai 48 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, *ceteris paribus.*

Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,98 persen dan menurun hingga tahun 2023 menjadi 1,26 persen. Namun pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan kembali hingga menjadi 1,27 persen.

Tabel 2.47.
Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan / *Manufacturing*	1,98	1,90	1,29	1,26	1,27

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.

Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,38 persen dan menurun hingga tahun 2022 menjadi 0,23 persen, namun mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2024 menjadi 0,25 persen.

Tabel 2.48.
Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,38	0,34	0,23	0,24	0,25

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

c. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Badan Pusat Statistik mendefinisikan wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di

Kabupaten Balangan pada tahun 2023 yaitu sebesar 171.353 orang dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 238.106 orang.

Tabel 2.49.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Balangan
Tahun 2023-2024

Uraian	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	171.353	238.106

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2025

d. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten

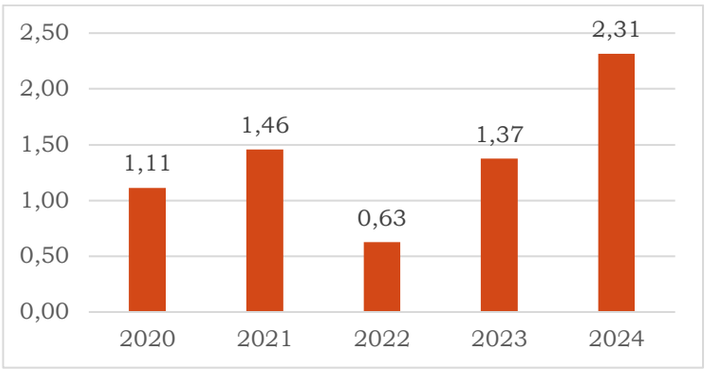
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

e. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

f. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha dengan total angkatan kerja. Rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator keberhasilan transformasi ekonomi. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2024 yang mencapai 2,31 dan capaian terendah yaitu pada tahun 2022 yang hanya sebesar 0,63. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.37.
Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2021-2024

g. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

h. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai

Pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3):
   a) Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan)
2. Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6):
   a) Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau
   b) Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau

Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Balangan. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2.50.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan
Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,50	75,38	72,54	73,16	76,91

Sumber: BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan 2024

Berdasarkan tabel tersebut, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung Mengalami banyak peningkatan. Karena jumlah partisifasi Angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan di tahun 2024, yang di dominasi oleh Fresh Graduate setingkat SLTA di Kabupaten Balangan.

Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan telah mengalami peningkatan menjadi 76,91 %. Artinya pada tahun 2024 banyak penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yang bekerja di berbagai sektor Formal dan Informal, hal ini tidak terlepas dari peran serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi dan keterampilan. Sisanya, 23,09 % bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga serta lansia.

j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab/Kota

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak

bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

TPAK Laki-laki di kabupaten Balangan sejak tahun 2020 sampai 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	85,48	85,31	83,47	87,11	86,86
Perempuan	67,45	65,55	61,66	59,07	66,81

Sumber: BPS RI, 2025

k. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID merupakan kumpulan variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah. Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mendapatkan skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 1.616 dengan predikat sangat inovatif, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 42,62 dengan predikat Inovatif. Namun pada tahun berikutnya hingga 2024 kembali meningkat menjadi 93,77 dengan predikat Sangat Inovatif. Adapun Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	1.616 (Sangat Inovatif)	42,62 (Inovatif)	57,57 (Inovatif)	63,95 (Sangat Inovatif)	93,77 (Sangat Inovatif)

Sumber: Kepmendagri Tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

l. Kinerja Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada tahun 2024, koperasi di Kabupaten Balangan berjumlah 113 buah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan koperasi baru dari tahun sebelumnya (2023) yang berjumlah 113 buah. Dengan demikian, maka koperasi aktif di Kabupaten Balangan pun berjumlah 72 buah koperasi atau setara dengan 63,71% dari total koperasi.

Tidak adanya peningkatan jumlah koperasi ini mencerminkan kurangnya pertumbuhan dalam sektor koperasi di Kabupaten Balangan. Meskipun demikian, perkembangan koperasi di Kabupaten Balangan masih menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Ada asumsi bahwa keberadaan koperasi belum dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, sehingga dampak positifnya masih dirasakan terbatas.

Di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 terdapat 10.737 pelaku usaha yang semuanya adalah pelaku Usaha Mikro. Hal ini didasarkan pada hasil pendataan UMKM dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan dimana kategori Usaha Mikro adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan hambatan yang umumnya dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro adalah akses permodalan yang terbatas serta jangkauan pemasaran yang belum maksimal.

Pada tahun 2024, jumlah Usaha Mikro di Balangan adalah 10.737 pelaku usaha. Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah Usaha Mikro adalah 10.904 pelaku. Dengan demikian ada terdapat Penurunan jumlah pelaku usaha sebanyak 167 pelaku usaha atau 1,5 %. Data ini bersumber dari Pendataan UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2024 dengan melibatkan peran dari para Aparatur Desa sebagai petugas pendata, adapun penurunan jumlah Usaha Mikro pada tahun ini dipengaruhi oleh karena mungkin adanya kenaikan inflasi, PPN dan kenaikan harga barang yang menyebabkan sebagian kecil pelaku usaha menutup usaha.

Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Balangan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Koperasi dan UKM Kabupaten Balangan
Tahun 2020–2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
11.1	Jumlah koperasi aktif (unit)	69	69	71	72	72
11.2	Jumlah koperasi (unit)	110	110	112	113	113
11.3	Persentase Koperasi aktif	62,73 %	62,73 %	63,39%	63,71%	63.71 %
11.4	Jumlah Usaha Mikro (unit)	11.217	8.209	11.030	10.904	10.737
11.5	Jumlah UMKM (unit)	11.335	8.209	11.030	10.904	10.737
11.6	Persentase usaha mikro dan kecil	98,95 %	100%	100%	100%	100 %

Sumber: DKUKMTT Kabupaten Balangan, 2024

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan salah satu arah penting pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing. Ekonomi hijau menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan lingkungan yang berkeadilan. Sedangkan ekonomi biru berorientasi pada pemanfaatan potensi sumber daya perairan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perlindungan ekosistem akuatik.

Penerapan ekonomi hijau dapat diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah dan limbah terpadu, serta konservasi lahan dan hutan. Upaya ini tidak hanya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong terciptanya lapangan kerja hijau (green jobs).

Sementara itu, penerapan ekonomi biru diarahkan pada pengelolaan sumber daya perairan secara optimal dan berkelanjutan. Program yang dapat dikembangkan antara lain penguatan budidaya perikanan, konservasi daerah aliran sungai, pemanfaatan sumber daya perairan untuk ketahanan pangan, serta pengembangan wisata berbasis ekosistem akuatik. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Integrasi konsep ekonomi hijau dan biru dalam dokumen perencanaan pembangunan menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai landasan utama pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial sehingga pembangunan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang.

2.1.3.4. Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk: 1. memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; 2. Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; dan 3. Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Balangan Tahun 2019 dan 2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, nilai Indeks Pembangunan TIK mencapai 4,47, meningkat menjadi 6,04 pada tahun 2022.

Walaupun meningkat dari tahun ke 2019 ke 2022, namun capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Balangan tahun 2022 berada pada posisi 3 terendah se Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tentu membutuhkan perhatian besar untuk pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, terutama untuk mewujudkan transformasi digital.

b. Layanan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi yang pesat dapat menyediakan segala kebutuhan akan informasi dan komunikasi bagi masyarakat melalui berbagai fasilitas seperti smartphone dan komputer/laptop. Penyediaan smartphone dengan harga terjangkau dengan berbagai jenis akses media informasi yang beragam disajikan sebagai pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengamati indikator-indikator yang menggambarkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Di Kabupaten Balangan tercatat bahwa penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel untuk keperluan komunikasi dalam tiga bulan terakhir telah mencapai angka 80,44% tahun 2024. Persentase tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 76,54%.

Kemudian, terkait dengan Proporsi rumah tangga dengan akses internet, ada sebanyak 68,44% penduduk Balangan dalam tiga bulan terakhir yang pernah melakukannya. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya 65,40%.

Akan tetapi, persentase yang masih cenderung sangat rendah/sedikit ditunjukkan oleh indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dalam tiga bulan terakhir yang hanya sekitar 8,42% dan 9,37% untuk masing-masing tahun 2023 dan 2024. Meskipun mengalami pengingkatan, namun hal tersebut masih mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Balangan masih awam atau belum terlalu mengenal dengan teknologi informasi yang berupa komputer tersebut, sehingga penggunaan menjadi jarang atau rendah.

Sementara Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Jumlah rumah tangga yang menggunakan TV datanya tidak dapat di ukur karena BPS tidak melakukan sensus untuk menyediakan data tersebut, hal tersebut karena tingkat komunikasi hanya di ukur dengan penggunaan internet.

Adapun permasalahan yang masih ada yaitu belum maksimalnya jangkauan akses jaringan di daerah blank spot, itu perlunya penambahan Tower Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 48 BTS se Kabupaten Balangan.Perkembangan capaian indikator urusan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kecamatan	53,26 %	45,58%	80,44%	76,54%	80,44%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	60,70 %	92,36%	92.36%	94.26%	-
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	83,35%	99,36%	46,96%	65,40%	68,44%
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	13,24%	15,74%	12,34%	8,42%	9,37%
5	Jumlah Rumah tangga menggunakan TV	61,29%	93,91%	93,97%	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Tahun 2024

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.451,22 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 3.425,04. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55.
Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.451,22	2.516,05	2 809,28	3.088,17	3.425,04

Sumber: BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.

Berdasarkan tabel dibawah, dijelaskan bahwa perkembangan Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Balangan sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan, dari yang semula 4.538,29 pada tahun 2020 menjadi 13.124,52 di tahun 2024.

Tabel 2.56.
Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	4.538,29	6.034,18	12.817,81	13.124,55	13.124,52

Sumber: BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

c. Kinerja Penanaman Modal

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 sebanyak 44 pelaku usaha (sumber NSWI per Januari 2022) dengan nilai rencana investasi sebesar Rp. 149,736,112.210. Tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana pada tahun 2021 jumlah sebanyak 37 investor berskala nasional (PMDN). Peningkatan ini disebabkan berakhirnya masa pandemi COVID 19 mempengaruhi kebangkitan pelaku usaha, sehingga investasi menjadi meningkat, Walaupun masih banyak para pelaku usaha masih enggan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini dikarenakan pera pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak yang akan dikenakan kepada mereka. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya.

Tabel 2.57.
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Balangan
Tahun 2020–2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	89	237	1.094	1.799	2.156
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	1,651,394,241,459	21,722,200,000	149.736.112.210	183,890,000,000	349.524.876.359,-
12.3	Rasio daya serap tenagakerja	35.66 : 1	37,01 : 1	3,09 : 1	1,34 : 1	3,09 : 1
12.4	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyarrupiah)	216,466,328,218	115,122,788,614	288,478,592,007	67.625.480.457	165.643.876.359
12.5	Kenaikan /penurunan Nilai RealisasiPMDN (persentase)	673.41%	- 46,82 %	351 %	16,76%	90.07 %

Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.58.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024

Tahun	Uraian Ijin Prinsip	PMDN	PMA	Total
2020	NIB	112	-	112
2021	NIB	237	-	237

Tahun	Uraian Ijin Prinsip	PMDN	PMA	Total
2022	NIB	1.094	1	1.121
2023	NIB	1.799	-	1.799
2024	NIB	2.156	-	2.156

Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2025

Nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022 sebesar Rp. 403.601.380.621,-, jika dibandingkan dengan tahun 2021 Rp. 115,122,788,614,-, sehingga tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 351 %. Dari data pada tabel tersebut di atas, nilai realisasi sangat dinamis dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2018, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 356,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal sebaliknya terjadi pada tahun 2019 dimana terjadi penurunan sebesar 34,73% dari tahun 2018. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan realisasi investasi yang sangat signifikan, yaitu 216,466,00 miliar atau terdapat kenaikan sebanyak 673,41% dari tahun 2019 dan pada Tahun 2021 nilai realisasi investasi turun menjadi Rp. 115,122,788,614. Peningkatan kembali terjadi pada Tahun 2022 disebabkan karena beberapa perusahaan yang pada tahun sebelumnya masih pada tahap kontruksi dan di tahun 2022 sudah memasuki tahap produksi sehingga memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, beberapa perusahaan tambang batubara mengadakan pembelian lahan untuk kegiatan produksi baru sehingga sangat berpengaruh pada peningkatan nilai investasi.

Tabel 2.59.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2020	67	120,378,000,000	29	216,466,328,218
2021	237	226,317,465,000	79	115,122,788,614
2022	1.094	443,423,896,338	128	403.601.380.621
2023	1.799	441,085,000,000	602	471,226,861,079
2024	2156	17.883.874.174.994		**724.110.688.336**

Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek Investasi PMDA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Tabel 2.60.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Balangan
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.174	3.442	4.317	4.034	4.304
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	89	93	93	374	392
3	Rasio daya serap tenaga kerja	35,66 : 1	37,01 : 1	46,42 : 1	10,79 : 1	10,97 : 1

Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

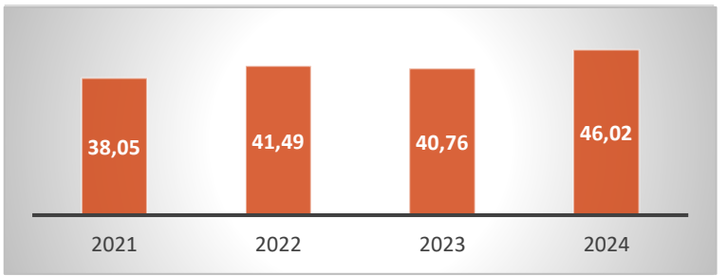
Pada tahun 2024 Jumlah perusahaan PMDN yang tercatat di Kabupaten Balangan yang termasuk dalam Wajib Lapor ketenagakerjaan adalah sebanyak 374 Perusahaan. Pada 374 Perusahaan tersebut terserap tenaga kerja sebanyak 4.304 orang. Berdasarkan kondisi ini diketahui rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2024 adalah sebesar 10,97 : 1. Dengan tingkat rasio daya serap tenaga kerja tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Balangan meningkat dari tahun sebelumnya.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur Publik

Indeks Infrastruktur Publik merupakan indikator yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir untuk mengukur kinerja pelayanan terkait infrastruktur. Indeks Infrastruktur Publik hingga tahun 2024 mencapai 46,02. Ini berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 40,76.

Tingkat capaian kinerja indeks infrastruktur publik pada tahun 2024 sebesar 100,63% dari target 45,73 dan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPJMD. Capaian kinerja indeks infrastruktur publik didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah akses jalan kabupaten dalam kondisi mantap, jembatan dalam kondisi mantap, terbangunnya infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang menjadi kewenangan daerah, tersedianya jaringan daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, tersedianya bangunan gedung/publik dalam kondisi baik dan tersedianya luasan RTH.

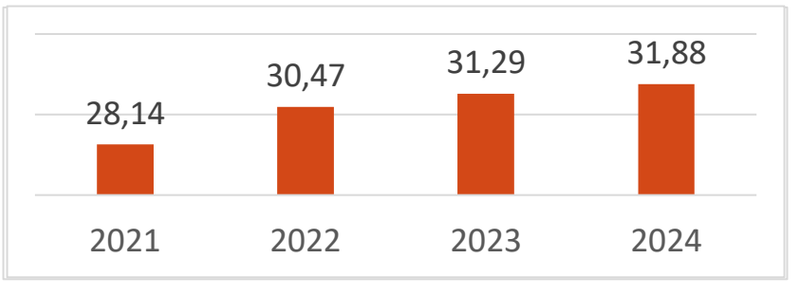


Gambar 2.38.
Indeks Infrastruktur Publik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024
Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024

b. Indeks Infrastruktur Permukiman

Indeks Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024 mencapai 31,88. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Indeks infrastruktur permukiman pada tahun 2023 yang hanya mencapai 31,29. Capaian kinerja indeks infrastruktur permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak, rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik, cakupan ketersediaan rumah layak huni, perumahan yang sudah dilengkapi PSU, luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani. Pada akhir tahun 2023 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM, dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 39.977 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Balangan sebanyak 45.540 KK.

Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air limbah domestik adalah sekitar 98,75%. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Balangan sebesar 38.423 unit sedangkan jumlah rumah seluruh kabupaten yang ada di Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU sebesar 35.425 unit dan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 luas permukiman kumuh yang telah tertangani sebesar 40,40 ha dari total seluruh luas permukiman kumuh yang ada sebesar 47,65 Ha.



Gambar 2.39.
Indeks Infrastruktur Permukiman Kabupaten Balangan
Tahun 2021-2024
Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024

c. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak.

d. Persentase Desa Mandiri

Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.

Persentase peningkatan status desa mandiri di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,79% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 100%. Lalu pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 16,79% dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 92,85%.

Tabel 2.61.
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan status desa mandiri	0,00	0,79	100,00	16,79	92,85

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa

e. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat mencapai taraf sejahtera dan mandiri dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan, berdasarkan data IDM tahun 2024 terlihat bahwa Kabupaten Balangan berada pada urutan keempat tertinggi dan ranking 79 nasional. Balangan berada di bawah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu.

Tabel 2.62.
Peringkat Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2024

Peringkat Nasional	Kabupaten	Nilai IDM	Status
44	TABALONG	0,8349	MANDIRI
57	HULU SUNGAI TENGAH	0,8181	MANDIRI
71	TANAH BUMBU	0,8099	MAJU
79	**BALANGAN**	**0,8049**	**MAJU**
92	TAPIN	0,7970	MAJU
98	TANAH LAUT	0,7938	MAJU
103	BARITO KUALA	0,7912	MAJU
113	HULU SUNGAI UTARA	0,7867	MAJU
128	HULU SUNGAI SELATAN	0,7799	MAJU
140	BANJAR	0,7743	MAJU
203	KOTABARU	0,7400	MAJU

Sumber: Dinsos P3A PMD, 2022

Pada lingkup Kabupaten Balangan sendiri dari nilai indeks yang sudah dicapai sebesar 0,7293, terdapat desa dengan status mandiri 7 desa, maju 96 desa, berkembang 50 desa, tertinggal 0, dan sangat tertinggal 1 desa. Masih terdapat desa yang sangat tertinggal yaitu Desa Wonorejo. Saat

ini secara administrasi kedudukan Desa Wonorejo masih ada di Kabupaten Balangan dan penggabungannya dengan Desa tetangga dalam hal ini Desa Sumber Rejeki masih dalam proses, karena secara populasi penduduk desa tersebut tidak memenuhi syarat adanya wilayah administrasi. Beberapa persyaratan yang masih dalam tahapan untuk dilengkapi proses tersebut salah satunya penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi dasar agar penggabungan desa tersebut dapat segera terlaksana.

f. Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun 2023 SK jalan Kabupaten mengalami perubahan sehingga panjang jalan Kabupaten Balangan adalah sebesar 567,076 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Pada tahun 2024 panjang jalan dalam kondisi mantap 369,655 km atau 65,19% yang kondisinya mantap, sedangkan 16,080 km atau 2,84% kondisinya rusak ringan dan 181,341 km atau 31,98% dalam kondisi rusak berat.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dimana pada Tahun 2023 sebesar 0,47 dan meningkat menjadi 049, di tahun 2024 Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Pada tahun 2024, drainase berkondisi baik tercatat sebesar 90%. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. Kabupaten Balangan yang memiliki sejumlah areal persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2024, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 34,55%.

Data yang tertera di atas adalah update data inventarisasi air minum dan sanitasi Desember TA 2022. Untuk data update tahun 2023 belum dilaksanakan. Data update akan dilakukan di triwulan 1 (paling awal dimulai bulan Maret 2023 berkolaborasi dengan pihak konsultan dan sanitarian dari Dinas Kesehatan) untuk pendataan ke lapangan meliputi Pemetaan Data Esensial Rumah Tangga yg Terlayani Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Air Limbah di Kab Balangan Serta Pemetaan Essensial Rumah Tangga Yang Masih BABS di Kab. Balangan, agar mendapatkan data terupdate yang lebih akurat.

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kabupaten Balangan	672,253	672,253	672,253	567,076	567,076
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,417	0,202	0,34	0,47	0,49
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0050	0,0051	0,20	0,24	0,24
4	Kondisi Jalan (km) a. Baik b. Sedang c. Rusak Ringan d. Rusak Berat	 280,114 44,608 74,390 273,141	 135,760 302,860 89,630 144,003	 229,839 129,628 26,289 286,497	 286,344 58,079 16,890 206,083	 275,108 94,547 16,080 181,341
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	48,30	65,24	53,47	60,70	65,19
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	41,67	20,19	27,56	46,59	48,51
7	Persentase irigasi kabupaten dlm kondisi baik	19,10	23,43	30,43	33,28	34,55
8	Rasio Jaringan Irigasi	55.88	58,16	48,79	83,61	84,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2024

Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan RTH publik. Luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan Kabupaten Balangan adalah 2.650 Ha dengan kebutuhan RTH publik adalah sebesar 529,978 Ha.

Sampai dengan tahun 2023, luasan RTH Publik yang dikelola baru sebesar 103,667 Ha atau 19,59%. Dengan penambahan luas RTH pada tahun 2019 sebesar 1,7 Ha. Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus

ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin. Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Balangan untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi. Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global.

Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Balangan No. 24 Tahun 2013-2032 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%.

Tabel 2.64.
Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas	0.039112	0.039112	0.0392	0,0392	
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas	19,59%	19,59%	19,59%	19,59%	
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan	85 %	85 %	85%	85%	85%
4	Ketaatan terhadap RTRW	96 %	96%	96%	96%	96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

g. Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada pada tahun 2024 sebesar 97,14%, angka ini bertambah dari tahun 2023 yang hanya 95,02%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2022 sebesar 93,91%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh

di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2022 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Untuk Kawasan kumuh ini menggunakan SK terbaru yang berjumlah sebesar 12,35 Ha dimana tahun 2022 luasan Kawasan kumuh di targetkan sebesar 2,1 ha atau sebesar 78,49% dari total Kawasan kumuh yang sesuai SK baru dan SK lama (35,30 + 12,35 = 47,65 ha) yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2022 sebesar 35,30 + 2,1 ha = 37,40 ha atau sebesar 78,49%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh kembali.

Tabel 2.65.
Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	90,27	93,757	93,91	95,02	97,14
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	85,89	92,68	93,74	94,34	95,06
3	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	96,37	74,08	78,49	84,78	94,38
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan(%)	0,001	0,000	0,0001	0,0001	0,0001
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	74.75	86,63	86,90	87,61	90%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2024 sebesar 97,14%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2024 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Untuk Kawasan kumuh ini menggunakan SK terbaru yang berjumlah sebesar 12,35 Ha dimana tahun 2024 luasan Kawasan kumuh di targetkan sebesar 3,3 ha atau sebesar 91,71% dari total Kawasan kumuh yang sesuai SK baru dan SK lama (35,30 + 12,35 = 47,65 ha) yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2024 sebesar 35,30 + 9,67 ha = 44,97 ha atau sebesar 94,38%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman

kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali.

h. Kinerja Perhubungan

Pada urusan Perhubungan, hal yang masih menjadi kendala di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah masih banyaknya Pelanggaran ODOL (*Over Dimension Over Load*). ODOL adalah kondisi dimana kendaraan angkutan melebihi batas dimensi dan beban yang ditentukan, dapat menyebabkan beberapa masalah serius di sektor perhubungan. Kendaraan ODOL seringkali menimbulkan kerusakan yang lebih cepat pada jalan raya karena beban yang melebihi kapasitas. Hal ini bisa memperburuk kondisi jalan dan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Kurangnya Sarana Angkutan Masyarakat dan sarana angkutan yang memadai dapat berdampak pada mobilitas masyarakat di Kabupaten Balangan, dengan beberapa isu sebagai berikut masyarakat terlalu bergantung pada kendaraan pribadi, karena angkutan umum yang terbatas, banyak warga yang terpaksa menggunakan kendaraan pribadi serta tidak semua daerah atau desa di Kabupaten Balangan memiliki akses mudah ke angkutan umum. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah terpencil atau jauh dari pusat kota.

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sudah melaksanakan penambahan Angkutan Masyarakat sebanyak 5 buah, 2 buah untuk angkutan pelajar dan 3 buah untuk angkutan Masyarakat Gratis. Jadi total penyelenggaran angkutan yang sudah ada diKabupaten Balangan adalah sebanyak 14 unit, dan pada Tahun 2025 juga sudah menganggarkan penambahan angkutan sebanyak 5 unit.

Kemauan menjadikan Balangan lebih terang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas transportasi. Penyediaan perlengkapan jalan yang tepat akan mempermudah pengendara dalam mengenali peraturan dan kondisi jalan, meningkatkan kewaspadaan, serta mengurangi potensi kecelakaan. Dengan adanya perlengkapan yang memadai, pengendara dapat lebih terarah dan aman dalam perjalanan, terutama pada malam hari atau di kondisi cuaca buruk. Berdasarkan hasil kajian Masterplan mengenai PJU diKabupaten Balangan pada Tahun 2024 diketahui bahwa ketersediaan PJU di Kabupaten Balangan masih 58%.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki infrastruktur jalan di daerah. Kurangnya penerangan jalan memiliki dampak yang besar terhadap keselamatan, mobilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih baik, peningkatan anggaran, serta penggunaan teknologi yang efisien sangat penting untuk memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses ke penerangan jalan yang memadai. Adapun perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah uji kir angkutan umum	1.423	2.886	1.475	1.568	1.560
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,12	0,118	0,29	0,32	0,38
3	Pemasangan Rambu-rambu	42.84%	42.84%	19,48%	24,25%	45%
4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	130.872	29.669	21.470	16.820	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, 2024

Hal-hal lain yg menyangkut urusan perhubungan bisa dilihat dari analisa sebagai berikut:

a) Pada tahun 2024 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR mengalami penurunan dari tahun 2023, karena pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. UU ini juga menghadirkan inovasi-inovasi baru, seperti: Fleksibilitas alokasi dana, Penguatan DAK untuk prioritas nasional, Redistribusi yang lebih adil untuk daerah tertinggal, Pengawasan yang lebih ketat. Meskipun pembarayan uji KIR (Kendaraan Uji Berkala) yang gratis ternyata kebijakan ini malah dapat menurunkan minat masyarakat untuk melakukan uji KIR kendaraan diKabupaten Balangan disebabkan kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Uji KIR Minimnya Sosialisasi dan Edukasi, Masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya uji KIR kendaraan untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara. Banyak masyarakat yang mungkin tidak menyadari bahwa uji KIR juga berfungsi untuk mengurangi potensi kecelakaan, mengurangi polusi udara, dan menjaga

keselamatan pengendara serta pengguna jalan lainnya.

b) Layanan angkutan pelajar pada tahun 2024 mencapai target dimana angkutan pelajar gratis yang melayani desa yang menjadi lintasan trayek pada tahun 2024 sebanyak 57 desa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 57 desa perlintasan.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio PAD terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

b. Tingkat Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Meskipun inflasi merugikan, tetapi ada sejumlah pihak yang diuntungkan. Sebut saja eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan, dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, importir atau pembeli, kreditur, masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Tabel 2.67.
Perkembangan Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kalsel	1.68	2.55	6.99	2,43	1,95
Kotabaru	1.44	2.68	8.65	3,81	0,26
Tanjung	2.05	2.43	5.01	2,39	2,24
Banjarmasin	1.67	2.54	6.98	2,28	1,98
Tanah Laut	-	-	-	-	2,9
Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	1,11

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2025

Melihat pada Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan secara tahunan tahun 2024 di angka 1,95. Daerah di Kalimantan Selatan diwakili dan diukur oleh lima kab/kota yaitu kota Tanjung, Banjarmasin dan Kotabaru dan dua tambahan baru yaitu Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah. Wilayah Balangan sendiri diwakili oleh Kota Tanjung di Kabupaten Tabalong per Desember 2024 mengalami inflasi di angka 2,24.

Untuk wilayah Banua Enam yang diwakili Kota Tanjung dan Hulu Sungai Tengah dengan angka yang masih relatif aman. Terjadinya Inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti beras, tarif air minum PAM, bensin, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, emas perhiasan, angkutan antar kota, mie kering instan, telur ayam ras, dan solar. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi diantaranya minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, ikan layang atau ikan benggol, cabai merah, ikan baung, kacang panjang, daster, dan ikan patin. intervensi dari pemerintah daerah dan provinsi baik berupa pasar murah hingga subsidi sejumlah bahan pokok menjadi salah satu faktor penurunan angka inflasi.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan

pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Indeks SPBE. Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengoptimalkan aspek Perencanaan Strategis SPBE dengan memenuhi 4 indikator, Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu meningkatkan kematangan layanan pusat data, layanan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan, penyelenggara SPBE dengan meningkatkan kolaborasi antar Daerah dan Internal, dan pengoptimalan Penerapan Manajemen SPBE. Aspek Teknologi Informasi dan Penyelenggara SPBE yang tingkat kematangannya masih rendah, ditahun 2024 telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga pada domain layanan Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami kenaikan tingkat kematangan. sehingga pada tahun 2023 dengan Nilai Indeks SPBE 2,69 meningkat di tahun 2024 menjadi 3,34 dengan predikat Baik.

Tabel 2.68.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,77	2,44	2,69	3,34

Sumber: Kemenpan RB, 2023 dan Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2024

c. Survey Penilaian Integritas

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).

d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sistem penilaian dan pemantauan yang digunakan pemerintah untuk mengukur kemajuan dan

kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. IRB bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya reformasi birokrasi telah dilakukan dan hasilnya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Balangan sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 53,80 dengan kategori CC, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 83,06 dengan predikat A. Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 beserta dengan komponen penghitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Komponen Pengungkit						
	1. Pemenuhan	20,00	8,63	9,47	10,45		
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,43	5,58	6,20		
	III. Reform	30,00	9,67	10,24	13,43		
	Total Komponen Pengungkit	60,00	23,73	25,29	30,08	57,81	72,41
B	Komponen Hasil						
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,58	7,62	7,69		
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,85	8,83	8,00		
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,15	7,78	8,54		
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,48	5,11	5,72		
Total Komponen Hasil		40,00	30,07	29,34	29,95	12,20	10,65
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**53,80**	**54,63**	**60,03**	**70,01**	**83,06**

Sumber: Kemenpan RB, 2023 dan Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2024

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.70.
Hasil Antara Area Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Sumber Data
1.	ASN yang Profesional	0-100	67,05	52,21			Badan Kepegawaian Nasional
2.	Implementasi SPBE	0-5	1,77	2,44	2,69	3,34	Kementerian PANRB
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	63,93	57,50			Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,56	3,52	4,01	4,29	Kementerian PANRB

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Sumber Data
5.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3			Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	3			Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	70,30	80,78			Ombudsman Republik Indonesia
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	51,92	52,26			Arsip Nasional Republik Indonesia

Sumber: Berbagai Sumber, 2023

e. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah 4,29 dengan capaian sebesar 95,12 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang hanya 4,01.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian pelayanan publik diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.71.
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Balangan
Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,56	3,52	4,01	4,29

Sumber: Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2025

Realisasi indeks pelayanan publik 4,29 dihitung berdasarkan jumlah akumulasi SKPD yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik. Hampir setiap tahun lokus penilaian mengalami perubahan yang sudah ditentukan oleh Kementerian PAN RB. Mungkin memiliki makna bahwa seluruh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib menjadi standar unit pelayanan sehingga siapapun yang ditetapkan menjadi lokus, haruslah siap memenuhi data dukung yang ditetapkan dalam juknis penilaian. Pada tahun 2024 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD Lokus mulai dari pemenuhan dokumen 14 Standar pelayanan sampai pada pemenuhan video pelayanan publik yang akan disajikan saat penilaian atau desk dengan tim penilai pusat. Tahun 2024 yang menjadi lokus adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan RSUD.

Berbanding lurus dengan penilaian ombudsman RI akan kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Balangan juga berada pada zona hijau atau sangat tinggi dengan nilai 92. Penilaian kepatuhan ini juga terhadap sampel lokus yang sudah ditentukan oleh Ombudsman RI. Terkadang ada unit kerja yang menjadi lokus IPP juga menjadi lokus kepatuhan ombudsman. Untuk itu pada tahun 2025 ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan cara melatih dan membina SDM pelaksana pengaduan yang akan dijadikan pioneer pembinaan kepada SKPD lain dan mengikutsertakan dalam TFT pelayanan publik. Perwakilan SDM itu terdiri atas narahubung, petugas front office dan petugas pengelola pengaduan. Sedangkan SKPD yang ditunjuk sebagai sampel pioneer adalah RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencattan Sipil.

f. Nilai SAKIP

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Balangan tahun 2024 berdasarkan Surat Nomor: B/411/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 adalah 72,09 (Kategori BB). Hasil capaian realisasi target nilai SAKIP 72,09 ini memang belum mencapai target nilai SAKIP yang diperjanjikan yaitu 74,40 (Kategori BB), akan tetapi hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2024 yaitu 96,90% dibandingkan dengan hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 70,17 (Kategori BB) dengan capaian sebesar

96,92% mengalami kenaikan capaian sebesar 1,92% dan telah memenuhi kategori penilaian (BB). Dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian nilai SAKIP ini masih belum mencapai target dan masih kekurangan nilai sebesar 6 poin.

Tabel 2.72.
SAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	66,04 (B)	66,67 (B)	67,04 (B)	70,17 (BB)	72,09 (BB)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2023 dan Lakip Tahun 2024

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Balangan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik dengan cara melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Tabel 2.73.
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IKM	82,53	81,05	84,07	85,07	87,07

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2023 dan LKIP 2024

Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah terdapat survei mengenai IKM. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 telah mencapai nilai indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 87,07. Terkait IKM tersebut didapatkan dari rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di 45 SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dari 45 SKPD atau Unit Kerja tersebut didapatkan nilai IKM terendah pada Puskesmas Tanah

Habang sebesar 81,42, sedangkan nilai IKM tertinggi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 92,53 dengan kualitas mutu A dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini didapat dari hasil kuesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan di 45 SKPD atau Unit Kerja dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB no.14 Tahun 2017. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga tetap dapat bertahan dengan kualitas mutu B antara lain memperbaiki fasilitas dan sarana pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi pelayanan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan arahan dan dorongan yang diberikan kepada unit penyelenggara pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

h. Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Balangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akutansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prisip akutansi yang berlaku dan konsisten. Kedepannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 10 (sepuluh) tahun berturut-turut.

Tabel 2.74.
Opini BPK Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2025

i. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka mengetahui tingkat maturitas penyelengggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan sub unsur SPIP. Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Balangan berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "3,6933". Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Level tersebut merupakan hasil QA *(Quality Assurance)* atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

Tabel 2.75.
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2020–2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Balangan, 2024

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Definisi Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya yaitu seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b. Persentase Penegakan PERDA

Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Balangan sejak tahun 2020 sampai 2024 konsisten di angka 100 persen. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.76.
Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2024

c. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks: 1. IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi) 2. IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan 3. IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1. Aspek Kebebasan (7 indikator); 2. Aspek Kesetaraan (7 indikator); 3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).

d. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator ketentraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2023 terdapat 20 kasus yang masuk dan 20 kasus yang tertangani dengan persentase 100%. Selanjutnya, di tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak satu kasus menjadi 18 Kasus Pelanggaran yang masuk dan yang 18 Kasus Pelanggaran yang tertangani terdiri dari pelanggaran PP No 10 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaran Administrasi kependudukan sebanyak 15 Kasus yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Paringin

Selatan Desa Lingsir 4 Kasus, Kecamatan Paringin Desa Sungai Ketapi 5 kasus, Kelurahan Paringin Kota 1 Kasus Desa Dahai 2 Kasus Kecamatan Batu Mandi Desa Mampari sebanyak 3 kasus dan Pelanggaran Perda No 5 Tahun 2066 Tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdiri dari 7 kasus yang tersebar pada 2 Kecamatan Yaitu kecamatan Paringin Desa sungai ketapi 3 Kasus Desa Dahai 1 Kasus dan Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir sebanyak 3 Kasus. Penurunan Angka pelanggran K3 tidak terlepas dari Patroli pengamanan wilayah secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh pihak jajaran Satpol PP Kabupaten Balangan dan juga Sosialisasi tentang Perda dan Perkada pada Daerah Daerah rawan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel 2.77.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2.355	2.338	2.338	2.355	2.355
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	29 (100%)	23 (100%)	22	20 (100)	18 (100)
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	61 Desa	10 Desa	20 Desa	154 Desa	154 Desa
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2024

Indikator ketentraman dan ketertiban umum selain terkait disiplin Perda maupun perlindungan masyarakat dalam ranah ketaatan ketertiban umum, terkait juga dengan kebencanaan. Tahun 2021 untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terdapat 29 kejadian. Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian, dan 2019 160 kejadian. Perkembangan pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat angka penurunan kejadian, hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan membakar lahan di tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali terdapat peningkatan sejumlah 10 desa, kejadian bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2022 didominasi oleh faktor human error. Respon Time Rate selama 15 menit dapat dijangkau didukung beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, lokasi yang mudah dijangkau, dan adanya akses pendukung menuju tempat

kejadian. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) manajemen pada wilayah kebakaran pada tahun 2019 hingga 2022 selama 15 menit dari lokasi kantor menuju lokasi bencana kebakaran. Pada tahun 2022 waktu tanggap juga masih dapat dipenuhi selama 15 menit dikarenakan masih terjangkaunya lokasi kejadian dengan *basecamp* Damkar.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

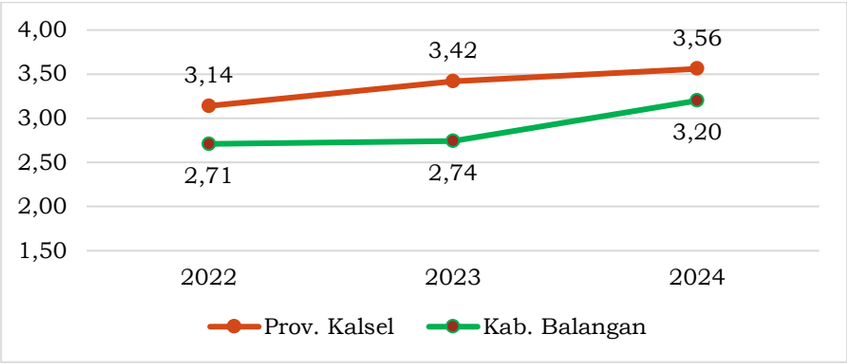
a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pada tahun 2022, IDSD Kabupaten Balangan berada pada peringkat ke-8 (delapan) di Provinsi Kalimantan Selatan dari 11 daerah yang diukur, dengan skor 2,71. Nilai ini masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dengan skor masing-masing 3,14 dan 3,26. Nilai IDSD Balangan meningkat pada tahun 2023 mencapai 2,74. Walaupun meningkat, namun IDSD Balangan paling rendah dari 11 daerah yang diukur di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penilaian BRIN, komponen yang mempengaruhi rendahnya nilai IDSD Balangan yakni pada Pilar 7, Pilar 9, Pilar 11, dan Pilar 12. Pilar 7: pasar produk, menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Pilar 9: Sistem keuangan, terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksa nanya simpan pinjam secara baik. Pilar 11: Dinamisme bisnis, menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Sementara Pilar 12: Kapabilitas inovasi, memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah.

Selanjutnya pada tahun 2024 Nilai IDSD di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan kembali menjadi 3,20. Meski terjadi peningkatan nilai IDSD, namun capaian IDSD di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 masih paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 3,56.

Perkembangan IDSD Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2022 sampai 2024 disajikan pada grafik di bawah.



Gambar 2.40.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024
Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Balangan periode 2020–2024 menunjukkan tren perbaikan di sebagian besar sektor, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator tertentu. Hal ini mencerminkan adanya upaya intensif pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, dinamika capaian

antar sektor masih menunjukkan disparitas, sehingga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan lanjutan.

Pada awal periode, khususnya tahun 2020, beberapa indikator mengalami keterbatasan capaian yang erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19. Namun, dalam empat tahun berikutnya terjadi percepatan pemulihan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya akses layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang semakin merata.

Pada indikator dengan tren meningkat, sektor pendidikan menjadi salah satu pencapaian yang menonjol. Tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun yang bersekolah meningkat tajam dari 38,28% pada 2020 menjadi 99,40% pada 2024. Perkembangan serupa juga terlihat pada indikator tingkat partisipasi jenjang lain yang relatif konsisten berada di atas 90%. Hal ini menandakan keberhasilan kebijakan wajib belajar dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Balangan. Pada sektor kesehatan, peningkatan signifikan terjadi pada rasio daya tampung rumah sakit rujukan, dari 0,103 pada 2020 menjadi 0,938 pada 2024, menunjukkan perbaikan kapasitas layanan kesehatan rujukan. Selain itu, di bidang infrastruktur, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang berfungsi baik meningkat dari 55,87% menjadi 84,89%, menandakan penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Sementara itu, terdapat pula indikator yang menunjukkan tren menurun sepanjang periode. Misalnya, jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurun dari 9.723 unit pada 2020 menjadi hanya 2,85 unit pada 2024. Meskipun dikategorikan menurun, indikator ini sejatinya mencerminkan perbaikan kondisi perumahan masyarakat dan keberhasilan program peningkatan kualitas hunian. Hal serupa terlihat pada indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) yang turun dari 2,35 menjadi 2,31, menunjukkan adanya pengendalian pertumbuhan penduduk. Adapun penurunan rasio pegawai fungsional dari 51,61% menjadi 24,85% memperlihatkan perbaikan dalam struktur aparatur sipil negara melalui peningkatan jumlah pegawai dengan kompetensi fungsional.

Lebih lanjut dapat dijelaskan pada sektor pendidikan, indikator partisipasi sekolah dari jenjang anak usia dini hingga menengah mengalami lonjakan yang konsisten. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerataan akses pendidikan dan dukungan kebijakan wajib belajar yang

diimplementasikan pemerintah daerah. Demikian pula, pada sektor kesehatan capaian indikator pelayanan ibu, anak, dan balita relatif stabil pada tingkat tinggi di atas 90%, yang menandakan kualitas layanan dasar kesehatan terjaga dengan baik. Meski demikian, pada kelompok usia produktif dan lanjut usia masih terlihat adanya fluktuasi yang perlu menjadi perhatian.

Dalam bidang infrastruktur dan tata ruang, tren capaian memperlihatkan perbaikan dari tahun ke tahun, khususnya pada akses jalan, sanitasi, dan layanan air bersih. Perkembangan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Sementara itu, pada sektor sosial dan ketenagakerjaan, terdapat upaya nyata dalam memperkuat perlindungan kelompok rentan serta memperluas kesempatan kerja, meskipun tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor formal masih perlu ditangani.

Di sisi ekonomi, sektor pertanian memperlihatkan capaian yang stabil dan mendukung ketahanan pangan daerah. Sektor perdagangan, perindustrian, serta UMKM juga menunjukkan arah pertumbuhan positif meski dengan laju yang bertahap. Selain itu, sektor lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan memperlihatkan capaian yang semakin baik, mencerminkan adanya perhatian terhadap aspek keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Data/informasi IKK Pemerintahan di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	38,29	83,16	88,48	94,21	99,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	90,09	93,40	91,42	93,55	95,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	72,86	136,84	81,84	91,19	91,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	80,25	68,36	90,85	93,25	98,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	0,10	0,10	0,88	0,88	0,94	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	82,17	90,11	92,70	91,43	91,43	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	96,78	96,45	91,36	95,96	95,96	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,94	92,76	95,03	97,74	97,74	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	97,81	100,00	99,52	100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	15,01	57,97	99,63	100,00	98,62	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	9,30	15,19	71,09	98,62	72,09	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	93,79	94,47	98,92	72,02	99,98	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	29,96	26,30	79,49	99,98	92,54	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	49,64	29,33	87,55	92,54	92,93	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	92,93	100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	30,75	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00	88,42	92,43	100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	n/a	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	n/a	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	55,88	55,88	60,48	60,48	84,89	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	78,65	81,72	84,05	84,05	89,13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	91,88	92,61	98,85	98,85	98,85	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	48,30	65,25	72,62	72,62	65,18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	100,00	80,83	60,70	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	79,17	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	0 (tidak ada relokasi)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	70,09	100,00	78,53	84,78	94,37	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	9,72	6,25	6,09	4,98	2,85	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	5,26	92,45	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi pamong Praja
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi pamong Praja
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	132.103,00	152.384,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana daerah
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	132.103,00	152.384,00	100,00	100,00	2,35	Badan Penanggulangan Bencana daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0,00	10.400,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana daerah
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana daerah
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,00	14,30	10,25	6,00	6,80	Badan Penanggulangan Bencana daerah
	Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	24,75	11,46	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	50,66	56,08	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa
	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0,82	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	6,95	100,00	41,46	65,42	3,49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	9,90	2.618,04	14,60	15,21	14,377	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	28,57	39,79	67,74	70,00	21,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	64,26	48,48	80,35	63,27	61,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	IndekS	12,35	18,04	12,13	22,97	31,01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	0,02	0,03	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
								dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	15,83	17,59	12,11	11,87	5,84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa
	Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	0,24	200,58	140,76	97,51	144,64	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	45,59	100,00	100,00	0,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0,00	28,95	34,67	8,07	81,60	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	65,93	63,25	67,83	68,24	70,80	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	71,74	75,18	93,88	92,42	91,03	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	Persen	47,37	100,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota							
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	98,23	98,01	99,00	99,53	99,24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	23,50	55,37	64,23	67,80	70,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	93,46	95,73	97,50	98,09	98,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0,00	3,33	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	50,00	92,86	100,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0,00	0,79	100,00	16,79	92,85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka Kelahiran Total	2,35	2,35	2,36	2,31	2,31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	81,21	81,73	76,68	83,23	78,39	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,41	5,97	12,77	4,66	3,86	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio Konektivitas	25,00	17,00	0,17	0,17	1,00	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio Volume/ Capacity	28,00	0,29	0,32	0,35	0,38	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	19,05	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	3,06	3,05	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	19,09	19,09	100,00	100,00	11,11	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	1,05	0,41	100,00	100,00	2,44	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	673,42	-46,82	250,58	16,76	52,62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
								Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,03	0,05	5,00	4,78	5,21	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,46	16,64	16,64	16,06	24,31	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	9,00	23,00	167,00	22,00	23,00	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	Statistik							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	2,38	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	2,38	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0,63	100,00	3.680,00	28,53	52,71	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	61,54	69,23	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	77,55	82,48	51,76	60,22	79,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	1,00	1,00	49,47	67,73	94,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	Persen	76,70	41,00	100,00	17,35	87,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)							
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	2.599,67	1,00	100,00	16,74	69,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Persen	1.837,01	1.814,00	89,36	100,33	100,00	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan
	Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	68,39	-85,71	1.900,00	35,00	-55,56	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	68,39	60,92	23,88	13,71	412,11	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	100,00	100,00	10,10	7,78	35,94	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	6.337.520 .975,00	41,73	0,23	0,24	0,25	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	6.337.520 .975,00	172.895.5 38,00	4,18	3,82	5,19	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Ton Per Hektar Per Tahun	448,99	523,66	577,89	5,84	549,53	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Persen	41,39	23,83	-9,49	10,39	-9,25	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan
	Perdagangan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	5,64	8,42	45,57	75,67	100,00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	0,16	111,08	83,72	39,26	33,04	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	1,10	27,82	100,00	100,00	34,87	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	5,81	1,60	1,36	1,68	1,98	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0,00	1,00	3,00	3,00	37,41	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0,00	66,67	100,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0,00	100,00	100,00	11,43	0,00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	0,00	1,00	50,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	4,39	9,64	9,07	16,80	3,23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Rasio PAD	Persen	1,51	3,04	5,20	4,97	4,18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,00	3,00	3,02	3,00	3,00	Inspektorat
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	Persen	61,20	65,49	58,27	53,43	15,03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 - 10 Opini WTP	10,00	10,00	10,00	WTP	10,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	1,28	100,00	0,95	0 (tidak kontrak dengan nilai besar)	UKPBJ
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	0,75	62,95	72,82	24,91	24,14	UKPBJ
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	24,24	23,17	68,66	69,25	66,80	UKPBJ
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	0,00	13,59	32,97	206,39	109,51	UKPBJ

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	263,64	74,24	79,07	80,40	81,85	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	51,61	31,51	27,32	26,98	24,85	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,84	14,29	14,82	22,35	77,00	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
	Manajemen Keuangan							
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,00	3,86	11,50	3,98	6,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	0,00	78,57	22,45	82,12	108,26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Manajemen Aset	Persen	4,00	4,00	4,00	Ada	Ada	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	27,66	9,52	12,05	31,04	27,82	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	116,98	145,93	95,06	98,54	89,50	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: LPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 sampai 2024

2.1.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Guna memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dasar sebagai hak warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berikut dijabarkan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan wajib terkait pelayanan dasar di Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Tabel 2.79.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Balangan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
I.	**PENDIDIKAN**					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4645	4645	Orang	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Thn yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	22445	22445	Orang	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Thn yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1440	1440	Orang	100
II.	**KESEHATAN**					
1	Pelayanan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	1668	1668	Orang	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	1668	1668	Orang	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	1632	1632	Orang	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	7629	7629	Orang	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19889	19889	Orang	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	60117	60117	Orang	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	8733	8733	Orang	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	10488	10488	Orang	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah warga negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	2979	2979	Orang	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	276	276	Orang	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	2990	2990	Orang	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	2201	2201	Orang	100
III.	**PEKERJAAN UMUM**					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	5296	5296	Orang	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2924	2924	Orang	100
IV.	**PERUMAHAN RAKYAT**					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Tidak ada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Tidak ada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Tidak ada relokasi program pemerintah	Tidak ada relokasi program pemerintah		100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
V.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	8.000	8.000	Orang	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	34000	34000	Orang	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	800	800	Orang	100
4	Pelayanan Peyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan peyelamatan dan evakuasi korban bencana	650	650	Orang	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	umlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	112	112	Orang	100
VI.	**SOSIAL**					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi diluar Panti	300	300	Orang	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	Jumlah Anak yang Memperoleh Terlantar diluar Panti	828	50	Orang	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	300	300	Orang	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial diluar Panti	Tidak ada gepeng	Tidak ada gepeng	Orang	100
2	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana ysng Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	242	242	Orang	100

Sumber: LPPD Kabupaten Balangan Tahun 2024

2.1.6. Kerjasama Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melakukan beberapa kerjasama dengan pihak swasta selama beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Balangan memberikan

kontribusi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun beberapa perusahaan dimaksud meliputi: PT. Adaro Indonesia, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama - Jobsite Adaro Indonesia, PT. Saptaindra Sejati - Jobsite Admo, Balangan Coal Companies, PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera Balangan, dan Bank Kalsel.

2.1.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kabupaten Balangan memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera atau dikenal juga dengan Bank BPR Balangan dan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

a. PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BPR Sanggam Cipta Sejahtera berdiri sejak Juni 2012 dengan modal awal Rp 1 miliar. Modal awal tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 350 juta, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Rp 500 juta, dan Bank Kalsel Rp 150 juta.

Seiring waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terus meningkatkan setoran modalnya, termasuk Rp 4 miliar pada 2013, Rp 2 miliar pada 2014 dan 2015, serta Rp 10 miliar pada 2023. Pada 2021, BPR Sanggam Cipta Sejahtera juga berhasil melakukan merger dengan BPR Hulu Sungai Tengah. Saat ini, kepemilikan saham terbesar berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan persentase 96,51%, menjadikannya sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sanggam Cipta Sejahtera mencatatkan laba sebesar Rp 979 juta pada 2024. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni Rp 669 juta pada 2022 dan Rp 670 juta pada 2023. Dengan peningkatan laba ini, dividen yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan pemegang saham lainnya juga semakin besar. Dividen yang diberikan dalam 4 (empat) tahun terakhir untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut: Rp 335 juta pada 2021, Rp 343 juta pada 2022, Rp 354 juta pada 2023, dan estimasi Rp 524 juta pada 2024.

Perkembangan kinerja BPR Sanggam Cipta Sejahtera disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.80.
Realisasi Kinerja BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Indikator Kinerja	Realisasi			
	Kinerja dan Anggaran 2021	Kinerja dan Anggaran 2022	Kinerja dan Anggaran 2023	Kinerja dan Anggaran 2024
Aset	18.642.563.500	25.653.563.402	30.918.113.813	32.926.584.757
Tabungan	3.796.938.894	5.410.047.025	5.752.022.470	6.438.335.885
Deposito	1.695.000.000	3.441.000.000	3.731.800.000	4.530.000.000
KYD	14.202.731.246	16.132.920.915	15.764.055.315	15.402.790.626
Laba	710.806.515	669.231.202	670.432.724	979.326.798

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2025

b. PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balangan atau PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) merupakan pemisahan dari PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusul pemekaran Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pemisahan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan PDAM Kabupaten Balangan beserta Penyerahan Aset dan Personilnya tanggal 6 April 2004.

Pada tanggal 4 Juli 2007 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) untuk mengukuhkan berdirinya PDAM Kabupaten Balangan. PDAM Kabupaten Balangan awalnya memiliki 6 wilayah pelayanan, dengan adanya pemekaran kecamatan dari Kecamatan Paringin menjadi Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan serta Kecamatan Tebing Tinggi maka saat ini menjadi 8 wilayah pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Persero Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan, maka PDAM Kabupaten Balangan diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroda (Perseroda). Adapun data kinerja PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.81.
Data Kinerja PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja dan Anggaran 2020	Kinerja dan Anggaran 2021	Kinerja dan Anggaran 2022	Kinerja dan Anggaran 2023	Kinerja dan Anggaran 2024	Rencana Program/Kegiatan Unggulan kedepan (s.d 2030)
1	Jumlah pelanggan	SL	23.887	24.575	25.399	25.925	26.692	– Peningkatan cakupan pelayanan – Peningkatan dan kemudahan pelayanan bagi pelanggan
2	Cakupan pelayanan (domestik)	%	53,43	54,42	53,84	53,69	54,00	
	- Jumlah penduduk terlayani	Jiwa	69.634	72.006	72.417	73.299	75.032	
3	NRW (tingkat keilangan air)	%	29,30	28,66	27,13	26,58	25,83	
4	Tingkat kinerja:							
	Berdasarkan parameter Kementerian PUPR		Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	
	Berdasarkan parameter Kemendagri		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
5	Keuangan:							
	– Pendapatan usaha	Rp	22.796.813.538	23.212.999.886	26.651.093.359	29.114.251.151	30.809.069.418	
	– Biaya usaha	Rp	27.753.948.619	29.307.540.142	29.478.304.313	26.304.490.948	29.140.114.470	
	– Labar (Rugi)	Rp	(4.957.135.081)	(6.094.540.256)	(2.827.210.954)	2.809.760.203	1.668.954.948	

Sumber: PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda), 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Gambaran Singkat mengenai Kondisi Keuangan Daerah dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana dengan baik apabila terdapat kemampuan keuangan daerah yang memadai, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Gambaran keuangan daerah merupakan aspek penting agar dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam kurun waktu periode tertentu. Data capaian kinerja keuangan suatu daerah dalam periode tertentu menjadi dasar yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana Pembangunan pada periode selanjutnya.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan Gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah terutama dalam Pembangunan daerah. salah satu faktor dalam mewujudkan pengelolaan daerah yaitu adanya APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Oleh sebab itu, dibutuhkannya realisasi kinerja keuangan daerah yang sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan masa lalu, pergerakan data dan informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah dan perkiraan ketersediaan dana Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan daerah diawali dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan dan belanja Rincian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan akan dibahas pada bagian berikut ini.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran tentang realisasi pendapatan daerah Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.82.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.378.574.067	11.417.071.564	12.308.860.394	13.907.676.851	17.931.079.060	8,77%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.675.985.562	1.890.123.555	1.908.662.405	2.366.139.331	6.491.994.812	53,02%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.827.731.257	12.391.951.413	13.573.275.479	14.874.367.772	18.345.765.305	17,14%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	61.294.319.268	104.805.980.827	64.976.235.243	105.859.221.278	133.132.894.990	30,42%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**86.176.610.154**	**130.505.127.359**	**92.767.033.521**	**137.007.405.232**	**175.901.734.167**	**24,65%**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**						
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**						
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil	329.189.779.940	257.465.532.658	994.362.274.685	1.899.001.975.914	3.394.844.581.540	108,54%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	352.411.306.000	346.527.140.000	345.185.535.241	361.821.744.450	387.094.307.000	2,44%

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	57.210.431.455	53.985.284.454	52.704.154.259	46.040.531.309	36.005.560.168	-10,61%
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	69.143.936.633	59.779.051.872	70.332.537.607	73.995.919.307	81.484.551.213	
	Jumlah Pendapatan Tranfser Dana Perimbangan	**807.955.454.028**	**717.757.008.984**	**1.462.584.501.792**	**2.380.860.170.980**	**3.899.428.999.921**	**54,79%**
1.2.2	**Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya**						
	Dana Insentif Daerah (DID)		34.187.576.000	13.333.129.000	16.166.958.000	20.597.049.000	
	Dana Desa		117.097.773.920	107.836.177.240	112.897.928.300	114.314.789.590	
	Dana Penyesuaian	**180.919.681.500**	0	0	0	0	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**180.919.681.500**	**151.285.349.920**	**121.169.306.240**	**129.064.886.300**	**134.911.838.590**	-6,31%
1.2.3	**Transfer antar Daerah**					**107.530.009.314**	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.906.832.441	59.172.919.137	102.303.271.167	113.011.263.142	107.530.009.314	19,32%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0	
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	**59.906.832.441**	**59.172.919.137**	**102.303.271.167**	**113.011.263.142**	**107.530.009.314**	19,32%

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Total Pendapatan Transfer	**1.048.781.967.969**	**928.215.278.041**	**1.686.057.079.199**	**2.622.936.320.422**	**4.141.870.847.825**	**45,91%**
	_						
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**						
	Pendapatan Hibah	18.000.810.000	6.776.710.373	6.537.075.079	600.000.000	421.917.285	-46,60%
	Pendapatan lainnya	18.211.603.345	19.880.532.455	2.335.200	0	7.935.418.762	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**36.212.413.345**	**26.657.242.828**	**6.539.410.279**	**600.000.000**	**8.357.336.047**	**275,05%**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.171.170.991.468**	**1.085.377.648.228**	**1.785.363.522.999**	**2.760.543.725.654**	**4.326.129.918.039**	**42,13%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pendapatannya menjadi Rp1.085.377.648. Rata-rata Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 42,13 persen pertahun dengan jumlah realisasi Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp4.326.129.918.039 Pertumbuhan Pendapatan Daerah ini dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah PAD sebesar Rp86.176.610.154 dan pada tahun terakhir yaitu 2024 meningkat menjadi Rp175.901.734.167. Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 24,65 persen per tahun. Selanjutnya, Pendapatan Trasnfer menjadi bagian dengan jumlah tertinggi dari beberapa bagian sumber pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 45,91 persen. Jumlah Pendapatan Transfer terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah Rp4.141.870.847.825 Penerimaan Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.421.058.604,81 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima Tahun Anggaran 2023, dan jumlah terendahnya terjadi di tahun 2021 sebesar Rp928.215.278.041.

Selanjutnya, pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi pada komponen pendapatan hibah terejadi kenaikan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 275,05 persen. Kenaikan yang signifikan terebut terjadi karena pada tahun 2024 terdapat realisasi pendapatan lainnya sebesar Rp7.935.418.762.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah Ketika mengalokasikan anggaran. alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya visi dan misi daerah. Belanja daerah merupakan suatu kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. kebijakan dalam menentukan alokasi belanja daerah tidak lepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi. Seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga,

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan anggaran kinerja (Perfomance *Budget*), yaitu belanja daerah yang ditujukan untuk pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan berarti bahwa belanja daerah harus konsisten dengan kepentingan publik. Rincian terkait realisasi belanja pada Kabupaten Balangan dari kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.83.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**						
2.1	**BELANJA OPERASI**						
2.1.1	Belanja Pegawai	379.657.162.332	356.909.206.146	386.952.974.398	437.938.657.742	528.346.491.670	9,06%
2.1.2	Belanja Barang	372.416.851.684	362.967.883.665	570.184.530.893	795.194.098.966	1.292.777.489.261	126,53%
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
2.1.3	Belanja Hibah	81.202.547.835	16.122.460.000	47.703.693.561	165.622.074.354	198.460.440.000	95,69%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.333.900.000	5.000.625.000	4.471.225.000	5.226.190.000	9.013.922.500	23,54%
	Jumlah Belanja Operasi	**837.610.461.851**	**741.000.174.811**	**1.009.312.423.852**	**1.403.981.021.062**	**2.028.598.343.430**	**27,07%**
2.2	**BELANJA MODAL**						
2.2.1	Belanja Tanah	902.599.000	912.371.000	5.115.127.000	0	8.119.274.250	130%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	51.241.769.111	32.249.659.337	94.619.742.724	161.050.737.928	370.854.449.606	89,20%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	79.756.919.590	35.624.820.668	47.238.414.494	99.741.722.125	274.000.297.829	65,78%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.356.046.223	94.916.079.688	244.145.726.258	313.533.424.904	396.492.146.917	45%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	40.000.000	74.714.800	652.944.850	5.354.696.000	778.523.500	373,83%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.107.191.000	0	0	993.507.200	1.929.984.600	
	Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	
	Belanja Modal Dana BOS	0	0	0	0	0	

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Belanja Modal	**273.404.524.924**	**163.777.645.493**	**391.771.955.326**	**580.674.088.157**	**1.052.174.676.702**	**57,13%**
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	40.850.531.490	8.386.535.090	1.203.971.500	1.602.500.000	1.357.500.000	-36,83%
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**40.850.531.490**	**8.386.535.090**	**1.203.971.500**	**1.602.500.000**	**1.357.500.000**	-36,83%
	JUMLAH BELANJA	**1.151.865.518.265**	**913.164.355.394**	**1.402.288.350.678**	**1.986.257.609.219**	**3.082.130.520.132**	**32,41%**
2.4	**TRANSFER**						
2.4.1	**Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**					**1.730.148.884**	
	Bagi Hasil Pajak Daerah	1.167.940.423	0	1.366.693.655	0	0	
	Bagi Hasil Retribusi	165.901.680	0	0	0	0	
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	**1.333.842.103**		**1.366.693.655**	**-**		
	Transfer Bantuan Keuangan						
	Bantuan Keuangan ke Desa	194.004.813.260	181.531.462.000	241.036.092.700	306.086.953.047		-11,67%
	Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	
	Jumlah Trasnfer Bantuan Keuangan	**194.004.813.260**	**181.531.462.000**	**241.036.092.700**	**306.086.953.047**	**495.133.425.641**	

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	JUMLAH TRANSFER	**195.338.655.363**	**181.531.462.000**	**242.402.786.355**	**306.086.953.047**	**496.863.574.525**	28,77%
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	**1.347.204.173.628**	**1.094.695.817.394**	**1.644.691.137.033**	**2.292.344.562.266**	**3.578.994.094.657**	**31,75%**

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Realisasi Belanja Daerah pada Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi cenderung meningkat meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup besar dengan jumlah realisasi belanja daerah di tahun tersebut sebesar Rp913.164.355.394 namun pada tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2022-2023 mulai mengalami peningkatan kembali.

Presentase rata-rata pertumbuhan realisasi belanja dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar sehingga total rata-rata pertumbuhannya sebesar 31,75 persen. Berdasarkan jenis belanjanya, belanja operasi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27.07 persen. apabila dilihat dari tahun 2020-2024, jumlah realisasi belanja operasi tertinggi terdapat di tahun 2024 sebesar Rp2.028.598.343.430 sedangkan jumlah terendahnya terdapat di tahun 2021 sebesar Rp741.000.174.811. pada belanja modal secara umum selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 57,13%. Pertumbuhan belanja modal menunjukkan tren yang cukup tinggi . Lonjakan terbesar terlihat pada pos belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Kenaikan ini mencerminkan adanya prioritas pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dari sisi pembangunan, belanja modal yang tumbuh tinggi dapat memberi dampak positif terhadap sektor riil, seperti meningkatnya konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta dukungan terhadap produktivitas masyarakat.

Dengan kata lain, meskipun tren pertumbuhan belanja modal positif, upaya menjaga konsistensi alokasi yang lebih besar ke sektor ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan berkesinambungan. Belanja modal ini menjadi satu-satunya bagian dari belanja daerah dengan jumlah terbesar diantara belanja operasi dan belanja tak terduga, meskipun jumlah realisasinya berfluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan.

Pertumbuhan ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur serta mendorong sektor riil melalui peningkatan konektivitas dan produktivitas. Kedepan, apabila porsi belanja modal dapat ditingkatkan hingga mendekati 40% dari total belanja, maka

kontribusinya terhadap pembangunan daerah akan semakin optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan tabel kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang yaitu tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi. Dapat kita lihat di tahun 2020 kemampuan keuangan daerahnya sebesar Rp397.080.645.153 dan di tahun 2024 sebesar Rp3.498.166.825.655 Kemampuan keuangan daerah pada periode ini memiliki kategori kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Lebih rinci mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.84.
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	86.176.610.154	130.505.127.359	92.767.033.521	137.007.405.232	175.901.734.167
2	Dana Bagi Hasil	329.189.779.940	257.465.532.658	994.362.274.685	1.899.001.975.914	3.394.844.581.540,00
3	Dana Alokasi Umum	352.411.306.000	346.527.140.000	345.185.535.241	361.821.744.450	387.094.307.000,00
	Jumlah A	**767.777.696.094**	**734.497.800.017**	**1.432.314.843.447**	**2.397.831.125.596**	**3.957.840.622.707**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	199.102.078.580	192.923.445.409	203.154.144.376	207.600.751.527	246.514.845.550
2	Tambahan Pengjhasilan PNS	171.594.972.361	96.392.040.285	121.612.369.908	169.666.856.186	213.158.951.502
	Jumlah B	**370.697.050.941**	**289.315.485.694**	**324.766.514.284**	**377.267.607.713**	**459.673.797.052**
	Kemampuan Keuangan Daerah	**397.080.645.153**	**445.182.314.323**	**1.107.548.329.163**	**2.020.563.517.883**	**3.498.166.825.655**

Sumber: Laporan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun Pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima Kembali, atau Dalam penganggaran pemerintah daerah, pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutup defissit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Gambaran tentang rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Balangan pada periode 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.85.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
	Penggunaaan SiLPA	317.246.508.731	141.207.155.814	131.899.986.649	222.572.372.614	640.771.613.619	48,64%
	Penerimaan atas Investasi Permanen	14.250.000					
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		10.600.000			1.000.000	
	Jumlah Penerimaan	**317.260.758.731**	**141.217.755.814**	**131.899.986.649**	**222.572.372.614**	**640.772.613.619**	**48,64%**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	750.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran	**-**	**-**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**750.000.000.000**	
	PEMBIAYAAN NETTO	**317.260.758.731**	**141.217.755.814**	**81.899.986.649**	**172.572.372.614**	**(109.227.386.381)**	**-37,52%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Dilihat dari Tabel 2.120 diatas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2019-2023 jumlah penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Balangan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuh setiap tahunnya sebesar 26,33 persen. Pada tahun 2019 jumlah realisasi penerimaan pembiayaannya sebesar Rp159.691.436.792 dan di tahun 2023 menjadi Rp222.572.372.614. Selanjutnya untuk Pengeluaran pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2019-2021 tidak terdapat sejumlah Pengeluaran pembiayaan, namun di tahun 2022-2023 jumlah Pengeluaran pembiayaan memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp50.000.000.000. nilai tersebut penyertaan modal pada beberapa BUMD diantaranya PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT. Asabaru Dayacipta Lestari (PERSERODA) dan PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera. Selanjutnya untuk rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Neto memiliki persentase sebesar 27,97 persen dengan jumlah pembiayaan daerah terendahnya berada di tahun 2022 sebesar Rp81.899.986.640, dan jumlah pembiayaan daerah tertinggi berada di tahun 2020 sebesar Rp317.260.758.731.

2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah termasuk asset, kewajiban, modal pada periode waktu tertentu. Neraca daerah berfungsi sebagai alat pengelolaan pemerintah daerah, memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai acuan dalam pengambilan Keputusan yang tepat sasaran. Tujuan analisis neraca daerah ialah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1. Aset

Kabupaten Balangan ada periode tahun 2020-2024 total asetnya mengalami peningkatan. Semula dari tahun 2020 jumlah asetnya sebesar Rp2.545.528.571.784 lalu di tahun 2024 menjadi Rp6.614.844.548.126 dengan presentase rata-rata pertumbuhannya sebesar 28,4 persen. Adapun peningkatan yang terjadi pada jumlah asset tidak lepas karna adanya dukungan dari jumlah asset lancar yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 89,69 persen, meskipun pada bagian asset lancar tersebut jumlah realisasinya berfluktuasi. Tetapi pada tahun 2022 ke 2023

terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang semula hanya sebesar Rp325.085.247.307 menjadi Rp701.595.000.795. lalu untuk investasi jangka Panjang, jumlah rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 101,26 persen. selanjutnya, pada bagian asset tetap jumlah rata-rata pertumbuhannya sebesar 10,73 persen. pada bagian asset lainnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 558,85 persen. Peningkatan tersebut terjadi karna terjadi kenaikan yang cukup signifikan antara tahun 2021 ke 2022 lalu di tahun 2022 ke 2023, Dimana semula di tahun 2021 jumlah asset lainnya sebesar Rp29.047.483.750 lalu di tahun 2022 menjadi Rp666.464.765.203 dan di tahun 2023 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp1.142.914.927.751.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. kewajiban dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Rata-rata pertumbuhan jumlah kewajiban Kabupaten Balangan dari Tahun 2020-2024 memiliki nilai sebesar 47,71 persen dengan jumlah kewajiban tertinggi berada di tahun 2021 sebesar Rp256.475.361.206, dan di tahun 2023 menjadi tahun dengan jumlah kewajiban terendah yaitu sebesar Rp16.606.946.096. Adapun presentase kewajiban jangka pendek dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki presentase sebesar 48,71 persen dimana pada tahun 2020 jumlah kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp164.076.190.873, sedangkan di tahun 2024 jumlahnya sebesar Rp59.692.530.288

3. Ekuitas

Ekuitas dana ialah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan jumlah ekuitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Dengan presentase rata-rata pertumbuhannnya sebesar 126,80 persen, adapun jumlah ekuitas terendah berada di tahun 2020 sebesar Rp381.452.380.910, sedangkan jumlah tertinggi berada di tahun 2024 sebesar Rp6.555.152.017.838 Neraca Pemerintah daerah Kabupaten Balangan dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.86.
Neraca Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	121.452.973.847	75.760.132.462	194.215.215.819	624.221.300.103	629.401.707.659	85,24%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	975.000	271	19.534.949			
5	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	518.861.272	458.698.336	129.978.981	21.841.033	122.260.304	73,33%
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	18.051.216.461	54.764.848.477	28.020.766.993	13.733.779.327	6.219.353.795	12,21%
7	Kas Dana BOS	1.204.524.991	915.807.103	187.586.288	241.939.226	147.761.158	-28,36%
8	Kas Dana BOK Puskesmas				2.552.676.313	2.017.354.083	
9	Kas Di BOP			164.584			
10	Piutang Pajak	2.071.333.071	2.669.407.144	3.197.076.781	3.561.751.154	3.881.268.779	17,25%
11	Penyisihan Piutang Pajak	- 1.208.173.953					
12	Piutang Retribusi	63.859.005	93.864.820	119.783.070	74.062.730	147.907.730	34,03%
13	Piutang lain-lain PAD yang sah	2.156.266.561	1.060.248.205	4.460.054.973	4.347.732.158	12.036.582.088	111,04%
14	Piutang transfer pemerintah pusat - dana perimbangan	34.180.831.191		47.366.160.434	5.600	1.223.130.370.000	
15	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	22.300.065.176	29.067.967.757	33.073.341.443	33.008.029.465	24.790.084.881	4,76%
16	Piutang Lainnya		742.513.254	738.720.481	69.095.162	111.377.138	#DIV/0!
17	Persediaan	11.502.311.810	13.277.609.671	15.248.018.577	21.511.033.345	36.877.880.753	35,70%
18	**Jumlah Aset Lancar**	**212.274.810.458**	**177.315.570.500**	**325.085.247.307**	**701.595.000.795**	**1.937.043.450.397**	**89,69%**
19							

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
20	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
21	Investasi Non Permanen						
22	Dana Bergulir	673.300.000					
23	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	208.118.000	205.318.000	**204.818.000**	**204.818.000**	**203.818.000**	-0,52%
24	**Jumlah Investasi Non Permanen**	**208.118.000**	**205.318.000**	**204.818.000**	**204.818.000**	**203.818.000**	**-0,52%**
25	Investasi Permanen						
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	197.609.093.258	188.827.009.087	288.753.470.441	236.648.008.591	1.123.997.112.829	101,35%
27	**Jumlah Investasi Permanen**	**197.609.093.258**	**188.827.009.087**	**288.753.470.441**	**236.648.008.591**	**1.123.997.112.829**	**101,35%**
28	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	**197.817.211.258**	**189.032.327.087**	**288.958.288.441**	**236.852.826.591**	**1.124.200.930.829**	**101,26%**
29							
30	**ASET TETAP**						
31	Tanah	488.482.307.045	487.473.485.019	462.268.632.239	449.098.118.527	502.128.333.512	0,90%
32	Peralatan dan Mesin	394.555.253.493	441.374.293.137	531.210.747.855	669.968.804.651	988.477.540.498	26,47%
33	Gedung dan Bangunan	920.201.823.509	953.444.676.720	1.016.496.287.826	1.084.988.256.210	1.360.559.912.324	10,59%
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.823.269.189.518	1.886.548.166.563	2.135.209.568.350	2.379.190.811.108	2.685.719.280.826	10,24%
35	Aset Tetap Lainnya	8.052.807.988	8.461.757.988	9.180.696.428	9.341.290.628	9.753.400.327	4,93%
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.852.802.238	41.055.203.090	5.289.342.748	12.462.602.214	15.345.808.759	72,77%
37	Akumulasi Penyusutan	- 1.533.784.212.702	- 1.633.056.879.031	- 1.872.837.603.893	- 2.108.143.707.165	2.423.329.601.218	-45,31%
38	**Jumlah Aset Tetap**	**2.113.629.971.089**	**2.185.300.703.486**	**2.286.817.671.553**	**2.496.906.176.173**	**3.138.654.675.028**	**10,73%**
39							
40	**DANA CADANGAN**						
41	Dana Cadangan						

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
42	**Jumlah Dana Cadangan**						
43							
44	**ASET LAINNYA**						
45	**Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**						
46	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara		19.150.000	19.150.000	538.784.181	538.784.181	
47	Aset Tak Berwujud	2.692.599.050	2.846.399.050	3.617.219.400	4.740.182.600	6.670.167.200	26,14%
48	Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 1.389.564.850	- 1.825.454.250				
49	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya						
50	Aset Lain-Lain	62.272.794.441		84.412.936.230	118.279.868.621	102.555.885.116	
51	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			637.760.586.124	1.098.657.770.000	371.190.177.000	
52	Properti Investasi (Netto)					114.170.000	
53	**Jumlah Aset Lainnya**	**21.806.578.979**	**29.047.483.750**	**666.464.765.203**	**1.142.914.927.751**	**414.954.491.871**	**558,85%**
54	**JUMLAH ASET**	**2.545.528.571.784**	**2.580.696.084.823**	**3.515.220.510.653**	**4.630.374.393.160**	**6.614.844.548.126**	**28,04%**
55							
56	**KEWAJIBAN**						
57	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
58	Perhitungan Fihak Ketiga			875.000			
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
60	Pendapatan Diterima dimuka	103.450.522	178.178.464	227.852.639	246.232.442	186.392.548	20,97%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
61	Utang Beban	3.686.715.599	42.464.389.889	14.314.626.878	16.343.257.091	59.493.224.212	315,93%
62	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat						
63	Utang jk Pendek kpd Pihak Ketiga						
64	Utang kjk Pendek Lainnya	160.285.049.752	213.832.792.853	164.528.529.889	17.456.563	12.913.527	-28,92%
65	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**164.076.190.873**	**256.475.361.206**	**179.071.884.406**	**16.606.946.096**	**59.692.530.288**	**48,71%**
66							
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
68	Utang Jangka Panjang Lainnya						
69	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**						
70	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**168.397.222.570**	**256.475.361.206**	**179.071.884.406**	**16.606.946.096**	**59.692.530.288**	**47,71%**
71							
72	**EKUITAS DANA**						
73	EKUITAS	381.452.380.910	**2.324.220.723.617**	3.336.148.626.247	4.613.767.447.064	6.555.152.017.838	126,34%
74	**JUMLAH EKUITAS DANA**	**381.452.380.910**	**2.324.220.723.617**	**3.336.148.626.247**	**4.613.767.447.064**	**6.555.152.017.838**	**126,34%**
75	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**2.545.528.571.783,00**	**2.580.696.084.823,11**	**3.515.220.510.653,10**	**4.630.374.393.160,05**	**6.614.844.548.126,00**	**28,04%**

Sumber: Laporan Neraca Kabupaten Balangan, Tahun 2020-2024

Selain itu, berdasarkan data diatas. Rasio keuangan daerah dapat dihitung dengan menghitung rasio likuiditas dan solvabilitas. Hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.87.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	1,29	0,69	1,82	42,25	32,45
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	1,22	0,64	1,73	40,95	31,83
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,0797	0,1174	0,0783	0,0067	0,0190
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,4415	0,1103	0,0537	0,0036	0,0091

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Balangan berada dalam keadaan sehat. Dengan menampilkan nilai positif dari kedua rasio tersebut. Penjelasan perbandingan rasio-rasio tersebut dijelaskan dibawah ini.

A. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimiliki. Jumlah rasio lancar yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan cenderung berfluktuasi dan meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dapat dilihat bahwa di tahun 2020 jumlah rasio keuangannya sebesar 1,29 lalu di tahun 2024 meningkat menjadi 32,45.

B. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat dihitung dengan mengurangi persediaan dari asset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Asset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, Piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur asset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Balangan dinyatakan dalam kondisi sehat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kebelakang.

C. Rasio Total Utang terhadap Total Aset

Rasio hutang terhadap asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan asset yang dimilikinya. Rasio total hutang terhadap total asset dihidung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka Panjang dengan total asset. Jumlah rasio total hutang terhadap total asset yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan dari 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktivanya sangat kecil.

D. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio Hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan modal yang dimiliki. Rasio hutang terhadap modal dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka Panjang dengan jumlah modal. Tahun 2020-2024 pemerintah daerah Kabupaten Balangan semakin mandiri serta tidak bergantung pada hutangnya.

3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Prinsip utama yang menjadi point penting pengelolaan keuangan daerah adalah keteraturan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis pengelolaan keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu. Dengan mengenalisis pengelolaan keuangan tahun tahun sebelumnya, kita dapat menentukan Tingkat pertumbuhan rata-rata yang dapat digunakan sebagai analisis proyek keuangan di masa depan.

1. Kebijakan Pendapatan

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan Upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pendapatan daerah dalam stuktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

A) Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
d. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
e. Pendapatan Pajak Hotel diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013.
f. Pendapatan Pajak Restoran dan Katering diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012.
g. Pendapatan Pajak Hiburan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012.
h. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012.

i. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011.
j. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2009.
k. Pendapatan Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011.
l. Pendapatan Pajak Air Tanah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013.
m. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013.
n. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011.
o. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2014.
p. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
q. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2009 Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

r. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
s. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012.
t. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018.
u. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013.
v. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012.
w. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013.
x. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013.
y. Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
z. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013.
aa. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018.
bb. Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018.
cc. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2016.

dd. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.

ee. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan jenis retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

ff. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

gg. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B) Kebijakan Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2. Kebijakan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek

belanja daerah. Secara khusus dengan kurang stabilnya ekonomi dunia Pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adapun beberapa point pokok dari peraturan ini adalah:

a. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

b. Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022 Belanja wajib sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen).

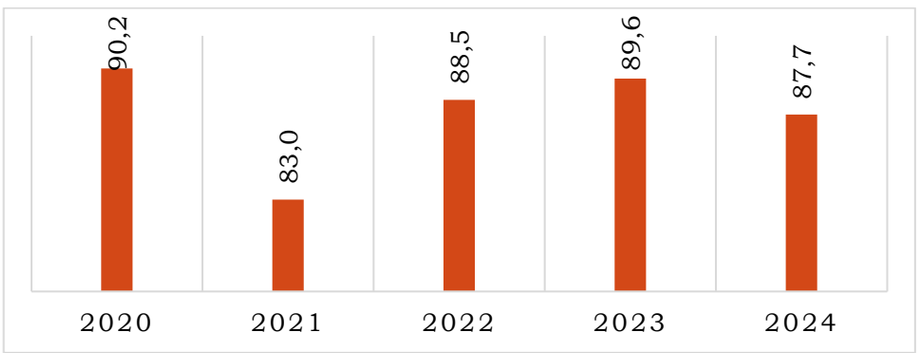
4 Proporsi Pengguna Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masalalu juga dapat dilihat dari proporsi pengguna anggarannya. Tujuan analisis proporsi pengguna anggaran yang dilakukan di Kabupaten Balangan ialah untuk

memperoleh Gambaran realisasi dari lebijakan pembelanjaan dan Pengeluaran pembiayaan kabupaten balangan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelajaan dan Pengeluaran pembiayaan dimasa dating dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan Pembangunan daerah

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Proporsi Realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggarannya. Realisasi rata-rata pertumbuhan belanjanya sebesar minis 0,66 persen. Selain itu, jumlah rata-rata pertumbuhan belanja dan transfer sebesar -0,56%, dan rata-rata penyerapan anggarannya memiliki nilai yang lebih besar pula yaitu sebesar 87,8 persen.



Gambar 2.41.
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: LRA 2020-2024, diolah

Berikut ini ialah tabel perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggarannya.

Tabel 2.88.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	2021	(%)
5	**BELANJA**									
5.1	**BELANJA OPERASI**									
5.1.01	Belanja Pegawai	418.952.932.127	379.657.162.332	90,6	394.820.948.104	356.909.206.146	90,4	433.399.320.480	386.952.974.398	89,3
5.1.02	Belanja Barang	404.150.311.823	372.416.851.684	92,1	437.905.314.032	362.967.883.665	82,9	651.764.530.544	570.184.530.893	87,5
5.1.03	Belanja Subsidi				1.000.000.000					
5.1.04	Belanja Bunga									
5.1.05	Belanja Hibah	84.471.982.871	81.202.547.835	96,1	19.579.844.758	16.122.460.000	82,3	56.190.170.950	47.703.693.561	84,9
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.842.125.000	4.333.900.000	74,2	5.575.014.196	5.000.625.000	89,7	4.493.243.003	4.471.225.000	99,5
	Jumlah Belanja Operasi	**913.417.351.821**	**837.610.461.851**	**91,7**	**858.881.121.090**	**741.000.174.811**	**86,3**	**1.145.847.264.977**	**1.009.312.423.852**	**88,1**
5.2	**BELANJA MODAL**									
5.2.01	Belanja Tanah	925.400.000	902.599.000	97,5	1.615.000.000	912.371.000	56,5	8.037.500.000	5.115.127.000	63,6
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	54.870.827.268	51.241.769.111	93,4	41.769.211.802	32.249.659.337	77,2	108.001.085.453	94.619.742.724	87,6
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	86.780.794.849	79.756.919.590	91,9	44.169.257.147	35.624.820.668	80,7	57.760.841.023	47.238.414.494	81,8
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.170.954.795	140.356.046.223	96,0	167.151.994.717	94.916.079.688	56,8	282.217.875.924	244.145.726.258	86,5
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	40.000.000	40.000.000	100,0	224.300.000	74.714.800	33,3	695.900.000	652.944.850	93,8
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	1.123.200.000	1.107.191.000	98,6			#DIV/0!			
	Jumlah Belanja Modal	**289.911.176.912**	**273.404.524.924**	**94,3**	**254.929.763.666**	**163.777.645.493**	**64,2**	**456.713.202.400**	**391.771.955.326**	**85,8**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**									

No	Uraian	2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	2021	(%)
5.3.01	Belanja Tak Terduga	91.494.901.850	40.850.531.490	44,6	12.528.852.727	8.386.535.090	66,9	**12.539.428.466**	1.203.971.500	9,6
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**91.494.901.850**	**40.850.531.490**	**44,6**	**12.528.852.727**	**8.386.535.090**	**66,9**	**12.539.428.466**	**1.203.971.500**	**9,6**
	JUMLAH BELANJA	**1.294.823.430.583**	**1.151.865.518.265**	**89,0**	**1.126.339.737.483**	**913.164.355.394**	**81,1**	**1.615.099.895.843**	**1.402.288.350.678**	**86,8**
5.4	**TRANSFER**									
5.4.01	**Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**									
	Bagi Hasil Pajak Daerah	1.174.502.300	1.167.940.423	99,4			#DIV/0!	1.366.693.655	1.366.693.655	100,0
	Bagi Hasil Retribusi	166.644.000	165.901.680	99,6			#DIV/0!			#DIV/0!
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya									
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	**1.341.146.300**	**1.333.842.103**	99,5			#DIV/0!	1.366.693.655	**1.366.693.655**	100,0
5.4.02	**Transfer Bantuan Keuangan**									
	Bantuan Keuangan ke Desa	197.422.990.150	194.004.813.260	98,3	191.988.851.465	181.531.462.000	94,6	241.980.164.460	241.036.092.700	99,6
	Bantuan Keuangan Lainnya									#DIV/0!
	Jumlah Trasnfer Bantuan Keuangan	**197.422.990.150**	**194.004.813.260**	**98,3**	**191.988.851.465**	**181.531.462.000**	**94,6**	**241.980.164.460**	**241.036.092.700**	**99,6**
	JUMLAH TRANSFER	**198.764.136.450**	**195.338.655.363**	**98,3**	**191.988.851.465**	**181.531.462.000**	**94,6**	**243.346.858.115**	**242.402.786.355**	**99,6**
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	**1.493.587.567.033**	**1.347.204.173.628**	**90,2**	**1.318.328.588.948**	**1.094.695.817.394**	**83,0**	**1.858.446.753.958**	**1.644.691.137.033**	**88,5**

Lanjutan

No	Uraian	2023			2024			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)		
5	**BELANJA**								-
5.1	**BELANJA OPERASI**								-
5.1.01	Belanja Pegawai	502.425.067.881	437.938.657.742	87,2	614.502.877.115,00	528.346.491.670,00	86,0	-1,30%	88,7
5.1.02	Belanja Barang	889.889.966.575	795.194.098.966	89,4	1.506.803.774.658,00	1.292.777.489.260,70	85,8	-1,59%	87,5
5.1.03	Belanja Subsidi								
5.1.04	Belanja Bunga								
5.1.05	Belanja Hibah	180.582.121.770	165.622.074.354	91,7	227.281.970.711,00	198.460.439.999,65	87,3	-2,00%	88,5
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737	5.226.190.000	96,1	11.628.381.400,00	9.013.922.500,00	77,5	2,27%	87,4
	Jumlah Belanja Operasi	**1.578.337.781.963**	**1.403.981.021.062**	**89,0**	**2.360.217.003.884,00**	**2.028.598.343.430,35**	85,9	-1,55%	88,2
5.2	**BELANJA MODAL**								
5.2.01	Belanja Tanah	1.035.250.000	-	-	26.035.500.000	8.119.274.250	31,2		49,8
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	173.356.943.387	161.050.737.928	92,9	387.542.617.012	370.854.449.606	95,7	1,30%	89,4
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	116.951.551.100	99.741.722.125	85,3	337.350.155.747	274.000.297.829	81,2	-2,83%	84,2
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	368.065.180.950	313.533.424.904	85,2	454.867.342.450	396.492.146.917	87,2	3,07%	82,3
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400	5.354.696.000	91,2	785.885.500	778.523.500	99,1	30,20%	83,5
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	1.068.878.900	993.507.200	92,9	2.673.727.100	1.929.984.600	72,2		
	Jumlah Belanja Modal	**666.352.162.737**	**580.674.088.157**	**87,1**	**1.209.255.227.809**	**1.052.174.676.702**	87,0	0,77%	83,7
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**								
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5.603.265.908	1.602.500.000	28,6	7.316.334.100,00	1.357.500.000,00	18,6	31,75%	33,7

No	Uraian	2023			2024			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)		
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**5.603.265.908**	**1.602.500.000**	**28,6**	**7.316.334.100,00**	**1.357.500.000,00**	18,6	31,75%	33,7
	JUMLAH BELANJA	**2.250.293.210.608**	**1.986.257.609.219**	**88,3**	**3.576.788.565.793,00**	**3.082.130.520.132,39**	86,2	-0,62%	86,3
5.4	**TRANSFER**								
5.4.01	**Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**				1.734.701.284,00	1.730.148.884,00	99,7		19,9
	Bagi Hasil Pajak Daerah	1.827.921.467		-					
	Bagi Hasil Retribusi								
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya								-
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	1.827.921.467	**-**	-	1.734.701.284,00	1.730.148.884,00	99,7		
5.4.02	**Transfer Bantuan Keuangan**				496.749.162.157	495.133.425.641	99,7		19,9
	Bantuan Keuangan ke Desa	305.046.166.000	306.086.953.047	100,3					78,6
	Bantuan Keuangan Lainnya								
	Jumlah Trasnfer Bantuan Keuangan	**305.046.166.000**	**306.086.953.047**	**100,3**	**496.749.162.157**	**495.133.425.641**	**99,7**	**0,41%**	**98,5**
	JUMLAH TRANSFER	**306.874.087.467**	**306.086.953.047**	**99,7**	**498.483.863.441,00**	**496.863.574.525,00**	**99,7**	**0,41%**	**98,4**
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	**2.557.167.298.075**	**2.292.344.562.266**	**89,6**	**4.075.272.429.234,00**	**3.578.994.094.657,39**	**87,8**	**-0,53%**	**87,8**

Sumber: LRA Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024, diolah

2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Informasi adalah menggambarkan proporsi alokasi anggaran untuk kebutuhan aparatur disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024, proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur disajikan dengan mempertimbangkan belanja wajib pegawai, kecuali tunjangan profesi guru, tunjangan kuhusus guru dan tumjangan tambahan penghasilan guru. Gambaran ini menyajikan realisasi belanja wajib pegawai di Kabupaten Balangan dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi belanja wajib pegawai tercatat sebesar Rp334.256.908.332 atau 24,2 persen, sementara pada tahun 2024 mencapai Rp483.518.003.670 atau 13,5 persen.

Tabel 2.89.
Realisasi Belanja Wajib Pegawai
Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
Belanja						
1)	Belanja Pegawai	379.657.162.332	356.909.206.146	386.952.974.398	437.938.657.742	528.346.491.670
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	44.533.416.000	48.394.510.000	40.899.745.260	44.126.929.700	43.053.348.100
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)	852.713.000	938.690.000		699.430.000	891.639.900
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	14.125.000	324.000.000	427.500.000	973.499.950	883.500.000
2)	Jumlah Tunjangan Guru	45.400.254.000	49.657.200.000	41.327.245.260	45.799.859.650	44.828.488.000
3)	Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	334.256.908.332	307.252.006.146	345.625.729.138	392.138.798.092	483.518.003.670
	Presentase Belanja Pegawai	24,2%	20,8%	22,4%	17,1%	13,5%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024, diolah

3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat adalah Pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan, sedangkan Pengeluaran wajib prioritas utama adalah Pengeluaran yang harus dibayar secara periodic oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama ini merupakan Pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar, sebab amanat perundang-undangan maupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Tabel 2.90.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi									
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A	**Belanja Mengikat**										
1	Belanja Pegawai	1.763.279.534.073		1.934.780.590.156		1.657.814.652.026		1.796.601.374.485		1.961.818.054.525	
2	Belanja Bunga							-			
B	**Belanja Wajib**										
1	Pendidikan							521.933.371.382			
2	Infrastruktur							712.776.603.979			
3	Peningkatan Kapasitas SDM							22.327.483.874			
4	Penguatan APIP							12.259.479.582			
C	**Pengeluaran Pembiayaan**							**155.561.250.000**			
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo										
2	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000		0		12.000.000.000		55.561.250.000		62.837.000.000	
3	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000		0		0		100.000.000.000		100.000.000.000	
4	Pemberian Pinjaman Daerah										
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.										
	Total Belanja Wajib Mengikat							**3.221.459.563.302**			

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023, diolah

5 Proporsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal ini terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan kembali investasi dana bergulir, dan lain-lain.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diketahui bahwa rata-rata jumlah SiLPA yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan berfluktuasi. Jumlah SiLPA tahun lalu dengan nilai terendah berada pada tahun 2021 sebesar Rp131.888.648, dan jumlah terbesar berada di tahun 2024 sebesar Rp640.771.613.619. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai SiLPA tahun lalu pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun gambaran terkait realisasi SiLPA tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.91.
Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.171.170.991.468	1.085.377.648.228	1.785.363.522.999	2.760.543.725.654	4.320.998.847.342
2	Belanja Daerah	1.151.865.518.265	913.164.355.394	1.402.288.350.678	1.986.257.609.219	3.076.942.722.812
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	750.000.000.000
A.	Defisit Riil	19.305.473.203	172.213.292.834	333.075.172.320	724.286.116.435	494.056.124.530
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	317.246.508.731	141.207.155.814	131.899.986.649	222.572.372.614	640.771.613.619
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Koreksi					1.000.000
B.	Total Realisasi Penerimaan	317.246.508.731	141.207.155.814	131.899.986.649	222.572.372.614	640.772.613.619
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**336.551.981.934**	**313.420.448.648**	**464.975.158.969**	**946.858.489.049**	**1.134.828.738.149**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024, diolah

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Analisis terhadap kerangka keuangan dilakukan untuk menghitung actual kemampuan keuangan daerah yang dapat dialokasikan dalam jangka menengah untuk membiayai program pembangunan lima tahun ke depan. Proyeksi keuangan daerah dilakukan dengan menempatkan seluruh pendapatan daerah pada posisi yang ditetapkan pada sumber-sumber pendapatan.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan Daerah

Perubahan APBD Tahun 2025 merupakan dasar dalam memprediksi pendapatan pada periode tahun 2026-2030. Dilihat dari data Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Balangan, diketahui Pendapatan daerah sebesar Rp3.506.652.191.207. Pada tahun 2026, diproyeksikan terjadi penurunan Pendapatan menjadi Rp2.780.232.508.375.

Pendapatan daerah Kabupaten Balangan periode tahun 2026-2030 diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-ratanya sebesar 3,55 persen. Rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 13,74 persen per tahun, dan Pendapatan Transfer sebesar 2,94 persen. Selanjutnya, pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan nominal yang sama setiap tahunnya mulai 2026 sampai 2030.

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata 3,55% per tahun, lebih tinggi dibandingkan Belanja Daerah yang tumbuh 2,63% per tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya disiplin fiskal yang relatif baik serta peluang menjaga keseimbangan anggaran dalam jangka menengah. Namun, optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta penataan kembali alokasi belanja menjadi kunci agar pertumbuhan fiskal tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal. Misalnya, dari sektor pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan digitalisasi layanan, pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif, serta penguatan kerja sama investasi dan optimalisasi transfer dari pemerintah pusat. Rincian tabel proyeksi pendapatan daerah selama 5 tahun dimuat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.92.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025 (PAPBD)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.506.652.191.207**	**2.780.232.508.375**	**2.877.480.448.702**	**2.975.618.077.339**	**3.081.415.484.519**	**3.196.064.511.515**	**3,55%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**120.879.109.224**	**159.316.815.392**	**179.028.574.397**	**202.853.774.528**	**231.681.171.289**	**266.596.375.866**	**13,74%**
4.1.01	Pajak Daerah	28.902.958.032	37.163.351.400	42.737.854.110	49.148.532.227	56.520.812.060	64.998.933.870	15,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.773.128.000	1.950.440.800	2.084.826.171	2.228.470.694	2.382.012.325	2.546.132.974	6,89%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000	60.000.000.000	74.002.870.924	91.273.748.415	112.575.323.711	138.848.285.830	23,34%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	0,00%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.077.806.232.640**	**2.512.048.843.640**	**2.589.585.024.962**	**2.663.897.453.468**	**2.740.867.463.887**	**2.820.601.286.306**	**2,94%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pusat	3.000.010.875.000	2.434.253.486.000	2.499.902.536.675	2.569.910.205.743	2.642.368.828.271	2.717.374.716.180	2,79%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	77.795.357.640	77.795.357.640	89.682.488.287	93.987.247.725	98.498.635.616	103.226.570.126	7,42%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**307.966.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**0,00%**

No	Uraian	2025 (PAPBD)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	307.966.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	0,00%

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

2. Belanja Daerah

Berdasarkan data proyeksi APBD Pergeseran Tahun 2025, belanja daerah diproyeksikan akan mengalami perkembangan dan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,63 persen dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Belanja Operasi menunjukkan rata-rata yang paling tinggi dengan kenaikan sebesar 3,73 persen, sementara Belanja Modal memiliki rata-rata kenaikannya yaitu sebesar 1,92 persen, dan Belanja Transfer sebesar 0,06 persen. Namun untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan sama nilainya setiap tahun mulai tahun 2026 sampai 2030.

Proyeksi Belanja Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.93.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025 (PAPBD)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
5	**BELANJA DAERAH**	**3.839.707.519.631**	**3.325.203.260.338**	**3.408.826.931.866**	**3.493.680.898.424**	**3.586.526.735.076**	**3.688.547.980.808**	**2,63%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.377.090.168.548**	**1.666.488.016.496**	**1.731.731.872.707**	**1.792.849.190.983**	**1.852.441.825.489**	**1.929.455.434.954**	**3,73%**
5.1.01	Belanja Pegawai	654.584.717.264	749.584.717.109	768.324.335.037	787.532.443.413	807.220.754.498	827.401.273.360	2,50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.483.787.684	809.881.635.787	856.385.874.070	898.295.083.970	938.199.407.391	995.032.497.993	5,28%
5.1.05	Belanja Hibah	175.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**978.440.141.942**	**1.259.075.521.606**	**1.276.627.091.605**	**1.300.363.739.888**	**1.333.616.942.033**	**1.358.624.578.301**	**1,92%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**90.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**0,00%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	90.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**394.177.209.141**	**349.639.722.236**	**350.467.967.554**	**350.467.967.554**	**350.467.967.554**	**350.467.967.554**	**0,06%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541	4.106.948.181	4.935.193.499	4.935.193.499	4.935.193.499	4.935.193.499	5,04%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.759.506.600	345.532.774.055	345.532.774.055	345.532.774.055	345.532.774.055	345.532.774.055	0,00%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tujuan proyeksi pembiayaan daerah adalah untuk menciptakan surplus neraca keuangan daerah meskipun terjadi defisit dalam pembangunan, namun dengan adanya SiLPA tahun anggaran sebelumnya, hal tersebut tetap terjaga dan dikendalikan. Seluruh Pengeluaran daerah difokuskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran penyertaan modal.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya diproyeksikan secara bertahap menurun pada periode tahun 2026-2030. Diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Balangan berjalan secara efisien dan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif untuk mendanai pembangunan. Gambaran lebih jelas terhadap proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Balangan tahun 2025-2030 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.94.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025 (PAPBD)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**333.055.328.424**	**544.970.751.963**	**531.346.483.164**	**518.062.821.085**	**505.111.250.558**	**492.483.469.294**	**-2,5%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**443.055.328.424**	**544.970.751.963**	**531.346.483.164**	**518.062.821.085**	**505.111.250.558**	**492.483.469.294**	**-2,5%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	443.055.328.424	544.970.751.963	531.346.483.164	518.062.821.085	505.111.250.558	492.483.469.294	-2,5%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**110.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	110.000.000.000	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program Pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Proses yang dilakukan ialah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah.

a) Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA pada dasarnya mengacu pada efisiensi pengeluaran dalam pengadaan barang/jasa di pendapatan, juga dari pelampauan target pendapatan. SiLPA diproyeksikan secara bertahap mengalami penurunan dalam rangka efektfitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran. Proyeksi nilai SiLPA Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030 akan dijelaskan dibawah ini.

Tabel 2.95.
Proyeksi SILPA Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030

Tahun	SiLPA (Rp)
2026	544.970.751.963
2027	531.346.483.164
2028	518.062.821.085
2029	505.111.250.558
2030	492.483.469.294

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

Dari hasil analisis proyeksi SILPA yang telah dilakukan berdasarkan data APBD Tahun 2025, diproyeksikan SILPA Tahun 2026-2030 mengalami penurunan. Semula di tahun 2026 jumlah SILPA sebesar Rp544.970.751.963 lalu di tahun 2030 diproyeksikan menurun menjadi Rp492.483.469.294.

b) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib

Berdasarkan proyeksi tahun 2026 sampai 2030, total belanja wajib yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan cenderung mengalami kenaikan. Proyeksi 5 (lima) tahun kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan total belanja wajib di tahun 2025 sebesar Rp2.648.756.329.637 Proyeksi belanja wajib di tahun 2030 sebesar Rp3.332.810.602.087 berarti lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.

Belanja wajib dialokasikan antara lain untuk Belanja Pegawai, Pendidikan, Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Penguatan APIP dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, akan dilakukan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah dimuat dalam Peraturan Daerah. Rincian proyeksi kebutuhan Pengeluaran wajib yang terdiri atas belanja wajib dan pengeluaran pembiayaan dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.96.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib di Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi						Proyeksi					
		2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%	2030	%
A	**Belanja Wajib**	**2.538.756.329.637**		**2.686.997.743.283**		**3.035.407.836.471**		**3.123.880.513.755**		**3.221.847.084.299**		**3.332.810.602.087**	
1	Belanja Pegawai	654.584.717.264	17,0 %	749.584.717.109	22,5 %	768.324.335.037	22,5 %	787.532.443.413	22,5 %	807.220.754.498	22,5 %	827.401.273.360	22,4 %
2	Pendidikan	813.991.940.500	34,2 %	856.319.521.406	25,8 %	900.848.136.519	26,4 %	947.692.239.618	27,1 %	996.972.236.078	27,8 %	1.048.814.792.354	28,4 %
3	Infrastruktur	1.028.493.827.717	26,8 %	1.031.540.202.687	31,0 %	1.315.496.131.068	38,6 %	1.336.667.099.169	38,3 %	1.364.348.891.382	38,0 %	1.401.902.300.412	38,0 %
4	Peningkatan Kapasitas SDM	20.685.851.140	0,5%	27.427.709.440	0,8%	27.427.709.440	0,8%	27.427.709.440	0,8%	27.427.709.440	0,8%	27.427.709.440	0,7%
5	Penguatan APIP	20.999.993.016	0,5%	22.125.592.642	0,7%	23.311.524.407	0,7%	24.561.022.115	0,7%	25.877.492.901	0,7%	27.264.526.520	0,7%
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**110.000.000.000**	**2,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Penyertaan Modal Daerah	110.000.000.000	2,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib	**2.648.756.329.637**		**2.686.997.743.283**		**3.035.407.836.471**		**3.123.880.513.755**		**3.221.847.084.299**		**3.332.810.602.087**	

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

c) Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas sebenarnya dari kemampuan keuangan daerah yang disediakan untuk membiayai program Pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan menghitung proyeksi pendapatan, belanja, dan sisa lebih rill perhitungan anggaran Kabupaten Balangan selama periode tahun 2026-2030.

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas rill kemampuan keuangan daerah. Kapasitas rill keuangan daerah adalah total Penerimaan Daerah dan total Pengeluaran daerah. Total Penerimaan daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp3.949.707.519.631 dan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 proyeksi penerimaan daerah meningkat rata-rata pertumbuhan sebesar 2,63 persen.

Pada periode yang sama, Pengeluaran Daerah yang merupakan akumulasi dari Belanja ditambah pengeluaran pembiayaan, diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,63 persen. Komponen penerimaan daerah yang diproyeksikan meningkat tertinggi pada belanja operasi. Pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.666.488.016.496dan pada tahun 2030 meningkat sebesar Rp1.929.455.434.954 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 3,73 persen. Rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.97.
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025 (Perubahan APBD)	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.506.652.191.207**	**2.780.232.508.375**	**2.877.480.448.702**	**2.975.618.077.339**	**3.081.415.484.519**	**3.196.064.511.515**	**3,55%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**120.879.109.224**	**159.316.815.392**	**179.028.574.397**	**202.853.774.528**	**231.681.171.289**	**266.596.375.866**	**13,74%**
4.1.01	Pajak Daerah	28.902.958.032	37.163.351.400	42.737.854.110	49.148.532.227	56.520.812.060	64.998.933.870	15,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.773.128.000	1.950.440.800	2.084.826.171	2.228.470.694	2.382.012.325	2.546.132.974	6,89%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000	60.000.000.000	74.002.870.924	91.273.748.415	112.575.323.711	138.848.285.830	23,34%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	60.203.023.192	0,00%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.077.806.232.640**	**2.512.048.843.640**	**2.589.585.024.962**	**2.663.897.453.468**	**2.740.867.463.887**	**2.820.601.286.306**	**2,94%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.000.010.875.000	2.434.253.486.000	2.499.902.536.675	2.569.910.205.743	2.642.368.828.271	2.717.374.716.180	2,79%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640	77.795.357.640	89.682.488.287	93.987.247.725	98.498.635.616	103.226.570.126	7,42%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**307.966.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**108.866.849.343**	**0,00%**
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	307.966.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	108.866.849.343	**0,00%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**443.055.328.424**	**544.970.751.963**	**531.346.483.164**	**518.062.821.085**	**505.111.250.558**	**492.483.469.294**	**-2,50%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	443.055.328.424	544.970.751.963	531.346.483.164	518.062.821.085	505.111.250.558	492.483.469.294	-2,50%

No	Uraian	2025 (Perubahan APBD)	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
	TOTAL PENERIMAAN	**3.949.707.519.631**	**3.325.203.260.338**	**3.408.826.931.866**	**3.493.680.898.424**	**3.586.526.735.076**	**3.688.547.980.808**	**2,63%**
5	**BELANJA DAERAH**	**3.839.707.519.631**	**3.325.203.260.338**	**3.408.826.931.866**	**3.493.680.898.424**	**3.586.526.735.076**	**3.688.547.980.808**	**2,63%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.377.090.168.548**	**1.666.488.016.496**	**1.731.731.872.707**	**1.792.849.190.983**	**1.852.441.825.489**	**1.929.455.434.954**	**3,73%**
5.1.01	Belanja Pegawai	654.584.717.264	749.584.717.109	768.324.335.037	787.532.443.413	807.220.754.498	827.401.273.360	2,50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.483.787.684	809.881.635.787	856.385.874.070	898.295.083.970	938.199.407.391	995.032.497.993	5,28%
5.1.05	Belanja Hibah	175.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	90.816.588.600	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	16.205.075.000	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**978.440.141.942**	**1.259.075.521.606**	**1.276.627.091.605**	**1.300.363.739.888**	**1.333.616.942.033**	**1.358.624.578.301**	**1,92%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**90.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**0,00%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	90.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**394.177.209.141**	**349.639.722.236**	**350.467.967.554**	**350.467.967.554**	**350.467.967.554**	**350.467.967.554**	0,06%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541	4.106.948.181	4.935.193.499	4.935.193.499	4.935.193.499	4.935.193.499	5,04%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.759.506.600	345.532.774.055	345.532.774.055	345.532.774.055	345.532.774.055	345.532.774.055	0,00%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**110.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	110.000.000.000	-	-	-	-	-	
	TOTAL PENGELUARAN	**3.949.707.519.631**	**3.325.203.260.338**	**3.408.826.931.866**	**3.493.680.898.424**	**3.586.526.735.076**	**3.688.547.980.808**	**2,63%**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub bab ini memuat rumusan permasalahan Kabupaten Balangan yang menjadi input penting dalam penentuan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan yang perlu diambil untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya, isu strategis memberikan gambaran potensi dan peluang serta tantangan maupun permasalahan yang harus dikedepankan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan periode 2025-2029.

2.3.1.Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan menggambarkan kondisi belum tercapainya target-target pembangunan yang diharapkan. Rumusan permasalahan pembangunan juga dapat diperoleh dari kondisi dimana target pembangunan telah tercapai namun belum optimal bila dibandingkan dengan capaian provinsi atau daerah di sekitarnya. Lebih lanjut, permasalahan juga menggambarkan adanya keinginan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebab adanya target atau standar baru.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan diidentifikasi berdasarkan evaluasi kinerja beberapa tahun terakhir sebagaimana dapat dimuat pada Subbab 2.1. Penyajian permasalahan pembangunan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: 1). permasalahan utama daerah yang memiliki dampak besar dan luas bagi pembangunan daerah; 2) permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1.1. Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan utama pembangunan yang disajikan pada bagian ini merupakan beberapa masalah pokok yang ditemui di Kabupaten Balangan. Munculnya permasalahan utama ini dipengaruhi oleh beberapa masalah lainnya. Adapun permasalahan utama daerah yang dapat diidentifikasi, meliputi:

1. **Pengembangan Infrastruktur, konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah Belum Optimal dan Merata**

Pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan ditunjukkan dengan indikator indeks infrastruktur wilayah dan indeks kualitas lingkungan hidup dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan serta meningkatnya

kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri pengembangan infrastruktur saat ini masih harus dimaksimalkan perannya sehingga bisa optimal dan merata guna mendukung pertumbuhan dan penggerak perekonomian daerah. Kondisi saat ini terkait infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan diantaranya terkait dengan jaringan jalan dalam kondisi mantap, meskipun jaringan jalan dalam kondisi mantap yang diukur dengan indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%, terjadi penurunan aktivitas pengangkutan orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dari yang semula 130.872 pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 16.820 pada tahun 2023, dan belum optimalnya infrastruktur publik yang diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Publik dimana pada tahun 2024 masih berada pada angka 46,02.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian bersama guna menciptakan lingkungan yang mampu diwariskan dan berkelanjutan untuk masa depan. Berdasarkan pengukuran pada kualitas lingkungan hidup di Balangan pada tiga aspek air, udara dan lahan hanya kualitas udara yang memiliki kategori sangat baik sementara air dan lahan pada kategori sedang. Permasalahan yang perlu diatasi yaitu kualitas air dimana parameter Fecal Coli masih tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai serta kualitas lahan yang masih dikategori sedang karena belum ada penambahan lokasi ruang terbuka hijau.

2. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pengolahan, Perdagangan, Pertanian Perikanan, dan Pariwisata) serta Perekonomian masih Didominasi oleh Sektor Pertambangan

Peningkatan Perekonomian berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran terbuka dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menurunnya angka pengangguran terbuka.

Berdasarkan data grafik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi perekonomian di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,47 persen dan pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga menjadi 5,24 persen di tahun 2022, namun pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,15 persen atau turun sebesar 1,09 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, kondisi perekonomian di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 5,05 persen.

Dalam pelaksanaannya sendiri pertumbuhan ekonomi Balangan masih sangat ditopang oleh Pertambangan khususnya batu bara. Terdapat kecenderungan meningkatnya peranan komoditas pertambangan, data tahun 2020 menunjukkan kontribusi 59,92 persen naik menjadi 72,61 persen pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 12,69 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. Kondisi saat ini terkait perekonomian non pertambangan yang perlu terus dibenahi diantaranya kontribusi sektor pertanian dan perikanan, dimana sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 persentasenya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun menjadi hanya 7,87 persen pada tahun 2024 atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 12,23 persen, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga demikian, meskipun pada tahun 2024 persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 5,97 persen, begitu pula dengan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, meskipun pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 0,38 persen.

3. Masih adanya Pengangguran dan Kemiskinan serta belum meratanya pendapatan masyarakat

Upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Balangan masih perlu kerja keras dan upaya lebih besar lagi meskipun angka pengangguran di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 2,44 persen. Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya Partisipasi Angkatan Kerja dimana pada tahun 2024 masih berada pada angka 76,91.

Berbagai upaya untuk terus menekan angka pengangguran dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Balangan melalui serangkaian pelatihan kerja yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan industri.

Masalah lain yang erat kaitannya dengan pengangguran yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang diukur oleh indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berada pada 4,87 persen, berarti turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,22 persen. Walaupun menunjukkan penurunan, namun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Balangan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, angka kemiskinan di Balangan berada pada urutan 4 tertinggi setelah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong.

Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap terus melakukan upaya inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sejumlah program prioritas diantaranya dengan melakukan penambahan lapangan kerja, mengadakan pelatihan kerja, serta mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Balangan.

Selain itu, ketimpangan pendapatan atau belum meratanya pendapatan masyarakat di Balangan juga perlu perhatian, dimana ini ini diukur dengan gini rasio/indeks gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dari 0 sampai 1, semakin rendah maka semakin merata atau baik. Meskipun gini rasio Balangan menunjukkan tren menurun di lima tahun terakhir di angka 0,218 pada tahun 2024, namun hal ini tetap perlu diantisipasi dan menjadi perhatiaan daerah karena setiap tahunnya penduduk Balangan akan semakin meningkat apalagi dengan banyaknya kedatangan orang dari berbagai daerah karena lebih massifnya pembangunan salah satunya dalam rangka

mendukung ibu kota negera (IKN) di Kalimantan Timur tentu akan menjadikan Balangan sebagai salah satu daerah penyangga yang perlu berbenah dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing sehingga mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah di Regional Kalimantan Selatan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan sebuah wilayah. Oleh sebab itu, sejak dahulu pembangunan SDM selalu menjadi prioritas dan menjadi tolok ukur kemajuan daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM sebuah daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Kondisi terkini tahun 2024 menunjukkan IPM Kabupaten Balangan mencapai 73,83, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,97 di tahun 2023. Walaupun mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 IPM di Kabupaten Balangan selalu lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasinal. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan masih berada pada urutan 5 terendah. Dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah semestinya pembangunan SDM di Kabupaten Balangan dapat lebih ditingkatkan.

Berbicara mengenai IPM, maka tidak lengkap bila tidak melihat sampai ke komponen pembentuknya yakni kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah serta usia harapan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk kualitas pendidikan jika dilihat pada IPM secara umum kualitas pembangunan manusia di Balangan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Kalsel Balangan masih berada di urutan ke-9 dan perlu upaya yang lebih optimal untuk sejajar dengan daerah lainnya. Pada tahun 2024 angka rata-rata lama sekolah capaiannya 8,13 naik sekitar 0,10 dari tahun 2023 sedangkan harapan lama sekolah capaiannya 13,09 naik sekitar 0,27 dari tahun 2023.

Selanjutnya, untuk kualitas kesehatan masyarakat Balangan dalam rangka mewujudkan peningkatan usia harapan hidup secara umum sudah menujukkan taraf kesehatan yang baik, dimana untuk UHH pada tahun 2024 sebesar 73,87 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 73,69. Hal-hal yang perlu terus ditingkatkan diantaranya kelengkapan sarana dan parasarana kesehatan serta edukasi khususnya terhadap penanganan dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi stunting yang lebih massif serta penurunan angka kelahiran remaja yang masih tinggi di Balangan.

Selain itu, sehubungan UHH Kabupaten Balangan masih berada dibawah Propinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkannya melalui implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 tahun 2020. Implementasi GERMAS yang dimaksud tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja namun juga oleh seluruh SKPD terkait dah pihak swasta melalui berbagai kegiatan seperti penggerakan masyarakat, sosialisasi, edukasi, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terciptanya budaya hidup sehat di masyarakat Balangan.

Komponen IPM yang menggambar kondisi standar hidup layak masyarakat diukur oleh indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Balangan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Data menunjukkan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan tahun 2024 mencapai 12.325 Ribu Rupiah/Orang/Tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Balangan berada pada posisi 3 terendah setelah Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Balangan memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Kalimantan Selatan. Selain itu, bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir, capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Balangan selalu berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pengarusutamaan gender (PUG) juga berperan penting dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengingat masih terdapat kesenjangan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)

perlu terus diperkuat karena masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk pencegahan perkawinan anak yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan peningkatan risiko stunting.

5. Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan yang Belum Optimal

Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan diukur dengan indeks reformasi birokrasi dengan tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dibenahi baik dari kualitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana pelayanan publik. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan indikator penyusunnya hal yang harus dioptimalkan diantaranya nilai SAKIP Pemerintah Balangan pada tahun 2024 yang masih berada di angka 72,09 poin dengan kategori BB yang didorong pada poin perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan juga masih belum optimal yaitu masih berada pada angka 83,06 di tahun 2024. Begitu pula dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diukur oleh indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Balangan yang dinilai masih belum optimal dengan capaian pada tahun 2024 masih berada pada angka 87,07.

6. Perwujudan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama yang Harmonis dan Kondusif Belum Optimal

Mewujudkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif diukur dengan angka kemiskinan, angka konflik sosial bernuansa SARA, indeks ketentaraman dan ketertiban umum, persentase pengembangan seni dan budaya, serta indeks desa membangun dengan dua tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif dan meningkatnya nilai indeks desa membangun. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan untuk tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif menunjukkan masih perlu kerja keras di berbagai lini diantaranya angka kemiskinan pada tahun 2024 yang berada pada angka 4,87 poin salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi daerah yang masih rapuh dan ditopang pertambangan sehingga saat terjadi wabah pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan masih cukup tinggi, permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya penanganan PPKS dimana pada tahun

2024 masih diangka 73,18 persen, sehingga perlu perhatian yang lebih optimal terhadap kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lanjut usia, pekerja informal, serta kelompok rentan lainnya juga menjadi prioritas agar mereka memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, masih tingginya risiko bencana di Kabupaten Balangan meskipun selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, namun capaiannya masih diangka 104,24 pada tahun 2024.

Selanjutnya untuk nilai indeks desa membangun dimana indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada tahun 2024 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,8049 dengan kategori maju. Meskipun berada pada status kategori maju, namun IDM Kabupaten Balangan pada tahun 2024 tersebut masih berada pada urutan keempat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Masih rendahnya Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Balangan menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius khususnya pada kualitas air dan lahan yang mana dari hasil pengamatan mutu air di tahun 2023, menunjukkan status mutu air pada kondisi cemar ringan dengan nilai IP mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Capaian indeks kualitas lahan meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun kenaikan belum signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan menghilangkan tutupan vegetasi diatasnya sehingga tergolong sebagai tutupan lahan terbuka. Hilangnya tutupan vegetasi alami tentunya akan menggeser fungsi lingkungan hidup dari kondisi semula. Selain itu, modifikasi lahan dengan penggalian lubang tambang begitu besar dan dalam menciptakan relif dan kelerengan yang berbeda dari kondisi aslinya. Pengelolaan pasca tambang yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dampak negatif dari kegiatan tambang diminimalkan dan kondisi lingkungan dapat pulih seperti sediakala. Dengan demikian, menjadi penting isu terkait kualitas air dan tutupan lahan dipertimbangkan sebagai salah satu rumusan isu strategis.

Permasalahan lainnya yaitu, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Balangan yang diukur oleh indikator IKLH pada tahun 2024 masih di angka 70,80 atau mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian capaiannya masih dalam kategori sedang dan masih tergolong rendah di banding Kabupaten Kota se Kalsel. Kondisi tersebut menjadikan capaian terhadap IKLH masih perlu untuk dioptimalkan.

Selanjutnya, Intensitas kejadian bencana alam terutama bencana hidrometeorologis diperkirakan terus meningkat seiring krisis iklim global yang masih berlangsung. Tidak hanya menimbulkan kerugian infrastruktur dan ekonomi, namun juga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bahaya kekeringan, kesehatan, dan dampak psikologis. Risiko Bencana Kabupaten Balangan yang diukur oleh indikator Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Terjadi penurunan nilai IRBI setiap tahunnya dimana tahun 2024 Balangan mencapai 104,24 dengan kriteria Sedang. Capaian ini lebih rendah dari nilai IRB Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 122,11 dengan kriteria Sedang. Meski terus menurun tentu mitigasi bencana tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah khususnya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan yang masih rawan terjadi dengan kondisi geografis Balangan yang memiliki banyak sungai dan perbukitan.

2.3.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini memuat permasalahan pembangunan berdasarkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Balangan. Permasalahan pembangunan yang disajikan pada tabel di bawah menggambarkan mutu maupun cakupan pelayanan urusan yang membutuhkan penyelesaian atau perbaikan serta peningkatan.

Tabel 2.98.
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Pendidikan	a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diukur oleh indikator RLS yang capaiannya masih dibawah Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir. b. Tingkat partisipasi penduduk yang diukur oleh indikator Angka Partisipasi Kasar cenderung mengalami penurunan, dengan penjelasan: 1) APK untuk jenjang PAUD pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 89,28%. 2) APK untuk jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 108,35%. 3) APK untuk jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 104,32%. 4) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/SMK/Paket C c. Daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang diukur oleh indikator Angka Partisipasi Murni cenderung mengalami penurunan, dengan penjelasan: 1) APM untuk jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 99,27%. 2) APM untuk jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 82,69%. 3) APM untuk jenjang SMA/SMK/Paket C pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 70,84%. d. Menurunnya partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama. e. Masih adanya angka putus sekolah. Beberapa kasus putus sekolah terjadi didaerah terpencil disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap. f. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. g. Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun. h. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat.
2.	Kesehatan	a. Belum optimalnya Derajat kesehatan Masyarakat dan Gerakan untuk hidup sehat di Kabupaten Balangan yang diukur oleh Umur harapan hidup masih rendah. Capaian Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah 73,87 tahun atau mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Namun demikian angka ini masih lebih rendah dibanding umur harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan. b. Kematian bayi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya 7. c. Kematian ibu pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang hanya 89. d. Belum optimalnya penanganan masalah gizi pada kelompok balita yang diukur oleh indikator Prevalensi Stunting, dimana pada tahun 2024 terjadi peningkatan Prevalensi Stunting. e. Menurunnya ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan. f. Cenderung menurunnya ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan. g. Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 98,94%. h. Menurunnya anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. i. Menurunnya penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. j. Menurunnya penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. k. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan tidak optimal. l. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya dokter spesialis, dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya termasuk masih adanya desa yang belum memiliki bidan. m. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang. n. Kurangnya alat-alat kesehatan yang memenuhi standar di puskesmas dan jaringannya serta di RSUD. o. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola asuh anak (Balita). p. Masih rendahnya desa Stop Buang Air Besar Sembarangan berdasarkan aspek prilaku masyarakat. q. Masih rendahnya kualitas sumber air minum yang memenuhi syarat kualitas air minum.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		r. Masih ada puskesmas yang belum terakreditasi dan masih banyak puskesmas yang akreditasinya masih berstatus ketegori dasar. s. Akreditasi RSUD masih berstatus kategori dasar.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu aggregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baik. b. Belum optimalnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2024 masih sebesar 48,51%. hal ini diakibatkan karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan. c. Masih rendahnya luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik yaitu sebesar 34,55% pada tahun 2024. d. Belum optimalnya luasan ruang terbuka hijau.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 96,37%. b. Masih rendahnya masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni. c. Tidak seimbangnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman dengan kelengkapan PSU. d. Belum adanya sistem pengelolaan persampahan.
5.	Ketenteraman. Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	a. Menurunnya penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. b. Masih kurangnya Sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang mendukung penanggulangan bencana. c. Masih rendahya kesadaran akan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana. d. Munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya Agama pertahanan dan keamanan. e. Kurangnya kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi konflik sosial. f. Belum Optimalnya pemahaman wawasan politik dimasyarakat dalam membangun pemilih cerdas dan bertanggung jawab. g. Belum optimalnya sosialisasi dan simulasi pemilu dan pemilihan kepala daerah dikalangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk mengikuti pemilu dan pemilihan kepala daerah. h. Belum sinkronnya data ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan ormas. i. Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaaan dalam kehidupan Masyarakat.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
6.	Sosial	a. Belum optimalnya PPKS yang tertangani. b. Belum optimalnya PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. c. Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai 100%. d. Belum tersedianya data progres manfaat. e. Belum terpenuhinya kepemilikan database PPKS oleh pemerintah daerah. f. Belum optimalnya jangkauan pada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan. g. Belum tersedianya rumah singgah. h. Belum optimalnya kebermanfaatan PSKS. i. Belum optimalnya perhatian terhadap kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lanjut usia, pekerja informal, serta kelompok rentan lainnya.
7.	Tenaga Kerja	a. Menurunnya Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi. b. Menurunnya Produktivitas Tenaga Kerja. c. Menurunnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. d. Menurunnya Tenaga kerja yang ditempatkan. e. Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja. f. Masih tingginya angka pengangguran. g. Kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri/Perusahaan yang ada di Balangan. h. Kurangnya kesempatan kerja dari industri/Perusahaan yang ada di Balangan. i. Serapan Tenaga kerja di Sektor Tambang masih kalah dari sector lainnya padahal sektor ini penyumbang tertinggi terhadap PDRB kabupaten Balangan. j. Kurang optimalnya nya pelatihan-pelatihan yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja di sector Non Formal.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Menurunnya Pembangunan Gender. b. Terjadi penurunan Pemberdayaan Gender. c. Terjadi penurunan tingkat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang diukur oleh indikator Indeks Perlindungan Anak. d. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan. e. Masih adanya perkawinan usia anak. f. Belum tersedianya tenaga konselor dalam penanganan kasus kekerasan di P3A Kab. Balangan. g. Masih adanya kasus kekerasan anak. h. Belum tersedianya tenaga konselor dan Psikolog Klinis. i. Belum tersedianya tenaga Paralegal dan Advokat. j. Masih kurangnya pemahaman mengenai Konsep Responsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). k. Masih terdapat kesenjangan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan
9.	Pangan	a. Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya 2,96. b. Menurunnya Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		c. Masih tingginya Desa Rentan Pangan. d. Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 200,58%. e. Menurunnya ketersediaan produksi untuk komoditi Telur Ayam Ras, Jagung dan Kacang Tanah. f. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian. g. Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan-bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu. h. Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian. i. Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan.
10.	Pertanahan	a. Penatagunaan tanah pemerintah daerah yang belum maksimal.
11.	Lingkungan Hidup	a. Belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup. b. Menurunnya pengelolaan sampah, yang ditandai dengan menurunnya beberapa indikator Kinerja Pengelolaan Sampah antara lain: 1. Menurunnya Timbunan sampah yang tertangani 2. Menurunnya Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R 3. Menurunnya Persentase sampah yang tertangani c. Cenderung menurunnya Tutupan Lahan. d. Masih rendahnya kualitas air. e. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemilahan sampah. f. Belum optimalnya daur ulang sampah. g. Belum optimalnya pengurangan sampah. h. Belum optimalnya pengelolaan RTH. i. Belum optimalnya penggalian potensi – potensi PAD (Sampah, RTH, LAB).
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Menurunnya Pembuatan KTP elektronik. b. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tahun bersangkutan. c. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD. d. SDM pelayanan belum terlatih dasar-dasar *sevice excellent* sehingga dalam memberikan pelayanan belum memenuhi standar pelayanan publik. e. Masih rendahnya tingkat pemahaman penduduk tentang tertib administrasi kependudukan. f. Masih kurangnya sosialisasi tentang adminitrasi kependudukan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. g. Perangkat elektronik untuk pelayanan menggunakan SIAK serta perekaman dan pencetakan KTP-el memiliki umur ekonomis 5 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan minimal 5 tahun sekali. h. Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar intansi terkait kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Status desa mandiri pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 100%. b. Belum optimalnya penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa. c. Rendahnya BUMDes kategori maju. d. Kurangnya pemahaman SDM Aparatur Desa terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa.
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	a. Menurunnya pemakaian kontrasepsi Modern. b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan anak. c. Pengaruh sosial budaya untuk menikahkan anak usia dini terutama didaerah terpencil. d. PUS usia kurang dari 20 tahun tidak menggunakan kontrasepsi.
15.	Perhubungan	a. Konektivitas pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 25. b. Kinerja lalu lintas pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 28. c. Uji kir angkutan umum pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 2.886. d. Belum optimalnya Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas. e. Menurunnya PAD Sektor Perhubungan Darat. f. Rendahnya pelayanan angkutan orang dalam kabupaten. g. Kurangnya ketersediaan sarana angkutan umum. h. Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. i. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji kir. j. Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal angkutan penumpang tipe c. k. Belum optimalnya pengembangan titik – titik parkir sebagai potensi penyumbang PAD.
16.	Komunikasi dan Informatika	a. Rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 99,36%. b. Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 15,74%. c. Belum maksimalnya jangkauan akses jaringan di daerah blank spot. d. Masih rendahnya penggunaan sistem informasi daerah.
17.	Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	a. Menurunnya Koperasi yang berkualitas. b. Menurunnya Usaha Mikro dan UMKM. c. Menurunnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha.
18.	Penanaman Modal	a. Peningkatan investasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 673,42%. b. Menurunnya nilai investasi berskala nasional. c. Belum optimalnya iklim investasi daerah (Realisasi Investasi masih didominasi pada Sektor Pertambangan, sementara Sektor yang lebih banyak menyerap Tenaga Kerja seperti Pertanian Masih belum ada dari segi realisasi Investasi). d. Masih sulitnya melakukan investasi berbasis peta potensi. e. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha.
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	a. Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. b. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. c. Prestasi olahraga pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 167 medali. d. Belum terpenuhinya fasilitas olahraga. e. Belum adanya penataan Induk Organisasi Keolahragan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi oalahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasioanal, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
20.	Statistik	a. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral yang valid dan akurat serta terupdate sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan Pembangunan. b. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai prinsipnya, termasuk belum optimalnya forim satu data. c. Belum terintegrasinya portal satu data balangan dengan satu data banua dan Satu data Indonesia. d. Belum optimalnya pelaksanaan e-walidata, kualitas data yang dihasilkan produsen data belum sesuai prinsip data, e. Kurangnya pemahaman tentang rekomendasi data dan metadata sesuai prinsip satu data f. Kurangnya SDM yang mengerti tentanng integrasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, kurangnya koordinasi terkait pengintergasian satu data
21.	Persandian	a. Keamanan informasi pemerintah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 100%. b. Masih kurangnya pengamanan website pemda. c. Kurangnya SDM/Tenaga IT Kemanan Informasi. d. Belum terbentuknya CSIRT Pemkab. e. Masih rendahnya Hasil Evaluasi Indeks Keamanan Informasi Nilai 184, Tidak Layak).

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
22.	Kebudayaan	a. Minimnya penyelenggaraan festival kesenian. b. Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya. c. Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan.
23.	Perpustakaan	a. Tingkat kegemaran membaca Masyarakat pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 82,48%. b. Tidak adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. c. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan seperti perpustakaan desa yang masih minim. d. Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling. e. Letak perpustakaan daerah kabupaten tidak strategis karena tidak berada diwilayah perkotaan.
24.	Kearsipan	a. Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 100%. b. Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 100%. c. Pengelolaan arsip secara baku sesuai standar belum optimal. d. Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif. e. Belum optimalnya SDM kearsipan sebagai arsiparis yang bersertifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun disetiap OPD. f. Minimnya sarana dan prasarana salah satu diantaranya tidak adanya depo arsip daerah yang sesuai standar ANRI.
25.	Perikanan	a. Belum optimalnya produksi perikanan. b. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan. c. Belum optimalnya pengawasan Kawasan Perikanan Lestari. d. Kurangnya minat Masyarakat terhadap perikanan tangkap. e. Belum adanya pengembangan potensi ikan lokal.
26.	Pariwisata	a. Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara. b. Hunian akomodasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai 100%. c. Menurunnya kontribusi sektor pariwisata. d. Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. e. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana objek wisata. f. Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke objek – objek wisata. g. Masih rendahnya ketersediaan akomodasi yang representatif (penginapan dan rumah makan).

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
27.	Pertanian	a. Produktivitas pertanian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 523,66 Ton Per Hektar Per Tahun. b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 12,23 persen. c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. d. Belum optimalnyasarana dan prasaranapertanian. e. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani. f. Belum optimalnya pengendalian OPT. g. Belum optimalnya kelembagaan petani. h. Belum optimalnya fungsi irigasi. i. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan (utama) jagung hibrida, kopi lokal, padi gunung. j. Mahalnya harga pakan. k. Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan.
28.	Perdagangan	a. Menurunnya kinerja realisasi pupuk. b. Menurunnya alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.
29.	Perindustrian	a. Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 5,81 persen. b. Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK. c. Menurunnya hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait. d. Menurunnya hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
30.	Transmigrasi	Masih minim nya kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.
31.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	a. Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan yang Belum Optimal. b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kabupaten Balangan yang diukur oleh nilai SAKIP. c. Belum optimalnya tingkat Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan. d. Menurunnya Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.
32.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Menurunnya Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan. b. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah. c. Menurunnya Belanja Urusan Pemerintahan Umum. d. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 11,50 persen. e. Menurunnya Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya. f. Pengelolaan keuangan masih perlu perbaikan. g. Menurunnya pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. h. Menurunnya belanja yang dilakukan melalui pengadaan. i. Menurunnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.3.2. Isu Strategis Daerah

2.3.2.1. Isu Internasional

Isu internasional menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, isu internasional yang dihadapi dunia saat ini sedikat banyak memberikan kontribusi bagi Indonesia termasuk daerah-daerah di dalamnya. Isu internasional menjadi tantangan pembangunan jangka panjang yang perlu dicermati sehingga Balangan dapat menghadapi tantangan.

Pada dokumen Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 telah diidentifikasi tantangan global kedepan yaitu berupa 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju tahun 2045. Kesepuluh megatren global tersebut terdiri atas:

1. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).
2. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan mengantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.

7. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan oeranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. **Perubahan iklim**. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. **Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).** Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.3.2.2. Isu/Kebijakan Nasional

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025-2029 diarahkan untuk mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 agar terwujud sinergi perencanaan pusat dan daerah. Visi Presiden periode 2O25-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai mclalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Gambar 2.42.
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan dibcrbagai sektor serta langkah-langkah bcrupa Program Hasil Terbaik Ccpat/Ouick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan scrta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pcmbangunan RPJMN Tahun 2O25-2O29. Untuk pencapa.ian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah`, dan Badan Usaha (BUMN dan Swasta).



Gambar 2.43.
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2O29 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

2) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada

perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.

Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi "Kota Dunia untuk Semua" tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan.

Perencanaan IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni sebagai berikut:

a. Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare;
b. Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56. 180 hektare; dan
c. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

3) Isu Pengurangan Tingkat kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Isu strategis terkait Pengurangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) menjadi perhatian penting dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah. TKDN selama ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat industri dalam negeri melalui kewajiban penggunaan komponen lokal pada berbagai sektor, termasuk energi, infrastruktur,

telekomunikasi, dan manufaktur. Namun, pengurangan standar TKDN berpotensi melemahkan daya saing industri lokal karena terbukanya ruang lebih besar bagi produk impor yang dinilai lebih murah dan kompetitif. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah (IKM), sehingga mengancam kesinambungan usaha serta lapangan kerja masyarakat.

Selain itu, penurunan kewajiban TKDN berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap barang dan jasa impor, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kemandirian serta ketahanan nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam, karena hasil hilirisasi yang diproduksi di dalam negeri bisa kehilangan pasar domestiknya. Di sisi lain, dari perspektif investasi, pengurangan TKDN dapat memberikan kemudahan bagi investor asing dalam melaksanakan proyek karena tidak lagi dibatasi oleh persyaratan penggunaan komponen lokal. Namun, kondisi tersebut juga berisiko menurunkan efek berganda (multiplier effect) dari investasi terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Dengan demikian, isu pengurangan TKDN memunculkan dilema kebijakan. Di satu sisi dapat mempercepat realisasi investasi dan efisiensi biaya pembangunan, tetapi di sisi lain dapat melemahkan industri dalam negeri, mengurangi peluang kerja, dan menurunkan daya saing ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencermati isu ini secara hati-hati agar strategi pembangunan yang dirancang tetap berpihak pada penguatan ekonomi lokal, tanpa mengabaikan keterbukaan terhadap investasi.

4) Isu Pelonggaran Masuknya Barang-Barang Impor

Isu pelonggaran masuknya barang-barang impor menjadi tantangan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun nasional. Kebijakan pelonggaran impor umumnya dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, menekan harga, dan mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas kebutuhan pokok dan barang penunjang industri. Namun, pelonggaran yang terlalu luas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan industri dan produk lokal yang berpotensi kalah bersaing dengan barang impor yang seringkali lebih

murah dan memiliki standar kualitas yang konsisten. Kondisi ini berisiko menurunkan produktivitas pelaku usaha dalam negeri, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain itu, derasnya arus barang impor dapat meningkatkan ketergantungan terhadap produk luar negeri, yang pada akhirnya mengurangi kemandirian ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah ketahanan ekonomi, memperlebar defisit neraca perdagangan, serta menghambat perkembangan hilirisasi sumber daya lokal. Di sisi lain, pelonggaran impor memang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen karena harga menjadi lebih terjangkau dan pilihan barang semakin beragam, serta membantu menjaga kelancaran rantai pasok industri tertentu yang masih bergantung pada bahan baku impor. Isu pelonggaran masuknya barang-barang impor mengandung dilema kebijakan. Di satu sisi, dapat membantu stabilisasi harga, mendukung investasi, dan memperlancar produksi. Namun di sisi lain, berpotensi melemahkan daya saing produk lokal, mengurangi permintaan terhadap komoditas dalam negeri, serta menghambat pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyikapi isu ini dengan hati-hati melalui kebijakan proteksi selektif, penguatan kapasitas produksi lokal, dan peningkatan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan barang impor.

5) Isu Pertambahan Jumlah Pengangguran akibat pemutusan hubungan Kerja (PHK)

Isu pertambahan jumlah penganggaran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi perhatian strategis karena berimplikasi langsung terhadap beban fiskal pemerintah daerah. Meningkatnya angka PHK, baik sebagai dampak perlambatan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, maupun perubahan iklim usaha global, berpotensi menambah jumlah masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan tetap. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan anggaran pemerintah untuk menyediakan berbagai program jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja, subsidi kebutuhan pokok, serta penciptaan lapangan kerja alternatif. Akibatnya, alokasi anggaran daerah yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan infrastruktur atau

program prioritas lainnya berpotensi mengalami pergeseran untuk menutupi kebutuhan darurat akibat tingginya tingkat PHK.

Lonjakan angka PHK tidak hanya memunculkan tekanan pada aspek penganggaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang. Peningkatan jumlah pengangguran dapat memperbesar risiko kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengurangi daya beli masyarakat yang pada akhirnya menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, meningkatnya pengangguran juga menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat program pemberdayaan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta fasilitasi wirausaha dan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK.

Isu pertambahan jumlah penganggaran akibat PHK menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas fiskal daerah dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat terdampak. Pemerintah daerah perlu merespons isu ini dengan strategi adaptif, antara lain melalui efisiensi belanja, penguatan program padat karya, peningkatan investasi yang pro-lapangan kerja, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan kesempatan kerja baru. Langkah tersebut menjadi penting agar dampak sosial-ekonomi dari PHK dapat ditekan tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan daerah.

6) Isu Program Makan Bergizi Gratis

Isu Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian penting dalam konteks pembangunan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan, sebagai upaya menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui penyediaan makanan bergizi, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sehingga mampu menjadi modal utama pembangunan daerah di masa depan.

Implementasi program ini tidak lepas dari tantangan strategis. Pertama, dari aspek fiskal, penyediaan makan bergizi gratis membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berkelanjutan, sehingga berpotensi menekan alokasi belanja daerah untuk sektor prioritas lainnya. Kedua, dari aspek logistik dan manajemen, penyediaan bahan makanan bergizi secara

konsisten di seluruh wilayah membutuhkan sistem distribusi yang kuat serta pengawasan mutu yang ketat agar program benar-benar memberikan manfaat. Ketiga, terdapat potensi ketergantungan masyarakat terhadap program, apabila tidak disertai dengan upaya edukasi gizi dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Program ini juga membuka peluang untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM pangan lokal, apabila pengadaan bahan makanan dapat diprioritaskan dari produk dalam negeri maupun hasil produksi daerah. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai intervensi sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal.

Oleh karena itu, isu Program Makan Bergizi Gratis menuntut kebijakan yang cermat dan berimbang. Pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan pembiayaan, memperkuat tata kelola distribusi, melibatkan UMKM dan petani lokal, serta menyertakan edukasi gizi bagi masyarakat. Dengan langkah tersebut, manfaat program dapat dirasakan secara optimal baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian daerah.

7) Isu Program Makan Bergizi Gratis

Isu Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian penting dalam konteks pembangunan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan, sebagai upaya menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui penyediaan makanan bergizi, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sehingga mampu menjadi modal utama pembangunan daerah di masa depan.

Namun demikian, implementasi program ini tidak lepas dari tantangan strategis. Pertama, dari aspek fiskal, penyediaan makan bergizi gratis membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berkelanjutan, sehingga berpotensi menekan alokasi belanja daerah untuk sektor prioritas lainnya. Kedua, dari aspek logistik dan manajemen, penyediaan bahan makanan bergizi secara konsisten di seluruh wilayah membutuhkan sistem distribusi yang kuat serta pengawasan mutu yang ketat agar program benar-benar memberikan manfaat. Ketiga, terdapat potensi

ketergantungan masyarakat terhadap program, apabila tidak disertai dengan upaya edukasi gizi dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di sisi lain, program ini juga membuka peluang untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM pangan lokal, apabila pengadaan bahan makanan dapat diprioritaskan dari produk dalam negeri maupun hasil produksi daerah. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai intervensi sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal. Isu Program Makan Bergizi Gratis menuntut kebijakan yang cermat dan berimbang. Pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan pembiayaan, memperkuat tata kelola distribusi, melibatkan UMKM dan petani lokal, serta menyertakan edukasi gizi bagi masyarakat. Dengan langkah tersebut, manfaat program dapat dirasakan secara optimal baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian daerah.

8) Isu Koperasi Merah Putih

Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa sesungguhnya memuat tujuan yang mulia, yaitu menciptakan kelembagaan ekonomi yang kuat, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target pembentukan puluhan ribu koperasi baru hingga tahun 2025 diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing produk lokal, serta mengurangi ketergantungan desa terhadap pihak ketiga dalam menggerakkan perekonomian. Namun, di balik tujuan yang ideal tersebut, terdapat berbagai isu strategis yang perlu dicermati secara serius.

Pertama, isu terkait kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan utama. Pengalaman masa lalu pada era Koperasi Unit Desa (KUD) menunjukkan banyak koperasi gagal bertahan karena lemahnya manajemen, kurangnya profesionalisme pengurus, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip koperasi. Kondisi ini berpotensi terulang jika Koperasi Merah Putih hanya dibentuk secara administratif tanpa diikuti dengan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas SDM yang memadai.

Kedua, muncul isu mengenai skema pembiayaan dan risiko keberlanjutan usaha. Pemerintah memberikan skema pinjaman hingga Rp3 miliar bagi koperasi desa, namun dalam praktiknya banyak desa masih

menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, keterbatasan akses pasar, dan minimnya pengalaman usaha. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi gagal bayar serta beban finansial yang justru dapat memperlemah perekonomian desa. Tanpa kajian bisnis yang matang, skema pendanaan tersebut berisiko tidak efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketiga, terdapat potensi tumpang tindih kelembagaan ekonomi desa. Saat ini desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Kehadiran Koperasi Merah Putih tanpa koordinasi yang jelas berpotensi menimbulkan persaingan internal, tumpang tindih program, hingga kebingungan masyarakat dalam berpartisipasi. Hal ini bisa melemahkan efektivitas program, apalagi jika kedua lembaga berebut sumber daya yang sama, baik dana maupun dukungan masyarakat.

Keempat, isu governance, transparansi, dan akuntabilitas menjadi perhatian besar. Besarnya dana yang akan dikelola menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan, praktik nepotisme, hingga "*elite capture*" oleh pihak-pihak tertentu di desa. Jika tidak diawasi dengan ketat, koperasi dapat kehilangan fungsi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan dan justru menjadi instrumen kepentingan segelintir orang.

Kelima, terdapat kritik terhadap pendekatan sentralistik dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Desain program yang top-down dikhawatirkan mengabaikan keragaman potensi dan kebutuhan desa, sehingga kurang sesuai dengan prinsip otonomi desa dan asas rekognisi yang dijamin undang-undang. Padahal, semangat koperasi seharusnya lahir dari inisiatif masyarakat itu sendiri, bukan sekadar instruksi dari pemerintah pusat.

Dengan berbagai isu tersebut, jelas bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi secara kuantitatif, melainkan juga pada kualitas kelembagaan, kapasitas pengelolaan, integrasi dengan lembaga ekonomi desa lain, serta mekanisme pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, program ini berpotensi mengulang kegagalan koperasi di masa lalu dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi desa.

9) Isu-Isu Terkait Hasil Pengawasan

Isu-isu terkait hasil pengawasan merupakan berbagai permasalahan yang muncul dari kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, maupun pemantauan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal pemerintah. Dari sisi kelembagaan, pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu isu utama adalah masih ditemukannya kelemahan pada sistem pengendalian intern pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan program dan kegiatan. Kelemahan ini sering berdampak pada ketidaktepatan sasaran program, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, hingga keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, hasil pengawasan juga mengungkap adanya permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, administrasi pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian penggunaan anggaran. Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak atau belum ditindaklanjuti secara optimal, sehingga menimbulkan risiko berulangnya permasalahan yang sama pada periode berikutnya. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan program pembangunan juga masih menjadi perhatian, karena dalam beberapa kasus capaian indikator kinerja tidak sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Isu pengawasan juga berkaitan erat dengan faktor kapasitas sumber daya manusia pengelola program dan keuangan daerah. Kompetensi yang belum merata, keterbatasan pemahaman regulasi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas seringkali memperlambat perbaikan tata kelola. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menindaklanjuti catatan hasil pengawasan, sehingga memperlambat proses perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Jika isu-isu tersebut tidak ditangani secara konsisten dan sistematis, maka akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.3.2.3. Isu Strategis/Kebijakan Regional

A. Isu Strategis Pulau Kalimantan

Isu strategis Pulau Kalimantan sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Fondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat.
2. pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian, serta konektivitas yang masih terbatas.
3. tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal.
4. daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.
5. pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan belum dilakukan secara optimal.

B. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan disusun bersamaan dengan RPJMD Kabupaten Balangan, sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 mengidentifikasi beberapa isu strategis, yaitu:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah
2. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian serta Konektivitas yang Masih Terbatas
4. Fondasi Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan yang Masih Belum Kuat dan Proses Hilirisasi Masih Lambat
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Potensial yang Berkelanjutan dan Terintegrasi Antarwilayah Kabupaten/Kota Belum Optimal
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Belum Dilakukan Secara Optimal
7. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah: KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN. Visi RPJMD diwujudkan melalui misi yang jelas dan menggambarkan pencapaian pokok-pokok visi. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
2. Pembangunan Infrastruktur yang Handal
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah
4. Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
5. Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah & Cepat

Janji kampanye gubernur dan wakil gubernur apda periode tahun 2025-2029, meliputi:

1. Pesantren Modern Terpadu
2. Mendorong Program Paket A, B, dan C
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, serta Jaminan Sosial
4. Peningkatan Transportasi Publik ke Daerah Pelosok
5. Pembangunan Jembatan Pulau Laut
6. Pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih
7. Mendorong Bandara Internasional Syamsudin Noor
8. Meningkatkan Olahraga dan Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional
9. Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
10. Menigkatkan Pariwisata dan Kebudayaan

2.3.2.4. Isu/Kebijakan Kabupaten

A. Telaahan RTRW Kabupaten Balangan

Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan memuat tujuan dari penataan ruang Kabupaten Balangan adalah "**Mewujudkan Bumi Balangan sebagai Kabupaten Berdaya Saing Tinggi berbasis Keunggulan Agrindustri, Agrobisnis, ditunjang oleh Pusat Perkotaan, Pusat Budaya dan Pusat Religi Regional serta Berwawasan Lingkungan**".

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Kawasan-kawasan Potensial sebagai Sentra Penghasil Komoditas Unggulan yang Berdaya Saing.
2. Kebijakan Perwujudan Balangan sebagai Wilayah Berdaya Saing Tinggi Berbasis Keunggulan Agroindustri dan Agrobisnis.
3. Kebijakan Penataan Pusat-Pusat Perkotaan yang Merata, Berhierarki, dan Terintegrasi dengan prinsip Keseimbangan Wilayah.

4. Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana wilayah guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan prinsip keseimbangan wilayah.
5. Kebijakan Perwujudan Balangan sebagai Pusat Budaya dan Pusat Religi Regional Berbasis Wisata yang didukung oleh Daya Tarik Wisata Alam.
6. Kebijakan Perwujudan dan Pengaturan dalam harmonisasi antara lingkungan Alam Buatan secara Berkelanjutan.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang disusun untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan yang merupaan kebijakan tentang struktur, pola ruang dan kawasan strategis. Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka dirumuskan strategi-strategi sebagai panduan dalam operasionalisasinya.

Kebijakan dan strategi dari penataan ruang wilayah Kabupaten Balangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan-kawasan Potensial sebagai Sentra Penghasil Komoditas Unggulan yang Berdaya Saing

   Strategi untuk mengembangkan Kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

   a. Menetapkan sawah irigasi teknis menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
   b. Mengembangkan kawasan pertaniasn lainnya yang potensial.
   c. Mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi.
   d. Mengembangkan usaha budidaya perkebunan yang berorientasi ekspor di kawasan-kawasan yang memiliki sumber daya alam potensial.
   e. Meningkatkan produktivitas khususnya komoditas unggulan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
   f. Mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang saling berkesinambungan dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi.
   g. Mengembangkan lumbung desa terpadu.

2. Perwujudan Balangan sebagai Wilayah Berdaya Saing Tinggi Berbasis Keunggulan Agroindustri dan Agrobisnis

   Strategi untuk mengembangkan Kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan untuk meningkatkan produksi.
b. Memantapkan sistem pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.
c. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.
d. Mendorong masuknya investasi dalam kegiatan industri yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
e. Menjamin kemudahan dalam berinvestasi dengan tetap memperhatikan arahan pemanfaatan ruang dan lingkungan.
f. Mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, produksi dan jaringan pemasaran.
g. Menyusun prioritas pengembangan dan pemanfaatan masing-masing komoditas sumberdaya unggulan.
h. Mengembangkan kegiatan industri dengan memberdayakan sumber daya lokal.

3. Penataan Pusat-Pusat Perkotaan yang Merata, Berhierarki, dan Terintegrasi dengan prinsip Keseimbangan Wilayah

   Strategi untuk mengembangkan Kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

   a. Mengoptimalkan peran Ibukota Kabupaten sebagai PKL.
   b. Mengembangkan kawasan bisnis atau komersial untuk menunjang kegiatan transit.
   c. Menciptakan dan mengembangkan fungsi-fungsi perekonomian kreatif dan kompetitif antar kawasan dalam suatu sistem ekonomi wilayah.
   d. Memperluas jangkauan pelayanan fungsi-fungsi perekonomian kawasan perkotaan dan distribusi barang/jasa ke seluruh wilayah.
   e. merevitalisasi kawasan-kawasan perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun non fisik.

4. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan prinsip keseimbangan wilayah

   Strategi untuk mengembangkan Kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

   a. Membangun sarana wilayah untuk mendukung kegiatan unggulan dan kegiatan masyarakat.

b. Meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa melalui sistem jaringan prasarana yang berkualitas.
c. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi khususnya pada wilayah yang masih terisolir..
d. Meningkatkan jaringan energi gas dan listrik serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga gas dan listrik.
e. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana air baku dan air minum.
f. Mengembangkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan *sanitary landfill* dan *waste to energy*.
g. Mengembangkan sistem pengelolaan limbah domestik dan non domestik.
h. Mendorong terselenggaranya pengembangan dan pembangunan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan antara beberapa kawasan.

5. Perwujudan Balangan sebagai Pusat Budaya dan Pusat Religi Regional Berbasis Wisata yang didukung oleh Daya Tarik Wisata Alam

   Strategi untuk mengembangkan Kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

   a. Mengembangkan kawasan strategis pariwisata yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
   b. Mengembangkan pusat keagamaan Balangan.
   c. Mengelola, mengembangkan dan melestarikan lokasi peninggalan budaya serta pusat religi yang bernilai historis.
   d. Memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan keindahan alam, aktivitas budaya lokal dan spiritual.
   e. Memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata.
   f. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan

6. Perwujudan Balangan sebagai Pusat Budaya dan Pusat Religi Regional Berbasis Wisata yang didukung oleh Daya Tarik Wisata Alam

   Strategi untuk mengembangkan Kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

   a. Memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinir.

b. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
c. Mengendalikan kegiatan dalam kawasan pertambangan agar tetap terjaga fungsinya.
d. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung wilayah.
e. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
f. Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis alam, buatan dan budaya dengan penataan dan pemasaran yang efektif.
g. Melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam kawasan lindung
h. Memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan
i. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
j. Mengembangan sistem mitigasi bencana

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Balangan, meliputi:

a. Kawasan Strategis

Kabupaten Balangan memiliki kawasan starategis yang merupakan bagian darai wilayah yang diprioritaskan penataan ruangnya. Beberapa kawasan starategis yang terdapat di Kabupaten Balangan terbagi menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

1. Kawasan Dahai di Kecamatan paringin;
2. Kawasan Agropolitan di Kabupaten Balangan, di tetapkan melalui surat Keputusan Bupati tahun 2011, terdiri dari Kota Tani Utama Paringin, Kota Tani Halong dan Kota Tani Batumandi.
3. Perkotaan Batumandi terdapat di Kecamatan Batu Mandi dan Kecamatan Paringin Selatan
4. Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan.

Kota Tani Batumandi merupakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang didukung dari secara lengkap dari hulu hingga hilir, baik produksi pada hinterlandnya dan pengolahan pasca produksi (agro industri), hingga pemasarannya (Pasar Batumandi yang melayani lebih dari 1 Kecamatan, hingga regional). Kota Agropolitan Batumandi di kecamatan Batumandi meliputi Desa Batumandi, Desa Timbun Tulang, Desa Teluk Mesjid, Desa Bungur, Desa Riwa, Desa Mantimin, Desa Kasai, dan Desa Guha.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

1. Kawasan Datu Kandang Haji di Kecamatan Juai Pusat Kegiatan Wisata Religius Makam Datuk Kandang Haji di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai.
2. Kawasan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kawasan Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong yang meliputi Dayak Balangan dan Dayak Tabalong.
3. Perkotaan Halong di Kecamatan Halong. Kawasan Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong yang meliputi Dayak Balangan dan Dayak Tabalong.

Kawasan starategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Ekowisata Hutan Lindung Pegunungan Meratus terdiri dari Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi meliputi Desa Dayak Pitap, Desa Binuang Santang, Desa Marajai, Desa Uren, Desa Mamantang, Desa Kapul, Desa Aniungan, Desa Liyu, Desa Gunung Riut, Desa Sumsum, Desa Auh, dan Desa Mayanau.
2. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan.

b. Kawasan Transmigrasi

Kalimantan selatan memiliki lokasi transmigrasi yang tersebr di tujuh kabupaten yaitu Barito Kuala, Kotabaru, Banjar, tapin, Balangan dan tabalong. Dari sejumlah kawasan transmigrasi terdapat dua unit permukiman. Trans,igrasi (UPT) yang memerlukan pembinaan kawasan yakni di Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu. Pembinaan transmigrasi di Tanah Bumbu adalah dalam rangka persiapan lokasi kawasan transmigrasi yang direncanakan mencapai 300 KK (RPJMD Kab. Balangan 2016-2021). Berikut adalah kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.99.
Kawasan Transmigrasi Kabupaten Balangan

Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Total Luas (Ha)
Lampihong	Matang Hanau	12.354,68	22.554,56
	Papuyuan	10.199,87	
Batumandi	batumandi	21.379,79	21.379,79
Paringin	Lamida Bawah	20.714,43	20.714,43
Juai	Sumber Rejeki	13.512,87	43.639,54
	Tawahan	30.126,66	
Halong	Ha'uwai	25.540,87	50.587,06
	Sumber Agung	12.365,83	
	Suryatama	12.680,34	

Sumber: Peta RBI Kab. Balagan Skala 1:50.000, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, kawasan di Kabupaten Balangan yang menjadi kawasan transmigrasi terdapat di beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Lampihong, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Paringin, Kecamatan Juai dan Kecamatan Halong. Kecamatan yang memiliki luasan kawasan transmigrasi terluas adalah kecamatan Halong yaitu seluas 50.587,06 Ha yang tersebar di 3 desa Ha'uwai, Desa sumber agung dan Desa Suryatama.

c. Potensi Pertambangan

Kabupaten balangan memiliki kawasan yang berpontensi untuk menghasilkan komoditas pertambangan. Komoditas pertambangan yang ada di kabupaten Balangan terbagi menjadi 2 diantaranya yaitu komiditi logam dan komiditi bukan logam. Pertambangan komiditi logas di Kabupaten Balangan berupa besi primer, memiliki potensi untuk ditambang komoditi bukan logam yang memiliki potensi pertambangan di kabupaten Balangan terdiri dari Batugamping dan Kaolin. Potensi pertambangan Batugamping di Kabupaten Balangan berada di Desa Kapul,

Kecamatan Halong. Potensi pertambangan Kaolin di Kabupaten Balangan berada di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan.

d. Perizinan Pemanfaatan Ruang

Izin pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memeprhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Tabel 2.100.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Balangan (WIUP)

Komoditas Pertambangan	Pejabat Pemberi Izin	Lokasi	Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
Batu Gamping	Gubernur	Kecamatan Halong	7,5	7,5
Batu Bara	Bupati	Desa Baramban, Kecamatan Awayan	193	54.191,44
		Desa Kapul, Kecamatan Halong	1.640	
		Desa Mantuyun, Tigarun, TawahanKecamatan Juai dan Halong	2.000	
		Desa Mayanau, Kecamatan Awayan	2.500	
	Gubernur	Desa Ambakiang dan Piyait, Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi	486	
		Desa Bramban dan Sikuntan Kecamatan Awayan	184,64	
		Kecamatan Juai, Halong, Awayan dan Tebing Tinggi	2.400	
	Menteri	Desa Ambakiang, Kecamatan Awayan	2.500	
		Kecamatan Awaan dan Juai	2.500	
		Kecamatan Juai	2.500	
		Kab Tabalong dan Balangan	5.908	
		Tabalong, Hulu Sungai Utara	31.379,8	
Bijih Besi	Bupati	Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi	680	1.562
		Desa Dayak Kecamatan Tebing Tinggi	882	
Tanah Urug	Gubernur	Dusun Mampari Kecamatan Batumandi	5	5
Kabupaten Balangan				**55.765,94**

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 komoditas pertambangan yang termasuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Balangan, diantaranya yaitu Batu Gamping, Batu Bara, Bijih Besi dan Tanah Urug. Komoditas terbesar adalah Batu bara dengan total luas wilayah yaitu 54.191,44 Ha dari total luas Kabupaten Balangan.

2) Peta Indikatif Pengehentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

Tabel 2.101.
Indikator Penghentian Pemberian Izin Baru Kabupaten Balangan

Lahan	Luas (Ha)	Luas per Kecamatan	
		Kecamatan	Luas (Ha)
PIPPIB Gambut	23,03	Batumandi	9,03
		Lampihong	14,01
PIPPIB Kawasan	60.458,22	Halong	47.647,68
		Tebing Tinggi	12.810,53
Total	**60.481,26**		

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penghentian pemberian izin baru di Kabupaten Balangan berupa lahan Gambut berada di Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dengan luas total 23,03 Ha. Sedangkan indikasi penghentian pemberian izin baru untuk kawasan hutan alam primer, lahannya berada di Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 60.458,22 Ha.

B. Telaahan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 adalah: **BALANGAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA LOGISTIK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN (BALAJU SEJALAN)".**

Visi Balangan sebagai Daerah Penyangga Logistik yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Balaju Sejalan) memiliki makna bahwa pada Tahun 2045 akan terwujud Kabupaten Balangan:

- **Daerah Penyangga Logistik** memiliki makna bahwa Balangan akan menjadi daerah yang mendukung visi jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Kalimantan. Posisi strategis Balangan yang dekat dengan IKN, menjadikannya sebagai daerah penyangga logistik yang maju dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dan konektivitas yang baik.
- **Maju** memiliki makna Balangan menjadi daerah dengan daya saing yang tinggi dan perekonomian yang tangguh dan berkuakitas berbasis keunggulan agrindustri, agrobisnis, didukung oleh sarana dan prasarana berkualitas dan kemajuan IPTEK.

- **Sejahtera** memiliki makna masyarakat Balangan memiliki kualitas hidup dan SDM yang unggul, kondisi sosial budaya yang kuat, dan perekonomian inklusif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan berkelanjutan, dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan profesional.
- **Berkelanjutan** memiliki makna Kabupaten Balangan menjadi daerah yang maju dan sejahtera yang dicapai secara bertahap dan berkesinambungan dengan prinsip ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Visi RPJPD dijabarkan ke 8 Misi sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Setiap misi RPJPD memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan.

Tabel 2.102.
Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

VISI	ISU STRATEGIS	MISI
BALANGAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA LOGISTIK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN (BALAJU SEJALAN)		
Daerah Penyangga Logistik: memiliki makna bahwa Balangan akan menjadi daerah yang mendukung visi jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik di Kalimantan. Posisi strategis Balangan yang dekat dengan IKN, menjadikannya sebagai daerah penyangga logistik yang maju dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dan konektivitas yang baik.		
Maju: memiliki makna Balangan menjadi daerah dengan daya saing yang tinggi dan perekonomian yang tangguh dan berkuakitas berbasis keunggulan agrindustri, agrobisnis, didukung oleh sarana dan prasarana berkualitas dan kemajuan IPTEK.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Misi 1: Mewujudkan Tranformasi Sosial
	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial	Misi 7: Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Sejahtera: memiliki makna masyarakat Balangan memiliki kualitas hidup dan SDM yang unggul, kondisi sosial budaya yang kuat, dan perekonomian inklusif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan berkelanjutan, dengan tata kelola	Peningkatan ketahanan sosial dan budaya untuk mendukung pembangunan yang merata	Misi 4: Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban
	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi
	Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perdesaan	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan

VISI	ISU STRATEGIS	MISI
pemerintahan yang efektif, akuntabel dan profesional.		Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung percepatan pembangunan	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
		Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan
Berkelanjutan: memiliki makna Kabupaten Balangan menjadi daerah yang maju dan sejahtera yang dicapai secara bertahap dan berkesinambungan dengan prinsip ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan hidup;
b. Akses dan kualitas air bersih;
c. Pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan lahan;
d. Ketahanan bencana dan perubahan iklim;
e. Akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif;
f. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
g. Diversifikasi ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
h. Pengelolaan limbah dan persampahan; dan
i. Kesejahteraan sosial budaya.

Rekomendasi hasil kajian dan analisis KLHS RPJMD Kabupaten Balangan dirumuskan untuk menyelesaikan isu strategis serta permasalahan akibat adanya gap capaian TPB terhadap target yang telah

ditetapkan. Rekomendasi KLHS RPJMD berupa program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk pemilihan alternatif kebijakan daerah pada periode perencanaan jangka menengah.

Tabel 2.103.
Rekomendasi Berdasarkan Isu Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

Isu Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup	Rekomendasi		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemanfaatan lahan gambut belum menerapkan manajemen tata hidrologis berkelanjutan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Meluasnya alih fungsi lahan kawasan hutan Pegunungan Meratus	Program pengelolaan hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
Meluasnya fragmentasi lahan menurunkan interaksi ekologis antar spesies			
Menurunnya tingkat keanekaragaman hayati Kawasan Indikasi Pegunungan Meratus	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Menurunnya kapasitas pengaturan siklus hara pada ekosistem rawa akibat intensifikasi lahan pertanian	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Penyediaan air, pangan dan pengaturan tata aliran air dan banjir dengan morfologi berupa perbukitan dan pegunungan memiliki kategori sangat tinggi dan dominan berkategori rendah hingga sangat rendah dengan wilayah bermorfologi dataran			
Status daya dukung pangan dan air di Kabupaten Balangan secara umum memiliki kategori aman / surplus	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lok

Isu Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup	Rekomendasi		
	Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
	masyarakat	Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

Rekomendasi rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan hasil telaah dalam KLHS di Kabupaten Balangan dapat disajikan dalam beberapa alternatif skenario sebagai berikut:

a. Skenario strategi dan arah kebijakan yang tidak memerlukan upaya tambahan dilakukan sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya (*Bisnis as Usual*). Pemenuhan target TPB dilakukan dengan melakukan proyeksi target moderat jika memang sudah selayaknya tercapai, target optimis jika dilakukan proyeksi dengan adanya upaya peningkatan capaian target.
b. Skenario strategi dan arah kebijakan yang memerlukan upaya tambahan dirumuskan pada masing-masing indikator yang belum memenuhi target:

Tabel 2.104.
Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan

Indikator	Sasaran Strategis	Strategi & Arah Kebijakan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Terpenuhinya pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran efektif bagi semua anak-anak, dan menjamin semua anak-anak menyelesaikan pendidik dasar dan pendidikan menengah secara aman, tanpa dipungut biaya dan akses seluas-luasnya terhadap pembelajaran TIK	Peningkatan fasilitas belajar yang memadai Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Memastikan akses yang setara bagi semua anak
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkatnya akses pelayanan dasar yang setara terutama bagi kelompok rentan dan miskin, dan terjaminnya pemenuhan layanan dasar, dan akses terhadap peluang ekonomi, sumber daya alam,	Perluasan jangkauan layanan dasar Melalui subsidi pembiayaan Penyediaan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas

Indikator	Sasaran Strategis	Strategi & Arah Kebijakan
	kepemilikan lahan, teknologi baru, dan keuangan mikro terjamin penuh	
Prevalensi anemia pada ibu hamil	Meningkatnya akses dan konsumsi suplemen zat besi, edukasi gizi yang baik, serta pemeriksaan kesehatan yang rutin selama kehamilan	Peningkatan edukasi kesehatan Penyediaan suplemen yang terjangkau di fasilitas kesehatan Integrasi program suplemen dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama yang melakukan persalinan dan ditolong tenaga kesehatan	Pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Optimalnya upaya pencegahan dan pengurangan penyakit menular melalui pemenuhan layanan dasar berkualtias, universal, dan aman serta mengakhiri epidemi malaria, filariasis, tuberkulosis, penyakit tropis, dan penyakit AIDS	Peningkatan cakupan vaksinasi, Edukasi kesehatan Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah
Prevalensi tekanan darah tinggi	Meningkatkatnya edukasi pola makan sehat, peningkatan aktivitas fisik, serta penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan gaya hidup seimbang	Peningkatan edukasi masyarakat melalui penyuluhan gizi yang melibatkan masyarakat Pelatihan bagi tenaga kesehatan Kampanye media yang menyasar berbagai kalangan
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Terpenuhinya pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran efektif bagi semua anak-anak, dan menjamin semua anak-anak menyelesaikan pendidik dasar dan pendidikan menengah secara aman, tanpa dipungut biaya dan akses seluas-luasnya terhadap pembelajaran TIK	Peningkatan fasilitas belajar yang memadai Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Memastikan akses yang setara bagi semua anak.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Meningkatnya akses pendidikan, meningkatnya kualitas pengajaran dan akses seluas-luasnya terhadap pembelajaran TIK	Peningkatan fasilitas belajar yang memadai Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Memastikan akses yang setara bagi semua anak.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Meningkatnya edukasi tentang hak anak, pemberdayaan perempuan, serta penegakan hukum terkait batas usia perkawinan	Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pelatihan bagi pemangku kepentingan Kolaborasi dengan lembaga hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkatnya akses sumber air minum layak yang aman dan terjangkau bagi semua	Peningkatan infrastruktur sumberdaya air serta Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan

Indikator	Sasaran Strategis	Strategi & Arah Kebijakan
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Optimalnya pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan akses IPLT	Peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Tersusun dan terlaksananya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan kebudayaan dan produk lokal	Meningkatkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan program Menyediakan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik pariwisata ramah lingkungan
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkatnya promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional	Dukungan kebijakan yang memfasilitasi akses pasar bagi usaha kecil dan menengah Pengembangan teknologi ramah lingkungan Pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Meningkatnya mitigasi bencana, penguatan kapasitas tanggap darurat, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana	Peningkatan edukasi masyarakat tentang risiko bencana Penguatan infrastruktur yang tahan bencana Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Berkembangnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Peningkatan implementasi prinsip good governance di semua level pemerintahan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

3) Isu Strategis RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

Isu strategis merupakan hal-hal yang penting, berdaya ungkit dan sangat berdampak bagi pembangunan Kabupaten Balangan. Isu strategis Kabupaten Balangan dirumuskan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 berdasarkan potensi dan permasalahan daerah. Selain itu, perumusan isu strategis juga dilakukan dengan menelaah isu internasional/global, RPJMN 2025-2029, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantam Selatan, RPJPD kabupaten, RTRW kabupaten, dan KLHS RPJMD Kabupaten Balangan yang menjadi penentu dalam perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan.

Dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal, maka ditetapkan isu-isu strategis dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2025-2029, meliputi:

1. **Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah Perdesaan**

   Wilayah perdesaan di Kabupaten Balangan merupakan basis utama perekonomian masyarakat, terutama melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Isu strategis dalam pembangunan perdesaan terletak pada masih terbatasnya infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, sanitasi, dan pelayanan dasar, serta kualitas layanan sosial yang masih perlu diperkuat. Hal ini berimplikasi pada aksesibilitas antarwilayah perdesaan yang belum optimal dan berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian maupun akses masyarakat terhadap layanan publik.

   Pemberdayaan desa harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta diversifikasi usaha masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga pada penguatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan.

2. **Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial**

   Kawasan perkotaan Balangan memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta jasa yang menopang aktivitas ekonomi daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana transportasi, drainase, jaringan air bersih, serta fasilitas publik yang representatif. Pembangunan perkotaan diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung transformasi ekonomi menuju basis jasa dan perdagangan, serta menyediakan ruang publik yang inklusif. Peningkatan prasarana perkotaan juga harus sejalan dengan penataan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.

3. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

   Sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, Kabupaten Balangan menghadapi tantangan degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, dan pengelolaan sampah yang masih terbatas. Permasalahan lingkungan hidup cukup serius, terutama kualitas air yang masih rendah akibat tingginya angka buang air besar

sembarangan di sungai. Kualitas lahan juga tergolong sedang karena keterbatasan ruang terbuka hijau. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2024 masih berada pada angka 70,80 dengan kategori sedang. Di sisi lain, tingginya aktivitas pertambangan menambah tekanan terhadap kondisi lahan dan tutupan vegetasi, sehingga menuntut adanya kebijakan pemulihan pascatambang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Isu strategis ini menekankan pentingnya pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, serta pengelolaan ekosistem sungai, hutan, dan lahan basah. Upaya pembangunan berkelanjutan perlu diwujudkan melalui kebijakan perlindungan kawasan lindung, penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi hijau. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup, Balangan dapat mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. **Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan, dengan kontribusi meningkat dari 59,92% (2020) menjadi 72,61% (2024). Sebaliknya, kontribusi sektor non-pertambangan seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata justru menurun. Hal ini menandakan kerentanan ekonomi yang tinggi, sehingga diperlukan transformasi menuju sektor unggulan lain yang lebih berkelanjutan.

   Isu strategisnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan memperluas kesempatan kerja, memberdayakan UMKM, dan mendorong investasi yang ramah lingkungan. Penguatan ekonomi inklusif harus menjamin keterlibatan masyarakat desa maupun kota dalam rantai nilai ekonomi, sementara keberlanjutan pembangunan ekonomi menuntut penerapan prinsip efisiensi sumber daya, pengelolaan hasil tambang yang berwawasan lingkungan, serta pengembangan sektor unggulan baru. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

5. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Kompeten dengan Tetap Mengedepankan Nilai Spiritual dan Etika**

Sumber daya manusia merupakan kunci dalam menghadapi perubahan global dan era digital. Tantangan Kabupaten Balangan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di pasar kerja, sekaligus membangun karakter yang berbasis nilai spiritual dan etika. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan formal yang merata, pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta program pengembangan kompetensi aparatur. Dengan tetap mengedepankan nilai keagamaan dan etika sosial, pembangunan SDM tidak hanya melahirkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga pribadi yang berintegritas dan berakhlak mulia.

6. **Peningkatan Ketahanan Agama, Sosial, dan Budaya yang Harmonis dan Kondusif untuk Mendukung Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**

   Keragaman agama, budaya, dan sosial di Kabupaten Balangan merupakan potensi sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni masyarakat. Isu strategisnya adalah bagaimana memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, serta melestarikan kebudayaan lokal sebagai identitas daerah. Pembangunan yang merata dan berkeadilan harus ditopang oleh suasana sosial yang kondusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, penguatan ketahanan agama, sosial, dan budaya bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi fondasi moral pembangunan.

7. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif dalam Mendukung Percepatan Pembangunan**

   Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Kabupaten Balangan menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Isu strategis ini menekankan perlunya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan penguatan tata kelola pemerintahan,

percepatan pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Adapun rangkuman perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.105.
Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

POTENSI BALANGAN	PERMASALAHAN BALANGAN	ISU KLHS RPJMD BALANGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS BALANGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Lahan pertanian yang subur di Balangan, mendukung budidaya berbagai komoditas unggulan di sektor Pertanian dan Perkebunan serta Perikanan seperti padi, jagung, pisang, karet, kelapa sawit, ayam potong, itik dan ikan nila	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pengolahan, Perdagangan, Pertanian Perikanan, dan Pariwisata) serta Perekonomian masih Didominasi oleh Sektor Pertambangan	a. Pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan hidup; b. Akses dan kualitas air bersih; c. Pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan lahan; d. Ketahanan bencana dan perubahan iklim; e. Akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif; f. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan; g. Diversifikasi ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah; h. Pengelolaan limbah dan persampahan; i. Kesejahteraan sosial budaya.	Dunia semakin proteksionis. Meningkatnya proteksionisme mendorong ketidakpastian terhadap perdagangan global	Pendapatan per Kapita setara Negara Maju	Fondasi Perekonomian berbasis SDA terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Balangan dikenal memiliki cadangan batubara yang cukup besar. Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang utama bagi perekonomian daerah ini. Banyak perusahaan tambang beroperasi di wilayah ini, terutama di Kecamatan Paringin, Juai, dan Lampihong.	Pengembangan Infrastruktur, konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah Belum Optimal dan Merata		Disrupsi Teknologi Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian, serta Konektivitas yang Masih Terbatas	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial
Topografi wilayah Balangan yang dikelilingi pegunungan dan sungai menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang menarik, seperti Air Terjun Batarius, Sungai Maranting, Batu Ajung, Gunung Hauk, Pasar Budaya Racah Mampulang, dan sebagainya yang perlu dikembangkan lebih optimal						Peningkatan ketahanan agama, sosial dan budaya yang harmonis dan kondusif untuk mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan

POTENSI BALANGAN	PERMASALAHAN BALANGAN	ISU KLHS RPJMD BALANGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS BALANGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi energi air dan tenaga surya cukup besar, terutama karena topografi daerahnya yang berbukit dan memiliki banyak aliran sungai kecil yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mikrohidro.	Masih adanya Pengangguran dan Kemiskinan serta belum meratanya pendapatan masyarakat					
UMKM di Balangan mulai berkembang, terutama dalam sektor makanan olahan lokal, kerajinan tangan, dan sasirangan khas daerah. Dukungan pelatihan dan pemasaran digital bisa sangat membantu sektor ini.	Perwujudan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama yang Harmonis dan Kondusif Belum Optimal					
	Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan yang Belum Optimal		Eskalasi Geopolitik dan Geoekonomi yang Memunculkan fragmentasi dan kekuatan baru	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang belum optimal	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif dalam mendukung percepatan pembangunan
	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah di Regional Kalsel Terutama Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah		Demografi Global yang Penduduk dunia menjadi 9,7 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%) pada Tahun 2050	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Masih Rendah	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang kompeten dengan tetap mengedepankan nilai spiritual dan nilai etika
						Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perdesaan
	Masih rendahnya Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana		Perubahan Iklim YANG Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zeroemission	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan belum dilakukan secara optimal	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga mendukung pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki kabupaten.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan arahan pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029. Bab ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan.

3.1. Visi, Misi. Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah akan dilaksanakan melalui Misi. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

A. Penelaahan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025 2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya.

Penyelarasan dimaksudkan bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2025-2029. Selain itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan juga disusun dengan bersinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Keterkaitan visi dan misi Kabupaten Balangan dengan visi dan misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dimuat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Balangan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

RPJMD KALSEL	RPJMD KAB. BALANGAN	RPJMN
Visi:		
KALSEL BEKERJA **(BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN**	**BALANGAN BAHARAT** **(MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)**	**BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045**
Misi:		
Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Handal Misi 4: Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	Misi 1: Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari	Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Misi 2 Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital,

RPJMD KALSEL	RPJMD KAB. BALANGAN	RPJMN
		ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia	Misi 4: Menigkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 5: Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah & Cepat	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif	Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sumber: hasil analisis, 2025

B. RPJMD sebagai Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 adalah: BALANGAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA LOGISTIK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN (BALAJU SEJALAN).

Pencapaian visi daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Kedelapan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selain memedomani misi RPJPN, juga menjawab isu strategis daerah. Delapan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun Kabupaten Balangan ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan. Tema per tahapan ditentukan untuk memberikan fokus pembangunan jangka menengah, sehingga secara berkesinambungan dan bertahap sasaran pokok dapat dicapai untuk mewujudkan visi RPJPD yakni Balangan sebagai Daerah Penyangga Logistik yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Balaju Sejalan). Tahap pertama RPJPD (2025-2029) memiliki tema: **Penguatan Fondasi Transformasi**; dimana seluruh sumber daya dikerahkan untuk memperkuat berbagai sendi pembangunan terutama yang mendukung pelaksanan transformasi SDM, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

C. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan selama masa jabatan tahun 2025-2029 telah menjadi Visi daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 adalah:

BALANGAN BAHARAT

(MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. **Membangun Desa dan Kota:** Tujuan pembangunan desa dan kota Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Membangun desa yang maju dan mandiri, Mewujudkan kota yang tertata rapi.
b. **Harmonis:** Masyarakat dikatakan hidup harmonis jika interaksi atau hubungan antar individu atau kelompok di masyarakat satu dengan

lainnya berjalan dengan baik, memiliki rasa solidaritas, menghargai perbedaan, merasa saling membutuhkan, terbangun kerjasama, tolong menolong dan lainnya.

c. **Religius:** Religiusitas dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki makna sebagai pedoman hidup, penguat solidaritas, dan perekat sosial. Nilai-nilai religius yang diajarkan agama dapat membantu masyarakat menjalani kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.
d. **Maju:** Makna "maju" dalam kehidupan masyarakat adalah kondisi masyarakat yang berkembang, berorientasi pada kemajuan, dan unggul dalam berbagai bidang. Masyarakat maju juga memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif.
e. **Sejahtera:** Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Masyarakat sejahtera juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial.

Visi RPJMD juga mendukung Visi RPJPD 2025-2045: Balangan Sebagai Daerah Penyangga Logistik Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan (Balaju Sejalan) yang menekankan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan desa dan penataan perkotaan, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, religius, maju, dan sejahtera. Dalam konteks jangka panjang, visi ini juga secara strategis diarahkan untuk mendukung perwujudan Balangan sebagai daerah penyangga logistik yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam, letak geografis yang strategis, serta peran penting dalam rantai distribusi regional, Balangan diharapkan dapat mengoptimalkan peranannya sebagai simpul logistik, mendukung kelancaran arus barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas wilayah.

Komitmen keberlanjutan (sustainability) tercermin dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan ketahanan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, guna menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, visi "Balangan Baharat" tidak hanya mengedepankan aspek kesejahteraan sosial dan religiusitas masyarakat, tetapi juga

menegaskan kesiapan Balangan sebagai daerah penyangga logistik yang mendukung pembangunan nasional dan regional secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Visi Balangan Baharat, maka ditetapkan 5 (lima) Misi. Rumusan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat terwujud selama 5 (lima) tahun kedepan. Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, yaitu:

MISI 1: MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI

MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA

MISI 4: MENIGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF

MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF

Penjelasan masing-masing misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025- 2029, sebagai berikut:

1. **Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari**

   Misi ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan wilayah secara merata antara desa dan kota di Kabupaten Balangan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang andal, pengembangan aksesibilitas wilayah, serta penguatan sarana pendukung perekonomian lokal. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan kualitas ruang hidup masyarakat.

   Pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi kunci dalam membuka keterisolasian wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan kota, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, keseimbangan ekologis harus tetap

dijaga dengan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berbasis potensi lokal.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mengintegrasikan perencanaan infrastruktur dengan kebutuhan logistik jangka panjang, guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung daya saing daerah. Selain itu, komitmen terhadap lingkungan yang lestari diwujudkan dengan memperhatikan aspek mitigasi perubahan iklim, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan, serta pengelolaan pasca tambang yang terencana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, misi ini selaras dengan Misi RPJPD 2025–2045, yaitu mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta memperkuat ketahanan ekologi daerah.

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi pada penguatan struktur dan daya tahan ekonomi daerah dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pembangunan ekonomi yang inklusif ditujukan untuk membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal, tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Salah satu fokus utama dalam pelaksanaan misi ini adalah pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya Kota Paringin sebagai ibu kota kabupaten dan kota-kota kecamatan sebagai simpul pelayanan wilayah. Tata ruang yang tertata baik, infrastruktur kota yang memadai, serta lingkungan perkotaan yang bersih dan tertib akan menjadi fondasi penting dalam mendorong investasi, aktivitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, misi ini juga diarahkan untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor pertambangan, dengan fokus pada hilirisasi agro-industri dan pengembangan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Hal ini

didukung oleh target dan program yang lebih ambisius untuk memperluas basis ekonomi, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

3. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia**

   Misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai pilar utama kemajuan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan moralitas yang menjadi fondasi masyarakat yang unggul dan bermartabat.

   Selain itu, misi ini juga diarahkan pada peningkatan investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan sektor non-pertambangan, termasuk sektor logistik dan sektor unggulan lainnya.

   Dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan era digital, SDM Kabupaten Balangan dituntut untuk adaptif, inovatif, serta memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kearifan lokal. penguatan kualitas SDM juga diprioritaskan melalui program penurunan stunting dan angka kematian ibu/bayi, serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara lebih masif, sebagai upaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Upaya ini mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

   Oleh karena itu, pengembangan SDM dilakukan secara holistik, mencakup sektor pendidikan, keterampilan kerja, ekonomi kreatif, hingga penguatan peran sosial dan budaya masyarakat.

4. **Menigkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis Dan Kondusif**

   Misi ini bertujuan untuk membangun masyarakat Kabupaten Balangan yang hidup dalam suasana kebersamaan, toleransi, serta saling menghormati dalam keberagaman. Kondisi sosial yang harmonis dan budaya yang lestari merupakan fondasi penting dalam menciptakan stabilitas daerah, sekaligus sebagai landasan bagi kemajuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, misi ini diarahkan pada penguatan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pengembangan kehidupan beragama dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi kegiatan keagamaan yang moderat, toleran, dan edukatif. Selain itu, pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian penting agar identitas dan warisan budaya masyarakat Balangan tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Misi ini juga menekankan pentingnya memperkuat program pelestarian budaya lokal dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai tradisi dapat terus diwariskan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata. Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko konflik sosial dan bencana dilakukan melalui edukasi yang terintegrasi, guna memperkuat ketahanan sosial serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan resilien.

5. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif

Misi ini dilandasi oleh kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan tantangan birokrasi yang masih memerlukan peningkatan kapasitas, digitalisasi, serta inovasi layanan, pemerintah daerah berupaya membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan, misi ini juga diarahkan untuk mempercepat reformasi birokrasi dan penerapan pemerintahan digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE), guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik dan investasi. Transformasi digital ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan responsif.

Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya memastikan konsistensi data dan informasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga setiap

kebijakan dan program dapat lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi, juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.

Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah strategis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, dengan memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi. Tujuan ini mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Rencana pembangunan dirancang agar mampu mencerminkan perubahan nyata yang ingin diwujudkan, baik dari segi peningkatan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, maupun perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator makro pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Target indikator makro daerah selama periode pembangunan 2025 sampai dengan 2030 ditetapkan dengan mempertimbangkan sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Target masing-masing indikator dimuat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Indikator Makro Kabupaten Balangan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,33	74,89	75,45	76,01	77,12	77,68
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4.22	4.33	4.44	4.55	4.66	4.77
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.67	2.36	2.35	2.34	2.33	2.32
4	Angka Kemisikinan	Persen	4.62	4.41	4.2	4.1	3.55	3.34
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.1	72.31	72.52	72.73	73.16	73.37
6	Rasio Gini	Indeks	0,207	0,204	0,194	0,182	0,177	0,169
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	0,83	0,82	0,76	0,71	0,66	0,59

Sumber: hasil proyeksi, 2025

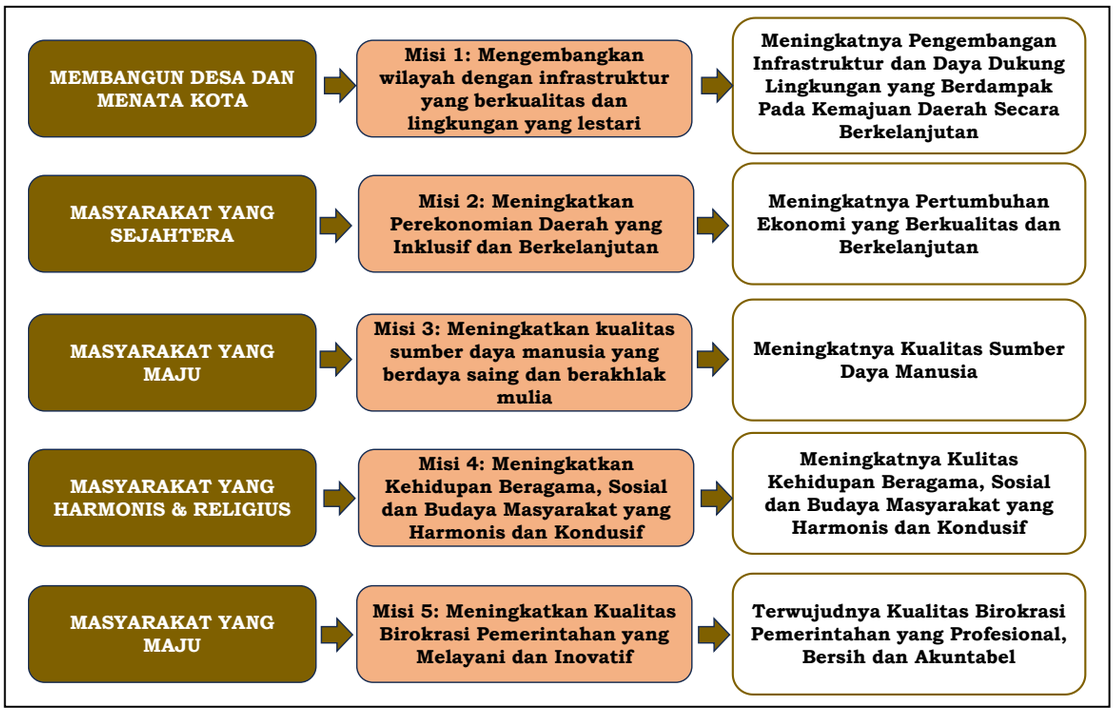
Tujuan RPJMD juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antarsektor dan antarwilayah di dalam Kabupaten Balangan, agar pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan terkoordinasi dan saling mendukung dalam mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya tujuan yang terarah, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Selain itu, tujuan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan sasaran pembangunan, indikator kinerja daerah, serta pengukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara periodik. Dengan demikian, perumusan tujuan dalam dokumen RPJMD bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada hasil-hasil pembangunan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka menengah. Sasaran dirumuskan untuk memberikan kejelasan arah dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara permasalahan dan potensi daerah, arah kebijakan nasional dan provinsi, capaian indikator kinerja utama daerah, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan menetapkan sasaran yang terukur dan relevan, RPJMD diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya menjabarkan harapan pembangunan, tetapi juga menjadi alat kendali pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penetapan indikator kinerja utama daerah yang akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah, tujuan, dan visi daerah yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi RPJMD menjadi dasar dalam penentuan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD. Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD dimuat dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029
Sumber: hasil analisis, 2025

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 yang disertai indikator dan target per tahun dimuat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

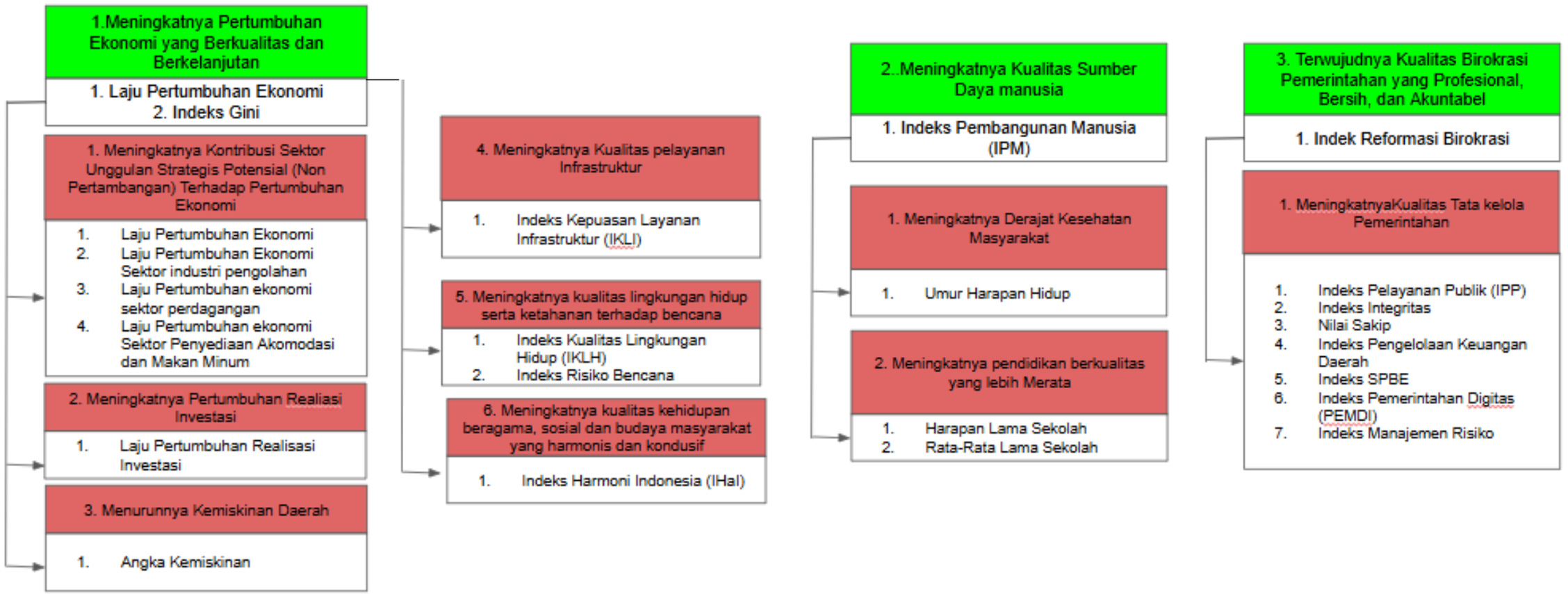
MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)										
1	**MISI 1 : Mengembangkan wilayah dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari**									
1.1	Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	85,46	86,14	86,83	87,52	88,22	88,93	89,64
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,8	72,1	72,31	72,52	72,73	73,16	73,37
		3	Indeks Resiko Bencana	104,24	100,25	96,3	92,35	88,4	84,45	80,5
1.1.1	sasaran : Meningkatnya pengembangan Infrastruktur	1	Indeks Infrastruktur	0,415	0,512	0,554	0,580	0,605	0,630	0,655
1.1.2	sasaran : Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana	1	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	N/A	0,83	0,82	0,76	0,71	0,66	0,59
		2	Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
2	**MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan**									

MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,15	4,22	4,33	4,44	4,55	4,66	4,77
		2	Indeks Gini	0,218	0,207	0,204	0,194	0,182	0,177	0,169
2.1.1	sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,63	3,78	3,88	3,98	4,08	4,19	4,30
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,82	4,04	4,15	4,26	4,37	4,48	4,60
		3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	4,96	5,29	5,42	5,57	5,71	5,86	6,02
		4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	8,34	8,56	8,78	9,01	9,25	9,49
2.1.2	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	1	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	9,72	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25
2.1.3	Sasaran: Menurunnya Pengangguran Daerah	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,69	2,67	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32
		2	Rasio Kewirausahaan	13,9	14	14,1	14,3	14,5	14,8	15,1
2.1.4	Sasaran: Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	1	Indeks Desa	n/a	69.35	79.63	79.67	79.71	79.76	80.33

MISI, TUJUAN, DAN SASARAN			INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	**MISI 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia**									
3.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	74,33	75	75,67	76,34	77,01	77,68
3.1.1	Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Umur Harapan Hidup	73,87	74,26	74.60	74.81	75.02	75.41	75.65
		2	Prevalensi Stunting	14,58	11,88	10,58	9,38	8,28	7,28	6,38
3.1.2	Sasaran : Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	1	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,17	13,27	13,38	13,5	13,87	14,01
		2	Rata-Rata lama Sekolah	8,13	8,37	8,52	8,68	8,85	9,05	9,19
4	**MISI 4 : Meningkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif**									
4.1	Tujuan : Meningkatnya Kulitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	1	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7
4.1.1	Sasaran : Menurunnya Kemiskinan Daerah	1	Angka Kemiskinan	4,87	4,62	4,41	4,2	4,1	3,55	3,34
4.1.2	Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	68	70	75	80	85	90	95

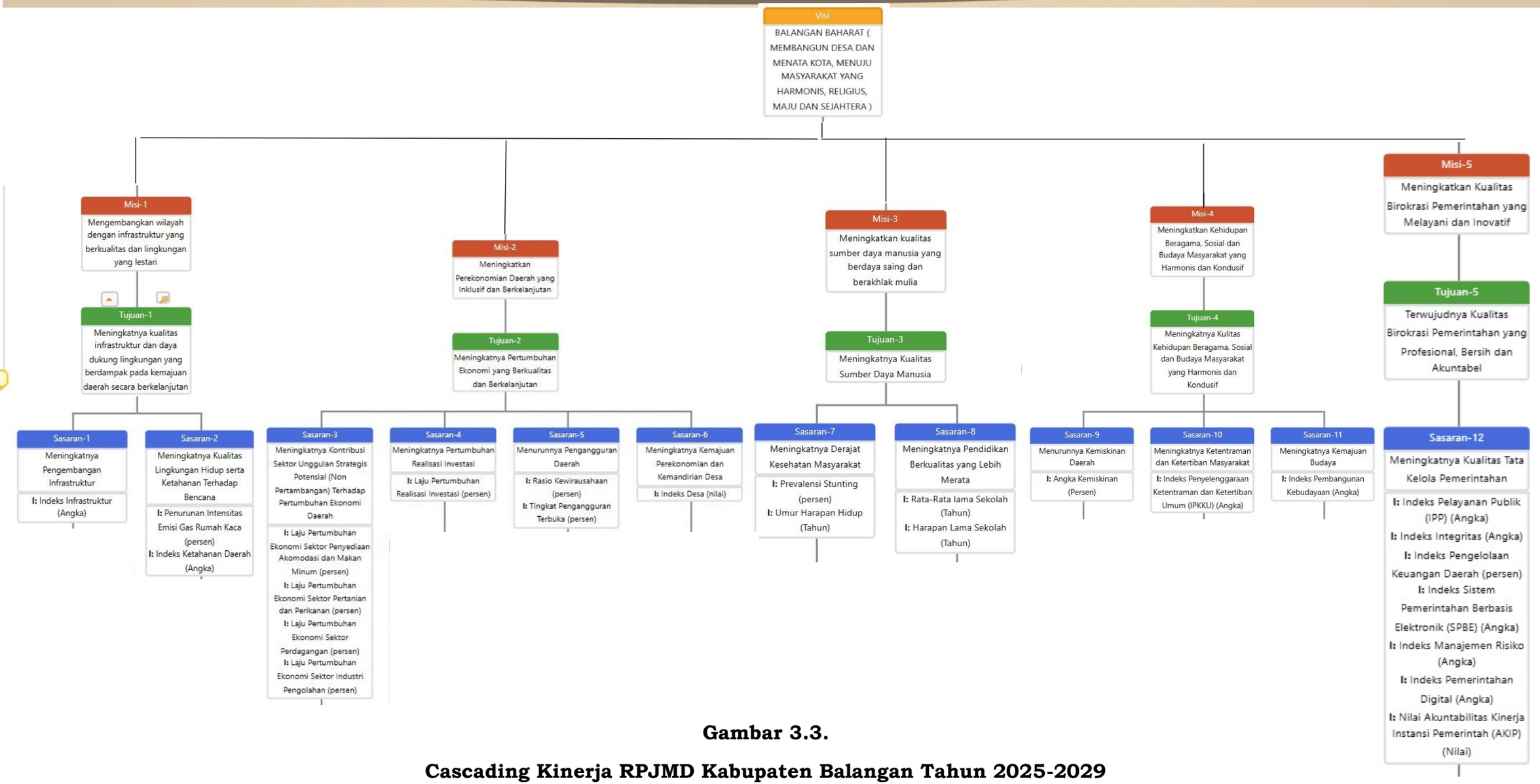
MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.3	Sasaran : Meningkatnya Kemajuan Budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,55	60,34	62,14	63,93	65,73	67,52	69,32
5	**Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif**									
5.1	Tujuan : Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	83,74	84,74	85,76	86,79	87,83	88,89	89,95
5.1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,29	4,39 (-A)	4,49 (-A)	4,59 (A)	4,69 (A)	4,79 (A)	4,89 (A)
		2	Indeks Integritas	74,96	75,25	75,5	76	76,5	77	77,5
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,09	75	78	81	84	87	90
		4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,688	80,70	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95
		5	Indeks SPBE	3,34	3,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		6	Indeks Pemerintahan Digital	N/A	N/A	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
		7	Indeks Manajemen Risiko	3	3,049	3,098	3,147	3,196	3,245	3,294

Sumber: hasil analisis, 2025



Gambar 3.2.

Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029



Gambar 3.3.

Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused-management). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

3.2.1. Strategi dan Program Prioritas

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkahjupaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuanjsasaran RPJMD. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Dengan demikian, rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penahapan pembangunan sebagai bagian dari strategi pembangunan, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.
Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia untuk Kemajuan Perekonomian Daerah	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Inovasi Pelayanan Publik	Pengembangan Wilayah Desa dan Kota dengan Perekonomian yang Maju dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pemantapan Sinergi Desa dan Kota dalam Perekonomian yang Kokoh dan Infrastruktur yang Berkualitas serta Lingkungan yang Lestari	Perwujudan Masyarakat Balangan yang Harmonis, Religius, Maju dan Sejahtera

Sumber: hasil analisis, 2025

Penahapan pembangunan Kabupaten Balangan diuraikan sebagai berikut:

a. Tahun 2026 (Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia untuk Kemajuan Perekonomian Daerah)

Tahap ini berfokus pada pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Peningkatan akses dan mutu pendidikan yang merata menjadi instrumen penting dalam mendukung sasaran meningkatnya pendidikan berkualitas yang lebih merata dan sasaran meningkatnya kualitas kesetaraan gender, melalui pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja juga sejalan dengan sasaran menurunnya pengangguran daerah serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, penguatan karakter berbasis spiritualitas dan etika mendukung sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Tahun 2027 (Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Inovasi Pelayanan Publik)

Fokus pembangunan pada tahun ini adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dorongan terhadap sektor non-pertambangan seperti pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, dan pariwisata berkontribusi langsung pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan strategis potensial (non-pertambangan) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan iklim usaha dan penerapan inovasi pelayanan publik juga diharapkan

mendorong meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi. Dampaknya, perluasan kesempatan kerja dapat mendukung penurunan kemiskinan daerah dan penur unan pengangguran daerah secara signifikan.

Sejalan dengan itu, inovasi pelayanan publik menjadi prioritas, dengan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Dengan strategi tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya tumbuh dari sisi angka, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. **Tahun 2028 (Pengembangan Wilayah Desa dan Kota dengan Perekonomian yang Maju dan Perlindungan Sosial yang Adaptif)**

Pada tahap ini, pembangunan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan desa dan kota. Penguatan pembangunan desa melalui infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal mendukung meningkatnya kemajuan desa. Perbaikan kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial adaptif turut memperkuat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya kemiskinan daerah. Di sisi perkotaan, pengembangan sarana ekonomi modern berperan penting dalam memperluas lapangan kerja sehingga berkontribusi pada penurunan pengangguran daerah. Dengan demikian, pembangunan tahun ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat.

d. **Tahun 2029 (Pemantapan Sinergi Desa dan Kota dalam Perekonomian yang Kokoh dan Infrastruktur Berkualitas serta Lingkungan yang Lestari)**

Pembangunan pada tahun ini menekankan pada penguatan integrasi ekonomi desa dan kota sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang saling mendukung. Perekonomian yang kokoh diwujudkan melalui integrasi rantai nilai produksi desa dengan pusat distribusi dan perdagangan di kota, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Pembangunan ekonomi berbasis sinergi desa–kota memperkuat kontribusi sektor unggulan non-pertambangan, serta mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur jalan, sanitasi, dan air bersih selaras dengan sasaran meningkatnya pengembangan infrastruktur. Pemantapan tata ruang perkotaan dan pembangunan

berwawasan lingkungan mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

e. Tahun 2030 (Perwujudan Masyarakat Balangan yang Harmonis, Religius, Maju, dan Sejahtera)

Tahapan terakhir merupakan konsolidasi dari seluruh capaian pembangunan sebelumnya, sehingga mampu menempatkan Kabupaten Balangan sebagai daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga unggul secara sosial, budaya, spiritual, dan lingkungan.. Kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius mencerminkan tercapainya meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya kemajuan budaya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sepanjang periode 2026–2029 terintegrasi menjadi capaian yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan yang merata. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, adaptif, dan inovatif menguatkan pencapaian meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Strategi memberikan gambaran bagaimana berbagai sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai. Strategi tersebut akan menjadi panduan umum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Strategi pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Misi 1. Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari		
1	Meningkatnya pengembangan infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Wilayah
			Meningkatkan Konektivitas Daerah
		Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan Indeks Resiko Bencana
	Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
2	Meningkatnya Pertumbuhan	Meningkatnya Kontribusi Sektor	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan
			Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan
			Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatkan Kemudahan dan Iklim Berinvestasi
		Menurunnya Pengangguran Daerah	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berwirausaha
			Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan Tenaga Kerja
		Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
	Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia		
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah
	Misi 4. Meningkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif		
4	Meningkatnya Kulitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat
		Meningkatnya Kemajuan Budaya	Meningkat Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
	Misi 5. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif		
5	Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Publik
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatkan Penerapan Pemerintahan Digital
			Meningkatkan Penerapan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Sumber: hasil analisis, 2025

Lebih lanjut, strategi juga menjadi instrumen untuk mengintegrasikan pendekatan pembangunan sektoral dan kewilayahan, serta memperkuat efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Dalam konstelasi regional, Kabupaten Balangan termasuk kedalam Klaster Banua

Anam. Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan wilayah kedalam 3 (tiga) klaster, yaitu:

1. Klaster Banjarbakula, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. Klaster Banua Anam, meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
3. Klaster Saijaan Bersujud, meliputi Kabupaten Tanah Bumu dan Kabupaten Kotabaru.

Adapun strategi pengembangan wilayah Banua Anam secara umum dan Kabupaten Balangan secara khusus, diuraikan sebagai berikut:

a. Arah Pengembangan Kawasan

Klaster Banua Anam merupakan wilayah yang memiliki kondisi hamparan wilayah yang cukup heterogen yang terdiri dari hamparan pegunungan sampai dataran rawa dan memberikan nilai strategis yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Rawa Batang Banyu dan KSP Pegunungan Meratus. KSP Rawa Batang Banyu diarahkan untuk pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Adapun KSP Pegunungan Meratus bertujuan sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Arah pengembangan kawasan pada Klaster Banua Anam sebagai berikut:

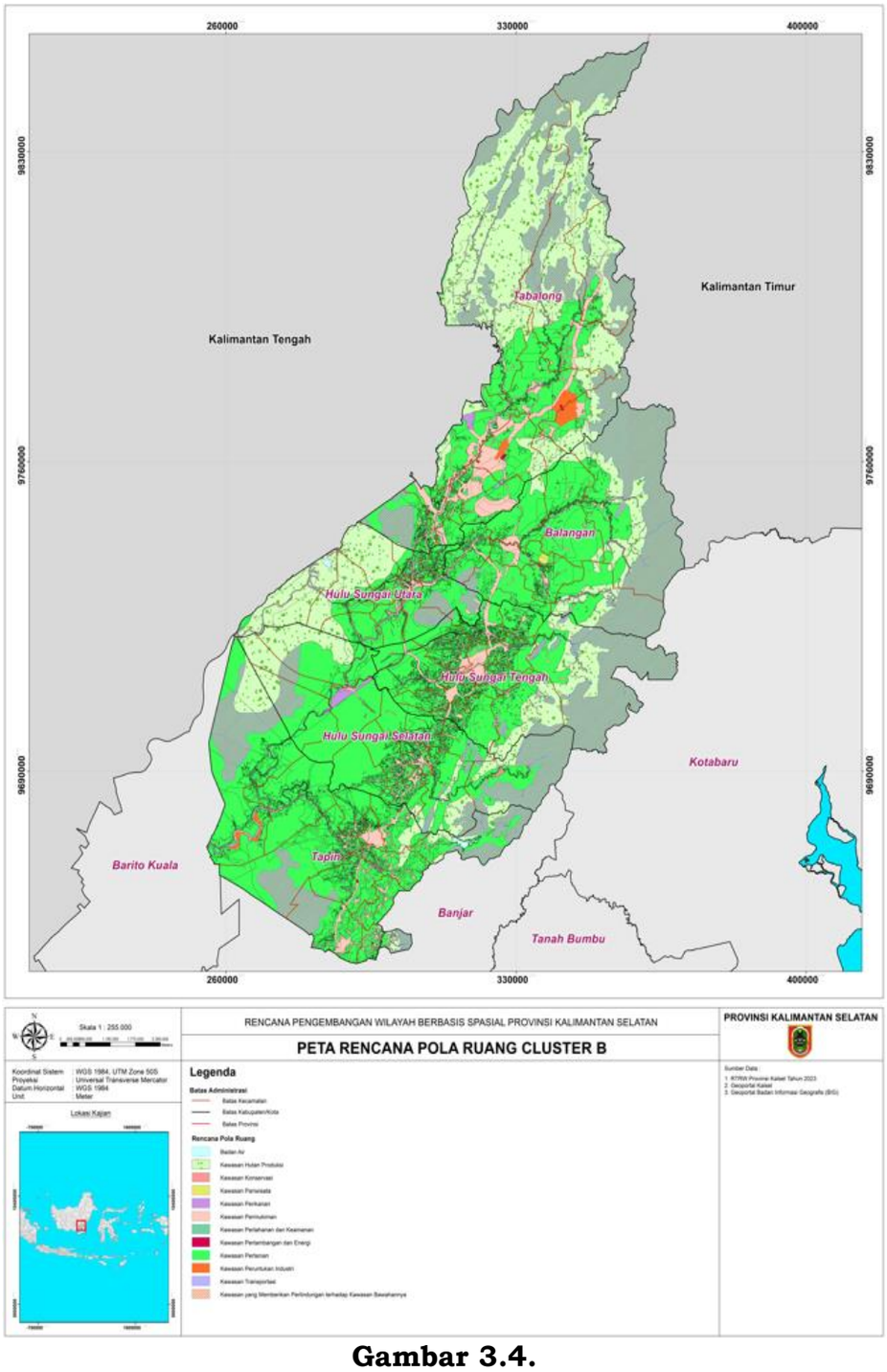
1) Mendorong pengembangan “Sentra Pangan Lestari”, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
2) Pengembangan hilirisasi industri hasil pertanian terutama komoditas padi, tanaman holtikultura, dan perkebunan karet serta pengolahan produk turunannya.
3) Pengembangan kawasan transit, simpul transportasi dan perdagangan dalam pengembangan sistem logistik untuk menunjang distribusi logistik dan angkutan penumpang dengan memperhatikan potensi interaksinya terhadap Ibukota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada kawasan perbatasan antar provinsi.

4) Sebagai salah satu kawasan bernilai konservasi tinggi dan memiliki kekayaan geologi bernilai internasional, Klaster Banua Anam berpotensi dikembangkan sebagai kawasan konservasi, kawasan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif dengan skala global.
5) Pengembangan geosite dan kawasan sekitarnya dalam mendukung pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus.
6) Perwujudan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong.
7) Terkait pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan penerapan Prinsip 5R (*Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*).
8) Meminimalkan sampah hingga menjadi residu sekecil mungkin.

b. Arah Pengembangan Infrastruktur

1) Peningkatan layanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dalam mengintegrasikan pusat produksi dan pusat distribusi, salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jalan lintas.
2) Pengembangan infrastruktur dalam mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian dan ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengembangan daerah irigasi permukaan/rawa serta pembangunan tampungan air (bendung/bendungan).
3) Peningkatan layanan prasarana dan sarana yang mendukung UNESCO Global Geopark Meratus dan pariwisata unggulan, seperti pengembangan/penataan kawasan pariwisata dan sekitarnya, penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peningkatan amenitas pariwisata seperti penyediaan akomodasi, tempat makan dan minum, tempat ibadah, toilet umum, tempat parkir dan area peristirahatan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan aktivitas wisatawan.
4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, salah satunya pengembangan pemenuhan dan pelayanan air minum pada Klaster Banua Anam.
5) Pengembangan transportasi publik baik angkutan umum massal maupun non massal yang terintegrasi sampai ke pelosok.
6) Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir.

7) Pengembangan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yaitu pembangunan lumbung pangan dan pembangunan sarana prasarana energi berkelanjutan.



Gambar 3.4.
Peta Rencana Pola Ruang Klaster Banua Anam
Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, 2025

c. Arahan dan Indikasi Intervensi Pengembangan Kabupaten Balangan

1) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian

- Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dengan prioritas pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas pusat produksi dan pasar, serta pengembangan jaringan distribusi dan logistik ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional.
- Pengembangan hilirisasi industri hasil pertambangan, pertanian, dan peternakan.
- Pengembangan klaster pertanian berbasis integrasi: sapi-kelapa sawit dan padi–ikan. Penguatan penyuluhan, penyediaan benih unggul, peralatan mesin pertanian, pendampingan dan akses teknologi, permodalan dan pasar.
- Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Lokal dengan prioritas fasilitasi akses permodalan KUR, pendampingan Koperasi dan BUMDes, pelatihan digital, pemasaran produk lokal, promosi produk khas Balangan melalui festival budaya, pasar daring, dan kemitraan regional.
- Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya dengan prioritas pengembangan kawasan wisata alam Pegunungan Meratus dan wisata budaya Dayak. Penataan kembali kawasan bekas tambang untuk geowisata, wisata edukasi, atau agroforestri.
- Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).

2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:
   - Pengembangan SDM dan Pendidikan Vokasi dengan prioritas: Pelatihan kerja berbasis pertambangan berkelanjutan, pertanian modern, UMKM digital, dan pariwisata. Perluasan kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan dan pelaku usaha industri dalam pelatihan dan penyediaan tenaga kerja terampil siap pakai.
3) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana
   - Pengelolaan Lingkungan dan Pascatambang dengan prioritas: Reklamasi tambang untuk pertanian rakyat, hutan sosial, dan wisata edukatif. Edukasi lingkungan dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pascatambang.
   - Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri

- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

Pengembangan klaster wilayah per kecamatan sesuai Kawasan Strategis di Kabupaten Balangan yang mengacu pada dokumen Materi Teknis RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:
   1. Kawasan Dahai di Kecamatan Paringin;
   2. Kawasan Agropolitan di Kabupaten Balangan, ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati tahun 2011, terdiri dari Kota Tani Utama Paringin, Kota Tani Halong, dan Kota Tani Batumandi.
   3. Perkotaan Batumandi terdapat di Kecamatan Batu Mandi dan Kecamatan Paringin Selatan
   4. Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan.

B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
   1. Kawasan Datu Kandang Haji di Kecamatan Juai Pusat Kegiatan Wisata Religius Makam Datuk Kandang Haji di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai
   2. Kawasan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kawasan Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong yang meliputi Dayak Balangan dan Dayak Tabalong.
   3. Perkotaan Halong di Kecamatan Halong. Kawasan Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong yang meliputi Dayak Balangan dan Dayak Tabalong.

C. Kawasan starategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
   1. Kawasan Ekowisata Hutan Lindung Pegunungan Meratus terdiri dari Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi meliputi Desa Dayak Pitap, Desa Binuang Santang, Desa Marajai, Desa Uren, Desa Mamantang, Desa Kapul, Desa Aniungan, Desa Liyu, Desa Gunung Riut, Desa Sumsum, Desa Auh, dan Desa Mayanau.
   2. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan.

D. Kawasan Transmigrasi

Kawasan di Kabupaten Balangan yang menjadi kawasan transmigrasi terdapat di beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Lampihong, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Paringin, Kecamatan Juai dan Kecamatan Halong. Kecamatan yang memiliki luasan kawasan transmigrasi terluas adalah kecamatan Halong yaitu seluas 50.587,06 Ha yang tersebar di 3 desa Ha'uwai, Desa sumber agung dan Desa Suryatama.

E. Potensi Pertambangan

Kabupaten balangan memiliki kawasan yang berpontensi untuk menghasilkan komoditas pertambangan. Komoditas pertambangan yang ada di kabupaten Balangan terbagi menjadi 2 diantaranya yaitu komiditi logam dan komiditi bukan logam. Pertambangan komiditi logas di Kabupaten Balangan berupa besi primer, memiliki potensi untuk ditambang komoditi bukan logam yang memiliki potensi pertambangan di kabupaten Balangan terdiri dari Batugamping dan Kaolin. Potensi pertambangan Batugamping di Kabupaten Balangan berada di Desa Kapul, Kecamatan Halong. Potensi pertambangan Kaolin di Kabupaten Balangan berada di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan.

F. Perizinan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terdapat 4 (empat) komoditas pertambangan yang termasuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Balangan yang terdiri dari kecamatan Halong, Awayan, Juai, Tebing Tinggi, serta Kecamatan Batumandi diantaranya yaitu Batu Gamping, Batu Bara, Bijih Besi, dan Tanah Urug. Komoditas terbesar adalah Batu bara dengan total luas wilayah yaitu 54.191,44 Ha dari total luas Kabupaten Balangan.

Strategi memberikan gambaran bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program prioritas pembangunan daerah. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading kinerja. Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari Visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Program prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029 merupakan komponen utama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program ini disusun dengan pendekatan yang menyeluruh dan berdasarkan analisis terhadap permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan pembangunan yang ada. Penyusunan program prioritas ini juga memperhatikan kebijakan nasional, provinsi, serta kondisi lokal daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Balangan berjalan seiring dengan kebijakan yang lebih luas, dan dapat menciptakan sinergi antar berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

Program-program ini juga akan berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan realistis, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029. Dengan adanya program prioritas yang fokus dan jelas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.6.

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
20252029 - BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA) - MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI - MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN - MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA - MENINGKATKAN	**Misi 1 : Mengembangkan wilayah dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari**	**Meningkatnya kualitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan**			**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**		
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
					Indeks Resiko Bencana		
			Meningkatnya pengembangan Infrastruktur		**Indeks Infrastruktur (Angka)**		
				Meningkatnya Ketersediaan layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase panjang jalan	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF - MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF					dalam kondisi baik (%)	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
					Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Meningkatnya kualitas sarana jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya kualitas sarana jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya Sarana Air Limbah Domestik yang Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana		**Indeks Ketahanan Daerah (Angka)**		
					Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Nilai)		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Efektifitas Pemulihan Pascabencana	Persentase efektifitas pemulihan pasca bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kebijakan/Rencana/Program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya Layanan Informasi dalam Kesiapsiagaan Bencana	Persentase layanan informasi dalam kesiapsiagaan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase layanan penanganan kebakaran dan non kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Meningkatnya Layanan Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase layanan Penanganan	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					kedaruratan Bencana (%)		
				Meningkatnya Layanan Penguatan Kapasitas Kawasan dalam Menghadapi Bencana	Persentase layanan dalam penguatan kapasitas kawasan rawan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya penanganan Potensi Kejadian Luar Biasa/Wabah	Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensi KLB/Wabah (Polio, Pertusis, Difteri) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Air (Nilai)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Peningkatan Kualitas Udara (Nilai)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Peningkatan Kualitas Lahan (Nilai)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya penyediaan dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Meningkatnya persentase korban bencana alam dan sosial pasca bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pasca Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**			**Indeks Gini(Angka)**		
					Laju Pertumbuhan Ekonomi(Angka)		
			Menurunnya Pengangguran Daerah		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**		
					Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama terhadap penduduk usia sekolah Menengah Pertama (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka melanjutkan SMP ke SMA (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio ketersediaan Sekolah Dasar terhadap penduduk usia sekolah Dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Angka melanjutkan SD ke SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya akses dan layanan pendidikan jenjang PAUD	APK PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktiv dan Tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Meningkatnya Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin/rentan yang mandiri	Persentase keluarga miskin/rentan yang keluar dari kategori miskin/rentan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatnya kualitas kerjasama desa	Persentase Desa Yang Aktif Melakukan Kerjasama (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Tenga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kompetensi yang di berikan (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Layanan Informasi dalam Kesiapsiagaan Bencana	Persentase layanan informasi dalam kesiapsiagaan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Layanan Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase layanan Penanganan kedaruratan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Layanan Penguatan Kapasitas Kawasan dalam Menghadapi Bencana	Persentase layanan dalam penguatan kapasitas kawasan rawan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang yang omset usahanya meningkat (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya Partsipasi Pemuda dalam Perekonomian	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase prestasi olahraga yang diraih (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Meningkatnya pemenuhan layanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi , Surat Izin Praktik (SIP) /Surat Izin Kerja (SIK) di Puskesmas (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan wajib (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian, nutrisionis, ATLM, penyuluh kesehatan, kefarmasian) (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase rasio tenaga kesehatan yang terpenuhi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan dan desa rawan pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Meningkatnya Pengelolaan Perikanan budidaya	Produktivitas Perikanan budidaya (Ton/Ha)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%) (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Kerja yang terpenuhi (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Populasi Domba (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Cabai (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Populasi Sapi (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Kopi (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Ternak Itik (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Karet (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Ayam Buras (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Sawit (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Kambing (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase peningkatan rumah layak huni (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Meningkatnya Sarana Air Limbah Domestik yang Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Untuk Kawasan Transmigrasi	persentase jumlah warga yang layak usaha (%)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya UMKM yang memiliki legalitas usaha	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Meningkutnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Menjamin Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase peningkatan Restocking Ikan (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) (Angka)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-haknya (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terciptanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Terjaminannya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		**Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)**		
					Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan (%)		
					Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan (%)		
				Meningkatnya Cakupan Promosi Perdagangan	CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN (%) (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi Sapta Pesona (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Meningkatnya Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah diversifikasi olahan hasil perikanan (Produk)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Meningkatnya efektifitas promosi produk IKM	PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktiv dan Tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kepatuhan pelaporan industri	PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Meningkatnya Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang yang omset usahanya meningkat (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luasan Pengendalian terhadap Luasan Bencana Alam dan Serangan OPT Perkebunan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase Luasan Pengendalian terhadap luasan bencana alam dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Meningkatnya Pengawasan Kawasan Perikanan	Persentase Peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perikanan (Kali)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkatnya Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					DILAKSANAKAN (%)		
				Meningkatnya Pengelolaan Perikanan budidaya	Produktivitas Perikanan budidaya (Ton/Ha)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%) (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Meningkatnya Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terpenuhi (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Persentase Peningkatan Lahan Pertanian berkelanjutan yang dikelola (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Populasi Domba (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Cabai (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Sapi (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Kopi (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Ternak Itik (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Karet (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Ayam Buras (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Sawit (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Kambing (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan	Persentase ragam seni budaya	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					daerah yang di aktualisasikan (%)	KESENIAN TRADISIONAL	
				Meningkatnya Sarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluh Yang Terfasilitasi (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya Sarana Prasarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%) (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Meningkatnya Tertib Perijinan Sektor Perdagangan	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%) (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Meningkatnya Tertib Ukur	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya UMKM yang memiliki legalitas usaha	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kempetensi usaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Meningkutnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Menjamin Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Persentase peningkatan Restocking Ikan (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penyakit Hewan yang ditangani (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi		**Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi (%)**		
				Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) (Nilai)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Nilai)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					Hasil Penilaian Mandiri Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) (Nilai)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Minat Investasi	Nilai Rencana Investasi Sektor Non Pertambangan (Nilai)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kemajuan Perekonomian dan Kemandirian Desa		**Indeks Desa (Angka)**		
				Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					pemerintahan desa (%)		
				Meningkatnya akses dan layanan pendidikan jenjang PAUD	APK PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya kualitas kerjasama desa	Persentase Desa Yang Aktif Melakukan Kerjasama (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Layanan Informasi dalam Kesiapsiagaan Bencana	Persentase layanan informasi dalam kesiapsiagaan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Layanan Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase layanan Penanganan kedaruratan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Layanan Penguatan Kapasitas Kawasan dalam Menghadapi Bencana	Persentase layanan dalam penguatan kapasitas kawasan rawan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi , Surat Izin Praktik (SIP) /Surat Izin Kerja (SIK) di Puskesmas (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan wajib (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian, nutrisionis, ATLM, penyuluh kesehatan, kefarmasian) (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase rasio tenaga kesehatan yang terpenuhi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Kompetensi Sesuai Standar (%)	DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Untuk Kawasan Transmigrasi	persentase jumlah warga yang layak usaha (%)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya SDM di lokasi Transmigrasi	persentase jumlah permukiman yang layak huni (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya UMKM yang memiliki legalitas usaha	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Angka)**		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**Umur Harapan Hidup (Tahun)**		
					Prevalensi Stunting (%)		
				Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama terhadap penduduk usia sekolah Menengah Pertama (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka melanjutkan SMP ke SMA (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio ketersediaan Sekolah Dasar terhadap penduduk usia sekolah Dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka melanjutkan SD ke SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah diversifikasi olahan hasil perikanan (Produk)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Prevalensi Wasting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Gizi Buruk (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kesehatan Remaja Putri, Calon Pengantin, dan Ibu Hamil	Persentase Calon Pengantin dengan Anemia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase Ibu Hamil KEK (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil Anemia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Remaja Putri Anemia Sedang (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin/rentan yang mandiri	Persentase keluarga miskin/rentan yang keluar dari kategori miskin/rentan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatnya kualitas dan layanan komprehensif bagi keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Meningkatnya kualitas layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya kualitas SDM Rumah Sakit sesuai standar	Persentase SDM Rumah Sakit yang Profesional dan Kompeten dalam bidang tugasnya (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase prestasi olahraga yang diraih (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi , Surat Izin Praktik (SIP) /Surat Izin Kerja (SIK) di Puskesmas (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan wajib (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian,	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					nutrisionis, ATLM, penyuluh kesehatan, kefarmasian) (%)		
					Persentase rasio tenaga kesehatan yang terpenuhi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya penanganan Potensi Kejadian Luar Biasa/Wabah	Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensi KLB/Wabah (Polio, Pertusis, Difteri) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Penyakit Menular (TB, HIV, IMS, Kusta, Kecacingan, Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Pneumonia, Rabies, Hepatitis, dan Diare) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus , Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), Orang dengan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Masalah Kejiwaan (ODMK)) (%)		
				Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Produksi pangan rumah tangga yang aman	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya Sarana Air Limbah Domestik yang Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	Nilai Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Menurunnya Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi BBLR dan Asfiksia	Persentase Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi BBLR (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi Asfiksia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Menurunnya Bayi dengan Kasus Diare dan Pneumonia	Persentase Bayi Diare (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) (Angka)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Menurunnya komplikasi kebidanan (Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas)	Persentase komplikasi kebidanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terjaminannya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata		**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama terhadap penduduk usia sekolah Menengah Pertama (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka melanjutkan SMP ke SMA (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio ketersediaan Sekolah Dasar terhadap penduduk usia sekolah Dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka melanjutkan SD ke SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya akses dan layanan pendidikan jenjang PAUD	APK PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya akses dan layanan pendidikan non formal	Rasio Ketersediaan Kelompok Belajar Kesetaraan terhadap penduduk Putus Sekolah, Tidak Melanjutkan Sekolah dan Sedang Berpartisipasi pada Pendidikan Kesetaraan (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kesehatan Remaja Putri, Calon Pengantin, dan Ibu Hamil	Persentase Calon Pengantin dengan Anemia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Ibu Hamil KEK (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase Ibu Hamil Anemia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Remaja Putri Anemia Sedang (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kualitas dan layanan komprehensif bagi keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					kenaikaan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)		
					Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					berdasarkan asesmen nasional (%)		
				Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					asesmen nasional (%)		
				Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Kependidikan SD Dan SMP yang Kompeten (%)	TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Tenga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kompetensi yang di berikan (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Instansi yang Berkontribusi dalam Penyusunan Data Gender dan Anak (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Persentase Anggaran Responsif Gender (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Kerja yang terpenuhi (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya perlindungan perempuan	Persentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) (Angka)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Menurunnya komplikasi kebidanan (Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas)	Persentase komplikasi kebidanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Misi 4 : Meningkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang	**Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya**			**Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)(Angka)**		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	Harmonis dan Kondusif	**Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif**					
			Menurunnya Kemiskinan Daerah		**Angka Kemiskinan (Nilai)**		
				Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama terhadap penduduk usia sekolah Menengah Pertama (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SD/sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka melanjutkan SMP ke SMA (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio ketersediaan Sekolah Dasar terhadap penduduk usia sekolah Dasar (Rasio)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP/ sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Angka melanjutkan SD ke SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktiv dan Tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Meningkatnya Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin/rentan yang mandiri	Persentase keluarga miskin/rentan yang keluar dari kategori miskin/rentan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas Tenga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kompetensi yang di berikan (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang yang omset usahanya meningkat (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya Partsipasi Pemuda dalam Perekonomian	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Meningkatnya pemenuhan layanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan dan desa rawan pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Meningkatnya Pengelolaan Perikanan budidaya	Produktivitas Perikanan budidaya (Ton/Ha)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%) (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Kerja yang terpenuhi (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Populasi Domba (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Cabai (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Sapi (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Kopi (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Ternak Itik (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Karet (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Ayam Buras (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Sawit (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Populasi Kambing (Ekor)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase peningkatan rumah layak huni (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Meningkatnya Sarana Air Limbah Domestik yang Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkutnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Menjamin Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Persentase peningkatan Restocking Ikan (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) (Angka)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terjaminannya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		**Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Angka)**		
				Berkurangnya daerah rawan pelanggaran perda	Persentase berkurangnya daerah rawan pelanggaran Perda (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas	Persentase anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya ketertiban/kesadaran organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif melaporkan keberadaannya (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Meningkatnya Kualitas anggota Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP yang bersertifikat Tekhnis (Orang)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Jumlah anggota Satpol PP yang bersertifikat dasar (Orang)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Meningkatnya penanganan potensi konflik ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase pembinaan kepada kelompok masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya penyelesaian potensi konflik	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan wawasan politik masyarakat	Persentase partai politik yang aktif dalam peningkatan wawasan politik masyarakat (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan trantibum (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kemajuan Budaya		**Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)**		
				Meningkatnya objek warisan budaya yang dilestarikan	Persentasi objek warisan budaya yang dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Meningkatnya pelestarian sejarah lokal	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya pengelolaan museum	Persentase koleksi museum yang dikelola (%)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Meningkatnya ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan	Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Meningkatnya ragam tradisi budaya daerah yang diaktualisasikan	Persentase ragam tradisi budaya daerah yang diaktualisasikan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif	**Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi(Nilai)**		
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan		**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (%)**		
					Indeks Manajemen Risiko (Angka)		
					Indeks Integritas (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)		
					Indeks SPBE (Angka)		

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Indeks Pemerintahan Digital (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Angka)		
				Meningkatnya capaian nilai elemen kapasitas APIP	Nilai Elemen Peran dan Layanan (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai Elemen Struktur Tata Kelola (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai Elemen Praktik Profesional (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Fasilitasi pelayanan masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Paringin	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Di Kec. Paringin Selatan	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Di Kec. Tebing Tinggi	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Batumandi	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Kesekretariatan (Nilai)	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah		2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (BPBD)	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paringin	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kec. Paringin Selatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kec. Tebing Tinggi	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (POL PP)	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kelancaran Tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Persentase Badan Publik yang Informatif (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepuasan Layanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin/rentan yang mandiri	Persentase keluarga miskin/rentan yang keluar dari kategori miskin/rentan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatnya Ketepatan Ukuran dan Fungsi Organisasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya ketertiban/kesadaran organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif melaporkan keberadaannya (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatnya Kualitas atas penyelenggaraan SPIP	Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Nilai)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Meningkatnya Kualitas Bangunan/Gedung Publik	Persentase bangunan/gedung publik sesuai standart SNI (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya kualitas kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang sesuai (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Laporan Kinerja (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 Tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Kualitas layanan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah Rapat Kerja pembahasan Produk Hukum (Kali)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Nilai)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					Hasil Penilaian Mandiri Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Pelaksanaan Berusaha (PBB) (Nilai)		
				Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penganggaran (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas pengendalian evaluasi internal SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai AKIP A (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Meningkatnya kualitas pengendalian rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase Kualitas dan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Keselarasan muatan RKPD dengan muatanÂ RPJMD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Keselarasan proritas daerah dengan prioritas Nasional (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dan infrastruktur	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Pesentase Indikator Kegiatan Utama Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General yang Tercapai Sesuai Target (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Pesentase Indikator Kegiatan Utama Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang Tercapai Sesuai Target (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kematangan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang tervalidasi (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
					Nilai inovasi SKPD (Nilai)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Meningkatnya pemenuhan layanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Meningkatnya penanganan potensi konflik ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase pembinaan kepada kelompok masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pendapatan BLUD	Rasio Anggaran BLUD RS terhadap alokasi APBD RS (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Presentase Realisasi Penerimaan APBD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya penyelesaian potensi konflik	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan wawasan politik masyarakat	Persentase partai politik yang aktif dalam peningkatan wawasan politik masyarakat (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Meningkatnya Potensi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yang masuk ke tahap wawancara (Unit Kerja)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Meningkatnya upaya pencegahan korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCSP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase data anomali yang diturunkan (data ganda) (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
					Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sesuai rencana kerja DPRD	Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DPRD (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD sesuai rencana kerja	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD sesuai rencana kerja (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Tertibnya SKPD dan BLUD dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

Sumber: hasil analisis, 2025

Perwujudan visi dan misi RPJMD didukung oleh serangkaian sub prioritas yang berasal dari janji kepala daerah. Implementasi dari janji dan sub prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, dalam bentuk program perangkat daerah dimuat dalam tabel di bawah. Program perangkat daerah dimaksud menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah dan akan dijabarkan kedalam sub kegiatan dalam Renstra Perangkat daerah.

Tabel 3.7.
Implementasi dari Janji dan Sub Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
MISI 1: MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN LESTARI			
1	Peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan penghubung antar desa dan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Membangun jalan baru untuk meningkatkan konektivitas dan pengembangan wilayah perdesaan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan poros jalan baru yaitu konektivitas antar kabupaten yaitu Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Balangan) - Batang Alai Timur (Kabupaten HST). (Jika ada kesepakatan Bersama antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten HST)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Optimalisasi fungsi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan Koperasi sebagai penggerak roda perekonomian desa dengan berbasis potensi desa.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLIDUNGAN KOPERASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
5	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kewilayahan
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Peningkatan Indeks Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi (internet) secara bertahap di semua desa di wilayah Kabupaten Balangan (Balangan full akses internet).	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
8	Pendampingan desa melalui program satu desa satu sarjana.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Pengembangan/perluasan pusat kota Paringin yang terencana bertahap dan terintegrasi dengan titik sentral lapangan Martasura menjadi Alun-alun Kota Paringin.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah pelaksana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan
10	Pembenahan dan penataan kawasan kumuh pasar dan permukiman, terutama di bantaran sungai dan lahan kumuh lainnya.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
11	Peningkatan jalan-jalan kembar dan bundaran serta fasilitas pendukung Iainnya di kota Paringin.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan
12	Pembangunan poros jalan baru Lingkar Barat.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Pengembangan kota-kota kecamatan melalui perbaikan dan peningkatan sarana prasarana permukiman.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pengelolaan sampah secara terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
15	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
16	Meningkatkan Wilayah Tangguh Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
1	Menekan laju alih fungsi lahan pertanian melalui sertifikasi lahan pertanian abadi dengan pemenuhan infrastruktur jalan dan pengairan serta saprodi bagi para petani dengan berbasis agropolitan dan potensi wilayah.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
2	Menumbuhkembangkan Potensi Ekonomi Kreatif di segala sektor ekonomi masyarakat.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi
3	Optimalisasi kemitraan pelaku usaha di level desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
	dengan Bumdes dan koperasi yang bergerak di sektor pertanian pada semua tahapan mulai perbibitan sampai pasca panen dan pemasaran.	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
4	Optimalisasi pengembangan destinasi wisata terstandar yang berbasis alam, seni dan budaya dengan berkolaborasi dengan semua pihak terkait.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
5	Revitalisasi sentra peternakan, balai benih padi, balai banih ikan, dan unit perkebunan karet guna pengembangan bibit yang bersumber asli dari Balangan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
6	Pembinaan terhadap UMKM, melakukan pengembangan, pendampingan, dan bantuan teknologi dalam pengolahan hasil-hasil produksi pertanian/perkebunan khas Balangan berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif dengan memperhatikan ketersediaan dari bahan baku, produksi, pengolahan, dan Pemasaran.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian
7	Optimalisasi peran dan fungsi penyuluh pertanian.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
8	Menekan laju inflasi harga-harga pangan dan pendampingan terhadap pelaku usaha.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Perangkat daerah Pelaksanan Urusan Sekretariat Daerah
MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA			
1	Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi secara akademik, maupun prestasi di bidang Iainnya.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
2	Melanjutkan dan mengoptimalkan program 1000 Sarjana.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
3	Melanjutkan program beasiswa kuliah di luar negeri.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
4	Melanjutkan Pemberian bantuan khusus bagi siswa yang tidak mampu/miskin melalui program Kartu Balangan Pintar.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
5	Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
6	Meningkatkan Profesionalisme, Kapasitas, Kapabilitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
7	Melanjutkan program BPJS Kesehatan untuk 100 persen UHC (Universal Health Coverage)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
8	Melanjutkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk 100 persen UCJ (Universal Coverage Jamsostek)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
9	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Rujukan yang berkualitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
10	Melengkapi Dokter Spesialis dan sarana pendukungnya di RSUD Balangan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
11	Mengedepankan pelayanan Kesehatan yang prima untuk masyarakat Balangan.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
12	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan serta bantuan khusus bagi ibu, bayi, balita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta balita stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI 4: MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF			
1	Memberikan bantuan fisik dan operasional bagi semua tempat ibadah secara bertahap	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
2	Optimalisasi peran dan operasional Istana Anak Yatim Balangan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
3	Memberikan bantuan sosial dan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat Balangan yang meninggal dunia	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial
4	Meningkatkan pembinaan, kerjasama, dan bantuan bagi organisasi keagaamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
5	Penyusunan batas-batas desa dan batas-batas antar kecamatan berbasis geospasial	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
6	Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat serta kesenian khas Balangan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan
7	Meningkatkan bantuan dan pendampingan bagi warga miskin, anak yatim piatu, warga penyandang disabilitas dan Iansia	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Meningkatkan bantuan bagi panti-panti social dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
		DATA GENDER DAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Menciptakan kondisi daerah yang kondusif melalui penegakan perda dan penguatan peran dan fungsi SATLINMAS	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
10	Memajukan olahraga dan kelompok kepemudaan Balangan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
11	Pembangunan komplek olahraga terpadu yang berstandar nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Memberikan Bantuan/hibah/anggaran kegiatan bagi organisasi-organisasi sosial kepemudaan dan olahraga seperti KONI, KNPI, karang taruna, PMI, kepramukaan dan organisasi sosial lainnya	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13	Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan dan seluruh stake holder balangan dalam pembangunan.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perencanaan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
14	Melanjutkan Pembangunan Kawasan Islamic Center	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kapabel, Mandiri dan Melayani	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perencanaan
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perencanaan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi

No	Janji dan Sub Prioritas Penyangga Logistik	Program	Perangkat Daerah
			Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kewilayahan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kewilayahan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kewilayahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kewilayahan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perangkat Daerah Pelaksana Unsur Kewilayahan
2	Menjadikan lnovasi sebagai spirit dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
3	Optimalisasi pendayagunaan aparatur dan melaksanakan reformasi birokrasi melalui penerapan organisasi yang ramping dan padat kerja berbasis kinerja.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepegawaian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
4	Memastikan kompetensi sejalan dengan jabatan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Balangan dan memperbaiki pelayanan kepada Masyarakat	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepegawaian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan
5	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur yang profesional, produktif dan melayani	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepegawaian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan disusun berdasarkan misi dan selaras dengan strategi pembangunan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kejelasan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga seluruh perangkat daerah dapat menjalankan perannya secara sinergi dan terarah. Dengan adanya arah kebijakan yang tersusun secara sistematis, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Balangan dapat berjalan secara efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Arah kebijakan RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari	1	Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas intra dan inter wilayah terutama untuk mengurangi keterisolasian kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		2	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan	Dinas Perhubungan
		3	Peningkatan jaringan energi gas dan listrik serta keterpaduan sistem penyediaan tenaga gas dan listrik	Sekretariat Daerah
		4	Pengembangan permukiman dan hunian layak dan terhubung dengan PSU yang memadai	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		5	Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		6	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		7	Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		8	Peningkatan jaringan prasarana air baku dan air minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
		9	Pembangunan dan pengembangan irigasi terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		10	Pengembangan dan pembangunan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		11	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		1	Peningkatan rehabilitasi lahan, khususnya pasca tambang serta penghambatan laju deforestasi	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2	Pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan, keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		3	Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		4	Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		5	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		6	Peningkatan ketahanan daerah, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7	Pengembangan solusi berbasis alam (*natural based solution*) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor.	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Pengembangan pusat-pusat agroindustri dan agrobisnis	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2	Persiapan hilirisasi industri strategis berbasis	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
			sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan	
		3	Peningkatan produktivitas khususnya komoditas unggulan hasil pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		5	Pengembangan diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		6	Pengembangan destinasi wisata potensial termasuk wisata alam, budaya, dan olahraga, serta ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		7	Peningkatan pemasaran pariwisata terutama wisata budaya, religi, dan alam	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		8	Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1	Pengembangan iklim investasi dan kepastian berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah	Perangkat daerah yang masuk dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
		2	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal	Dinas Sosial
		3	Peningkatan rehabilitasi sosial dasar bagi disabiltas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Dinas Sosial
		1	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui *up-skilling* dan *re-skilling* sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema education to employment	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja
		2	Peningkatan kesempatan kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja
		3	Peningkatan perlindungan dan hak pekerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
		4	Pengembangan kewirausahaan, koperasi yang berkualitas dan modern, dan UMKM yang produktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja
		1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah kabupaten dengan pemerintahan desa	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				- Kecamatan
		2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta perekonomian dan infrastruktur desa sesuai karakteristik masing-masing desa	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				- Dinas Sosial
				- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja
				- Kecamatan
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia	1	Peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan
		2	Penurunan kematian ibu dan bayi serta kecukupan gizi bayi dan balita termasuk penanganan stunting	Dinas Kesehatan
		3	Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Dinas Kesehatan
		4	Peningkatan penyediaan tenaga medis dan kesehatan dengan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	Dinas Kesehatan
		5	Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama meliputi fasilitas, kualitas SDM, dan sistem pengelolaan BLUD	Dinas Kesehatan
		6	Peningkatan layanan kesehatan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis yang didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan	Dinas Kesehatan
		1	Peningkatan pemenuhan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Peningkatan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
			setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	
		3	Mendorong peningkatan pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik terutama kualitas dan kompetensi pendidik yang modern, berwawasan global, dan adaptif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6	Pembangunan sekolah baru dan perguruan tinggi yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau terutama untuk daerah terpencil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3	Pengembangan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemberdayaan anak, perempuan, pemuda,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
			penyandang disabilitas dan lansia	Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Meningkatkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	1	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum untuk mengurangi pelanggaran perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta peningkatan kewaspadaan daerah terhadap potensi konflik dan penyalahgunaan narkotika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Peningkatan peran ormas dan partai politik dalam pembangunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Peningkatan kerukunan antar etnis dan agama	Sekretariat Daerah
		2	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		3	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dengan pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		5	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif	1	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK	- Sekretariat Daerah - BKPSDM - didukung oleh seluruh perangkat daerah
		2	Peningkatan pengawasan internal pemerintah daerah serta pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat
		3	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui antara lain intensifikasi	- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO.	MISI		ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
			pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, dan optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		4	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5	Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara efektif dan efisien	
		6	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas provinsi dan prioritas nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		7	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		8	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				- didukung oleh seluruh perangkat daerah
		9	Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				- Inspektorat
				- Sekretariat DPRD

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, maka telah disusun rencana program perangkat daerah yang menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Balangan memuat program untuk mencapai visi dan misi Bupati Balangan maupun untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Program perangkat daerah merupakan penjabaran teknis dari arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Penyusunan daftar program dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi penyelesaian isu strategis daerah, potensi lokal, serta kemampuan keuangan daerah secara berkelanjutan. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyusun program sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, pilihan, unsur penunjang, pendukung, dan pengawasan urusan pemerintahan daerah, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pemilihan program perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil (*outcome*) yang akan dicapai dengan indikator yang terukur. Penyusunan indikator program, target capaian, dan pagu indikatif merupakan bagian penting dalam menjamin konsistensi dan keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029. Indikator program disusun untuk menggambarkan secara jelas parameter keberhasilan dari setiap program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Indikator ini meliputi satuan ukuran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif,

disesuaikan dengan karakteristik program dan *outcome* ingin dicapai. Dengan adanya indikator yang terukur, maka pelaksanaan pembangunan dapat dipantau secara berkala, dievaluasi, serta dilakukan penyesuaian apabila diperlukan.

Target program ditetapkan secara bertahap per tahun untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan target memertimbangkan *baseline* capaian tahun 2024, potensi perkembangan sektor terkait, dan tantangan yang dihadapi daerah. Penetapan target dilakukan secara realistis namun tetap progresif, sehingga dapat memacu kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Pagu indikatif disusun sebagai estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program. Penyusunannya memerhatikan kemampuan keuangan daerah, efisiensi belanja, serta sinkronisasi dengan rencana pendanaan nasional maupun sumber pembiayaan alternatif lainnya. Pagu yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan. Namun dalam pelaksaanan pembangunan, sumber-sumber pendapatan lainnya terus diupayakan baik dari sektor publik maupun non publik, termasuk dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selama ini telah terjalin dengan pihak swasta. Kolaborasi dan kontribusi pendanaan dari berbagai pihak untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan terutama untuk program prioritas akan diprioritaskan.

Daftar rencana program perangkat daerah Kabupaten Balangan tahun 2026-2030 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					447.789.115.837		458.776.804.292		470.090.639.776		482.585.334.012		496.319.874.524	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					267.646.585.796		284.298.860.908		290.553.435.847		296.945.611.437		304.170.880.055	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	87,94	88,44	88,94	267.646.585.796	89,44	284.298.860.908	89,94	290.553.435.847	90,44	296.945.611.437	90,94	304.170.880.055	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					173.686.883.341		167.881.551.137		172.795.983.494		178.749.322.513		185.104.749.384	
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Dasar	APK SD/sederajat (%)	99,69	99,73	99,78	67.002.332.320	99,83	71.825.059.296	99,95	73.567.075.335	100	75.312.495.340	100	76.969.370.238	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APM SD/sederajat (%)	87,23	87,36	87,41		87,53		87,61		87,72		87,9		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APK SMP/ sederajat (%)	91,76	91,78	91,81		91,93		92,01		92,12		92,23		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APM SMP/ sederajat (%)	56,62	56,69	56,74		56,81		56,92		60,01		60,14		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka melanjutkan SD ke SMP (%)	81,32	81,42	81,53		81,72		81,94		82,05		82,26		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka melanjutkan SMP ke SMA (%)	88,64	88,73	88,85		89,02		89,23		89,41		89,62		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rasio ketersediaan Sekolah Dasar terhadap penduduk usia sekolah Dasar (Rasio)	118	118	118		118		118		118		118		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama terhadap penduduk usia sekolah Menengah Pertama (Rasio)	34	34	34		34		35		35		35		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B (%)	58,42	61,41	65,56	70.002.602.921	69,71	57.867.540.883	73,86	60.199.800.280	78,01	63.549.078.921	82,16	67.041.935.944	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	73,45	75,36	78,19		82,93		85,3		87,67		90,04		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	79,06	81,4	83,72		86,04		88,37		90,69		93,02		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan non formal	Rasio Ketersediaan Kelompok Belajar Kesetaraan terhadap penduduk Putus Sekolah, Tidak Melanjutkan Sekolah dan Sedang Berpartisipasi pada Pendidikan Kesetaraan (Rasio)	27	37	37	15.976.831.200	37	17.378.321.486	37	17.760.644.559	37	18.151.378.739	37	18.550.709.072	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	55,68	56,25	56,82	3.330.904.600	57,39	3.574.184.501	57,95	3.652.816.560	58,52	3.733.178.525	59,09	4.218.195.325	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	50	53,85	57,69		61,54		65,38		69,23		73,08		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	59,66	60,23	60,8		61,36		61,93		62,5		63,07		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	80,77	84,62	88,46		92,31		96,15		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan jenjang PAUD	APK PAUD (%)	69,13	69,34	69,55	16.318.171.000	69,76	16.037.170.762	69,97	16.389.988.519	70,18	16.750.568.266	70,39	17.119.080.768	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (Rasio)	523	523	523		523		523		523		523		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	68,75	69,32	69,89	1.056.041.300	70,45	1.199.274.209	71,02	1.225.658.241	71,59	1.252.622.722	72,16	1.205.458.037	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	76,92	80,77	84,62		88,46		92,31		96,15		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	69,89	70,45	71,02		71,59		72,16		72,73		73,3		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	96,15	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	38,64	39,2	39,77		40,34		40,91		41,48		42,05		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	73,08	76,92	80,77		84,62		88,46		92,31		96,15		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					20.518.000		20.941.360		21.395.203		21.886.391		22.420.870	
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	55,68	56,25	56,82	20.518.000	57,39	20.941.360	57,95	21.395.203	58,52	21.886.391	59,09	22.420.870	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	50	53,85	57,69		61,54		65,38		69,23		73,08		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	59,66	60,23	60,8		61,36		61,93		62,5		63,07		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikaan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	80,77	84,62	88,46		92,31		96,15		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					5.581.758.000		5.704.556.676		5.830.056.923		5.958.318.175		6.089.401.175	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Dan SMP yang Kompeten (%)	53,17	64,05	68,43	5.581.758.000	71,28	5.704.556.676	73,21	5.830.056.923	74,27	5.958.318.175	75,03	6.089.401.175	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten (%)	27,82	31,23	34,64		36,35		38,05		39,76		41,47		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					22.200.000		22.655.857		23.146.857		23.678.260		24.256.498	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya (%)	74	75	76	22.200.000	79	22.655.857	85	23.146.857	92	23.678.260	100	24.256.498	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					831.170.700		848.238.354		866.621.452		886.517.236		908.166.542	
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan (%)	50	50	50	831.170.700	75	848.238.354	75	866.621.452	75	886.517.236	100	908.166.542	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					320.998.113.099		329.070.714.582		337.262.082.454		346.224.944.583		356.073.553.770	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					190.070.419.823		194.850.394.192		199.700.692.890		205.007.811.214		210.839.400.889	
Meningkatnya Pendapatan BLUD	Rasio Anggaran BLUD RS terhadap alokasi APBD RS (%)	32,75	48,42	59,98	55.235.104.990	61,25	56.624.181.661	63,49	58.033.694.820	65,48	59.575.961.303	67,27	61.270.640.929	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	70	75	80	134.835.314.833	85	138.226.212.531	90	141.666.998.070	95	145.431.849.911	100	149.568.759.960	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					118.417.893.452		121.395.918.628		124.417.757.350		127.724.204.365		131.357.408.133	
Menurunnya komplikasi kebidanan (Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas)	Persentase komplikasi kebidanan (%)	34	32	30	2.482.521.800	28	2.544.953.348	26	2.608.303.407	24	2.677.620.016	22	2.753.786.778	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Menurunnya Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi BBLR dan Asfiksia	Persentase Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi BBLR (%)	9,7	9,4	9,1	324.668.500	8,8	332.833.406	8,5	341.118.436	8,2	350.183.783	7,9	360.145.004	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi Asfiksia (%)	1,25	1,12	1		0,87		0,75		0,62		0,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Menurunnya Bayi dengan Kasus Diare dan Pneumonia	Persentase Bayi Diare (%)	8,4	8	7,5	367.127.400	7	376.360.081	6,5	385.728.596	6	395.979.473	5,5	407.243.385	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	Persentase Gizi Buruk (%)	0,06	0,05	0,04	1.340.450.000	0,03	1.374.160.225	0,02	1.408.366.405	0,01	1.445.794.252	0,01	1.486.920.875	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Wasting (%)	6,7	6,2	5,7		5,2		4,7		4,2		3,7		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kesehatan Remaja Putri, Calon Pengantin, dan Ibu Hamil	Persentase Remaja Putri Anemia Sedang (%)	3,8	3,7	3,7	414.211.900	3,6	424.628.683	3,5	435.198.720	3,4	446.764.284	3,3	459.472.804	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Calon Pengantin dengan Anemia (%)	17	16	15		14		13		12		11		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Ibu Hamil KEK (%)	14,3	12,3	11,3		10,3		9,3		8,3		7,3		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Ibu Hamil Anemia (%)	17,06	16	15		14		13		12		11		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Penyakit Menular (TB, HIV, IMS, Kusta, Kecacingan, Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Pneumonia, Rabies, Hepatitis, dan Diare) (%)	3,4	3	2,7	2.214.267.700	2,4	2.269.953.076	2,1	2.326.457.712	1,8	2.388.284.169	1,5	2.456.220.572	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus , Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)) (%)	9,95	9,5	9	2.342.625.500	8,5	2.401.538.875	8	2.461.318.999	7,5	2.526.729.444	7	2.598.604.019	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan Potensi Kejadian Luar Biasa/Wabah	Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensi KLB/Wabah (Polio, Pertusis, Difteri) (%)	100	100	100	322.800.000	100	330.917.916	100	339.155.266	100	348.168.439	100	358.072.333	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	64	68	72	21.866.972.899	76	22.416.893.134	80	22.974.903.950	84	23.585.470.354	90	24.256.375.453	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	Nilai Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit (%)	63,74	63,84	66	21.970.000.000	67	22.522.511.206	68	23.083.151.113	70	23.696.594.223	71	24.370.660.316	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pelayanan rumah sakit	Nilai Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit (%)	63,74	63,84	66	0	67	0	68	0	70	0	71	0	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Nilai Indeks Nasional Mutu (INM) (%)	83,69	85,5	86		86,5		87		87,5		88		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase SDM Rumah Sakit yang Profesional dan Kompeten dalam bidang tugasnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Terjaminannya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) (%)	99,89	100	100	39.889.083.600	100	40.892.231.788	100	41.910.138.574	100	43.023.915.704	100	44.247.760.888	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas SDM Rumah Sakit sesuai standar	Persentase SDM Rumah Sakit yang Profesional dan Kompeten dalam bidang tugasnya (%)	1.049	1.049	1,049	24.883.164.153	1,059	25.508.936.890	1.069	26.143.916.172	1.079	26.838.700.224	1.089	27.602.145.706	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					11.866.799.824		12.165.231.316		12.468.053.417		12.799.396.456		13.163.484.185	
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar (%)	100	100	100	11.866.799.824	100	12.165.231.316	100	12.468.053.417	100	12.799.396.456	100	13.163.484.185	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi , Surat Izin Praktik (SIP) /Surat Izin Kerja (SIK) di Puskesmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan wajib (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian, nutrisionis, ATLM, penyuluh kesehatan, kefarmasian) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase rasio tenaga kesehatan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					105.000.000		107.640.586		110.320.021		113.251.816		116.473.342	
Meningkatnya Produksi pangan rumah tangga yang aman	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	22	24	105.000.000	26	107.640.586	28	110.320.021	30	113.251.816	32	116.473.342	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					538.000.000		551.529.860		565.258.776		580.280.732		596.787.221	
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	45,8	50	55	538.000.000	60	551.529.860	65	565.258.776	70	580.280.732	75	596.787.221	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					961.304.786.592		985.480.101.428		1.010.011.090.312		1.036.852.501.257		1.066.346.491.301	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.989.132.120		22.542.124.469		23.103.252.597		23.717.229.913		24.391.883.000	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	86,16	87,16	88,16	21.989.132.120	89,16	22.542.124.469	90,16	23.103.252.597	91,16	23.717.229.913	92,16	24.391.883.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					11.172.920.000		11.453.901.497		11.739.016.874		12.050.985.504		12.393.784.163	
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder di Kabupaten	Persentase luas areal tanam yang terlayani irigasi (%)	35,03	36,51	37,9	2.359.030.000	39,18	2.418.355.922	40,59	2.478.554.664	41,97	2.544.423.153	43,97	2.616.801.038	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya Infrastruktur Pengendali Banjir yang Terbangun	Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun (%)	24,15	25,15	27,15	8.813.890.000	31,15	9.035.545.575	34	9.260.462.210	36,05	9.506.562.351	40,05	9.776.983.125	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					9.000.000.000		9.226.335.951		9.456.001.821		9.707.298.498		9.983.429.351	
Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	70,27	72,27	74,27	9.000.000.000	76,27	9.226.335.951	78,27	9.456.001.821	80,27	9.707.298.498	82,27	9.983.429.351	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		300.000.000		300.000.000		0		0	
Meningkatnya pengembangan sistem persampahan regional	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	0	0	0	0	50	300.000.000	100	300.000.000	0	0	0	0	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.177.820.000		4.282.885.652		4.389.497.059		4.506.149.535		4.634.330.090	
Meningkatnya Sarana Air Limbah Domestik yang Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman (%)	5	10	19	4.177.820.000	22	4.282.885.652	26	4.389.497.059	30,3	4.506.149.535	34,3	4.634.330.090	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	0	0	0	0	60	1.000.000.000	65	1.000.000.000	70	1.000.000.000	75	1.000.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					633.040.380.000		647.660.357.415		663.814.554.024		681.790.214.461		701.212.656.673	
Meningkatnya Kualitas Bangunan/Gedung Publik	Persentase bangunan/gedung publik sesuai standart SNI (%)	100	100	100	633.040.380.000	100	647.660.357.415	100	663.814.554.024	100	681.790.214.461	100	701.212.656.673	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					31.171.297.872		31.955.207.357		32.750.649.939		33.621.010.336		34.577.383.343	
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi kriteria ramah lingkungan	Persentase bangunan/gedung publik ramah lingkungan (%)	100	100	100	31.171.297.872	100	31.955.207.357	100	32.750.649.939	100	33.621.010.336	100	34.577.383.343	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					247.537.013.500		253.762.182.997		260.078.938.943		266.990.631.047		274.585.365.115	
Meningkatnya kualitas sarana jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	4.813	5.013	53,13	202.859.683.500	58,13	207.961.287.887	63,13	213.137.948.515	68,13	218.802.166.779	73,13	225.026.146.487	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya kualitas sarana jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	84	86	88	44.677.330.000	90	45.800.895.110	92	46.940.990.428	94	48.188.464.268	96	49.559.218.628	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.117.600.000		1.145.705.895		1.174.225.293		1.205.430.756		1.239.720.071	
Meningkatnya tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat tenaga terampil (%)	21,6	25,6	28,6	464.259.000	35,6	475.934.389	42,6	487.781.550	49,6	500.744.522	56,6	514.988.547	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi (%)	5	10	15	653.341.000	25	669.771.506	35	686.443.743	45	704.686.234	55	724.731.524	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.098.623.100		2.151.400.195		2.204.953.762		2.263.551.207		2.327.939.495	
Cakupan wilayah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Persentase wilayah yang memiliki RDTR sesuai ketentuan (%)	86	87	88	1.191.428.600	89	1.221.391.170	90	1.251.794.557	91	1.285.061.451	92	1.321.615.917	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya keselarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan dokumen pembangunan	Persentase keselarasan RTRW terhadap RPJMD (%)	100	100	100	907.194.500	100	930.009.025	100	953.159.205	100	978.489.756	100	1.006.323.578	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Persentase keselarasan RTRW terhadap KLHS (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					53.818.869.200		55.172.329.752		56.545.702.797		58.048.425.352		59.699.653.156	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					939.694.000		963.325.838		987.305.352		1.013.543.351		1.042.374.295	
Meningkatnya penyediaan dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	100	100	100	939.694.000	100	963.325.838	100	987.305.352	100	1.013.543.351	100	1.042.374.295	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.611.586.000		1.652.114.872		1.693.240.017		1.738.238.484		1.787.683.886	
Meningkatnya Kualitas kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani (%)	74,96	83,61	87,8	1.611.586.000	91,82	1.652.114.872	95,99	1.693.240.017	100	1.738.238.484	100	1.787.683.886	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					9.795.530.000		10.041.872.289		10.291.838.836		10.565.348.184		10.865.886.857	
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase peningkatan rumah layak huni (%)	2,73	2,65	2,59	9.795.530.000	2,52	10.041.872.289	2,46	10.291.838.836	2,4	10.565.348.184	2,34	10.865.886.857	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					41.472.059.200		42.515.016.753		43.573.318.592		44.731.295.333		46.003.708.118	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	45	50	56	41.472.059.200	67	42.515.016.753	78	43.573.318.592	89	44.731.295.333	100	46.003.708.118	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	63	65	71		79		87		93		100		1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					39.537.912.986		40.532.229.780		41.541.175.245		45.380.551.079		43.858.217.888	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.432.619.862		26.072.210.552		26.721.211.082		27.431.336.955		28.211.640.401	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (POL PP)	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	100	100	15.850.787.606	100	16.249.410.172	100	16.653.897.386	100	17.096.480.747	100	17.582.802.025	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (BPBD)	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	-	90	90	9.581.832.256	90	9.822.800.380	90	10.067.313.696	90	10.334.856.208	90	10.628.838.376	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.919.009.824		9.143.308.999		9.370.908.126		12.355.347.448		9.893.589.385	
Meningkatnya Kualitas anggota Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP yang bersertifikat Tekhnis (Orang)	4	5	6	249.980.000	7	256.266.607	8	262.645.704	9	269.625.609	10	277.295.297	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Jumlah anggota Satpol PP yang bersertifikat dasar (Orang)	15	17	19		21		23		25		27		1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Berkurangnya daerah rawan pelanggaran perda	Persentase berkurangnya daerah rawan pelanggaran Perda (%)	20	22	24	644.052.000	26	660.248.902	28	676.684.098	30	694.667.224	32	714.427.516	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas	Persentase anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	100	100	438.158.000	100	449.176.990	100	460.358.094	100	472.592.277	100	486.035.493	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan trantibum (%)	100	100	100	7.586.819.824	100	7.777.616.500	100	7.971.220.230	100	10.918.462.338	100	8.415.831.079	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.036.273.300		4.137.779.273		4.240.778.631		4.353.478.860		4.477.316.592	
Meningkatnya Layanan Penguatan Kapasitas Kawasan dalam Menghadapi Bencana	Persentase layanan dalam penguatan kapasitas kawasan rawan bencana (%)	100	100	100	2.886.179.300	100	2.958.762.204	100	3.032.412.969	100	3.113.000.443	100	3.201.551.904	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Efektifitas Pemulihan Pascabencana	Persentase efektifitas pemulihan pasca bencana (%)	100	100	100	315.099.900	100	323.024.171	100	331.065.025	100	339.863.198	100	349.530.843	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Layanan Informasi dalam Kesiapsiagaan Bencana	Persentase layanan informasi dalam kesiapsiagaan bencana (%)	100	100	100	299.994.100	100	307.538.483	100	315.193.862	100	323.570.253	100	332.774.434	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Layanan Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase layanan Penanganan kedaruratan Bencana (%)	100	100	100	535.000.000	100	548.454.415	100	562.106.775	100	577.044.966	100	593.459.411	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.150.010.000		1.178.930.956		1.208.277.406		1.240.387.816		1.275.671.510	
Meningkatnya Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase layanan penanganan kebakaran dan non kebakaran (%)	100	100	100	1.150.010.000	100	1.178.930.956	100	1.208.277.406	100	1.240.387.816	100	1.275.671.510	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					33.492.289.300		34.334.568.097		35.189.238.735		36.124.405.513		37.151.989.338	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.573.636.800		11.864.695.700		12.160.036.740		12.483.194.125		12.838.287.259	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	90	90	90,05	11.573.636.800	90,1	11.864.695.700	90,15	12.160.036.740	90,2	12.483.194.125	90,25	12.838.287.259	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					10.817.905.400		11.089.958.835		11.366.014.796		11.668.070.760		11.999.977.143	
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	35,58	35,58	48,47	10.817.905.400	61,35	11.089.958.835	74,23	11.366.014.796	87,11	11.668.070.760	100	11.999.977.143	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.591.667.900		2.656.844.302		2.722.979.598		2.795.343.768		2.874.859.265	
Meningkatnya pemenuhan layanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya (%)	-	32,83	38,85	2.591.667.900	39,72	2.656.844.302	40,56	2.722.979.598	41,41	2.795.343.768	42,25	2.874.859.265	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					6.596.779.400		6.762.678.105		6.931.017.558		7.115.211.863		7.317.609.009	
Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin/rentan yang mandiri	Persentase keluarga miskin/rentan yang keluar dari kategori miskin/rentan (%)	-	0,65	1,61	6.596.779.400	1,62	6.762.678.105	1,66	6.931.017.558	1,72	7.115.211.863	1,77	7.317.609.009	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.848.171.400		1.894.650.026		1.941.812.458		1.993.416.828		2.050.120.956	
Meningkatnya persentase korban bencana alam dan sosial pasca bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pasca Bencana (%)	100	100	100	1.848.171.400	100	1.894.650.026	100	1.941.812.458	100	1.993.416.828	100	2.050.120.956	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					64.128.400		65.741.129		67.377.585		69.168.169		71.135.706	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	PERSENTASE MAKAM PAHLAWAN DALAM KONDISI BAIK (%)	100	100	100	64.128.400	100	65.741.129	100	67.377.585	100	69.168.169	100	71.135.706	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					47.550.607.151		48.746.430.697		49.959.847.536		51.287.548.599		52.746.458.565	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.640.907.193		16.034.251.594		16.433.382.989		16.870.106.101		17.349.987.994	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	87,5	88	15.640.907.193	88,5	16.034.251.594	89	16.433.382.989	89,5	16.870.106.101	90	17.349.987.994	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					233.560.000		239.433.669		245.393.754		251.915.182		259.081.084	
Terciptanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	5	5	7	233.560.000	10	239.433.669	15	245.393.754	15	251.915.182	20	259.081.084	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					15.475.148.458		15.864.324.286		16.259.225.778		16.691.320.599		17.166.116.814	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Tenga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kompetensi yang di berikan (%)	0	40	40	15.475.148.458	40	15.864.324.286	40	16.259.225.778	40	16.691.320.599	40	17.166.116.814	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.266.439.900		1.298.288.887		1.330.606.445		1.365.967.793		1.404.823.697	
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Kerja yang terpenuhi (%)	60	61	62	1.266.439.900	64	1.298.288.887	65	1.330.606.445	66	1.365.967.793	67	1.404.823.697	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					14.934.551.600		15.310.132.261		15.691.238.570		16.108.238.924		16.566.448.976	
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-haknya (%)	65	90	92	14.934.551.600	95	15.310.132.261	97	15.691.238.570	99	16.108.238.924	100	16.566.448.976	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					16.181.159.198		16.588.090.093		17.001.007.871		17.452.815.820		17.949.273.297	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.973.870.798		13.300.143.397		13.631.216.211		13.993.470.724		14.391.524.725	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	-	84,5	85	12.973.870.798	85,5	13.300.143.397	86,5	13.631.216.211	87	13.993.470.724	87,5	14.391.524.725	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.842.400.000		1.888.733.484		1.935.748.639		1.987.191.861		2.043.718.915	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan (%)	24,72	24,79	24,95	1.842.400.000	25,01	1.888.733.484	25,17	1.935.748.639	25,24	1.987.191.861	25,31	2.043.718.915	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Anggaran Responsif Gender (%)	31,01	31,03	31,5		31,7		31,9		32,1		32,3		2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					95.000.000		97.389.102		99.813.353		102.465.929		105.380.643	
Meningkatnya perlindungan perempuan	Persentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani (%)	100	100	100	95.000.000	100	97.389.102	100	99.813.353	100	102.465.929	100	105.380.643	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					551.318.800		565.183.607		579.252.397		594.646.240		611.561.366	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan layanan komprehensif bagi keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (Indeks)	82,44	82,65	83	551.318.800	83,5	565.183.607	84	579.252.397	84,5	594.646.240	85	611.561.366	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					105.169.800		107.814.656		110.498.424		113.434.960		116.661.696	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Instansi yang Berkontribusi dalam Penyusunan Data Gender dan Anak (%)	100	100	100	105.169.800	100	107.814.656	100	110.498.424	100	113.434.960	100	116.661.696	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					430.399.800		441.223.683		452.206.810		464.224.370		477.429.555	
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Desa Layak Anak (%)	10,8	14	17	430.399.800	20	441.223.683	24	452.206.810	27	464.224.370	30	477.429.555	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					183.000.000		187.602.164		192.272.037		197.381.736		202.996.397	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani (%)	100	100	100	183.000.000	100	187.602.164	100	192.272.037	100	197.381.736	100	202.996.397	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.994.100.700		8.195.139.855		8.399.136.753		8.622.346.859		8.867.615.507	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					2.504.684.700		2.567.673.611		2.631.589.232		2.701.524.670		2.778.371.417	
Meningkatnya Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (%)	68,96	70	70,96	2.504.684.700	72,96	2.567.673.611	74,96	2.631.589.232	76,96	2.701.524.670	78,96	2.778.371.417	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4.455.074.000		4.567.112.157		4.680.798.650		4.805.192.573		4.941.879.614	
Meningkatnya Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	90,54	90,8	91	2.235.810.000	91,5	2.292.037.132	92	2.349.091.492	92,5	2.411.519.451	93	2.480.116.797	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi (Nilai)	91,64	91,8	92	2.219.264.000	92,5	2.275.075.025	93	2.331.707.158	93,5	2.393.673.122	94	2.461.762.817	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					846.509.200		867.797.585		889.399.171		913.035.276		939.007.199	
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan dan desa rawan pangan (%)	6,4	6	5,09	846.509.200	3,82	867.797.585	2,5	889.399.171	1,27	913.035.276	0	939.007.199	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					187.832.800		192.556.502		197.349.700		202.594.340		208.357.277	
Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi	74,66	82,66	82,66	187.832.800	82,66	192.556.502	82,66	197.349.700	82,66	202.594.340	83	208.357.277	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)													
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					15.600.002.176		15.992.317.879		16.390.405.443		16.825.986.410		17.304.613.288	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.700.612.176		14.045.161.186		14.394.779.299		14.777.325.778		15.197.677.080	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	-	88,5	88,75	13.700.612.176	90	14.045.161.186	90,25	14.394.779.299	90,5	14.777.325.778	90,75	15.197.677.080	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					272.200.000		279.045.405		285.991.522		293.591.850		301.943.274	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan (%)	100	100	100	272.200.000	100	279.045.405	100	285.991.522	100	293.591.850	100	301.943.274	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		200.000.000		100.000.000		200.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	50	0	100	200.000.000	50	100.000.000	100	200.000.000	50	100.000.000	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					25.250.000		25.884.998		26.529.338		27.234.365		28.009.066	
Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (%)	81	81	82	25.250.000	84	25.884.998	86	26.529.338	88	27.234.365	90	28.009.066	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					873.620.000		695.590.179		817.883.590		742.276.679		869.080.394	
Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah (%)	100	100	100	873.620.000	100	695.590.179	100	817.883.590	100	742.276.679	100	869.080.394	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					728.320.000		746.636.111		765.221.694		785.557.738		807.903.474	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah (%)	100	100	100	728.320.000	100	746.636.111	100	765.221.694	100	785.557.738	100	807.903.474	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.286.675.500		17.721.408.405		18.162.537.224		18.645.213.235		19.175.589.285	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					477.434.300		489.441.027		501.624.401		514.955.251		529.603.512	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kebijakan/Rencana/Program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yangÂ ditindaklanjuti (%)	-	100	100	477.434.300	100	489.441.027	100	501.624.401	100	514.955.251	100	529.603.512	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.633.601.000		1.674.683.515		1.716.370.448		1.761.983.615		1.812.104.463	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Air (Nilai)	3,33	3,6	4	1.633.601.000	4,2	1.674.683.515	4,3	1.716.370.448	4,4	1.761.983.615	4,5	1.812.104.463	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Kualitas Udara (Nilai)	3,26	3,5	3,8		4		4,2		4,3		4,4		2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Kualitas Lahan (Nilai)	-0,04	1	2		2		2		2		2		2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					3.531.061.800		3.619.862.492		3.709.969.646		3.808.563.434		3.916.900.668	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	40,52	41	62	3.531.061.800	63	3.619.862.492	64	3.709.969.646	65	3.808.563.434	66	3.916.900.668	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					125.151.600		128.298.967		131.492.640		134.987.104		138.826.906	
Meningkatnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	50	55	60	125.151.600	70	128.298.967	80	131.492.640	90	134.987.104	100	138.826.906	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					350.400.000		359.212.013		368.153.671		377.937.488		388.688.183	
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan (%)	30	40	50	350.400.000	60	359.212.013	70	368.153.671	80	377.937.488	90	388.688.183	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					224.967.900		230.625.492		236.366.319		242.647.840		249.550.126	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	100	100	224.967.900	100	230.625.492	100	236.366.319	100	242.647.840	100	249.550.126	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					196.892.600		201.844.142		206.868.532		212.366.138		218.407.040	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Penghargaan LingkunganÂ Hidup yang diterima (Angka)	-	3	3	196.892.600	3	201.844.142	3	206.868.532	3	212.366.138	3	218.407.040	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000		102.514.844		105.066.687		107.858.872		110.926.993	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sesuai Standar	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	100.000.000	100	102.514.844	100	105.066.687	100	107.858.872	100	110.926.993	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					10.647.166.300		10.914.925.913		11.186.624.880		11.483.913.493		11.810.581.394	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	19,8	25	30	10.647.166.300	35	10.914.925.913	40	11.186.624.880	45	11.483.913.493	50	11.810.581.394	2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Penanganan Sampah (%)	71,65	75	70		65		60		55		50		2.10.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.349.132.224		11.634.545.183		11.924.157.221		12.241.046.022		12.589.251.083	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.851.722.124		9.074.329.118		9.300.211.170		9.547.367.654		9.818.949.162	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	-	100	100	8.851.722.124	100	9.074.329.118	100	9.300.211.170	100	9.547.367.654	100	9.818.949.162	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					769.567.700		788.921.126		808.559.286		830.047.042		853.658.307	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik (%)	99,24	100	100	769.567.700	100	788.921.126	100	808.559.286	100	830.047.042	100	853.658.307	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	70,75	78	84		87		92		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					743.986.100		762.696.189		781.681.546		802.455.017		825.281.407	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 Tahun (%)	9.867	99	99,5	743.986.100	99,8	762.696.189	100	781.681.546	100	802.455.017	100	825.281.407	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI					940.854.300		964.515.317		988.524.442		1.014.794.837		1.043.661.382	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	43,48	45,16	58,06	940.854.300	67,74	964.515.317	77,42	988.524.442	90,32	1.014.794.837	100	1.043.661.382	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase data anomali yang diturunkan (data ganda) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					43.002.000		44.083.433		45.180.777		46.381.472		47.700.825	
Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang diolah (%)	100	100	100	43.002.000	100	44.083.433	100	45.180.777	100	46.381.472	100	47.700.825	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					40.739.891.980		41.764.436.670		42.804.054.751		43.941.588.027		45.191.537.040	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					0		0		0		0		0	
Meningkatnya penataan desa	Persentase Desa yang Tertata Dengan Baik (%)	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					30.675.187.980		31.446.621.075		32.229.403.712		33.085.911.802		34.027.063.559	
Meningkatnya kualitas kerjasama desa	Persentase Desa Yang Aktif Melakukan Kerjasama (%)	38,56	51,63	63,4	30.675.187.980	81,05	31.446.621.075	90,2	32.229.403.712	100	33.085.911.802	100	34.027.063.559	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.371.325.000		4.481.257.000		4.592.806.351		4.714.861.845		4.848.979.368	
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (%)	46,75	56,28	62,77	4.371.325.000	69,05	4.481.257.000	75,54	4.592.806.351	83,12	4.714.861.845	85,28	4.848.979.368	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					5.693.379.000		5.836.558.595		5.981.844.688		6.140.814.380		6.315.494.113	
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa (%)	93,7	94	94,5	5.693.379.000	96	5.836.558.595	97	5.981.844.688	98	6.140.814.380	98	6.315.494.113	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.261.189.000		5.393.499.691		5.527.756.974		5.674.659.120		5.836.078.743	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					3.353.000.000		3.437.322.716		3.522.886.012		3.616.507.985		3.719.382.068	
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	64,71	66	66,71	3.353.000.000	67,2	3.437.322.716	68,3	3.522.886.012	69,4	3.616.507.985	70,4	3.719.382.068	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					420.800.000		431.382.463		442.120.618		453.870.134		466.780.786	
Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)	75,4	76	76	420.800.000	76,5	431.382.463	77	442.120.618	77,5	453.870.134	78	466.780.786	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.487.389.000		1.524.794.512		1.562.750.344		1.604.281.001		1.649.915.889	
Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) (Angka)	17,05	17	16,5	1.487.389.000	16	1.524.794.512	15,5	1.562.750.344	15	1.604.281.001	14,5	1.649.915.889	2.08.2.14.2.13.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					39.888.218.189		40.891.344.614		41.909.229.316		43.022.982.280		44.246.800.914	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.217.846.864		18.675.997.276		19.140.888.125		19.649.564.167		20.208.509.677	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88	90	18.217.846.864	92	18.675.997.276	94	19.140.888.125	96	19.649.564.167	98	20.208.509.677	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					21.670.371.325		22.215.347.338		22.768.341.191		23.373.418.113		24.038.291.237	
Meningkatnya Ketersediaan layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	99,6	99,99	99,99	21.670.371.325	99,99	22.215.347.338	99,99	22.768.341.191	99,99	23.373.418.113	99,99	24.038.291.237	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					23.029.833.636		23.608.998.004		24.196.683.201		24.839.718.830		25.546.301.897	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.919.188.784		10.168.640.899		10.421.763.023		10.698.725.154		11.003.057.827	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	56,95	60	63,05	9.919.188.784	66,1	10.168.640.899	69,15	10.421.763.023	72,2	10.698.725.154	75,25	11.003.057.827	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					8.776.810.000		8.997.533.071		9.221.503.483		9.466.568.281		9.735.851.396	
Meningkatnya kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Persentase Badan Publik yang Informatif (%)	0	67	76	8.776.810.000	82	8.997.533.071	94	9.221.503.483	98	9.466.568.281	100	9.735.851.396	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.333.834.852		4.442.824.034		4.553.416.695		4.674.425.395		4.807.392.674	
Meningkatnya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kematangan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (%)	0	100	100	4.333.834.852	100	4.442.824.034	100	4.553.416.695	100	4.674.425.395	100	4.807.392.674	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.729.307.200		3.823.093.454		3.918.259.519		4.022.388.687		4.136.808.330	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					166.163.400		170.342.150		174.582.379		179.221.969		184.320.063	
Meningkatnya Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif (%)	26,39	30	30,49	166.163.400	32,18	170.342.150	33,7	174.582.379	35,05	179.221.969	36,27	184.320.063	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					433.517.600		444.419.891		455.482.579		467.587.194		480.888.037	
Meingkatnya Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi dengan SDM yang Kompeten (%)	26,39	30	30,49	433.517.600	32,18	444.419.891	33,7	455.482.579	35,05	467.587.194	36,27	480.888.037	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					400.318.100		410.385.475		420.600.965		431.778.588		444.060.830	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya daya saing dan ketahanan Koperasi	Persentase Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang meningkat (%)	7,8	0	8,7	400.318.100	9,4	410.385.475	10,08	420.600.965	10,74	431.778.588	11,38	444.060.830	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.003.808.200		2.054.200.848		2.105.334.888		2.161.284.926		2.222.764.178	
Meningkatnya UMKM yang memiliki legalitas usaha	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha (%)	4,59	5,2	5,2	2.003.808.200	5,4	2.054.200.848	5,6	2.105.334.888	5,8	2.161.284.926	6	2.222.764.178	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					725.499.900		743.745.090		762.258.708		782.516.010		804.775.222	
Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang yang omset usahanya meningkat (%)	1,86	2,7	3,62	725.499.900	4,66	743.745.090	5,83	762.258.708	7,11	782.516.010	7,68	804.775.222	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.526.852.507		9.766.437.977		10.009.548.295		10.275.555.671		10.567.850.993	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.926.688.907		8.126.032.760		8.328.309.416		8.549.637.258		8.792.837.632	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	-	88,5	88,75	7.926.688.907	90	8.126.032.760	90,25	8.328.309.416	90,5	8.549.637.258	90,75	8.792.837.632	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					238.902.200		244.910.217		251.006.626		257.677.219		265.007.026	
Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) (Nilai)	92,3	92,4	92,5	238.902.200	92,6	244.910.217	92,7	251.006.626	92,8	257.677.219	92,9	265.007.026	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					397.422.000		407.416.543		417.558.128		428.654.887		440.848.273	
Meningkatnya Minat Investasi	Nilai Rencana Investasi Sektor Non Pertambangan (Nilai)	88,9	90	95	397.422.000	100	407.416.543	105	417.558.128	110	428.654.887	115	440.848.273	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					473.753.600		485.667.764		497.757.212		510.985.290		525.520.622	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Hasil Penilaian Mandiri Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan PelaksanaanÃ Berusaha (PBB) (Nilai)	94,35	94,4	94,5	473.753.600	94,6	485.667.764	94,7	497.757.212	94,8	510.985.290	94,9	525.520.622	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Nilai)	A (92)	A (92,75)	A (93)		A (93,25)		A (93,5)		A (93,75)		A (94)		2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					341.373.000		349.957.998		358.669.301		368.201.068		378.674.803	
Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM (%)	90	90	90	341.373.000	90	349.957.998	90	358.669.301	90	368.201.068	90	378.674.803	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					148.712.800		152.452.695		156.247.612		160.399.949		164.962.637	
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	148.712.800	100	152.452.695	100	156.247.612	100	160.399.949	100	164.962.637	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					33.407.868.648		34.288.305.097		35.170.513.215		36.138.108.026		37.203.558.056	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.161.410.244		13.431.668.040		13.722.760.360		14.037.805.729		14.380.617.734	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	100	100	13.161.410.244	100	13.431.668.040	100	13.722.760.360	100	14.037.805.729	100	14.380.617.734	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.889.992.020		1.928.801.317		1.970.602.473		2.015.843.311		2.065.071.467	
Meningkatnya Partsipasi Pemuda dalam Perekonomian	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	5,21	5,4	5,5	1.889.992.020	5,6	1.928.801.317	5,7	1.970.602.473	5,8	2.015.843.311	5,9	2.065.071.467	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					17.590.567.284		18.146.209.587		18.678.584.757		19.267.559.994		19.921.020.678	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase prestasi olahraga yang diraih (%)	60	61	65	17.590.567.284	67	18.146.209.587	69	18.678.584.757	72	19.267.559.994	75	19.921.020.678	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					765.899.100		781.626.153		798.565.625		816.898.992		836.848.177	
Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif (%)	100	100	100	765.899.100	100	781.626.153	100	798.565.625	100	816.898.992	100	836.848.177	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					524.953.100		538.154.851		551.550.830		566.208.493		582.314.687	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					524.953.100		538.154.851		551.550.830		566.208.493		582.314.687	
Meningkatnya Akses Data Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Terpublikasikan dalam Portal data Daerah sebagai Upaya Mendukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	0	100	100	524.953.100	100	538.154.851	100	551.550.830	100	566.208.493	100	582.314.687	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					537.974.800		551.504.026		565.232.299		580.253.552		596.759.268	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					537.974.800		551.504.026		565.232.299		580.253.552		596.759.268	
Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Keamanan Informasi	Persentase Gangguan yang Terselesaikan (%)	0	37	40	537.974.800	43	551.504.026	49	565.232.299	51	580.253.552	53	596.759.268	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.654.417.200		5.044.977.360		5.276.790.492		5.415.158.080		5.562.130.741	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.506.738.100		1.537.677.608		1.571.002.293		1.607.069.170		1.646.314.827	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ragam tradisi budaya daerah yang diaktualisasikan	Persentase ragam tradisi budaya daerah yang diaktualisasikan (%)	20	37,5	50	1.506.738.100	62,5	1.537.677.608	75	1.571.002.293	87,5	1.607.069.170	100	1.646.314.827	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					2.137.039.300		2.180.925.877		2.228.191.098		2.279.345.626		2.335.008.677	
Meningkatnya ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan	Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan (%)	40	66,67	66,67	2.137.039.300	73	2.180.925.877	87	2.228.191.098	93	2.279.345.626	100	2.335.008.677	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					223.326.200		228.239.376		333.260.643		340.815.424		348.889.964	
Meningkatnya pelestarian sejarah lokal	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	60	89	89	223.326.200	92	228.239.376	94	333.260.643	97	340.815.424	100	348.889.964	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					787.313.600		804.634.499		822.336.458		840.427.860		858.917.273	
Meningkatnya objek warisan budaya yang dilestarikan	Persentasi objek warisan budaya yang dilestarikan (%)	68,00	73,68	79,00	787.313.600	84,00	804.634.499	89,00	822.336.458	95,00	840.427.860	100	858.917.273	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0		293.500.000		322.000.000		347.500.000		373.000.000	
Meningkatnya pengelolaan museum	Persentase koleksi museum yang dikelola (%)	0	17	33	0	50	293.500.000	67	322.000.000	83	347.500.000	100	373.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.054.742.757		11.332.752.282		11.614.851.961		11.923.520.862		12.262.693.700	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.238.234.910		9.470.562.098		9.706.307.348		9.964.255.985		10.247.696.172	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	80	84	9.238.234.910	88	9.470.562.098	92	9.706.307.348	95	9.964.255.985	97	10.247.696.172	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.736.457.597		1.780.126.795		1.824.438.467		1.872.923.580		1.926.200.193	
Terciptanya Perpustakaan Yang Refresentatif	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%)	31,18	31,19	31,2	1.736.457.597	31,21	1.780.126.795	31,22	1.824.438.467	31,23	1.872.923.580	31,24	1.926.200.193	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					80.050.250		82.063.389		84.106.146		86.341.297		88.797.335	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Kegemaran Membaca	Persentase Naskah Kuno yang Dilestarikan (%)	100	100	100	80.050.250	100	82.063.389	100	84.106.146	100	86.341.297	100	88.797.335	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.255.002.800		1.286.564.162		1.318.589.862		1.353.631.866		1.392.136.865	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					608.178.000		623.472.727		638.992.475		655.973.932		674.633.566	
Terkelolanya Arsip Daerah Dengan Baik	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SKPD (Nilai)	58	70	75	608.178.000	78	623.472.727	81	638.992.475	84	655.973.932	87	674.633.566	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					617.448.800		632.976.674		648.732.997		665.973.312		684.917.386	
Optimalnya Penyelamatan dan Perlindungan Arsip Perangkat Daerah	Nilai Kualitas Arsip Yang Diselamatkan (%)	0	0	0	617.448.800	0	632.976.674	0	648.732.997	0	665.973.312	0	684.917.386	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					29.376.000		30.114.761		30.864.390		31.684.622		32.585.913	
Optimalnya akses arsip melalui SOP	Persentase Akses Arsip Yang Sesuai Permintaan Pengguna (%)	100	100	100	29.376.000	100	30.114.761	100	30.864.390	100	31.684.622	100	32.585.913	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					11.311.287.500		11.595.748.725		11.884.395.022		12.200.227.129		12.547.271.069	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					918.030.000		941.117.022		964.543.706		990.176.804		1.018.343.072	
Menjamin Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Restocking Ikan (%)	22,27	28,65	28,65	918.030.000	28,65	941.117.022	28,65	964.543.706	28,65	990.176.804	28,65	1.018.343.072	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah sarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)	3.050	5.280	5.400		5.400		5.400		5.400		5.400		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					8.265.502.400		8.473.366.883		8.684.289.528		8.915.077.671		9.168.673.251	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan budidaya	Produktivitas Perikanan budidaya (Ton/Ha)	49,7	50,7	51,7	8.265.502.400	52,7	8.473.366.883	53,7	8.684.289.528	54,7	8.915.077.671	55,7	9.168.673.251	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER					385.862.100		395.565.930		405.412.524		416.186.509		428.025.224	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya Pengawasan Kawasan Perikanan	Persentase Peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	7,06	11,09	15,12	385.862.100	19,15	395.565.930	23,18	405.412.524	27,21	416.186.509	31,04	428.025.224	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perikanan (Kali)	4	4	4		4		4		4		4		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.741.893.000		1.785.698.890		1.830.149.264		1.878.786.145		1.932.229.522	
Meningkatnya Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah diversifikasi olahan hasil perikanan (Produk)	5	6	7	1.741.893.000	8	1.785.698.890	9	1.830.149.264	10	1.878.786.145	11	1.932.229.522	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					8.729.474.400		8.908.726.354		9.101.797.074		9.310.754.962		9.538.129.428	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.697.964.800		4.794.433.307		4.898.338.698		5.010.794.128		5.133.160.858	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi Sapta Pesona (%)	60,5	62	64	4.697.964.800	66	4.794.433.307	68	4.898.338.698	70	5.010.794.128	72	5.133.160.858	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.230.381.900		2.276.180.799		2.325.510.394		2.378.899.163		2.436.993.370	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	100	100	100	2.230.381.900	100	2.276.180.799	100	2.325.510.394	100	2.378.899.163	100	2.436.993.370	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					47.200.000		48.169.210		49.213.137		50.342.966		51.572.373	
Meningkutnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan intelektual (%)	-	-	10	47.200.000	10	48.169.210	10	49.213.137	10	50.342.966	10	51.572.373	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.753.927.700		1.789.943.038		1.828.734.845		1.870.718.705		1.916.402.827	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktiv dan Tervalidasi (%)	20	30	40	1.753.927.700	50	1.789.943.038	60	1.828.734.845	70	1.870.718.705	80	1.916.402.827	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					182.471.698.099		187.060.576.478		191.716.967.729		196.811.915.660		202.410.367.392	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.132.304.378		36.015.826.993		36.912.348.243		37.893.307.281		38.971.208.744	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	97,2	97,4	97,6	35.132.304.378	98	36.015.826.993	98	36.912.348.243	98	37.893.307.281	98	38.971.208.744	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					57.874.151.611		59.329.596.185		60.806.453.671		62.422.407.225		64.198.055.984	
Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	5,9	5,96	5,97	57.874.151.611	5,97	59.329.596.185	5,97	60.806.453.671	5,98	62.422.407.225	5,98	64.198.055.984	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	7,5	7,58	7,59		7,59		7,59		7,6		7,6		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produktivitas Cabai (Ton/Ha)	5,8	5,86	5,87		5,87		5,87		5,88		5,88		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produktivitas Karet (Ton/Ha)	975	1.000	1.000		1.020		1.030		1.040		1.050		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produktivitas Sawit (Ton/Ha)	1.376	2.820	2.830		2.835		2.840		2.845		2.850		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Produktivitas Kopi (Ton/Ha)	105	115	120		125		130		135		140		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Populasi Ternak Itik (Ekor)	6.326	6,833	7,38		7.971		8.609		9.298		10.042		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Populasi Ayam Buras (Ekor)	331.437	357.952	386.589		417.517		450.919		486.993		525.953		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Populasi Kambing (Ekor)	1.559	1.684	1.819		1.965		2.123		2.293		2,477		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Populasi Domba (Ekor)	146	158	171		185		200		216		234		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Populasi Sapi (Ekor)	1.327	1.434	1.549		1.673		1.807		1.952		2.109		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					74.157.331.860		76.022.273.001		77.914.651.681		79.985.261.800		82.260.498.165	
Meningkatnya Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terpenuhi (%)	20	100	100	74.157.331.860	100	76.022.273.001	100	77.914.651.681	100	79.985.261.800	100	82.260.498.165	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Persentase Peningkatan Lahan Pertanian berkelanjutan yang dikelola (%)	0	16	16		16		16		16		16		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.211.888.650		1.242.365.758		1.273.291.254		1.307.129.430		1.344.311.635	
Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penyakit Hewan yang ditangani (%)	100	100	100	1.211.888.650	100	1.242.365.758	100	1.273.291.254	100	1.307.129.430	100	1.344.311.635	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					8.871.816.700		9.094.929.042		9.321.323.875		9.569.041.437		9.841.239.471	
Meningkatnya Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luasan Pengendalian terhadap Luasan Bencana Alam dan Serangan OPT Perkebunan (%)	100	100	100	8.871.816.700	100	9.094.929.042	100	9.321.323.875	100	9.569.041.437	100	9.841.239.471	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Persentase Luasan Pengendalian terhadap luasan bencana alam dan serangan OPT	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)													
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					5.224.204.900		5.355.585.499		5.488.899.005		5.634.768.487		5.795.053.393	
Meningkatnya Sarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluh Yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	5.224.204.900	100	5.355.585.499	100	5.488.899.005	100	5.634.768.487	100	5.795.053.393	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.007.189.117		8.208.557.424		8.412.888.319		8.636.463.877		8.882.134.094	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					48.000.000		49.207.125		50.432.010		51.772.259		53.244.957	
Meningkatnya Tertib Perijinan Sektor Perdagangan	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%) (%)	23,63	26,54	29,34	48.000.000	31,9	46.812.496	34,23	45.398.975	36,32	45.418.389	38,19	46.501.435	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	100	100	0	100	2.394.629	100	5.033.035	100	6.353.870	100	6.743.522	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					3.840.329.700		3.936.907.998		4.034.907.182		4.142.136.304		4.259.962.248	
Meningkatnya Sarana Prasarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%) (%)	22,05	27,05	32,05	3.840.329.700	37,05	3.936.907.998	42,05	4.034.907.182	47,05	4.142.136.304	52,05	4.259.962.248	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.072.716.418		1.099.693.561		1.127.067.600		1.157.019.830		1.189.932.064	
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (%)	6,52	7	6,8	1.072.716.418	6,6	1.099.693.561	6,4	1.127.067.600	6,2	1.157.019.830	6	1.189.932.064	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					310.359.600		318.164.659		326.084.549		334.750.364		344.272.571	
Meningkatnya Cakupan Promosi Perdagangan	CAKUPAN PROMOSI PERDAGANGAN DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN (%) (%)	0	14,29	14,29	310.359.600	28,57	318.164.659	28,57	326.084.549	28,57	334.750.364	28,57	344.272.571	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.034.277.699		1.060.288.169		1.086.681.312		1.115.560.262		1.147.293.149	
Meningkatnya Tertib Ukur	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	60,98	76,92	70	1.034.277.699	71	1.060.288.169	72	1.086.681.312	73	1.115.560.262	74	1.147.293.149	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					1.701.505.700		1.744.295.912		1.787.715.666		1.835.224.858		1.887.429.105	
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%) (%)	52,77	55,55	4,88	1.701.505.700	9,99	1.744.295.912	15,02	1.787.715.666	20,01	1.835.224.858	25,01	1.887.429.105	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					14.033.201.251		14.386.114.357		14.744.219.621		15.136.052.603		15.566.608.140	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.375.868.151		11.661.953.478		11.952.247.773		12.269.883.091		12.618.908.444	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88,25	88,5	11.375.868.151	88,75	11.661.953.478	90	11.952.247.773	90,25	12.269.883.091	90,5	12.618.908.444	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.312.802.000		1.345.816.921		1.379.317.567		1.415.973.431		1.456.251.780	
Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	13,16	14	14,55	1.312.802.000	15,23	1.345.816.921	15,88	1.379.317.567	16,5	1.415.973.431	17,11	1.456.251.780	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					178.181.000		182.661.974		187.208.873		192.184.017		197.650.825	
Meningkatnya kepatuhan pelaporan industri	PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)	12,20	15,00	17,00	178.181.000	19,00	182.661.974	21,00	187.208.873	23,00	192.184.017	25,00	197.650.825	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					1.166.350.100		1.195.681.984		1.225.445.408		1.258.012.064		1.293.797.091	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya efektifitas promosi produk IKM	PERSENTASE PRODUK IKM YANG DI PROMOSIKAN (%)	66,67	66,67	66,67	1.166.350.100	66,67	1.195.681.984	66,67	1.225.445.408	66,67	1.258.012.064	66,67	1.293.797.091	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					999.995.700		1.025.144.031		1.050.662.351		1.078.584.084		1.109.265.158	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					443.558.900		454.713.714		466.032.641		478.417.627		492.026.549	
Meningkatnya SDM di lokasi Transmigrasi	persentase jumlah permukiman yang layak huni (%)	30	32	35	443.558.900	40	454.713.714	45	466.032.641	50	478.417.627	60	492.026.549	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					556.436.800		570.430.317		584.629.710		600.166.457		617.238.609	
Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Untuk Kawasan Transmigrasi	persentase jumlah warga yang layak usaha (%)	10	15	20	556.436.800	25	570.430.317	30	584.629.710	35	600.166.457	40	617.238.609	2.17.3.32.2.07.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					285.807.437.158		292.995.048.072		300.288.405.146		308.268.678.389		317.037.595.205	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					88.661.072.478		90.890.760.055		93.153.251.425		95.628.832.857		98.349.061.474	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88,57	89,07	87.015.193.978	89,57	89.253.490.280	90,07	91.473.981.415	90,57	93.903.606.870	91,07	96.573.337.949	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kepuasan Layanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah (Nilai)	87,07	88,57	89,07	269.039.500	89,57	275.805.423	90,07	282.670.889	90,57	290.182.970	91,07	298.437.427	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Ketepatan Ukuran dan Fungsi Organisasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	0	0	0	703.434.000	0	721.124.267	0	739.074.798	0	758.715.979	0	780.298.182	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Laporan Kinerja (Nilai)	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Pesentase Indikator Kegiatan Utama Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General yang Tercapai Sesuai Target (%)	87	100	100	673.405.000	100	590.340.085	100	607.524.323	100	626.327.038	100	646.987.916	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Pesentase Indikator Kegiatan Utama Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik	87	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang Tercapai Sesuai Target (%)													
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					192.248.948.480		197.083.709.444		201.989.600.775		207.357.547.653		213.255.977.216	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah (%)	97	100	100	188.192.492.980	100	192.925.240.420	100	197.727.617.374	100	202.982.300.500	100	208.756.273.117	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kebijakan Administrasi Otonomi Daerah	Persentase Administrasi Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti Sesuai Standar (%)	0	0	0	309.821.000	0	317.612.515	0	325.518.660	0	334.169.436	0	343.675.118	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Kewilayahan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Administrasi Wilayah yang Lengkap/Sesuai Standar (%)	0	0	0	362.030.000	0	371.134.489	0	380.372.927	0	390.481.475	0	401.588.992	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kelurahan yang Memiliki Administrasi Wilayah yang Lengkap/Sesuai Standar (%)	0	0	0		0		0		0		0		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti Sesuai Standar (%)	0	0	0	481.615.000	0	493.726.865	0	506.016.924	0	519.464.507	0	534.241.036	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah (%)	97	100	100	1.202.528.500	100	1.232.770.215	100	1.263.456.854	100	1.297.033.678	100	1.333.928.702	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Reformasi Hukum (%)	0	0	0	1.700.461.000	0	1.743.224.940	0	1.786.618.036	0	1.834.098.057	0	1.886.270.251	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.897.416.200		5.020.578.573		5.145.552.946		5.282.297.879		5.432.556.515	
Meningkatnya Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (%)	0	0	0	328.203.500	0	336.457.306	0	344.832.544	0	353.996.594	0	364.066.273	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kompetensi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Memiliki Sertifikat (%)	0	0	0	1.721.718.400	0	1.765.016.930	0	1.808.952.481	0	1.857.026.049	0	1.909.850.445	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	0	0	0	512.042.100	0	524.919.160	0	537.985.670	0	552.282.834	0	567.992.903	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Optimalisasi Kebijakan Pembangunan	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	0	0	0	914.446.100	0	937.442.992	0	960.778.221	0	986.311.250	0	1.014.367.560	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Optimalisasi Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)	0	0	0	1.421.006.100	0	1.456.742.185	0	1.493.004.030	0	1.532.681.152	0	1.576.279.334	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					80.703.989.742		82.733.569.108		84.793.008.219		87.046.413.160		89.522.508.881	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					49.498.316.208		50.743.121.596		52.006.240.912		53.388.325.622		54.906.993.651	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	80	84	49.498.316.208	88	50.743.121.596	92	52.006.240.912	95	53.388.325.622	97	54.906.993.651	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					31.205.673.534		31.990.447.512		32.786.767.307		33.658.087.538		34.615.515.230	
Meningkatnya Kualitas layanan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah Rapat Kerja pembahasan Produk Hukum (Kali)	20	20	20	11.197.632.100	20	11.479.235.068	20	11.764.981.059	20	12.077.639.697	20	12.421.196.552	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD sesuai rencana kerja	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD sesuai rencana kerja (%)	83	83	86	16.820.197.000	89	17.243.198.699	92	17.672.423.718	95	18.142.074.787	98	18.658.138.713	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sesuai rencana kerja DPRD	Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DPRD (%)	50	25	25	3.187.844.434	25	3.268.013.745	25	3.349.362.530	50	3.438.373.054	25	3.536.179.965	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					21.786.314.365		22.334.206.165		22.890.158.700		23.498.472.969		24.166.903.364	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.734.790.065		15.105.347.035		15.481.355.743		15.892.778.386		16.344.859.513	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	90	90	14.734.790.065	90	15.105.347.035	90	15.481.355.743	90	15.892.778.386	90	16.344.859.513	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.353.938.100		2.413.135.969		2.473.204.773		2.538.931.087		2.611.152.746	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Keselarasan proritas daerah dengan prioritas Nasional (%)	100	100	100	2.353.938.100	100	2.413.135.969	100	2.473.204.773	100	2.538.931.087	100	2.611.152.746	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.697.586.200		4.815.723.161		4.935.598.184		5.066.763.496		5.210.891.105	
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik (%)	100	100	100	2.399.999.600	100	2.460.355.844	100	2.521.600.065	100	2.588.612.501	100	2.662.247.383	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dan infrastruktur	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik (%)	90	95	100	2.297.586.600	100	2.355.367.317	100	2.413.998.119	100	2.478.150.995	100	2.548.643.722	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					439.631.086.440		450.687.122.023		461.905.817.118		474.181.131.690		487.669.543.553	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.373.732.204		27.036.990.401		27.710.006.639		28.446.410.113		29.255.588.020	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	100	100	26.373.732.204	100	27.036.990.401	100	27.710.006.639	100	28.446.410.113	100	29.255.588.020	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					406.926.176.836		417.159.734.993		427.543.852.142		438.905.985.036		451.390.970.835	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penganggaran (%)	100	100	100	2.461.192.500	100	2.523.087.650	100	2.585.893.418	100	2.654.614.474	100	2.730.126.828	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	100	100	1.841.554.700	100	1.887.866.926	100	1.934.860.511	100	1.986.280.130	100	2.042.781.249	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Terlaksananya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Persentase Tertibnya SKPD dan BLUD dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)	100	100	100	2.983.707.400	100	3.058.742.984	100	3.134.882.512	100	3.218.193.151	100	3.309.736.892	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					399.639.722.236		409.690.037.433		419.888.215.701		431.046.897.281		443.308.325.866	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.797.524.200		3.893.026.006		3.989.932.861		4.095.966.774		4.212.479.395	
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	3.797.524.200	100	3.893.026.006	100	3.989.932.861	100	4.095.966.774	100	4.212.479.395	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.533.653.200		2.597.370.623		2.662.025.476		2.732.769.767		2.810.505.303	
Meningkatnya Potensi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah (%)	100	100	100	1.825.250.000	100	1.871.152.188	100	1.917.729.703	100	1.968.694.065	100	2.024.694.936	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	0	0	0	627.479.300	0	643.259.425	0	659.271.712	0	676.792.096	0	696.043.918	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Presentase Realisasi Penerimaan APBD (%)	0	0	0	80.923.900	0	82.959.010	0	85.024.061	0	87.283.606	0	89.766.449	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					18.704.506.240		19.174.895.374		19.652.205.009		20.174.469.482		20.748.346.288	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.737.548.540		12.032.729.564		12.332.253.375		12.659.987.480		13.020.109.623	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	91	92	11.737.548.540	92,5	12.032.729.564	93	12.332.253.375	93,5	12.659.987.480	94	13.020.109.623	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					6.966.957.700		7.142.165.810		7.319.951.634		7.514.482.002		7.728.236.665	
Meningkatnya kualitas pengembangan karier ASN	Persentase Talent Pool yang tersusun (%)	0	30	70	1.131.765.300	70	1.160.227.431	70	1.189.108.304	80	1.220.709.289	80	1.255.433.213	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Kelompok Rencana Suksesi yang diidentifikasi (%)	0	30	70		70		70		80		80		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penataan ASN	Persentase kesesuaian penempatan ASN (%)	100	100	100	445.175.600	100	456.371.071	100	467.731.254	100	480.161.381	100	493.819.906	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan kedisiplinan ASN	Persentase Pegawai berkinerja "Sangat Baik" (%)	11,21	11,5	12	320.074.000	12,5	328.123.361	13	336.291.147	13,5	345.228.207	14	355.048.463	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Pegawai yang bebas hukuman disiplin (%)	99,94	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pengadaan ASN	Persentase formasi kebutuhan ASN yang terisi (%)	78,93	80	80	260.432.800	81	266.982.278	82	273.628.115	83	280.899.881	84	288.890.273	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas pengelolaan lembaga profesi ASN	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi lembaga profesi ASN (%)	0	91	92	95.786.000	92,5	98.194.868	93	100.639.177	93,5	103.313.699	94	106.252.529	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN	Persentase pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN (aspek kompetensi teknis, fungsional, dan sosial kultural) (%)	70,29	75	80	4.470.155.000	82	4.582.572.421	85	4.696.643.758	87	4.821.458.769	90	4.958.608.514	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas sistem informasi kepegawaian	Persentase data/informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)	100	100	100	243.569.000	100	249.694.380	100	255.909.879	100	262.710.776	100	270.183.767	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.728.504.900		3.822.270.978		3.917.416.569		4.021.523.335		4.135.918.362	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.728.504.900		3.822.270.978		3.917.416.569		4.021.523.335		4.135.918.362	
Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN	Persentase pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN (aspek kompetensi kepemimpinan) (%)	63	72	78	3.728.504.900	80	3.822.270.978	82	3.917.416.569	83	4.021.523.335	85	4.135.918.362	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.492.258.200		2.554.934.603		2.618.533.120		2.688.121.587		2.764.587.074	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.492.258.200		2.554.934.603		2.618.533.120		2.688.121.587		2.764.587.074	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang tervalidasi (%)	0	0	0	2.492.258.200	0	2.554.934.603	0	2.618.533.120	0	2.688.121.587	0	2.764.587.074	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Nilai inovasi SKPD (Nilai)	50	55	76,25		78,5		80,75		83		84,5		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					27.044.746.356		27.724.879.511		28.415.018.978		29.170.158.410		29.999.923.840	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.912.970.356		22.464.047.356		23.023.231.956		23.635.082.693		24.307.399.046	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	100	100	21.912.970.356	100	22.464.047.356	100	23.023.231.956	100	23.635.082.693	100	24.307.399.046	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.200.253.000		2.255.585.928		2.311.732.930		2.373.168.071		2.440.674.487	
Meningkatnya kualitas kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang sesuai (%)	84,44	84,55	84,6	1.077.603.000	84,9	1.104.703.033	85	1.132.201.770	85,5	1.162.290.442	85,7	1.195.352.603	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya kualitas pengendalian evaluasi internal SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai AKIP A (%)	6	9	15	74.600.000	21	76.476.073	25	78.379.748	28	80.462.719	31	82.751.536	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya Kualitas atas penyelenggaraan SPIP	Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Nilai)	3,904	3,93	3,96	1.048.050.000	3,99	1.074.406.822	4	1.101.151.412	4,1	1.130.414.910	4,3	1.162.570.348	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.931.523.000		3.005.246.227		3.080.054.092		3.161.907.646		3.251.850.307	
Meningkatnya kualitas pengendalian rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase Kualitas dan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) (%)	90	91	92	293.410.000	93	300.788.803	94	308.276.167	95	316.468.717	100	325.470.889	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yang masuk ke tahap wawancara (Unit Kerja)	WBK : 2	WBK : 2	WBK : 3 ; WBBM : 1	303.606.000	WBK : 4 ; WBBM : 2	311.241.217	WBK : 5 ; WBBM : 2	318.988.765	WBK : 6 ; WBBM : 3	327.466.008	WBK : 7 ; WBBM : 4	336.781.006	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya upaya pencegahan korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCSP) (Nilai)	96	85	87	1.783.187.000	89	1.828.031.370	91	1.873.535.502	93	1.923.325.387	95	1.978.035.715	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya capaian nilai elemen kapasitas APIP	Nilai Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Nilai)	-	3	3,1	551.320.000	3,2	565.184.837	3,3	579.253.658	3,4	594.647.534	3,5	611.562.697	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Nilai Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi (Nilai)	0	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Nilai Elemen Struktur Tata Kelola (Nilai)	0	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Nilai Elemen Praktik Profesional (Nilai)	0	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) (Nilai)	0	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Nilai Elemen Peran dan Layanan (Nilai)	0	3	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					59.245.213.406		60.735.138.045		62.246.982.876		63.901.219.013		65.718.933.604	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.238.677.286		49.403.210.814		50.624.904.631		51.961.251.805		53.429.046.067	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kec. Paringin Selatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	89	90	7.084.138.167	90,5	7.261.338.709	91	7.448.924.981	91,5	7.654.961.841	92	7.881.904.298	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88,57	88,75	5.310.260.526	89,00	5.404.298.189	89,50	5.521.420.626	90,00	5.648.180.691	91,00	5.786.112.800	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88	90	4.665.325.872	91	4.782.651.535	91,5	4.901.703.327	92	5.031.967.870	92,5	5.175.105.694	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWAYAN
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kec. Tebing Tinggi	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	89	90	4.954.854.228	91	5.079.461.078	91,25	5.205.901.178	91,5	5.344.249.890	91,75	5.496.270.792	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	87,7	87,75	5.005.077.151	87,8	5.130.947.029	87,85	5.258.668.741	87,9	5.398.419.770	87,95	5.551.981.582	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	89	89,5	5.693.738.798	90	5.836.927.441	90,5	5.982.222.716	91	6.141.202.454	91,5	6.315.893.226	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paringin	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88,6	89	8.487.730.882	89,5	8.689.597.065	90	8.905.939.516	90,5	9.142.660.912	91	9.402.778.999	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
Meningkatnya kelancaran Tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	88,75	88,75	7.037.551.662	89	7.217.989.768	89,5	7.400.123.546	90	7.599.608.377	91	7.818.998.676	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.081.389.780		2.285.846.237		2.360.616.550		2.443.860.605		2.536.717.047	
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Di Kec. Paringin Selatan	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88	89	90	344.816.500	90,5	351.894.440	91	359.522.864	91,5	367.780.039	92	376.759.807	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	0	88,57	88,75	420.508.300	89,00	585.528.130	89,50	619.630.319	90,00	658.507.796	91,00	702.747.520	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Di Kec. Tebing Tinggi	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88,44	89	90	140.410.300	91	143.941.400	91,25	147.524.450	91,5	151.444.966	91,75	155.752.923	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88	88	90	345.330.700	91	354.015.228	91,5	362.827.525	92	372.469.798	92,5	383.064.961	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWAYAN
Meningkatnya Fasilitasi pelayanan masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88,75	88,75	88,75	160.000.000	89	163.285.457	89,5	166.824.194	90	170.654.122	91	174.821.603	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	87,67	87,7	87,75	285.033.000	87,8	292.201.135	87,85	299.474.730	87,9	307.433.379	87,95	316.178.535	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Paringin	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	85,25	88,6	89	344.144.180	89,5	352.798.869	90	361.580.888	90,5	371.190.031	91	381.748.790	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Batumandi	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	0	89	89,5	41.146.800	90	42.181.578	90,5	43.231.580	91	44.380.474	91,5	45.642.908	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.575.087.600		5.639.943.736		5.774.021.908		5.920.221.287		6.080.385.391	
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	23	23	135.294.000	23	138.696.433	23	142.148.923	23	145.926.583	23	150.077.566	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWAYAN
Meningkatnya Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif di Kec. Paringin Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	30	30	1.485.738.400	35	1.516.250.639	40	1.549.107.678	45	1.584.666.830	50	1.623.367.922	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	60	76	315.855.100	91	256.147.733	106	261.698.990	116	267.707.042	121	274.244.616	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	36	36	314.130.600	36	322.030.494	36	330.046.614	36	338.817.722	36	348.455.628	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	120	269	269	183.390.000	269	187.155.750	269	191.211.806	269	195.601.622	269	200.378.336	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Paringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	75	100	16	2.787.212.300	32	2.857.306.339	48	2.928.431.621	64	3.006.255.753	80	3.091.770.787	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	90	180	180	126.977.000	180	130.170.273	180	133.410.527	180	136.955.960	180	140.851.768	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	10	20	226.490.200	40	232.186.075	60	237.965.749	80	244.289.775	100	251.238.768	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					674.896.400		715.860.900		732.915.630		751.515.406		771.893.749	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Paringin Selatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	46.048.400	100	64.474.896	100	65.872.202	100	67.384.488	100	69.030.059	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	112.208.400	100	121.984.442	100	124.628.100	100	127.489.296	100	130.602.664	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	58.050.000	100	59.509.867	100	60.991.212	100	62.612.075	100	64.393.119	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	112.080.000	100	114.898.637	100	117.758.743	100	120.888.224	100	124.326.974	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWAYAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	169.246.700	100	173.502.990	100	177.821.900	100	182.547.581	100	187.740.274	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Batumandi	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	9.723.000	100	9.967.518	100	10.215.634	100	10.487.118	100	10.785.432	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Lampihong	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	100	100	100	50.000.000	100	51.026.705	100	52.132.560	100	53.329.413	100	54.631.751	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Paringin	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	117.539.900	100	120.495.845	100	123.495.279	100	126.777.211	100	130.383.476	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					979.652.640		1.004.887.438		1.029.002.527		1.055.316.888		1.084.161.754	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	13.784.800	100	14.131.466	100	14.483.233	100	14.868.130	100	15.291.064	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	43.392.800	100	41.045.882	100	41.935.432	100	42.898.180	100	43.945.780	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan di Kec. Paringin Selatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	16.366.400	100	10.205.341	100	10.426.512	100	10.665.883	100	10.926.351	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	100	100	100	211.971.640	100	216.324.288	100	221.012.487	100	226.086.463	100	231.607.636	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	92.434.300	100	94.758.878	100	97.117.656	100	99.698.593	100	102.534.589	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Batumandi	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	428.383.300	100	439.156.471	100	450.088.141	100	462.049.396	100	475.192.712	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Paringin	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	0	0	0	100	11.587.000	100	11.838.115	100	12.109.893	100	12.405.624	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	173.319.400	100	177.678.112	100	182.100.951	100	186.940.350	100	192.257.998	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWAYAN
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.695.509.700		1.685.388.920		1.725.521.630		1.769.053.022		1.816.729.596	
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	127.117.300	100	130.314.102	100	133.557.936	100	137.107.286	100	141.007.398	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TEBING TINGGI
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa di Kec. Paringin Selatan	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	237.598.200	100	242.277.516	100	247.732.135	100	253.418.959	100	259.607.898	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	50	60	283.837.000	70	240.172.088	80	245.377.119	90	251.010.455	100	257.140.287	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	50	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN HALONG
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	143.320.000	100	146.262.948	100	149.432.772	100	152.863.430	100	156.596.451	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN LAMPIHONG
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	137.997.100	100	141.467.512	100	144.988.981	100	148.842.116	100	153.076.033	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BATUMANDI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100	249.602.000	100	255.879.101	100	262.248.552	100	269.217.902	100	276.875.993	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWAYAN
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	334.980.500	100	343.404.737	100	351.952.913	100	361.306.189	100	371.583.785	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	181.057.600	100	185.610.916	100	190.231.222	100	195.286.685	100	200.841.751	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PARINGIN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					13.993.341.684		14.345.252.385		14.702.340.494		80.413.706.159		15.522.393.121	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.342.006.684		7.526.646.692		7.714.003.175		7.919.005.606		8.144.267.225	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	73,29	73,99	74,69	7.342.006.684	75,39	7.526.646.692	76,09	7.714.003.175	76,79	7.919.005.606	77,49	8.144.267.225	1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.463.660.800		1.500.469.584		1.537.819.910		1.578.688.032		1.623.594.910	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (%)	0	100	100	1.463.660.800	100	1.500.469.584	100	1.537.819.910	100	1.578.688.032	100	1.623.594.910	1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.479.274.500		1.516.475.945		1.554.224.707		66.916.174.428		1.640.914.718	
Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan wawasan politik masyarakat	Persentase partai politik yang aktif dalam peningkatan wawasan politik masyarakat (%)	0	40	50	1.479.274.500	60	1.516.475.945	70	1.554.224.707	80	66.916.174.428	90	1.640.914.718	1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					95.400.000		97.799.161		100.233.619		102.897.364		105.824.351	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketertiban/kesadaran organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif melaporkan keberadaannya (%)	0	20	25	95.400.000	45	97.799.161	55	100.233.619	60	102.897.364	75	105.824.351	1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					194.600.000		199.493.886		204.459.773		209.893.365		215.863.928	
Meningkatnya penanganan potensi konflik ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase pembinaan kepada kelompok masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	0	0	0	194.600.000	100	199.493.886	100	204.459.773	100	209.893.365	100	215.863.928	1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					3.418.399.700		3.504.367.117		3.591.599.310		3.687.047.364		3.791.927.989	
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.418.399.700	100	3.504.367.117	100	3.591.599.310	100	3.687.047.364	100	3.791.927.989	1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					**3.325.203.260.338**		**3.408.826.931.864**		**3.493.680.898.427**		**3.654.582.784.744**		**3.688.547.980.809**	
TOTAL PROGRAM	**169**													

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2029 dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Balangan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD.

IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuanf sasaran yang terseleksi. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui yang terukur dan terseleksi. IKU merupakan indikator yang bersifat kritikal dan secara langsung mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai parameter utama dalam menilai kinerja pembangunan. Penetapan IKU ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja dan berbasis hasil (*result-based*), sebagaimana diatur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Target capaian setiap IKU disusun secara terukur, progresif, dan realistis untuk periode lima tahun. Penyusunannya mempertimbangkan sumber daya, isu strategis, serta tantangan pembangunan yang dihadapi.

Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah indikator untuk menjadi IKU, yakni instrumen pengukuran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Penetapan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2026 sampai dengan 2030 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Balangan

INDIKATOR SASARAN		*BASELINE*		TARGET				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR TUJUAN								
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	85,46	86,14	86,83	87,52	88,22	88,93	89,64
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,8	72,1	72,31	72,52	72,73	73,16	73,37
3	Indeks Resiko Bencana	104,24	100,25	96,3	92,35	88,4	84,45	80,5
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,15	4,22	4,33	4,44	4,55	4,66	4,77
5	Indeks Gini	0,218	0,207	0,204	0,194	0,182	0,177	0,169
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	74,33	75,00	75,67	76,34	77,01	77,68
7	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7
8	Indeks Reformasi Birokrasi	83,74	84,74	85,76	86,79	87,83	88,89	89,95
INDIKATOR SASARAN								
1	Indeks Infrastruktur	0,415	0,512	0,554	0,580	0,605	0,630	0,655
2	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	N/A	0,83	0,82	0,76	0,71	0,66	0,59
3	Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	3,63	3,78	3,88	3,98	4,08	4,19	4,3
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,82	4,04	4,15	4,26	4,37	4,48	4,6
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	4,96	5,29	5,42	5,57	5,71	5,86	6,02
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	8,34	8,56	8,78	9,01	9,25	9,49
8	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	9,72	10	10,25	10,5	10,75	11	11,25

INDIKATOR SASARAN		*BASELINE*		TARGET				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,69	2,67	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32
10	Rasio Kewirausahaan	13,9	14	14,1	14,3	14,5	14,8	15,1
11	Indeks Desa	N/A	69,35	79,63	79,67	79,71	79,76	80,33
12	Umur Harapan Hidup	73,87	74,26	74,6	74,81	75,02	75,41	75,65
13	Prevalensi Stunting	14,58	11,88	10,58	9,38	8,28	7,28	6,38
14	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,17	13,27	13,38	13,5	13,87	14,01
15	Rata-Rata lama Sekolah	8,13	8,37	8,52	8,68	8,85	9,05	9,19
16	Angka Kemiskinan	4,87	4,62	4,41	4,2	4,1	3,55	3,34
17	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	68	70	75	80	85	90	95
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,55	60,34	62,14	63,93	65,73	67,52	69,32
19	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,29	4,39 (-A)	4,49 (-A)	4,59 (A)	4,69 (A)	4,79 (A)	4,89 (A)
20	Indeks Integritas	74,96	75,25	75,5	76	76,5	77	77,5
21	Nilai AKIP	72,09	75	78	81	84	87	90
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,688	80,70	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95
23	Indeks SPBE	3,34	3,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Indeks Pemerintahan Digital	N/A	N/A	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
25	Indeks Manajemen Risiko	3	3,049	3,098	3,147	3,196	3,245	3,294

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen evaluatif yang mencerminkan kapasitas dan kapabilitas kinerja pemerintahan secara kelembagaan. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Indikator Kinerja Daerah memuat indikator-indikator yang disajikan atas beberapa kelompok, yaitu: Aspek Demografi dan Geografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi strategis dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. IKK disusun berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta unsur lainnya.

Dalam periode RPJMD Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan target pencapaian IKK secara bertahap, dengan memperhatikan baseline kondisi terkini serta target provinsi. Setiap target yang ditetapkan diharapkan mencerminkan peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan publik secara merata dan adil.

Adapun IKD dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Balangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,7	83,2	83,7	84,2	84,7	85,2	85,7	DKPPP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	3,41	3,16	2,91	2,66	2,41	2,16	1,91	DKPPP
3	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Aman	Persen	53,33	56,33	60,33	63,33	65,33	67,33	69,33	PUPRPERKIM
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,3	0,45	0,58	0,6	0,65	0,758	0,8	PUPRPERKIM
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5	10	19	22	26	30,2	34,2	PUPRPERKIM
6	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Persen	40,52	41	62	63	64	65	66	DPLH
7	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	70,8	72,1	72,31	72,52	72,73	73,16	73,37	DPLH
8	Pengelolaan Sampah:									
	a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	71,63	88	89	90	91	92	93	DPLH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	76,7	78,5	80,7	81,7	83,6	85,1	86,4	DPLH
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	0,83	0,82	0,76	0,71	0,66	0,59	DPLH
10	Penurunan Emisi GRK:									
	a. Kumulatif	Ton CO2 Eq	N/A	154.357,60	167.368,92	183.659,52	200.737,39	217.012,52	236.411,88	DPLH
	b. Tahunan	Ton CO2 Eq	N/A	11.154,42	13.013,31	16.292,59	17.079,71	16.276,87	19.401,76	DPLH
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	104,24	100,25	95,5	90,25	87,5	84,25	80,5	BPBD
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	BPBD
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,15	4,22	4,33	4,44	4,55	4,66	4,77	BPS
2	Nilai PDRB kabupaten ADHB	triilun rupiah	21,76	21,96	31,03	40,10	49,17	58,24	65,5	BPS
3	Angka Kemisikinan	Persen	4,87	4,62	4,41	4,2	4,1	3,55	3,34	BPS
4	PDRB Per Kapita	Rp Juta	157,58	170,99	186,66	203,82	224,2	247,58	274,44	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,69	2,67	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	BPS
6	Indeks Gini	Angka	0,218	0,207	0,204	0,194	0,182	0,177	0,169	BPS
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,83	74,33	75	75,67	76,34	77,01	77,68	BPS
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,87	74.39	74,6	74,81	75,02	75.41	75.65	BPS, DINEKS

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Keluarga Sehat	Angka/Nilai	0,33	0,37	0,47	0,57	0,67	0,77	0,87	DINKES
10	Prevalensi Stunting	Persen	14,58	11,88	10,58	9,38	8,28	7,28	6,38	DINKES
11	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	8,13	8,37	8,52	8,68	8,85	9,05	9,19	BPS, DISDIK
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,17	13,27	13,38	13,5	13,87	14,01	BPS, DISDIK
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	94,94	94,95	94,96	94,97	94,98	94,99	95	DISPERSIP
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPJS NAKER, KUKMTK
15	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,92	61	61,05	61,10	61,20	61,30	61,50	DP3AKBPMD
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	63.2	67,9	67,9	69,2	69,5	69,7	69,8	DP3AKBPMD
17	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,523	0,514	0,464	0,414	0,364	0,314	0,264	DP3AKBPMD
18	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92.95	92,83	93,29	93,46	93,63	93,8	93,97	DP3AKBPMD
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab/Kota	Persen	66,81	66,89	66,99	67,01	67,03	67,13	67,15	BPS (DKUKMTK)
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,55	60,34	62,14	63,93	65,73	67,52	69,32	DISDIKBUD
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	N/A	6,3	6,63	6,95	7,28	7,60	7,86	BPS

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	N/A	55,00	56,09	57,18	58,27	59,36	60,23	BPS
23	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,13	3,35-3,71	6,66-7,33	9,97-10,95	13,27-14,57	16,58-18,19	19,89-21,81	BPS/DINSOS
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Angka Ketergantungan	Persen	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	BPS
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	1,27	1,52	1,74	1,96	2,17	2,39	2,56	BPS
3	Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum	Persen	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31	BPS
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Persen	3,82	4,04	4,15	4,26	4,37	4,48	4,60	BPS
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	4,96	5,29	5,42	5,57	5,71	5,86	6,02	BPS
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	3,63	3,78	3,88	3,98	4,08	4,19	4,30	BPS
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	7,69	8,34	8,56	8,78	9,01	9,25	9,49	BPS
8	Rasio Kewirausahaan	Persen	13,9	14	14,1	14,3	14,5	14,8	15,1	KUKMTK
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,91	75,84	75,96	76,08	76,3	76,42	76,54	BPS
10	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	93,77	93,85	93,9	93,95	94	94,05	94,1	BAPPERIDA
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	0	6,48	6,62	6,75	6,86	6,96	7,05	DISKOMINFOSAN

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	15,74	17,23	17,96	18,69	19,43	20,28	20,89	BPS
13	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	60,3	64,13	64,36	64,58	64,81	65,07	65,26	BPS
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	85,46	86,14	86,83	87,52	88,22	88,93	89,64	PUPRPERKIM, DISHUB, KOMINFOSAN
15	Indeks Infrastruktur	Angka	0,415	0,512	0,554	0,58	0,605	0,63	0,655	PUPRPERKIM, DISHUB, KOMINFOSAN
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	81,84	84,11	86,08	87,82	89,37	90,78	92,06	PUPRPERKIM
17	Indeks Desa	Angka	N/A	69,35	79,63	79,67	79,71	79,76	80,33	DP3AKBPMD
18	Persentase Desa Mandiri	Persen	43,79	45,75	49,02	50,33	52,29	54,25	56,86	DP3AKBPMD
19	Rasio PAD terhadap PDRB	Persen	0	0,7	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90	BPS, BPKPAD
20	Tingkat Inflasi	Persen	2,24	2-4	2-4	2-4	1,88-3,75	1,88-3,75	1,86-3,70	BPS
21	Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	27,39	27,53	27,66	27,80	27,94	28,08	28,22	BPS
22	Kemampuan Literasi SD	Nilai	59,97	62,47	64,97	67,47	69,97	72,47	74,97	DISDIKBUD
23	Kemampuan Literasi SMP	Nilai	64,51	65,61	66,71	67,81	68,91	70,01	71,11	DISDIKBUD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24	Kemampuan Numerasi SD	Nilai	53,66	56,56	59,46	62,36	65,26	68,16	71,06	DISDIKBUD
25	Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58,99	60,49	61,99	63,49	64,99	66,49	67,99	DISDIKBUD
26	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Nilai	99,41	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Nilai	93,82	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
28	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Nilai	98,1	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
29	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	58,42	61,41	65,56	69,71	73,86	78,01	82,16	DISDIKBUD
30	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	63,03	77,89	80,37	82,86	85,34	87,83	90,31	DISDIKBUD
31	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59,71	62,21	64,71	67,21	69,71	72,21	74,71	DISDIKBUD
32	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	56,12	58,52	60,92	63,32	65,72	68,12	70,52	DISDIKBUD
33	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,29	76,19	77,09	77,99	78,89	79,79	80,69	DISDIKBUD
34	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,12	71,62	73,12	74,62	76,12	77,62	79,12	DISDIKBUD
35	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	71,58	72,58	73,58	74,58	75,58	76,58	77,58	DISDIKBUD
36	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69,38	70,38	71,38	72,38	73,38	74,38	75,38	DISDIKBUD
37	APM PAUD	Persen	93,99	94,49	94,99	95,49	95,99	96,49	96,99	DISDIKBUD
38	APM SD	Persen	87,23	87,36	87,41	87,53	87,61	87,72	87,9	DISDIKBUD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
39	APM SMP	Persen	56,62	56,69	56,74	56,81	56,92	60,01	60,14	DISDIKBUD
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,16	98,12	98,14	98,15	98,16	98,17	98,18	SETDA
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,29	4,39 (-A) Sangat Baik	4,49 (-A) Sangat Baik	4,59 (A) prima	4,69 (A) Prima	4,79 (A) Prima	4,89 (A) prima	SETDA
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	74,96	75,25	75,5	76	76,5	77	77,5	INSPEKTORAT
4	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
5	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	N/A	70	75	80	85	90	95	SATPOL PP
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.27	3,32-3,34	3,41 - 3,51	3,48-3,63	3,55-3,75	3,62-3,87	3,69-3,99	BAPPERIDA
7	Nilai IKM	Nilai	87,07 (A) Baik	88,57 (A) Sangat Baik	89,07 (A) Sangat Baik	89,57 (A) Sangat Baik	90,07 (A) Sangat Baik	90,57 (A) Sangat Baik	91,07 (A) Sangat Baik	SETDA
8	Nilai AKIP	Nilai	72,09	75	78	81	84	87	90	SETDA
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
10	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,000	3.049	3.098	3.147	3.196	3.245	3.294	BAPPERIDA, INSPEKTORAT
11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	80,688	80,70	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	BAPPERIDA, BPKPAD
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	2,38	2,54	2,61	2,69	2,76	2,84	2,88	BPKPAD
13	Indeks Sistem Merit	Angka	271,5	275	280	285	290	300	310	BKPSDM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,145	Level 3 (3,195)	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,295)	Level 3 (3,345)	Level 3 (3,360)	Level (3 3,380)	INSPEKTORAT, BAPPERIDA, BPKPAD
15	Indeks SPBE	Angka	3,34	3,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DISKOMINFOSAN
16	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	N/A	N/A	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	DISKOMINFOSAN
17	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	61,39-67,85	62,42-69,22	63,46-70,59	64,49-71,96	65,52-72,41	66,35-73,32	BPS
18	Opini Ombudsman (Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Nilai	N/A	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	OMBUDSMAN
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1.	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									**DISDIKBUD**
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,07	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	98,10	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
3	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	99,41	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,23	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
2	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									**DINKES**
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	119	106	93	81	70	61	53	DINKES
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran	14,9	10,67	9,77	9,11	8,6	8,1	7,7	DINKES
3	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
5	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
6	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiecy Virus)	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
7	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
10	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
12	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
13	Persentase SDM Rumah Sakit yang Profesional dan Kompeten dalam bidang tugasnya	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
14	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	76,03	90	90	90	90	90	90	DINKES
15	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	0	0	0	0	0	0	DINKES
16	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
17	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	91,79	90	90	90	90	90	90	DINKES
18	Nilai Indeks Nasional Mutu (INM)	%	83,69	85,5	86	86,5	87	87,5	88	DINKES
19	Nilai Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	63,74	63,84	66	67	68	70	71	DINKES
20	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
22	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	28	28,64	30,08	31,58	33,16	34,82	36,56	DINKES
3	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**PUPRPERKIM**
1	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1	0	2	1	1	1	1	
2	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	1	1	0	0	0	0	0	
3	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPLD terhadap jumlah rumah di Kabupaten A	%	98,85	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	35,03	5,23	90,07	30,92	25,33	133,66	52,18	
6	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	1	1	2	1	1	1	1	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	%	89,31	89,89	90,31	91,31	92,31	93,31	94,31	
4	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**PUPRPERKIM**
1	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	81,84	84,11	86,08	87,82	89,37	90,78	92,06	
5	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**BPBD & SATPOL PP**
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Orang	650	50	200	200	200	200	200	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana									
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	34.000	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	800	1.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
6	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									**DINSOS**
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten									
2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,13	3.35 -3.71	6.66-7.33	9.97-10.95	13.27-14.57	16.58-18.19	19.89-21.81	
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									**DKUKM TK**
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
2	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	3.440	6.500	9.000	11.500	15.000	19.000	23.500	
3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**DPPPAK BPMD**
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mendapatkan Layanan Komprehensif									
2	Nilai KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	Angka	658	658	675	680	698	700	700	
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ARG Daerah	%	31,01	30,1	30,2	30,4	30,6	30,8	31	
9	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									**DKPPP**
1	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	74,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	83	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	6,3	5,5	5	3,82	2,5	1,27	0,6	
3	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPDN berdasarkan Perbadan 15/2023	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92	91,8	92	92,5	93	93,5	94	
10	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									**DPLH**
1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	117	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	91	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33	74,62	74,82	75,02	75,22	75,42	75,62	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	97,23	71,11	71,41	71,71	72,01	72,31	72,61	
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	51,9	69,61	69,68	69,75	69,82	69,89	69,96	
12	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**DISDUK CATPIL**
1	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	98,67	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	2,05	5	10	15	20	25	30	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70,75	73	76	80	84	88	92	
13	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**DPPPAK BPMD**
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,1	1,45	1,4	1,4	1,39	1,38	1,35	
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	Indeks	64,7	66	67,2	68	69,4	70,4	71,4	
3	Presentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	5,7	6	5,8	5,7	5,6	5,5	5,5	
4	Angka Kelahiran total (TFR)	Angka	2,31	2,31	2,31	2,29	2,29	2,28	2,28	
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	75	69	70	72	73	74	74,5	
14	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									**DISHUB**
1	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	99,6	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
15	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**DISKOM INFOSAN**
1	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem	Level	0	1	2	2	2	2	2	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penghubung Layanan Pemerintah									
16	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**DKUKMTK**
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	13,9	14	14,1	14,3	14,5	14,8	15,1	
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,028	0,031	0,034	0,036	0,039	0,041	0,043	
3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	99	99	99	99	99	99	99	
4	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	0,12	0,05	0,05	0,07	0,1	0,13	0,15	
17	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									**DPMPTSP**
1	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	9,72	10	10,25	10,5	10,75	11	11,25	
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	719	620	630	640	660	680	700	
18	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**DISPORAPAR**
1	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	60	60	62	64	66	68	70	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	60	60	62	64	66	68	70	
3	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	0	30	32	35	37	40	42	
4	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	0	20	25	30	35	40	45	
5	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	44	44	44	44	44	44	44	
19	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									**DISKOM INFOSAN**
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,7	2,7	3,1	3,1	3,3	3,3	3,4	
20	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									**DISKOM INFOSAN**
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	0	37	40	43	49	51	53	
21	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									**DISDIKBUD**
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah	%	68,42	68,42	78,94	84,21	89,47	94,73	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ditetapkan terhadap total pendaftaran									
22	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									**DISPERSIP**
1	Tingkat Gemar Membaca	%	79,09	79,09	79,11	79,12	79,13	79,14	79,15	
23	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									**DISPERSIP**
1	Indeks Kearsipan	Nilai	60,29	68,21	75	78	81	84	87	
24	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									**DKPPP**
1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,8	1,805	1,809	1,814	1,818	1,823	1,827	
2	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	7,06	11,09	15,12	19,15	23,18	27,21	19,15	
3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.639	864	865	866	867	867	868	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	57,12	58,83	60,59	62,4	64,27	66,19	68,17	
25	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									**DISPORAPAR**
1	Rasio PDB Pariwisata	Nilai	0,24	0,25	0,28	0,3	0,32	0,34	0,36	
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	240.740	246.908	333.660	489.207	635.969	839.479	1.124.903	
26	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									**DKPPP**
1	Jumlah Produksi Telur	Ton	190.505	2.361,09	2.549,98	2.753,97	2.974,29	3.212,24	3.469,21	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	27.648,37	30.000	32.400	34.992	37.791,36	40.814,67	44.079,84	
3	Jumlah Produksi Jagung	Ton	33.088	33.088,03	33.088,06	33.088,09	33.088,12	33.088,15	33.088,18	
4	Jumlah Produksi Padi	Ton	81.631,04	81.631,09	81.631,14	81.631,19	81.631,24	81.631,29	81.631,34	
5	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	0	8	8,02	8,04	8,06	8,08	8,1	
6	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	700,5	700,53	700,56	700,59	700,62	700,65	700,68	
7	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	0,3	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	
8	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	320	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	
9	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	658.570	658.570	658.570	658.570	658.570	658.570	658.570	
27	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									**DISPERINDAG**
1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	58.403.472.000	59.000.000.000	65.000.000.000	73.000.000.000	81.000.000.000	90.000.000.000	99.000.000.000	
28	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	%	72,04	74,38	75,94	76,8	79,2	81,6	84	
29	**5.02 - KEUANGAN**									**BPKPAD**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Manajemen Aset	Angka	2,5	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	
2	Opini Laporan Keuangan	Skor	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	28	28,64	30,08	31,58	33,16	34,82	36,56	
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	42,22	17,07	20,5	20,82	20,87	20,88	20,85	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	80,28	85,96	84,76	85,11	85,47	85,85	86,24	
6	Rasio PAD	%	4	4,36	5,73	6,22	6,82	7,52	8,34	
7	Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									**BKPSDM**
1	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,86	25	26	28	30	32	35	
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	81,86	82	83	84	86	88	90	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77	79	81	83	85	87	90	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
31	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									**INSPEKTORAT**
1	Level Maturitas SPIP	Level	3,145	3,195	3,245	3,295	3,345	3,36	3,38	
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	

Sumber : Hasil Proyeksi, 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045. Pada tahap ini, pembangunan secara umum ditujukan untuk menguatkan fondasi transformasi, untuk melanjutkan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan pada tahun 2045.

Pemerintah daerah menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi serta program bupati terpilih, dengan tetap mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan visi "**Balangan Baharat (Membangun Desa dan Menata Kota, Menuju Masyarakat yang Harmonis, Religius, Maju dan Sejahtera)**". Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) misi yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang terukur.

Tahapan pembangunan 2026–2030 Kabupaten Balangan secara berurutan membentuk alur yang logis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dimulai dengan peningkatan kualitas SDM (2026), akselerasi ekonomi dan investasi (2027), penguatan desa–kota dan perlindungan sosial (2028), pemantapan infrastruktur dan lingkungan (2029), hingga konsolidasi visi masyarakat harmonis, religius, maju, dan sejahtera (2030). Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Balangan, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Mengingat sangat penting dan strategisnya dokumen ini, maka perlu pengaturan pelaksanaannya, antara lain:

a. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 sebagai bentuk keterbukaan informasi

publik.

b. Kepala perangkat daerah berkewajiban untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

c. Penyusunan RKPD setiap tahun mempedomani RPJMD dengan memperhatikan dinamika isu strategis, baik dari internal maupun esternal daerah. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Balangan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

d. Perangkat daerah memprioritaskan pelaksanaan sub kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target program prioritas dalam RPJMD.

e. Pemerintah daerah melaksanakan RPJMD Kabupaten Balangan selaras dengan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang terbit setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini.

f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi hasil RPJMD tahun 2025-2029 secara periodik sesuai peraturan yang berlaku. Evaluasi hasil RPJMD dilaporkan ke Bupati untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur.

g. Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah sebagai input bagi pengendalian dan evaluasi RPJMD. Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah bersumber dari pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah.

h. Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan RPJMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

i. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, maka perlu dilakukan manajemen risiko. Teknis pelaksanaan manajemen risiko berpedoman pada peraturan yang berlaku.

j. Bupati melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) sesuai kewenangan dan karaktersitik daerah, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PSN secara nasional.

k. Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya strategik untuk peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik serta manajemen investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 ini berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada saat dokumen RPJMD akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RPJMD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh Pemerintah, dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Balangan dan RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045, dan memerhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

Pada tahun 2029 akan dilakukan penyusunan RKPD tahun 2030. Penyusunan RKPD tahun 2030 dilakukan dengan mempedomani rencana tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunnan RKPD tersebut memperhatikan hasil evaluasi RKPD, permasalahan daerah, dan isu strategis yang terkini. Dalam hal RPJMD periode berikutnya belum disusun, maka RKPD tahun 2030 juga mempedomani arah kebijakan RPJPD Kabupaten Balangan pada periode berkenaan. Lebih lanjut pengaturan teknis penyusunan RKPD tahun 2030 dan RPJMD periode berikutnya, mempedomani peraturan yang berlaku.

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI